

HARMONI



Volume 11, Nomor 3, Juli - September 2012

Jurnal Multikultural & Multireligius

DINAMIKA PENANGANAN GERAKAN KEAGAMAAN

Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa:
Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus

Arifuddin Ismail

Harmoni dalam Keragaman: Konstruksi
Perdamaian dalam Relasi Islam - Katolik -
Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan
Nagaherang Tasikmalaya

Fitri Annisa

Potensi Konflik dan Integrasi Kehidupan
Keagamaan di Provinsi Gorontalo

Abdul Jamil

Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian
Identitas dalam Perkembangan Syiah

M. Alie Humaedi

Ajaran-ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis
Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang Berpotensi
Menimbulkan Konflik

Amir Mu'allim

Dinamika Agama Adam: Strategi Adaptasi
di Tengah Perubahan Sosial

Sulaeman

Identifikasi Potensi Rawan Konflik dalam
Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat
Beragama di Kalimantan Barat

Muhammad

Jurnal Harmoni	Nomor 3	Volume 11	Halaman 195	Jakarta Juli - September 2012	ISSN 1412 663X
-------------------	------------	--------------	----------------	----------------------------------	-------------------

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

DINAMIKA PENANGANAN GERAKAN KEAGAMAAN

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Endang Turmudi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

Rikza Chamami (IAIN Semarang)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Nuhrison M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Koeswinarno (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Mursyid Ali (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Achmad Rosidi, Akmal Salim R dan I Nyoman Suwardika

REDAKSI & TATA USAHA:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta

Telp. 021-3920425/Fax. 021-3920421 Email : jurnalharmoni@yahoo.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi
Pimpinan Redaksi ___5

Gagasan Utama

Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syi'ah
M. Alie Humaedi ___ 8

Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Strategi Penanganan Gerakan Keagamaan pada Kasus Jama'ah An-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
Mustaqim Pabbajah ___24

Penelitian

Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Menelusuri Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus
Arifuddin Ismail ___48

Ajaran-Ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Berpotensi Menimbulkan Konflik
Amir Mu'allim ___62

Dinamika Agama Adam: Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Sosial
Sulaeman ___77

Model Penanganan Konflik Keagamaan antara Jama'ah Qur'ani dan Jama'ah Sunnah di Desa Cibunar Tarogong Kidul Kabupaten Garut
Asep Achmad Hidayat ___89

Harmoni dalam Keragaman: Konstruksi Perdamaian dalam Relasi Islam Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaherang Tasikmalaya
Fitri Anisa ___101

Potensi Konflik dan Integrasi Kehidupan Keagamaan di Provinsi Gorontalo
Abdul Jamil ___116

Model Penanganan Konflik Bernuansa SARA di Kota Pontianak Kalimantan Barat
Lailial Muhtifah ___128

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Identifikasi Potensi Rawan Konflik dalam Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat Beragama di Kalimantan Tengah

Muhammad ___142

Pemberdayaan Umat Beragama melalui Pemberdayaan Wakaf di Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang

Agus Mulyono ___153

Telaah Pustaka

Dari Puncak Bagdad: *Sejarah Dunia Versi Islam*

Achmad Rosidi ___166

Pedoman Penulisan ___173

Lembar Abstrak ___176

Indeks Penulis ___189

Ucapan Terima Kasih ___195

Dinamika Penanganan Gerakan Keagamaan

Berbagai relasi antarmanusia, antarkelompok, dan antarnegara tidak pernah bersih dari muatan kepentingan, penguasaan, permusuhan, bahkan penindasan. Ini merupakan kodrat sosial dalam sejarah umat manusia. Demikian pula hubungan antarmanusia dalam kelompok keagamaan, antara pendiri (pemimpin) kelompok dengan anggotanya. Fenomena “infak wajib” dalam kelompok-kelompok keagamaan merupakan salah satu bukti muatan kepentingan penguasaan jika tidak boleh dikatakan sebagai penindasan. Itulah antara lain yang merupakan alasan kenapa selalu muncul berbagai gerakan keagamaan bermasalah yang berbeda dengan kelompok keagamaan *mainstream* yang sudah ada.

Sering terjadi seorang tokoh muda setelah pulang dari pengembaraan spiritualnya (belajar agama di tempat lain), kemudian di kampung halamannya menyebarkan ajaran dan melakukan gerakan keagamaan yang berbeda dengan ajaran yang sudah ada. Meski dahulu tokoh muda tersebut pernah belajar agama kepada tokoh tua (tokoh lama) yang ada di kampung itu. Ini adalah suatu strategi bagi tokoh muda untuk dapat lepas dari bayang-bayang dominasi tokoh tua. Jika ia tetap menganut faham yang sudah ada ia hanya akan menjadi tokoh kedua, bahkan tidak pernah diperhitungkan orang. Apalagi jika tokoh-tokoh agama yang sudah mapan adalah dari kalangan “darah biru” para kyai, sementara tokoh muda dari kalangan kebanyakan. Tetapi apabila tokoh muda itu tampil sebagai pimpinan suatu gerakan keagamaan baru ia akan menjadi tokoh tandingan dari tokoh tua yang sudah mapan.

Dengan strategi tersebut tokoh muda yang telah berhasil menjadi tokoh

tandingan tokoh tua ia akan berhasil menguasai sebagian dari sumber daya manusia (SDM) yang ada di wilayah penyebaran ajarannya itu. Dengan penguasaan SDM tersebut akan mengalir dana dalam bentuk “infak wajib” atau pungutan-pungutan dengan dalih amal jariah dan lain-lain. Dengan adanya pungutan-pungutan tersebut secara langsung maupun tidak kebutuhan hidup tokoh muda akan tercukupi atau bahkan bisa berlebihan.

Banyak alasan bagi kemunculan berbagai gerakan keagamaan tersebut, dengan dalih pemurnian agama, atau menghadirkan kelompok agama pemersatu meski pada kenyataannya telah menambah jumlah kelompok agama yang berarti telah memberi andil semakin menambah *crucial* fenomena perpecahan dalam gerakan keagamaan bermasalah.

Dari ilustrasi di atas fenomena munculnya gerakan keagamaan itu dapat difahami dari sisi lain (non keagamaan). Sehingga menjadi tidak aneh jika ada pendiri gerakan keagamaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang memadai, misalnya di Aceh seorang guru umum di SMP, di Padang hanya tamatan Sekolah Teknik Menengah (STM), di Bogor seorang pelatih bulu tangkis. Munculnya gerakan keagamaan bermasalah yang berbeda (menyimpang) dari ajaran *mainstream* misalnya tidak perlu shalat lima waktu, shalat Jumat tidak wajib, merupakan upaya penyesuaian dengan penguasaan ilmu agama yang dimiliki pendirinya dan kebiasaan olah spiritual yang biasa dilakukannya. Karena ajarannya yang menyimpang dari ajaran *mainstream* maka kelompok tersebut sering dikategorikan sebagai “kelompok sempalan (*splinter group*). Yang hampir menjadi ciri umum

dari kelompok tersebut adalah lebih menekankan amalan-amalan berupa infak, shadaqah dan jariyah dengan kata lain hanya mengutamakan pengumpulan dana.

Munculnya gerakan keagamaan bermasalah ini tidak jarang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga mengakibatkan munculnya konflik disertai dengan kekerasan. Meski sebenarnya konflik keagamaan sulit dipisahkan dengan non keagamaan. Karena di dalam konflik keagamaan sebenarnya juga ada perebutan sumber daya, baik sumber daya manusia, ekonomi dan kadang juga ada interes politik. Namun Lewis Coser mengategorikan konflik keagamaan sebagai konflik *nonrealistic*, yaitu konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, sebagaimana konflik antaragama, antaretnis, dan antarkepercayaan. Konflik *nonrealistic* merupakan suatu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas suatu kelompok. Konflik *nonrealistic* cenderung sulit untuk menemukan resolusi konflik, konsensus, dan perdamaian tidak mudah untuk dicapai. (Novri Susan, 2010: 61).

Dalam penanganan munculnya berbagai gerakan keagamaan bermasalah/ "sempalan" ini pemerintah sejak jaman orde lama telah melakukan berbagai upaya, antara lain lahirnya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 dalam Penetapan Presiden tersebut berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".

Penanganan terhadap gerakan keagamaan bermasalah yang dianggap menyimpang tersebut pada jaman orde lama cenderung lebih mengutamakan pendekatan hukum. Sedangkan pada era orde baru – karena sangat dominannya peran pemerintah – penanganannya cenderung bersifat *represif*. Hal itu misalnya dapat kita lihat dalam penanganan kelompok Haur Koneng, di Desa Sinargalih, Kecamatan Bantarrueg Majalengka. Kelompok Haur Koneng yang hanya merupakan kelompok kecil yang melakukan *uzlah (eksklusif)* menempati pemukiman terpisah dari warga lain, sebagai tindakan protes terhadap arogansi pejabat, serta kurangperhatiannya pemerintah terhadap kemiskinan dan kepapaan masyarakat, disikapi oleh pemerintah dengan tindakan sangat *represif*. Kelompok Haur Koneng dipandang sebagai kelompok sesat dan diselesaikan dengan cara penggerebekan oleh pasukan TNI dan Polri sehingga banyak menimbulkan korban meninggal dan luka-luka. (lihat Mursyid Ali, 2002: 32-34).

Dewasa ini di era reformasi, sikap pemerintah dalam menghadapi berbagai gerakan keagamaan bermasalah sudah mengalami dinamika yang jauh berbeda. Keterlibatan pemerintah lebih pada sisi keamanan, setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa munculnya kelompok keagamaan tersebut telah menimbulkan keresahan atau konflik disertai kekerasan. Misalnya keterlibatan dalam menangani Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilakukan setelah terjadi konflik disertai kekerasan antara masyarakat Muslim pada umumnya dengan kelompok JAI di berbagai daerah. Dalam hal ini, pemerintah selain tetap berpegang kepada Penetapan Presiden RI nomor 1 tahun 1965, yang sudah ditingkatkan menjadi UU PNPS nomor 1 tahun 1965, juga melalui berberapa tahapan, yaitu dialog dengan pihak JAI. Dialog dilakukan hingga beberapa kali pertemuan, sehingga melahirkan 12 poin pernyataan JAI. Selanjutnya dilakukan

pemantauan terhadap 12 poin pernyataan tersebut. Dari hasil pemantauan tersebut diperoleh bukti-bukti bahwa pihak JAI tidak mematuhi 12 poin pernyataannya sehingga pemerintah cq Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Dalam edisi ini Jurnal *Harmoni* menurunkan artikel-artikel yang sesuai dengan tema utama "Dinamika Penanganan Gerakan Keagamaan" sebagai berikut: M. Alie Humaidi "Strategi Budaya *Taqiyah*: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syiah", Arifuddin Ismail "Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Menelusuri Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus", Mustaqim Pabbajah "Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Strategi Penanganan

Gerakan Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus Jamaah An-Nadzir di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan", Amir Mu'allim "Ajaran-ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang Berpotensi Menimbulkan Konflik", Sulaeman: "Dinamika Agama Adam: Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Sosial", dan Asep Ahmad Hidayat "Model Penanganan Konflik Keagamaan antara Jamaah Qurani dan Jamaah Sunnah: Studi Kasus Konflik Aliran Keagamaan di Desa Cibunar Tarogong Kidul Kabupaten Garut".

Selain tulisan tersebut, *Harmoni* nomor 3 Tahun 2012 menurunkan beberapa tulisan lain yang masih sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) Puslibang Kehidupan Keagamaan, sebagai lembaga penerbit jurnal ini. Kami berharap tulisan-tulisan tersebut mampu menambah pengetahuan kita tentang persoalan-persoalan seputar gerakan keagamaan yang muncul dan berkembang di sekitar kita. Selamat membaca.

Strategi Budaya *Taqiyah*: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syiah

M. Alie Humaedi

Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstract

Constellation strengthening of Indonesia politics has been paralleled with dissemination of transnationalism of Islam movements. The movement is borderless in terms of nation states, that promoting agenda of khilafiah Islamiyah and romanticism of Islamic victory. The Syiah stream is quite different, its development in Indonesia in line with the history of Islam in this country, slowly moved with taqiyah. Its fear in showing of its identity has been part of the Syiah lesson and its strategy for spreading its teaching in this country. This dilemma could be visible in development and tragic experiences of communities in Pekalongan, Batang, Jepara, and Sampang, Madura.

Keywords: syiah, taqiyah, cultural strategy, political identity, religious development

Abstrak

Menguatnya konstelasi politik di Indonesia seolah berjalan lurus dengan makin tersebarnya gerakan Islam trans nasional. Sebuah gerakan “tanpa ruang batas kewilayahan nation state” yang mempromosikan agenda khilafah Islamiyah dan romantisme kejayaan Islam, termasuk semangat pbumian dan penegakan syariat Islam. Tidak demikian dengan paham keagamaan Syiah, ia ada seiring adanya sejarah Islam di Indonesia, serta tumbuh an berkembang kembang secara perlahan dengan cara taqiyah. Ketakutan menampilkan identitas merupakan bagian dari ajaran syiah dan strategi budaya dalam politik identitas pada proses perkembangan Syiah di Indonesia. Dilema seperti ini tercermin pada perkembangan dan tragedi yang dialami masyarakat Syiah di Pekalongan, Batang, Jepara dan Sampang Madura. Tulisan ini hendak menjelaskan perkembangan Syiah jejaring Jawa, beserta penerapan taqiyah sebagai strategi budaya politik identitas ditengah tuduhan-tuduhan miring kelompok Islam mayoritas.

Kata kunci: Syiah, taqiyah, strategi budaya, politik identitas, perkembangan keagamaan

Pendahuluan

Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2012, peristiwa tragis menimpa kelompok Syiah di Sampang Madura. Mereka diserang oleh kelompok warga yang mengaku diri sebagai kelompok Sunni, sebut saja organisasi *mainstream* yang ada di sana. Kejadian

ini pun terus berlangsung dan telah menelan korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian material dan fisik yang relatif besar. Peristiwanya sebagaimana tragedi jilid pertama, April 2012, terhenti sementara ketika adanya campur tangan pemerintah dan organisasi keagamaan *mainstream*, beserta pemberitaan yang terus menerus oleh media nasional

dan internasional. Penyebab tragedi Sampang banyak ragam, ia tidak semata didasarkan pada perbedaan aliran atau madzhab pemikiran keagamaan, tetapi juga telah bercampur baur dengan persoalan-persoalan kompleks ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan politik, baik perseorangan ataupun komunal.

Pembacaan terhadap tragedi di atas juga harus dilihat dari sisi peta keagamaan kontemporer yang ada di Indonesia saat ini. Pada dua dekade terakhir, peta keagamaan Indonesia diramalkan oleh wacana dan praktik *trans national Islamic movement*; sebuah gerakan neo-Pan Islamisme, neo-Wahabisme, dan Ikhwanul Muslimin. Banyak dugaan bahwa terorisme dan radikalisme kerap dihubungkan ke peta gerakan itu. Beberapa ide paham ini diserap beberapa partai politik, meskipun dalam pengungkapannya masih sembunyi dibalik nuansa demokrasi dan pluralisme ke-Indonesiaan. Namun, kontestasi politiknya semakin tampak ke permukaan, ketika partai berasaskan Islam literar dapat memenangi beberapa pilkada, dan meletakkan kader terbaiknya di parlemen. Partai seperti ini tidak lagi sekadar partai politik, tetapi telah menjadi *firqah* (faham) keagamaan. Bahkan Muhammadiyah menyebutkan bahwa PKS, misalnya tidak lagi sekadar partai politik, tetapi menjadi bagian faham keagamaan tersendiri (SK PP Muhammadiyah No.149 Kep/1.0/b/2006, Kebijakan tentang Konsolidasi Organisasi). Representasi politik-agama, seperti cikal bakal konspirasi Bani Su'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab, adalah tabiat Wahabisme yang membungkam demokrasi, pluralisme, dan gerakan *civil society*.

Namun, saat perhatian publik-keagamaan dan politik, hampir semuanya tertuju ke arah presentasi dari kontestasi politik Islam trans nasional, secara pelan tapi pasti, antitesa Wahabisme dan

juga Sunni, yaitu Syiah bekerja secara konsisten menyusun jaringan lintas etnis, sektoral, dan teritorial. Jaringan pengikut Syiah di Indonesia yang terpecah menjadi kelompok Syiah organisasi keturunan Arab (selanjutnya disebut Syiah alawiyin) dan Ikatan Jamaah *Ahlul Bait* Indonesia (Ijabi) pimpinan Jalaluddin Rakhmat yang anggotanya lebih banyak berasal dari keturunan Indonesia, telah membuktikan sebagai kekuatan yang patut dipertimbangkan dalam gerakan sosial keagamaan. Fenomena perkembangannya muncul pasca revolusi Iran tahun 1979 (Irfani 1983; Zayar 2000), dan semakin menguat ketika Iran selalu menampilkan diri sebagai kekuatan oposisi dari kekuasaan Amerika.

Perkembangan kelompok Syiah dapat divariasikan ke dua bentuk. Bentuk pertama didasarkan pada paham keagamaan dari tokoh utama (*marji*) nya. Dalam bentuk ini Syiah dapat dikelompokkan ke paham *Itsna Isyarah*, *Jafariyah*, dan lainnya. Bentuk kedua, dapat didasarkan pada jaringan penyebarannya. Dalam konteks Indonesia, penyebar ini dapat dikelompokkan menjadi dua; *Syiah alawiyin*, kelompok Syiah yang dibangun dan disebarkan para keturunan Arab; dan *Syiah Ijabi*, kelompok Syiah yang disebarkan orang Indonesia. Pada tulisan ini, penekanannya lebih banyak pada bentuk kedua, yaitu mengurai perkembangan Syiah dari kelompok para penyebarannya.

Syiah alawiyin, secara organisasional tidak mengelompok pada satu induk organisasi besar. Mereka memilih menggunakan pola organisasi sel, kecil tetapi banyak. Jumlah organisasi Syiah alawiyin sampai tahun 2010 mencapai angka 88 buah. Organisasi ini mewujudkan dalam bentuk yayasan, pesantren, lembaga pendidikan usia dini dan dasar, kursus, serta klinik kesehatan. Sementara itu, hanya ada 18 organisasi dari sayap organisasi Ijabi dan LSM Syiah (Prosiding Pertemuan Syiah

2000). Organisasi itu bersifat otonom, independen, dan memiliki tata kelola sendiri. Perbedaan di antara organisasi tidak begitu mencolok, karena dapat dikelompokkan sesuai patron *marji*. *Marji* adalah ulama setingkat mujtahid (penentu hukum agama). Ada tujuh *marji* Syiah dan semuanya berada di Iran. Setiap *marji* memiliki konsorsium yang dikhususkan untuk perekrutan dan penyusunan jaringan pelajar dan pengikut Syiah. Tujuh *marji* yang dikenal publik, seperti (i) Ayatollah al-Uzhma Syeikh Muhammad Taqi Behjat; (ii) Ayatollah al-Uzhma Sayyid Ali Khamenei; (iii) Ayatollah al-Uzhma Syeikh Hasan Wahid Khurasani; (iv) Ayatollah al-Uzhma Shabiri Zanjani; (v) Ayatollah al-Uzhma Nasir Makarim Syirazi; (vi) Ayatollah Uzhma Luthfullah Shafi Golpaigani; dan (vii) Ayatollah al-Uzhma Sayyid Ali Sistani (www.ahlulbaitindonesia.org, Januari 2008) Ada tiga konsorsium *marji* yang berkembang dan memiliki sel organisasi Syiah di Indonesia. Ikatan terhadap *marji* berasal dari perjalanan belajar santri kepada guru, baik *hauzah* di Indonesia maupun di Iran. Seperti organisasi Ijabi yang memiliki cabang di daerah, organisasi Syiah alawiyin juga demikian dan bersifat otonom. Kedua kelompok ini sama-sama memiliki kesadaran mengembangkan Syiah di Indonesia.

Dalam perspektif perkembangan di atas, muncul dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana perkembangan Syiah di Jawa? *Kedua*, sejauhmana nilai-nilai gerakan Syiah yang tercermin dalam *taqiyah* dihayati secara sendiri maupun bersama, dan diimplementasikan ke pola pemahaman dan penafsiran bagi hubungan antar kelompok keagamaan? Dua pertanyaan ini berkaitan dengan pemaknaan nilai agama dalam politik identitas, sekaligus usaha mengurai *driving integrating motive* yang mampu memberi semangat bagi tumbuhnya partisipasi sosial-politik kelompok Syiah pada masyarakat Indonesia.

Kerangka Teori

Syiah sebagaimana paham lain akan lah tidak bisa dilepaskan dari konsepsi “identitas yang melekat pada dirinya”. Menyebut Syiah, bagi sebagian Muslim adalah kelompok lain di luar dirinya yang mayoritas. Bahkan Syiah bisa dikenakan kata menjadi “lawan, musuh” bila pendekatannya pada konflik substansial yang terkandung pada ajaran yang dipahami berbeda dengan para penilainya; atau kata minoritas bila dilihat dari perspektif kuantitas. Stuart Hall (Woodward 2004: 51) mendefinisikan identitas sebagai proses bentukan sistem bawah sadar yang berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan imajiner. Ia menilai identitas sebagai proses menjadi (*becoming*) daripada nilai baku atau *taken for granted*. Sependapat dengannya, Barker, identitas diartikan “*it pertains to cultural descriptions of persons with which we emotionally identify and which concern sameness and difference, the personal and the social*”. Identitas terlebih politik identitasnya lebih berasal dari konstruksi budaya karena “*the discursive resources that form the material for identity formation are cultural in character*”. Hal ini menambah pengertian bahwa politik identitas bukan sesuatu terberi (*given*), tetapi sesuatu yang dibuat (*created*). Identitas adalah sesuatu yang dibentuk dalam interaksi antar individu dengan sentuhan politisasi atasnya (Ainlay & Coleman 1986). Artinya, identitas itu pengertiannya sangat bergantung pada situasi di mana orang itu lahir dan ada di masyarakat seperti apa. Wajar Cressida Heyes memberi definisi politik identitas dengan segala aktivitas politik dalam arti luas yang secara teoritik menemukan pengalaman ketidakadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam situasi sosial tertentu. Politik identitas lebih mengarah pada gerakan dari ‘kaum terpinggirkan’ dalam kondisi sosial, politik dan kultural tertentu dalam masyarakat (Maalouf 2004:41).

Secara lebih mendalam, Fuad Hassan (Kompas 2006:4) membedakan secara jelas modus interaksi antar subjek, yaitu modus kami (*we-object*) dan modus kita (*we-subject*). Pada modus kami, atau Hasan Hanafi menyebutnya kami yang diri (*al-ana*) dan mereka yang lain (*al-akhar*), hubungan individu diibaratkan sebagai hubungan diametral yang membuat satu kelompok berhadapan dengan kelompok lain. Ada segmentasi kultural cukup kuat dalam cara subjek menghadapi yang lain dan itu terbentuk dalam pandangan bahwa subjek lain adalah objek (Hanafi 1997:57-62). Hal ini yang memungkinkan bahkan menjadi pemicu utama munculnya konflik, baik dalam arti konflik fisik ataupun konflik laten, seperti *the clash of fundamental* yang dinyatakan Thariq Ali dan *clash of civilization* Huntington (Parekh 2008). Secara praktik terlihat ketika kelompok Syiah harus bertaqiyah, strategi budaya menyembunyikan identitas dirinya. *Taqiyah* tidak semata dilihat sebagai bagian ajaran Syiah, tetapi ia ada karena berproses dalam rentang waktu dan tempat “menyelamatkan diri” dari ketakutan yang datang saat pelekatan identitas itu dinyatakan.

Hubungan individu diandaikan sebagai hubungan komplementer yang membuat suatu kelompok dapat bekerja sama dengan kelompok lain dengan cara yang lebih baik. Subjek di sini tidak berupaya membuat jenis pemisah antar subjek, namun menganggap subjek lain sama seperti dirinya. Modus ini tidak membawa masalah bagi hubungan antar agama atau interaksi individu berbeda identitas. Modus ini yang mengarah pada harmoni dan penghargaan atas realitas multikulturalisme. Modusnya sebenarnya telah ada di masyarakat, baik berupa praktik budaya ataupun pemahaman kontekstual tentang identitas lain. Ia dapat dibangkitkan kembali atau dikuatkan melalui gubahan partisipasi masyarakat dan stimulasi pemerintah.

Metode Penelitian

Pengumpulan data tentang perkembangan Syiah dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan informan kunci dan keterlibatan langsung di banyak pengajian yang diadakan oleh majelis Syiah, baik kelompok Syiah alawiyin di Yogyakarta, Solo, Jepara, Pekalongan dan Jakarta; dan Syiah Indonesia di Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta, selama delapan bulan secara acak di tahun 2007-2009. Seluruh data dikategorisasikan sesuai wilayah dan permasalahannya. Analisis dan interpretasi atas data dan temuan dikonfirmasi kembali kepada informan kunci yang dianggap paling mengetahui persoalan, sehingga jawaban atas permasalahan yang diajukan ini benar-benar telah teruji.

Perkembangan Jejaring Syiah di Jawa

Tidak seperti faham atau organisasi keagamaan lain, perkembangan Syiah di Indonesia dapat dikatakan unik. Unik, karena Syiah dalam sejarah Indonesia dianggap faham Islam yang pertama kali masuk ke Nusantara, seiring menyebarnya Islam ke daerah “pusaran angin” (Sanusi 1952). Argumentasi pandangan ini berkisar pada soal hubungan geografis yang memasukkan Persia dan Gujarat dalam rute jalur sutra perdagangan dan islamisasi. Dua daerah ini dikenal sebagai pusat Syiah di Timur Tengah dan Asia Tengah. Kuat dugaan, jaringan Syiah terbentuk seiring masuknya Islam di Indonesia (Azra 2007:44-67). Perkembangan jaringan dapat dibagi ke dua periode. Sel periode klasik, dapat dipetakan ke teritorial Persia-Gujarat-Pasai-Banten-Bangil. Sel ini menyusun cikal bakal perkembangan Syiah di Indonesia pada periode modern, yaitu pasca revolusi Iran, termasuk pengaruhnya ke tarekat Sattariyah dan Rifaiyah. Dua tarekat ini lalu berkembang

di pesisir Barat Aceh, dari Lhoong Nga sampai Singkil. Pengaruhnya juga masuk ke wilayah *pucok* Aceh, seperti Teunom, Takengon, Kuala Simpang, Simpang Seumadam, dan seterusnya. Ulama-ulama seperti Syamsuddin as-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniry, dan Abdur Rauf as-Singkili menjadi ilustrasi besarnya pengaruh Syiah dalam praktik pemikiran keagamaan dan kemanusiaan. Konsepsi *wilayatul faqih* dan *imamah* misalnya, digambarkan secara jelas dengan konsep kesultanan pada kitab *Bustanussalatin* dan *Tajussalatin*.

Setelah di Aceh, Syiah menyebar ke seluruh Sumatra dan Jawa. Beberapa tradisi *maulidan*, *tabot*, *Arbain*, *debus*, dan hari as-Syura yang menampilkan teaterikal berdarah dari gambaran pembunuhan Husein bin Ali bin Abi Talib yang kerap diadakan di Sumatera bagian selatan dan barat, serta di Jawa menjadi bukti bahwa kepercayaan dan praktik Syiah telah mendarah-daging bagi masyarakat Indonesia. Meskipun dalam perkembangannya, mereka tidak lagi mengakui bahwa teaterikal itu dilandasi ajaran Syiah. Pemangkiran ini adalah hasil upaya terus-menerus yang dilakukan ulama-ulama Sunni Sumatra dan Jawa.

Syiah lalu dibawa ke Banten, Cirebon, dan daerah lain di Jawa bagian utara. Di daerah ini, Syiah tidak lagi murni. Ia tercampur dengan tradisi Sunni yang dibawa pedagang Islam lain yang mengambil rute Yaman dan Irak. Walaupun begitu, faham Syiah khususnya ajaran rahasia tujuh dan tigabelas khalik dan makhluk masih mempengaruhi praktik tarekat Syattariah, Rifaiyah, dan Sidzilyah. Pada periode klasik Syiah sepertinya terhenti di Bangil. Di sanalah Syiah “diendapkan” oleh keturunan Arab yang berasal dari *fam-fam* tertentu. Tidak semua keturunan Arab mengakui atau menjadi pengikut Syiah. Faham Syiah dalam pandangan Alawiyin Sunni

adalah “anak tiri lain bapak” (Wawancara dengan Habib K di Pekalongan, Oktober 2007; Bpk M di Bangsri Jepara, 2008). Dapat dikatakan, sebelum revolusi Iran, Syiah menjadi faham yang hanya dipegang secara individu. Perdebatan ajarannya terjadi sebatas di tingkat ulama, tidak masuk sebagai wacana masyarakat umum.

Sesaat revolusi Iran 1979, Syiah dianggap “barang baru” di bumi Indonesia. Setelah 1980, pesona Syiah mulai tersebar ke masyarakat seiring mengharumnya nama Imam Khumaeni yang menjalankan revolusi Iran dengan menjungkirkan Syah Iran dukungan Amerika. Jaringan Syiah lalu lebih berkembang, selain melalui sel periode klasik, Syiah berkembang ke semua daerah melalui sel konsorsium *marji*. Di samping itu, para guru dan pengikut Syiah dapat berkomunikasi langsung dengan Iran mengenai perkembangan setiap *marjinya*. Berdasar tiga *marji* yang berkembang di Indonesia, ada tiga sel teritori, yaitu (i) Bangil-(sebar)-Iran; (ii) Jepara-Pekalongan-Bogor-Jakarta-Iran; dan (iii) Solo-Yogyakarta-Bandung-Jakarta-Iran. Tiga sel ini membawa dampak bagi karakter Syiah di tiap daerah. Karakternya berhubungan dengan kecenderungan faham *marji*, juga interaksi penyebar dengan masyarakat. Belum lagi soal pertentangan pada kelompok *fam-fam* Arab sendiri. Sel pertama misalnya menganggap dirinya Syiah istimewa. Di samping anggotanya lebih banyak berasal dari keturunan Arab, sel ini dianggap sel pelopor perkembangan Syiah paling awal di Jawa. Sel Syiah kedua memiliki kecenderungan berada di tengah, antara mengakomodasi kepentingan keturunan Arab, juga memberi pelayanan faham Syiah bagi pengikut Syiah asli Indonesia. Dua kelompok sel ini tidak mau terikat dengan identitas organisasi masyarakat. Mereka lebih memilih bekerja dengan mendirikan yayasan sendiri; yayasan pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya,

sel ketiga lebih banyak dianggotai oleh orang Indonesia. Sel inilah yang membentuk ormas Ijabi pimpinan Jalaluddin Rakhmat.

Karakteristik di atas berasal dari ide dan aktor penyebar awal. Banyak pendapat mengenai aktor penyebar dan penyusun jaringan Syiah pasca revolusi Iran. Sebagian guru Syiah beranggapan bahwa Syiah bermadzhab, yang mempunyai karakter atas persoalan *fikh marji* dimulai dari jaringan Jawa Timur (pesantren Bangil). Argumen ini didasarkan pada kerja institusi. Ada pula pendapat Syiah beserta *fiqh* dan komunitasnya muncul dari wilayah Jepara, yaitu saat Habib Abdul Kadir Bafaqih menahbiskan diri sebagai seorang Syiah pasca revolusi, dan diikuti sebagian masyarakat Candi Bangsri Jepara (Wawancara dengan Ahmad Baragbah dan Miqdad Turkam, Oktober 2007). Melalui jaringan Bangsri lah, ide Syiah menyebar ke seluruh Jawa, termasuk Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Segaf al-Jufri berpandangan lain, tumbuh dan berkembangnya Syiah pasca revolusi Iran dengan berbagai selnya, sebagai tanda dimulainya Syiah zaman modern, adalah saat merebaknya penyebaran dan pembagian kitab Syiah yang berasal dari Najaf dan Iran pada tahun 1980. Dalam kapasitas ini, Ali Ba'bud, seorang keturunan Arab Bangil Pasuruan yang tinggal lama di Iran dan menggeluti ilmu akidah Syiah menjadi pelopor pembagian kitab dan bagian tidak terpisahkan dari proses pengelompokan Syiah di beberapa tempat. Ali Ba'bud mengirimkan kitab-kitab itu kepada Segaf al-Jufri dan Musthofa Shahab. Dua nama ini diberikan Ali Ba'bud atas dasar referensi dari Abdullah Masayyih, kakak Ali Ba'bud yang tinggal di Bangil dan sering melakukan perjalanan ke Solo dan Semarang.

Segaf al-Jufri lebih lanjut menyatakan, selain dua orang di atas, Habib Abdul Kadir Bafaqih, pimpinan

Pondok al-Qairat Bangsri Jepara juga mendapat kiriman kitab. Waktu itu, Bafaqih yang disebutnya *wong kulon* masih berada di Tegal dan Pekalongan sebagai santri Sunni. Segaf al-Jufri tidak mengakui Abdul Kadir Bafaqih adalah pendorong utama perkembangan Syiah di Jawa Tengah pasca revolusi Iran. Sebaliknya, Ibrahim Musawa dan Segaf al-Jufri sendiri lah yang menjadi pelopor perkembangan Syiah di Jawa Tengah, khususnya Surakarta dan Yogyakarta. Segaf al-Jufri mendapat kesempatan mengunjungi Iran secara kenegaraan di tahun 1982. Di sana ia mendapat kesempatan berkenalan dengan Ayatullah, *marji* dan *mullah*, serta mengunjungi *hauzah* dan universitas Iran. Dalam perkembangannya, ustadz dan pengusaha paling senior di Solo ini menjadi penghubung dan preferensi dari mahasiswa yang akan dikirim belajar ke Iran. Para mahasiswa itu diberi beasiswa penuh selama studi dan pasca studi, yaitu fasilitas tanah, bangunan, dan kitab untuk pesantren atau *hauzah* di Jawa. Inilah salah satu cara proses penyusunan sel konsorsium *marji* Syiah Iran di Indonesia (www.icg.org, diakses pada 6 Februari 2008).

Perbedaan pandangan di atas yang menurunkan perbedaan pengelompokan secara geneologis gerakan Syiah di Indonesia. Dari sini pula lahir perbedaan antara Ormas Ijabi dengan yayasan yang dibentuk Syiah alawiyin. Segaf al-Jufri misalnya diangkat Ijabi sebagai ketua Dewan Syuro Ijabi. Dalam anggapan pengikut Syiah akar rumput Jogja, Solo dan Pekalongan misalnya, pengangkatan Segaf al-Jufri adalah usaha politis Ijabi untuk mempertahankan kelompok alawiyin dalam basis organisasi yang mendasarkan diri pada kecintaan mereka kepada *ahlul bait* (keluarga nabi). Bila tanpa kehadiran kelompok alawiyin pada Ijabi, dikhawatirkan muncul pandangan masyarakat yang akan menyatakan pasti ada sesuatu yang salah di antara mereka. Tidak demikian

halnya dengan orang Syiah alawiyin lainnya, mereka lebih memilih untuk tidak bergabung kepada Ijabi, meskipun mempunyai sikap “tenggangrasa” dan kesadaran solidaritas sesama Syiah.

Ketidak-ikutan Syiah alawiyin didasari pula pada beberapa alasan: (i) (kesan yang diterima) sebagai kelompok alawiyin, ada anggapan mereka adalah kelompok bertingkat *highlander* (kelompok pertama) pewarisan *ahlul bait* Nabi. Sikap semacam ini tidak jauh berbeda dengan kelompok alawiyin Sunni, yang mempunyai kecenderungan dan sifat mentalitas lebih tinggi dibandingkan orang Islam lokal Indonesia; (ii) Adanya keyakinan bahwa keturunan Arab yang berfaham Syiah tidak dapat dikategorikan sebagai *muqallid* (pengikut) murni sepenuhnya atau sederajat dengan *muqallid* dari orang Indonesia. Tingkat pengetahuan keagamaan dan keahlian berbahasa Arab mereka lebih tinggi dibandingkan kelompok Syiah Jawa. Mereka berhak masuk dalam kategori *muqallid marji* level pertama, di mana sosoknya dapat menjadi contoh bagi *muqallid* pada level berikutnya.

Dua alasan di atas yang membuat orang Syiah alawiyin menjadi ustadz orang Syiah Jawa. Dalam posisi semacam ini, mereka berposisi sederajat (minimalnya) dengan Jalaluddin Rakhmat. Dalam anggapan ustadz Syiah alawiyin, mana mungkin mereka menjadi pengikut atau anggota di tingkat Ijabi cabang yang kebanyakan ketuanya berasal dari orang Jawa-Sunda. Pemisahan dua kelompok atas dasar etnisitas ini sesungguhnya pernah menjadi isu hangat saat Abdullah Assegaf (Abdullah Shom/KDS-Korban Dullah Shom) sebagai ketua Ikatan Pemuda Ahlul Bait Indonesia (IPABI) mengundurkan diri dari Ijabi di tahun 2002. Isu yang beredar kerap berhubungan tentang keistimewaan kelompok

alawiyin (Baswedan 1982; Suryadinata 1994). Pengunduran Abdullah Assegaf, sebagai lulusan Qum 1985 pun tidak dapat dicegah oleh Jalaluddin Rakhmat. Akhirnya, ada semacam gambaran bahwa Ijabi hanya menaungi kelompok Syiah dari keturunan lokal. Mereka tidak dapat menaungi orang Syiah alawiyin yang lebih memilih memisahkan diri.

Ustadz Syiah alawiyin yang tidak bergabung kepada Ijabi lebih mengurus lembaga. Abdullah Assegaf mendirikan IPABI di tahun 1997, jauh sebelum Ijabi berdiri, penerbitan al-Huda di Bogor (2004), juga beberapa lembaga pendidikan seperti Hauzah Amirul Mukminin di Ciomas, klinik kesehatan, dan Lembaga Masyarakat Peduli Pemilu dan Pilkada (2005). Segaf al-Jufri, Dewan Syuro Ijabi, ia mendirikan yayasan *doa kumail* atau biasa disebut majelis Amben di Surakarta (1996). Ahmad Baragbah mendirikan pesantren al-Huda di Pekalongan (tanah wakaf di tahun 1970-an, berdiri tahun 1985) dan Batang (tanah dibeli tahun 1982, berdiri 1987), masjid, bidang usaha ekonomi, dan bersama Abdullah Assegaf mendirikan Solidaritas Muslim Indonesia untuk al-Quds (SMIQ) di tahun 2000. Demikian juga Umar Ibrahim Musawa di Surakarta mendirikan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Husaini-2006) dan kursus pendidikan Teknologi Informasi (2004). Ustadz Mustofa al-Jufri di Jakarta mendirikan yayasan pendidikan dan penerbitan buku (Lentera Hati, 2004). Seorang alawiyin, Ali Muthalib bin Assegaf, bergerilya dengan dakwah dan diskusi. Menurut informasi, Ali Muthalib mendirikan yayasan pendidikan, di samping memiliki jaringan dengan SMIQ.

Dalam pelaksanaannya, yayasan yang didirikan Syiah alawiyin tetap melibatkan dan memberdayakan orang pribumi. Mereka menjadi santri pengajian atau *hauzah*, juga massa dalam

kegiatan bersifat ibadah dan sosial politik seperti demonstrasi SMIQ. Meskipun tampak terjadi perbedaan dan ketiadaan koordinasi antara satu sama lainnya, dalam momen tertentu dan penting, lembaga-lembaga ini saling berkoordinasi. Tentu koordinator utama bukanlah Ijabi. Ada semacam penghubung antara satu yayasan dengan yayasan lain yang berbeda *marji*. Pihak penghubung secara kelembagaan dapat difasilitasi oleh Islamic Culture Center (ICC) yang berada di bawah naungan konsorsium *marji* Ayatollah al-Uzhma Syekh Muhammad Taqi Behjat Iran, *marji* yang dianggap paling progressif dan bernuansa akademik-rasional, dan sekaligus penghubung antara konsorsium dengan Atase Kebudayaan dan Pendidikan Kedutaan Besar Iran. Beberapa Ustadz seperti Ahmad Baragbah, Abdullah Beik, dan Hasan Daliel dapat dikategorikan sebagai penghubung personal antar jejaring Syiah di Indonesia. Selain mereka, alumni Universitas Qum Iran, Universitas Beirut, dan beberapa *Hauzah* di Iran juga menjadi sel penghubung jaringan pemikiran, pendanaan, dan rekrutmen orang Syiah Indonesia dengan Syiah Iran. Mereka berhak merekomendasikan orang untuk belajar agama dan teknik di Iran dan Libanon. Kelompok Syiah sendiri tidak pernah mengurus soal bantuan pengiriman pasukan atau pendanaan ke wilayah konflik di Timur Tengah, khususnya yang berhubungan dengan pasukan Hizbullah Libanon. Meskipun harus diakui, mereka memuji pasukan Hizbullah, baik dari segi keagamaan, integritas kebangsaan, komitmen perjuangan, maupun toleransi terhadap orang non-Islam. Hizbullah bagi mereka adalah tentara *sunnatullah* yang mengusung kepentingan umat Islam dengan tidak membedakan antara kelompok Sunni ataupun Syiah untuk melawan kekuatan asing di Libanon, khususnya kaum Yahudi Israel.

Pengalaman Pahit Beridentitas Syiah

Dalam perkembangan Syiah di Jawa, meskipun anggota *bertaqiyah* (menyembunyikan diri) sebagai strategi budaya politik identitasnya, tetap saja ada pengalaman tragis dan pertentangan yang menyimpannya, baik yang dilakukan kelompok non-Syiah atau sesama Syiah (Ijabi dengan Syiah alawiyin). Selain tragedi Sampang di akhir Agustus 2012, salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah perusakan pesantren al-Hadi pimpinan Ahmad Baragbah di Batang pada 1999 dan 2002. Pelaku perusakan berasal dari masyarakat Wonotunggal, Brayo, Brotoh, dan Siwatu Pekalongan, juga kelompok massa yang berasal dari Pekalongan Kota. Salah satu faktor pendorong aksi itu adalah kejengkelan masyarakat dari proses pendirian pesantren Syiah ini yang sebelumnya tidak meminta izin masyarakat.

Pada tahun 1982, ustadz Ahmad Baragbah membeli tanah 3.000 meter. Baragbah menginformasikan ke masyarakat bahwa tanah itu akan dipakai untuk sawah, dan bila ada rezeki ia akan mendirikan pesantren. Masyarakat tidak diberitahu pesantren jenis apa yang akan ada. Masyarakat menduga bahwa pesantren itu mungkin seperti pesantren lain di Batang dan Pekalongan, pesantren NU. Dugaan itu muncul karena Baragbah adalah habib, di mana dalam pandangan mereka bahwa habib adalah keturunan Nabi, juga berilmu lebih tinggi dibandingkan kiai lokal. Apalagi perdebatan pemikiran Syiah saat itu belum dikenal di Batang. Di tahun 1985, saat pembangunan tiga gedung dimulai, kesejatan diri Syiah Baragbah mulai terungkap. Setelah pesantren dibuka 1987, tampak perbedaan ritual ibadah dengan masyarakat sekitar. Sejak tahun itu pula, Ahmad Baragbah melakukan ceramah yang isinya, menurut versi masyarakat, menghujat Sahabat Nabi dan khalifah non-Ali bin Abi Thalib, juga

terhadap habaib Sunni yang dianggap telah mengingkari tradisi *ahlul bait*. Dari versi masyarakat (peneliti belum mendapatinya), beberapa kaset ceramah dan selebaran ajaran Syiah pun telah diedarkan. Di samping itu, puluhan santri didatangkan dari luar daerah, seperti Banjarnegara, Wonosobo, Kendal, bahkan ada yang berasal dari NTB (generasi Hasan Bima) dan Kalimantan. Sampai tahun 2002, jumlah santri luar mencapai 120-an orang, hanya ada dua santri yang berasal dari wilayah sekitar.

Beberapa tokoh agama mulai resah dengan serangan faham baru beserta komponen pelaku dari luar daerah dan luar negeri, juga atas kondisi “penyelewengan” praktik ibadah yang dilakukan santri di pesantren itu. Resistensi mulai tumbuh di kalangan mereka. Beberapa dai yang berasal dari habaib Sunni mulai didatangkan, seperti Habib Thahir al-Kaff dari Tegal dan Habib Luthfi al-Idrus ketua *Rabithah Tarikat Mutabarrah* dari Pekalongan. Di tahun 1997, respon bernuansa permusuhan mulai tampak ke permukaan. Masyarakat mulai terang-terangan memutus kontak dengan semua aktivitas pesantren al-Hadi ini. Beberapa tokoh NU Wonotunggal Batang pun mulai berkonsentrasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk menangkis faham Syiah di daerah mereka.

Para pelaku kerap menyatakan bahwa tindakan mereka bersifat spontan. Dilihat secara kronologis, sangat nyata bahwa aktor intelektualnya berasal dari habaib Sunni keturunan Arab. Mereka adalah “oknum” organisasi Arab al-Irsyad dan Rabithah al-Alawiyah, serta *maqam* keluarga *fam* al-Attas di Pekalongan. Seperti sejarah sebelumnya, pertentangan “keturunan/*fam* dan nasionalisme” di antara keturunan Arab sudah genting. Persaingan habaib di Pekalongan, seperti di Solo sangat kentara. Ada lima jalur *fam* yang berebut kepemimpinan spiritual, yaitu al-Attas, al-Kaff, al-Idrus, Baragbah

dan Bafaqih. Mereka rata-rata mendirikan masjid dan madrasah sesuai prinsip dan faham yang sesuai dengan ciri khas *fam*nya. Ada juga masjid dan madrasah alawiyyin, sebutan *sayid* dan *syarifah* yang bekerjasama dalam operasionalisasinya. Salah satunya adalah Ma’had al-Islam di Pekalongan, dahulu disebut Ma’had al-Islami Abdullah Hinduan. Rupanya tindak tanduk Baragbah, anak ustadz Muhammad bin Abdur Rachman Baragbah yang tidak Syiah, meskipun telah memiliki koleksi kitab ulama Syiah Najhaf, mulai dicurigai para habib lain.

Mengapa dicurigai? Selain menjadi pemimpin keagamaan, habib biasanya menjadi saudagar atau pedagang *kayon* (mebel), percetakan, dan transportasi. Sebaliknya, Ahmad Baragbah tidak melakukan usaha itu, kecuali adiknya, yaitu Abdullah Baragbah (mebel) dan Bib Ali Baragbah (Batik). Saat ia membeli dan membangun pesantren al-Hadi cabang Wonotunggal, para habib curiga tentang perolehan dana Ahmad Baragbah. Bukan rahasia lagi bahwa ada aliran dana yang didapati dari Iran, apalagi diketahui setelah itu bahwa Baragbah di tahun 2005 diangkat menjadi Presiden al-Muammal Foundation Internasional, di mana pada tiap bulan para penyelia datang ke pondok al-Hadi. Selanjutnya akan diantarkan Baragbah untuk berkeliling kepada para anggota, masjid, musholla Syiah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kehadiran penyelia ini semakin dicurigai, saat beberapa habib sunni di Pekalongan telah mulai dikunjungi dan didekati. Kondisi ini yang membuat habib Sunni mulai marah. Mereka menyakini Syiah bukanlah faham *ahlul bait*, dan jangan pernah menyamakan *ahlul bait* dengan Syiah. *Ahlul bait* adalah keluarga besar alawiyyin, keluarga dan pengikut setia sunnah rasul dan sahabat, demikian juga khalifah di dalamnya. Habib yang masuk ke Syiah dianggap “bukan bagian *ahlul bait*” karena hanya pengikut Abdullah Saba, seorang munafik Yahudi.

Beberapa habib Sunni di Pekalongan mengkhawatirkan perkembangan Syiah, lebih khusus ketika pesantren al-Hadi mendirikan pesantren cabang, sebagai pesantren persiapan dan alternatif untuk pesantren al-Hadi pusat.

Para habib Sunni, dipelopori Thahir al-Kaff dan Habib Luthfi al-Idrus, pemimpin *Rabithah Tariqah Mutabirah*, Habib Abdullah al-Kaff, ketua *Rabithah al-Alawiyah Darul Aitam*, dan beberapa oknum di al-Irsyad dan Mahad Islam, juga beberapa kiai lokal seperti K. Saellan di tahun 1980-1996 pemimpin *Ribatul Mutaallimin* dan K.H. Taufik, pemimpin pesantren at-Taufiqy Watucongol mulai menceramahkan dengan lembut dan keras soal masuknya Syiah. Sejak 1994, habib Sunni mulai mengonsentrasikan dirinya atas gerak-gerik faham Syiah di pesantren al-Hadi, bahkan hal ini kerap diulang saat berceramah di luar kota. Puncaknya, di tahun 1997 dan 2002, muncul gerakan massa yang "diketahui" oleh Habib Luthfi dan beberapa habib al-Irsyad dan *Rabithah al-Alawiyah* serta anggota *maqam al-Attas* untuk menghentikan aktivitas pesantren Syiah di Wonotunggal Batang. Beberapa kontak wilayah dibangun, dari GP Anshor sampai pengurus ranting NU di setiap desa di Wonotunggal. Akhirnya, massa tanpa identitas NU menyusup sebagai anggota masyarakat sekitar untuk menghentikan pesantren al-Hadi. Aksi massa itu sebenarnya telah diketahui para habib dan kiai Sunni (al-Irsyad dan NU) Pekalongan. Inilah sebuah gerakan dan politik keagamaan kaum Sunni versi lokal saat menghadapi faham Syiah.

Masalahnya, mengapa massa Sunni NU yang kultural dan praktik ritualnya hampir mirip dengan Syiah, ikut menyerang pesantren Syiah? Apakah ini semata ketidak-mengertian mereka terhadap faham Syiah atau ada muatan politik kepartaian di dalamnya? Sebelum tahun 1999, massa NU lebih

memilih PPP sebagai saluran aspirasinya. Saat itu, Habib Luthfi adalah ulama dari kelompok habib yang dianggap massa setingkat dengan kiai kharismatik nasional dan lokal Jawa Tengah. Setelah 1999, massa NU lebih memilih menjadi simpatisan PKB. Secara umum, massa NU di Pekalongan dan Jawa Tengah terpecah ke PKB dan PPP. Massa NU kultural yang tidak progresif dan menjadikan kiai lokal yang tetap menjaga *muruah* sebagai patron lebih memilih menyalurkan aspirasinya kepada PKB, demikian juga pengikut Syiah. Mereka enggan menjadi simpatisan PPP, karena dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa kiai dan habib di PPP tidak bisa menjaga sikap hidup *wara'* (kehormatan beragama dan kehidupan pribadinya). Mereka lebih mementingkan politik kekuasaan dengan ceramah yang membawa kebencian. Sebaliknya, massa NU kultural tetapi bersifat progressif dan cenderung keras dalam hubungan sosial-politik kekuasaan lebih memilih PPP dan menjadikan Habib Luthfi sebagai patronnya. Karena perbedaan afiliasi ini, massa NU ikut menyerang al-Hadi atau bisa jadi jaringan Wahabi telah menyusup dalam basis massa keagamaan dan massa politik NU?

Pengalaman pahit Syiah di Jawa, seperti kasus di Pekalongan dan Sampang Madura pada kasus terakhir ini, sesungguhnya terletak pada anggapan awal masyarakat yang terprovokasi oleh ulama Sunni maupun kelompok Wahabi bahwa Syiah menjadi faham keagamaan yang sesat karena dianggap tidak sesuai ajaran Islam pada umumnya. Beberapa ajaran Syiah seperti soal *imamah*, *taqiyah*, *nikah mutah*, *wilayatul faqih*, pembencian Sahabat Nabi, pemalsuan al-Qur'an, dan seterusnya menjadi alat provokasi membenci Syiah. Provokasi ini dapat diterima masyarakat berkat tiga alasan: (i) *ashobiyah* (fanatisme buta); (ii) politik keagamaan dan politik kekuasaan; dan (iii) tidak mengetahui sepenuhnya akidah

Syiah dari ushul sampai *furu* (cabang). Segaf al-Jufri (dalam wawancara tahun 2008) telah memerinci tiga persoalan itu. *Ashobiyah* terdiri dari *ashobiyah unsuriyah* (fanatisme elemen), *ashobiyah ansobiyah* (fanatisme keturunan) seperti *maqam* al-Attas di Pekalongan dan *maqam* al-Habsy di Solo, *ashobiyah gurriyyah* (fanatisme *ghirah*), dan *ashobiyah ilmiah* (fanatisme keilmuan/pikiran). Sifat *ashobiyah* ini, menurutnya telah membelenggu akal untuk menerima pemikiran baru dan pemikiran lain.

Oleh karena itu, garis keturunan Ali Habsy, yaitu Alwi al-Habsy (generasi Kakek), Anis al-Habsy (Generasi Bapak), dan Husein al-Habsy (cucu Ali Habsy) berupaya tetap menentang Syiah dan berposisi sebagai anti Syiah. Tujuannya mempertahankan *shahibul maqam*, di samping menjaga kharisma keluarga. Mengapa Syiah menjadi incaran mereka? Dalam salah satu ajaran Syiah disebutkan bahwa keturunan Muhammad harus ditarik garisnya dari Hasan Husein, sedangkan keturunan Ali Habsy terputus. Sementara *tidak semua imam atau ulama itu maksum*, hanya imam utama setingkat ayatollah Khumaini dan *marjiah* yang maksum, karena itu *shahibul maqam* tidak perlu dihormati sedemikian hebatnya. Juga hal lain, misalnya Syiah dikategorikan madzhab rasional yang menerima logika sejarah khususnya kefiktifan sahabat Rasul yang berjumlah 150 orang, juga fatwa tentang sikap dasar orang Arab Timur Tengah yang cenderung *syadidul khusumah* (*lhud*-keras hati/pendendam). Menurut Ali Muthalib (Wawancara Oktober 2008), Yayasan al-Bayyinah dalam masa kepemimpinan Habib Anis bin Alwi bin Ali al-Habsy adalah masuk kategori kelompok *Nashibi* (pembenci *ahlul bait*; madzhab anti Syiah). Model semacam ini dianggap sebagai praktik Wahabi yang memposisikan Su'ud sedemikian terhormatnya.

Taqiyah: Strategi Budaya dalam Beridentitas

Kedua kelompok Syiah, Syiah alawiyin dan Ijabi yang mengikrarkan diri sebagai organisasi masyarakat kerap menjadi incaran partai politik besar. Golkar, PPP, PKB, PDI, dan Partai Demokrat telah berusaha mendekati, baik dengan pendekatan personal maupun organisasi. Semua tawaran dan "ancaman" ditolak dengan budaya politik identitas *taqiyah*. Praktik *taqiyah* atau menyembunyikan sesuatu dengan berpura-pura sebenarnya memiliki makna lebih luas, yaitu "menghindari atau menjauhkan diri dari bahaya". *Taqiyah* juga berarti seorang yang menyembunyikan agamanya atau beberapa praktik tertentu dari agamanya dalam keadaan yang mungkin atau pasti menimbulkan bahaya sebagai akibat tindakan dari orang yang menentang agamanya atau praktik keagamaan tertentu. Ada pandangan bahwa menjalankan *taqiyah* dapat dibenarkan apabila terdapat bahaya yang pasti yang mengancam hidup seseorang atau keluarganya, atau kemungkinan hilangnya kehormatan dan kesucian isteri atau anggota keluarga wanita lainnya, atau bahaya hilangnya harga benda yang sedemikian banyak sehingga mengakibatkan kemiskinan yang total dan tidak memungkinkan seseorang untuk seterusnya memberikan nafkah kepada keluarga dan dirinya sendiri. Pendek kata, sifat berhati-hati dan menghindari dari bahaya yang pasti atau mungkin datang dan tidak dapat dicegah, merupakan hukum logika yang biasa dan diterima dan dipraktikkan orang dalam seluruh tahap kemanusiaannya. Orang Syiah menjadikan al-Qur'an Surat 3, ayat 28 sebagai landasan mitis dan ontologisnya. (Thabathaba'i 1989: 123). Bila diverbalkan, Syiah kemungkinan besar terjegal seperti Ahmadiyah. Ibaratnya, jangankan menampilkan diri secara vulgar dalam partisipasi politik kekuasaan, menampilkan secara keagamaan saja,

mereka harus memperhitungkan secara rasional dampak langsung dan tidak langsungnya kepada para pengikut.

Dalam pandangan penulis, praktik *taqiyah* yang dikembangkan sebagai sikap hidup penganut Syiah, termasuk strategi kebudayaan dalam pengertian van Peurseun (1986). Di dalamnya mencakup makna strategi politik identitas dan politik keagamaan dalam upaya menyembunyikan identitas diri di tengah pergaulan sosial, meskipun tetap bereksistensi diri. Kebudayaan dalam makna ini bukan sebuah kata benda melainkan suatu kata kerja. Kebudayaan adalah karya manusia sendiri dan tanggung jawab manusianya. Dalam arti ini, orang Syiah telah berusaha mengkaryakan itu, dan siap menanggung konsekuensi untuk tidak dikenal kesejatiannya dirinya. *Taqiyah* telah memenuhi unsur mitis, di mana unsur agama dan keyakinan menjadi argumentasi dasarnya; unsur ontologis, di mana ada upaya keras untuk melihat sejauhmana nilai logis itu dapat berfungsi baik terhadap keyakinannya; dan unsur fungsional, di mana ada kehendak mereka untuk tetap mengadakan relasi-relasi baru sebagai representasi eksistensi diri. Mereka menggerakkan pola, melakukan jejaring, dan mengamati gerakan luar-diri sebagai suatu kebertautan terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya, meskipun dengan jarak dan batas tertentu demi tercapainya kepentingan diri dan kelompok pada rentang waktu tertentu. Unsur fungsional inilah yang mengarah salah satunya pada makna awal dari strategi politik identitas dan politik keagamaan.

Karena praktik *taqiyah* di atas, penganut Syiah seolah asyik dengan dunianya sendiri. Hal ini diumpamakan "Syiah bagaikan macan tidur". Padahal, siapa sangka mereka telah berhasil mempopulerkan ide cemerlang keilmuan filsafat dan praktik kehidupan di bidang

lingkungan hidup, pendidikan, teknologi, ekonomi, dan politik, belum ditambah dengan aset organisasi seperti pesantren, gedung sekolah, klinik kesehatan, penerbitan, dan jaringan ekonomi. Melalui jaringan dan pendanaan *humus* (dana agama) konsorsium tujuh *marji* Iran, di mana hanya tiga *marji* saja yang tersebar di Jawa, kelompok Syiah Indonesia khususnya di Jawa dapat menjadi kekuatan pengimbang dari afiliasi politis Wahabisme yang bersifat *trans national Islamic movement*. Masalah identitas boleh disimpan atau disembunyikan dalam banyak nama dan organisasi, tetapi masalah eksistensi diri biarlah merasuk ke ruang-ruang publik kehidupan individu dan sosial masyarakat.

Potensi di atas barangkali yang membuat politik internasional Amerika Serikat sampai menyebut Iran beserta paham Syiahnya sebagai poros kejahatan. Ibarat membangunkan "macan sedang tidur", pertanyaannya siapa yang akan membangunkan tidur panjangnya Syiah? Apakah betul rebakan *trans national Islamic movement* berupa Wahabisme menjadi pendorong gerakan regionalisme Syiah di Indonesia? atau, jangan-jangan faktor internal Syiah yang mendorong gerakan itu terjadi? Bagaimana pula respon secara politik keagamaan dan politik atau gerakan lain yang berada dalam kawasan *trans national Islamic movement* terhadap perkembangan paham dan gerakan Syiah di Jawa?

Syiah, baik berupa faham (*madzhab*) ataupun kelompok keagamaan seolah tidak dikenal oleh sebagian besar Muslim Indonesia. Syiah bahkan kerap disamaratakan dalam identitas kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), seperti pada penyebutan orang Syiah di Sleman, Bantul, dan Pasar Kliwon Solo. Ada juga yang menyebutnya Ahmadiyah, seperti yang terjadi pada Syiah di Bogor, Jepara, Pekalongan, Kediri, Tegal, dan Bangil. Penyebutan Syiah dengan

identitas dirinya jarang terdengar. Sedikit Muslim yang mengetahui identitas dan eksistensi Syiah. Padahal pengikut Syiah di Indonesia telah mencapai 5 juta orang, bahkan ada juga yang menaksir lebih dan kurang dari itu (Ijabi 2002:12). Meskipun minoritas, pengikut Syiah dengan sangat percaya diri kerap menyebut dirinya sebagai mayoritas, bila dilihat dari motivasi dan gerak persebarannya.

Pengetahuan masyarakat tentang Syiah sangat sedikit sehingga mudah menstigmatisasi Syiah sebagai aliran sesat, seperti Ahmadiyah dan kelompok Ahmad Musadiq. Stigmatisasi ini berujung pada tindakan anarkhis terhadap pengikut dan aset lembaga Syiah, seperti kasus perusakan pesantren al-Hadi Ahmad Baragbah di Batang dan Pekalongan pada 1999, 2002 dan tragedi Sampang Madura tahun 2012. Barangkali benar adanya pepatah bahwa setiap peristiwa (musibah), pasti ada hikmahnya. Kemungkinan besar tanpa kasus perusakan pesantren al-Hadi dan Sampang Madura, eksistensi Syiah di Jawa tidak pernah tampak ke permukaan. Meskipun muncul pula sebuah dilemma di dalamnya atau jangan-jangan orang Syiah dengan prinsip *taqiyah*nya berasumsi bahwa ketidaktampakan di ranah publik adalah apa yang diharapkan? Seandainya ini yang terjadi, apakah betul politik representasi *taqiyah* orang-orang Syiah benar-benar berhasil?

Kalau proses di atas yang diharapkan dan kemudian berhasil, jangan-jangan eksistensi Syiah pada perkembangan selanjutnya akan mengalami kendala, khususnya saat tuntutan pelarangan terhadap organisasi yang dianggap sesat dan eksklusif seperti Ahmadiyah telah menjadi sorotan publik. Bisa jadi, Syiah akan terkena imbas langsung atau sampingan dari pelarangan ini. Artinya, politik representasi identitas semacam *taqiyah* Syiah harus kembali dipikirkan. Pertanyaannya, adakah niat kelompok

Syiah untuk menyatakan dirinya sebagai Syiah? Apakah eksistensi mereka baru akan ditampakkan pada saat-saat yang tepat, khususnya saat fenomena *trans national Islamic movement* berupa Wahabi, Pan Islamisme, dan Ikhwanul Muslimin tidak lagi menemukan momen di Indonesia?

Bagi kebanyakan ustadz Syiah alawiyin seperti Segaf al-Jufri di Solo dan Hasan Daliel di Jakarta, Ijabi sebenarnya tidak diperlukan, karena bertentangan dengan strategi *taqiyah*, sebagai politik identitasnya. Kesimpulan ini didasarkan pada argumen bahwa misi utama perkembangan Syiah tidak untuk membentuk masyarakat Syiah, tetapi sekadar memberi sumbangan pemikiran bagi pencerahan Islam. Ijabi adalah organisasi yang langsung atau tidak langsung memiliki kecenderungan politik partisipan dalam penampakan eksistensi diri di tengah pergaulan sosialnya. Dengan kekuatan massa Syiahnya, partai politik seperti Partai Golkar, PPP, PKB, dan Partai Demokrat seperti terjadi sekarang kerap menawarkan posisi politis bagi pejabat teras Ijabi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. PPP Bandung misalnya pernah menawari kader Syiah terbaik untuk menjadi bagian penting dari PPP.

Tawaran politis di atas juga pernah dicoba Golkar dengan usaha mendudukkan kader Syiah sebagai pasangan bupati Kuningan. Beberapa kader Ijabi Jawa Tengah, khususnya Wonosobo bahkan pernah ditawarkan untuk menjadi anggota DPRD asal suara massa Syiah diarahkan kepada Partai Demokrat. Selain tawaran politis, ada usaha "pengancaman" yang menyejajarkan Syiah dengan Ahmadiyah bila beberapa tawaran itu ditolak. Artinya, stigmatisasi sebagai aliran sesat, baik melalui usaha hukum ataupun pengerahan massa akan dilakukan terhadap pengikut Syiah. Seperti kasus di Pekalongan, kasus Syiah

di Kuningan menjadi contoh menarik karena telah dilirik partai politik. Inilah masalahnya bila Syiah terlalu membuka diri dalam bentuk Ormas, maka ia menjadi incaran partai. Di satu sisi, *taqiyah* sebagai strategi kebudayaan politik identitas Syiah menjadi penting untuk tetap bereksistensi tanpa berada dalam ranah-ranah politik kekuasaan. Dengan *taqiyah*, Syiah barangkali menjadi besar dalam sebuah gerakan dan mobilisasi massanya.

Bila sifatnya menempel atau menjadi incaran politik kekuasaan seperti di atas, maka perkembangan Syiah di Indonesia dikhawatirkan akan terbatas dan mudah terbaca. Hasil akhir berupa resistensi langsung dari kelompok Sunni, khususnya dari keturunan alawiyin yang masuk *shahibul maqam* akan menyusahkan gerak kerja Syiah. Belum lagi, bila terdapat praktik ibadah yang tidak ditaqiyahkan (disembunyikan), tentu akan mengundang respon langsung berupa penuduhan sebagai aliran sesat dari masyarakat. Karena itulah, Syiah tetap dikembangkan melalui politik identitas *taqiyah*, dengan mempopulerkan ide pemikiran melalui ruang alam bawah sadar, yaitu dengan penerjemahan, penulisan, dan penerbitan buku. Di samping itu, pendidikan dan pengajaran praktik wacana dan konsep *filosofatuna* harus dikemas dengan konsepsi pluralisme. Akhirnya, Syiah tidak hanya sebatas ide atau konsep, bisa jadi ia menjadi bagian praktik masyarakat, dan dengan sendirinya pembentukan masyarakat Syiah dalam bentuk *historical block* dalam bahasa Gramsci, di mana pembakuan mitos, sejarah, dan realitas sosial dan aspek ekonomi politik adalah rangkaian komunikasi kekuasaan untuk menghegemoni struktur (Haryatmoko 2004: 4-8; Boggs 1976) akan menampilkan hasilnya sebagai suatu proses akhir. Sebaliknya, Ijabi hendak menjadikan pembentukan masyarakat Syiah sebagai proses awal. Bila hal ini yang dilakukan, maka Ijabi tidak ada bedanya dengan

tujuan dan model dari *trans national Islamic movement*, khususnya yang mengusung ide *wilayatul faqih* dan *imamah* dalam bentuk *khilafah islamiyah*, seperti HTI dan gerakan Pan Islamisme lainnya.

Perbedaan proses tujuan “membangun masyarakat Syiah di Indonesia” dari kategori proses awal (Ijabi) dan proses akhir (alawiyin) sangat nyata dalam praktik di lapangannya. Ijabi mempunyai target kemassaan sebesar 5 juta orang di tahun 2020 (www.ijabi.org; diakses 17 Desember 2007). Bahkan dalam dokumen itu disebutkan Ijabi harus menjadi kekuatan sosial yang suaranya dapat dipertimbangkan oleh negara dan kelompok lain. Dari pernyataan ini, ada kesan bahwa Ijabi seperti akan menjadi bagian dari partai politik atau bisa jadi menjadi partai yang berdiri sendiri. Tidak demikian dengan kelompok Syiah alawiyin yang tidak memiliki target massa. Targetnya ditekankan pada soal penerimaan prinsip dan pandangan Syiah, sehingga dapat dipraktikkan masyarakat Indonesia. Wajar bila Syiah alawiyin mengintensifkan model *hauzah*, *halaqah*, *liqa*, dan majelis pengajian berbahasa Arab antar jejaringnya. Bahkan mereka kerap bertaqiyah (mengaburkan) praktik *tawasul* di masyarakat luas dengan cara menempelkan diri pada kegiatan para habib Nahdliyin, seperti acara pengajian dan debat publik yang dilakukan Ali Muthalib bin Assegaf di Bangkalan Madura, Minggu, 18 Oktober 2007. Bila 10.000 orang Madura yang menghadiri acara itu mengetahui kesejatan diri Ali Assegaf yang Syiah, maka masyarakat yang menjadikan NU sebagai “agamanya” tentu akan menolak keras kehadirannya.

Penutup

Sebagai gerakan regional yang bertumpu pada gerakan kesadaran dan pencerahan intelektual, Syiah sebenarnya

lebih berpeluang diterima oleh masyarakat Indonesia. Ditambah pula adanya banyak persamaan kultur dalam praktik peribadatan dengan sebagian besar Muslim Indonesia (baca NU). Apalagi dengan politik identitas Syiah yang diwujudkan melalui *taqiyah* Syiah, tidak terdapat keharusan kuat mengenai pembentukan masyarakat Syiah, *wilayatul faqih* dan *imamah* yang bersifat internasional. Sebaliknya, penerimaan gerakan politik keagamaan *trans national Islamic movement* sedikit banyak mendapat tentangan kuat dari sebagian besar masyarakat, khususnya konsep mereka tentang *khilafah*, *jihad*, konsepsi negara Islam, dan lainnya. Dengan kecenderungan yang ada, maka Syiah sebagai gerakan Islam regional dapat menjadi kekuatan penyeimbang gerakan Islam trans nasional, minimalnya ide dan praktik mekanisme politik negara-agama yang bisa berpeluang menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri dapat dicegah.

Kecenderungan di atas dapat terlihat dari perkembangan Syiah di Jawa yang memiliki karakter unik, antara keinginan menampakkan diri sepenuhnya atau menyembunyikan diri secara praktis dan teknis, namun secara substansial pemikiran dan ajarannya ingin diketahui oleh masyarakat. Kedua keinginan itu pun menjadi landasan utama dari gerakan Syiah, baik alawiyin ataupun Syiah pribumi. Masing-masing memiliki argumentasi dan model gerakannya, walaupun masyarakat Sunni sendiri sering terjebak juga pada anggapan bahwa Syiah sebagai ancaman atau bagian dari usaha kelompok Sunni untuk mencegah tumbuh kembangnya aliran yang dianggap sebagian orang sama dengan aliran Ahmadiyah dan sekte-sekte sesat seperti kelompok Ahmad Musadiq.

Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang Syiah, sebagai dampak

bertaqiyah dalam beridentitas di satu sisi sangat membahayakan perkembangan Syiah, salah satu dampaknya seperti perusakan pesantren al-Hadi dan tragedi Syiah Sampang Madura. Konflik 'identitas' akan menjadi bermasalah pada semua hubungan sosial dan lainnya. Terlebih bila suatu kelompok mengembalikan pemahaman terhadap kelompok lain sebagai obyek, sebagaimana pengertian awal bahwa 'identitas sebagai tanda tidaklah esensi tetapi entitas kultural yang berelasi dengan banyak tanda yang lain. Sebagai tanda, identitas juga hidup dan dikembangkan dalam relasi pengaruh baik ruang politik, ruang ekonomi ataupun ruang sosial yang juga terus berdinamika. Jika relasi yang berjalan itu timpang, maka cenderung melahirkan 'ketimpangan' dan 'dominasi' dari tanda yang satu terhadap tanda lain. Ruang institusional ini juga dimaknai sebagai struktur yang akan mempengaruhi bagaimana identitas sebagai tanda akan dimaknai, dan dengan itulah pelekatan identitas yang buruk, minoritas, marginal, stereotyping, dan stigmatisasi akan memunculkan konflik dalam interaksi individu dan kelompok di masyarakat.

Namun di sisi lain, keterbatasan itu memberikan rentang kebebasan para pengikut Syiah untuk menggerakkan pemikirannya secara mandiri melalui *taqiyahnya*. Oleh karena itu, Departemen Agama, sebagai lembaga pengayom umat beragama seharusnya mampu melindungi kelompok Syiah, baik individu ataupun organisasinya, karena mereka secara paham bukan kelompok aliran sesat. Pemahaman tentang Syiah pun harus disebarluaskan kepada masyarakat sesuai versi Syiah yang telah didialogkan keshahihannya. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk mengukuhkan sendi-sendi Islam moderat, yaitu sejenis Islam yang berpandangan toleran (*tasamuh*) terhadap pluralitas yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Baso, Ahmad. 2007. *NU Studies*. Yogyakarta: LKiS.
- Coleman, L M. 1986. "Stigma: An Enigma Demystified". Dalam Ainlay, G. Backer, & L M. Coleman, *The dilemma of Difference*. New York: Plenum Press, 1986.
- Hall, Stuart. 1997. "Cultural Identity and Diaspora", dalam Kathryn Woodward (ed.), *Identity and Differenc*. London: Royal Publication.
- Hardiman, F Budi. 1990. *Kritik ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, cetak ulang *Kritik ideologi: Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hanafi, Hasan. 2002. *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat (Muqaddimah fi 'ilmi Istighrab)*, Yogyakarta: LkiS.
- Hassan, Fuad. 2006. "Pendidikan Multikulturalisme" dalam Kompas, Juni.
- Irfani, Suroosh. 1983. *Iran's Islamic Revolution: Popular Liberation or Religious Dictatorship?* New Haven and London: Yale University Press.
- Jackson, Karl D. 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Grafiti. Artikel Jackson. 2005. "The Political Implication of Structure and Culture in Indonesia" dalam www.google.co.id/politicalsymbol/indonesia
- Maalouf, Amin. 2004. *In the Name of Identity* (terjemahan), Yogyakarta: Resistbook.
- Parekh, Bikhu. 2008. *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World* New York: Routledge.
- Peurseun, C. Van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Roswanto, Alim. 2001. *Studi Oksidentalisme*. Yogyakarta: UIN Press.
- Sanusi SK. 1952. *Sesempal Hikmad dari Tajussalatin*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Suryadinata, Leo. 1994. *Politik Thionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: SH.
- Thabathaba'i, Al-Marhum Allamah. 1989. *Shia*. Qum: Ansariyan Publication. Diindonesiakan oleh Grafiti, dengan judul *Islam Syi'ah*. 1989.
- Zayar. 2000. *The Iranian Revolution: Past, Present, and Future*. New Haven and London: Yale University Press. Dialihbahasakan dengan judul *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan*, Pengantar Alan Woods. Jakarta: al-Huda , 2004.

Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Strategi Penanganan Gerakan Keagamaan pada Jamaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Mustaqim Pabbajah

Dosen Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali, Makassar

Abstract

At this modern era, where the economic competition has become very stronger, societal empowerment should be encouraged, especially in the economic life in order to build a strong, creative and autonomous society. This research is intended to explain relations religious (Islam) ethics, in the process and practices of societal empowerment of jamaah/followers An-Nadzir. This community, is actually has been autonomus in terms of economic aspect of their life. The methods of this research was qualitatively in technique and descriptive in its analysis of data..

Abstrak

Pada era modern seperti saat ini di mana persaingan ekonomi semakin kuat, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan, terutama pemberdayaan pada bidang ekonomi guna terciptanya masyarakat yang kuat, kreatif, dan lebih mandiri. Pemberdayaan sosial-ekonomi merupakan salah bentuk untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan etika agama (Islam) dalam proses dan praktik pemberdayaan sosial-ekonomi dengan mengambil jamaah An-Nadzir sebagai basis analisisnya. Dalam hal ini An-Nadzir berkembang sebagai komunitas gerakan keagamaan yang mandiri dari aspek ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif analisis.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial-Ekonomi, Gerakan keagamaan, Mandiri, dan An-Nadzi

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha membangun dan meningkatkan sumber daya masyarakat untuk mengantisipasi kompetisi bebas di era globalisasi. Usaha semacam itu terutama dilandasi oleh kesadaran bahwa dengan adanya sumber daya yang handal akan menghindarkan diri dari ketergantungan ekonomi dan menciptakan masyarakat mandiri. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya

tersebut dengan cara pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, baik di tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, mulai dari yang sifatnya individu hingga pemberdayaan secara kolektif. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kreatif dan mandiri dalam kehidupan sosial-ekonomi.

Apabila diamati dalam kajian maupun kebijakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang sejak era 1950-an sampai saat ini, kecenderungan

perspektif yang sedang menjadi arus utama adalah perspektif pembangunan yang berbasis pada masyarakat (Soetomo, 2011: 5). Dalam implementasi pembangunan berbasis masyarakat tersebut digunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. Kondisi ketidakberdayaan di samping disebabkan karena proses sejarah perkembangan sosial ekonomi negara-negara yang sedang berkembang yang cukup panjang terutama pada periode kolonial, juga disebabkan karena penggunaan pendekatan pembangunan masyarakat menjadi terpusat, sehingga pada tingkat lokal menjadi marjinal.

Permasalahan sosial ekonomi biasanya terjadi akibat dari kebijakan yang diterapkan secara sentralistik atau terpusat. Pada kondisi seperti ini, masyarakat tergiring untuk kurang menyadari masalah sosial yang ada dalam lingkungan mereka. Mereka juga kurang mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk menangani masalah sosial ekonomi dari dan oleh masyarakat sendiri. Dalam hal ini, masyarakat berada dalam situasi struktural yang tidak memperoleh kesempatan secara bebas untuk memuaskan aspirasi dan merealisasikan potensi mereka dalam menangani permasalahan sosial-ekonomi yang ada dalam kehidupan mereka (Hikmat, 1999).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dalam studi ini mencoba mengkaji fenomena pemberdayaan sosial-ekonomi secara kolektif pada tingkat lokal. Dalam hal ini terdapat kelompok keagamaan mencoba menciptakan suatu pemberdayaan ekonomi yang lebih mandiri dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Di sini dibahas bagaimana seharusnya nilai-nilai keislaman secara normatif dipahami oleh kelompok

masyarakat, kemudian nilai-nilai tersebut dipraktikkan menjadi perilaku sosial-ekonomi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil kasus Jamaah An-Nadzir sebagai obyek analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Jamaah An-Nadzir mengembangkan diri sebagai salah satu kelompok gerakan Islam yang mengembangkan dan memadukan nilai-nilai keislaman klasik (khususnya berupaya meniru kehidupan nabi Muhammad) tanpa harus kehilangan nuansa modernitas. Selain itu, dengan spirit keagamaan yang kental mereka tetap peduli terhadap etos kerja. Berkaitan dengan ini, dalam pandangan Weber (1956: 48-49) menyatakan bahwa agama yang bersemangat modernlah yang akan memberi dorongan dan spirit terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan Turner (1992: 260) bahwa kaitan agama dengan motif-motif dan sikap-sikap dominan, dapat ditemukan pada setiap sektor sosial dari tradisi religius. Di sini dapat terlihat bahwa agama berperan sebagai motivasi kerja dalam

Hal semacam ini, menawarkan peradaban Islam yang tetap berbasis pada "keyakinan agama", bukan ideologi. Dalam hal ini basis keyakinan yang secara terus menerus diijtihadi untuk berhasil menjadi rumusan-rumusan yang berkadar sebagai "ilmu" (logis, konkret, empiris) sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2004: 81-83). Jika keberhasilan Cina didasarkan oleh ideologi yang disebut "ekonomi pasar sosialis", sudah tentu bagi umat Islam yang ditawarkan harus lebih daripada sekedar "ideologi", melainkan "ilmu" atau "objektivikasi" Islam yang dikenal sebagai *din* (dunia-akhirat, keuntungan-pahala, kesejahteraan-surga, material-spiritual), bukan sekedar agama dalam arti umum. Maka objektivikasi yang menghasilkan konsep-konsep yang

terukur (logis, konkret, empiris) terhadap istilah-istilah agama Islam, seperti istilah “pahala”, “jamaah”, “birr”, “taqwa”, “amanah”, dan sebagainya.

Pemberdayaan sosial-ekonomi menjadi fokus utama Jamaah An-Nadzir dalam rangka mendorong Jamaah yang kuat dan mandiri. Kemandirian ini sangat penting karena mereka telah memutuskan untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka telah mengkonstruksi model keyakinan dan cara beragama yang berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya (di Indonesia). Mereka telah memutuskan untuk hidup sebagai Jamaah spiritual yang peduli kebutuhan ekonomi warga. Singkatnya, Jamaah ini kuat sebagai kelompok sosial (*civil society*) yang tidak menggantungkan hidup pada kekuatan ekonomi luar. Pemberdayaan Jamaah ini patut menjadi acuan untuk kehidupan umat (Islam) yang lebih baik dan mandiri, sebab pemberdayaan semacam ini merupakan proses membangun kembali struktur jamaah insane, di mana cara-cara baru untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, ekonomi dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa eksistensi Jamaah An-Nadzir di Sulawesi Selatan dengan stigma negatif oleh sebagian masyarakat, dalam kenyataannya dapat dijadikan kelompok percontohan dalam pengembangan ekonomi sosial-ekonomi. Meskipun dari penampilan yang cukup unik dari segi fisik dan aktivitas keagamaan berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya (*non-mainstream*), akan tetapi mereka memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya kelompok dan sumber daya alam yang dikelola secara mandiri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan dengan latar belakang

masalah dan rumusan masalah tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, adalah bagaimana Jamaah An-Nadzir menanamkan ideologi keagamaan dalam perilaku sosial-ekonomi? apa saja yang dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan? Mengapa Jamaah An-Nadzir melakukan pemberdayaan ekonomi melalui nilai-nilai keagamaan? dan bagaimana pengaruh etika agama terhadap pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Jamaah An-Nadzir di Sulawesi Selatan?

An-Nadzir sebagai kelompok keagamaan *non-mainstream* muncul sebagai reaksi terhadap kegalauan akan hilangnya “sifat kudus” dalam agama induk. Mereka lahir untuk menyelamatkan “sifat kudus” agama dan mengejawantahkan dalam bentuk ritual baru. Salah satu aspek yang penting dari sosiologi agama adalah perhatiannya terhadap relasi antara realitas sosial dan agama. Agama dalam defenisi trasenden –seolah-olah- berasal dari mileu Ketuhanan yang a-histori dan a-kultural. Padahal, agama senantiasa mengalami kontekstualisasi dengan kebudayaan masyarakat pemeluknya (Abu Zayd, 2002). Selain itu, gerakan keagamaan merupakan suatu gagasan yang berusaha menerjemahkan ide-ide keagamaan menjadi kekuatan transformatif untuk menumbuhkan struktur dan tatanan sosial yang baru dan lebih baik; partisipatif, terbuka dan emansipatoris (Rahardjo, 1999: 12).

Sebagai kelompok keagamaan An-nadzir mengembangkan pemberdayaan komunitas atau jamaah. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan sosial-ekonomi yang dipraktikkan oleh An-Nadzir terdapat beberapa konsep pemberdayaan masyarakat yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam menghadapi tantangan ekonomi global, tetapi di dalam tulisan ini hanya ingin mencoba menerapkan

konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari norma-norma keagamaan. Dalam hal ini norma agama diambil sebagai acuan utama dalam melakukan praktik sosial-ekonomi pada masyarakat.

James Coleman dalam *rational choice theory* (1992) menunjukkan ketika memberi contoh pengaruh doktrin Protestan terhadap sistem ekonomi, Ia menyatakan bahwa suatu norma atau doktrin keagamaan menjadi landasan dalam berperilaku seseorang ataupun kelompok. Norma yang sudah terserap dalam setiap individu/kelompok ini menjadi arahan untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan-tindakan individu/kelompok yang berorientasi ekonomi ini selanjutnya menghasilkan sistem ekonomi khusus. Demikian pula halnya analisis jamaah An-Nadzir di mana mereka melakukan tindakan ekonomi dilandasi dengan doktrin dan norma keagamaan. Mereka berangkat dari doktrin agama (Islam) yang menerapkan etika kenabian dalam rangka pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, kemudian berproses hingga menjadikannya sebagai sistem perekonomian umat. Turner (1991) Mengemukakan bahwa kandungan ajaran agama bukan saja berupa doktrin melembagakan atau mendukung *status quo* (menghindari perubahan) tetapi juga dapat berupa doktrin yang justru memacu perubahan (Usman, 2008: 180).

Teori Coleman tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh norma atau pilihan (preferensi). Aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selain itu, sumber daya adalah sesuatu yang juga menarik perhatian yang dapat dikontrol. Ini pula tidak terlepas dari kepercayaan (*trust*) masyarakat dengan sistem seperti ini, sebab dengan

tindakan ekonomi yang berlandaskan norma agama yang identik dengan kejujuran bertindak, dapat mengurangi potensi kerugian.

Selain konsep tersebut, konsep Weber yang dikenal dengan sebutan "etika protestan (*protestant ethic, die protestantische Ethic*) dan hubungannya dengan "semangat kapitalisme" diambil pula sebagai acuan dalam menganalisa kehidupan sosial-ekonomi jamaah An-Nadzir. Tesis yang diperkenalkannya sejak tahun 1905 menyatakan bahwa ada hubungan antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa orang-orang beragama (dalam hal ini agama Protestan) simetris dengan kedudukannya dalam bidang ekonomi. Terdapat korelasi positif antara orang beragama dan yang memiliki kecukupan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa semakin taat seseorang dalam melaksanakan perintah agama, maka semakin sejahtera pula kehidupan ekonominya. Tesis ini disinyalir berdasarkan pengamatan Weber terhadap fakta sosiologis yang ditemukannya di Jerman, bahwa sebagian besar pengusaha dan pemilik modal tingkat atas adalah orang-orang Protestan.

Penguatan Jamaah dengan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Jamaah An-Nadzir bukan-lah Jamaah sufistik yang acuh terhadap urusan ekonomi. Meski Jamaah ini lebih dikenal sebagai Jamaah agama, tetapi mereka cukup memperhatikan ekonomi. Jamaah ini menyadari bahwa ekonomi adalah basis yang sangat penting bagi perkembangan suatu Jamaah. Tanpa ekonomi yang kuat tentu mereka akan goyah sebagai Jamaah yang utuh. Apalagi sebageian besar Jamaah An-Nadzir adalah kelompok pendatang dari berbagai daerah. Kedatangan mereka

tidak membawa apa-pun. Seluruh aktivitas ekonomi mereka sebelumnya telah ditinggalkan dan berkumpul di Lingkungan Mawang. Tentu saja, mereka harus berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Pada awalnya, Jamaah An-Nadzir lebih banyak bergerak di bidang pertanian dan pertambakan. Tanah luas yang dimiliki oleh Daeng Rangka merupakan pondasi untuk bertani kebun dan tambak air tawar. Mereka kemudian mengembangkan sistem mina, yaitu sistem tanaman padi diselingi dengan tambak ikan mas. Sejauh ini usaha mereka cukup berhasil. Pemerintah kabupaten Gowa memberi apresiasi yang tinggi dengan menghadiri pesta panen Jamaah ini. Dinas perikanan Kabupaten Gowa pun ikut memberi perhatian dengan menghibahkan bibit ikan mas untuk dikelola. Bahkan gubernur pun menyempatkan diri datang dan memberi bantuan bibit ikan. Jamaah An-Nadzir dianggap berhasil membuat lahan tidur (di Desa Mawang) menjadi lahan produktif. Sebelum Jamaah An-Nadzir mendiami wilayah sekitar Danau Mawang, tempat ini dulunya dikenal sebagai hutan yang sangat jarang penduduknya. Di samping karena dianggap jauh dari pusat kehidupan masyarakat, juga karena dianggap sebagai sarang kawan perampok. Akibatnya, penduduk jarang sekali mau membuka lahan di sekitar Danau Mawang. Semuanya berubah sejak kehadiran Daeng Rangka dan Jamaah An-Nadzirnya di tempat itu.

Dengan pengelolaan usaha ekonomi mikro yang kreatif itu, Jamaah An-Nadzir dapat menghidupi Jamaah mereka, dapat menjalankan misi mereka untuk memberi peringatan kepada manusia akan kebenaran, tidak hanya melalui perkataan dan tabligh, tetapi juga melalui praktik sosial-ekonomi. Dalam hal ini, An-Nadzir tidak hanya berhasil mendekonstruksi

sistem pendidikan modern yang menghamba pada formalisme tetapi juga melakukan dekonstruksi terhadap sistem ekonomi kapitalis yang mengedepankan keuntungan melalui jalur-jalur ketidakjujuran.

Kuncinya adalah bunuh diri kelas. Istilah ini memang tumbuh dari tradisi gerakan Marxisme. Namun Jamaah An-Nadzir telah berhasil melakukan itu. Mereka (sejauh ini) mampu keluar dari logika kehidupan modern dan merancang sendiri format kehidupan mereka yang berbasis pada ajaran agama yang juga berbeda dengan *mainstream* ajaran Islam di Indonesia. Para pemimpin An-Nadzir berhasil meyakinkan pengikutnya bahwa ajaran yang mereka pegang tidak hanya berisi tentang wacana keagamaan, tetapi juga rekonstruksi kehidupan sosial yang dicita-citakan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad.

Pemberdayaan sosial-ekonomi yang dipraktikkan oleh An-Nadzir, menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan, yang tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Relevansi pembicaraan ini kepada masalah pemberdayaan sosial-ekonomi umat Islam ialah kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. Suatu pendekatan dari sudut keislaman dapat diharapkan dapat berdampak langsung pada masalah etos kerja itu, jika memang pada masalah etos kerja ini ada masalah, karena agama bertitik tolak dari keimanan. Setiap percobaan suatu masalah dari sudut pandangan keagamaan juga bertitik tolak dari keimanan, maka etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim. Kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah SWT. Islam agama amal atau kerja (*praktis*). Hamba mendekati dan berusaha memperoleh

ridha Allah melalui kerja atau amal sholeh dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya.

Realitas pemberdayaan sosial-ekonomi yang dilakukan oleh jamaah An-Nadzir, secara normatif sesungguhnya hubungan dan peran agama terhadap etos kerja merupakan sesuatu yang integral. Hubungan agama dengan etos kerja, ibarat bensin dengan mobil. Agama tidak hanya mampu mempengaruhi etos kerja menjadi lebih baik, tetapi agama justru menjadi bahan bakar dan sumber etos kerja tersebut.

Agama sebagai suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan, dan suatu sistem sosial yang dapat dianalisis, karena terdiri atas suatu kompleks norma dan peraturan yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan pada tujuan tertentu (Santoso, 2007: 13). Tujuan dari hal-hal sakral diwujudkan dalam lewat praktik-praktik yang menyatu ke dalam suatu jamaah moral, di mana semua orang taat pada praktik tersebut (Durkheim, 1969: 47). Hal-hal yang sakral dalam hal ini nilai agama, selalu melibatkan kepentingan besar, kepentingan dan kesejahteraan seluruh kelompok umat, tidak hanya satu atau beberapa. Pada sisi lain, hal-hal yang profan adalah masalah-masalah kecil yang mencerminkan urusan setiap individu sehari-hari, berupa kegiatan dan usaha pribadi yang lebih kecil dari kehidupan pribadi dan keluarga dekat.

Jamaah An-Nadzir berkeyakinan bahwa dengan melakukan sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi perhatian. Amalan atau pekerjaan yang demikian selain memperoleh keberkahan serta kesenangan dunia, juga ada yang lebih penting yaitu merupakan jalan atau tiket dalam menentukan tahap kehidupan

seseorang di akhirat kelak; apakah masuk golongan ahli surga atau sebaliknya.

Etos kerja Islami yang dipraktikkan An-Nadzir dalam pemberdayaan sosial-ekonomi bersumber dari ajaran wahyu yang dapat dicerna akal. Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup dan menjalankan Sunnah Rasul sangat kuat pengaruhnya bagi umat untuk meningkatkan etos kerja. Dalam Islam manusia diperintahkan untuk melakukan amal-amal konkrit, baik bersifat suruhan tegas, maupun rangsangan motivasi untuk bekerja. Larangan tegas terhadap sifat malas, meminta-minta, melacur, berjudi, mengambil hak orang lain menunjukkan tidak ada pilihan lain bagi orang yang mengaku Islam untuk tidak mempunyai etos kerja. Demikian juga halnya dengan jamaah An-Nadzir yang menganjurkan dan memotivasi umat Islam untuk bekerja dengan harapan mendapat keridhaan Allah. Dengan asumsi ini, cukup jelas bahwa secara normatif dan empiris, kesalehan sosial dapat mempengaruhi produktivitas ekonomi dan perilaku sosial selama ajaran agama dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh dalam rangka terciptanya masyarakat mandiri serta terwujudnya kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

An-Jamaah An-nadzir merupakan jamaah keagamaan yang mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu ekonomi maupun sosial. Meskipun sebagian masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap mereka, akan tetapi secara teologis, hingga saat ini belum ada alasan untuk menyatakan Jamaah An-Nadzir adalah Jamaah yang sesat. Mereka tidak melanggar atau keluar dari dasar teologi Islam pada umumnya. Akan tetapi mereka

hanya “berbeda” dalam hal re-interpretasi kehidupan nabi yang secara total yang berupaya dipraktikkan terutama dalam hal penampilan fisik. Memanjangkan rambut, memakai sorban, dan memakai jubah adalah upaya untuk “mengikuti” cara berpakaian Nabi Muhammad. Mereka juga berbeda dalam penentuan waktu dan pelaksanaan shalat. Dalam hal pelaksanaan shalat, perbedaan nampak bukan pada gerakan dasar, melainkan lebih pada teknis pelaksanaan. Jamaah ini cenderung mengerjakan waktu shalat di akhir waktu, misalnya shalat dhuhur di akhir waktu atau berdempetan dengan awal masuknya waktu ashar.

Jamaah an-Nadzir dapat dikategorikan sebagai jamaah yang mempraktikkan pemberdayaan sosial-ekonomi yang lebih mandiri. Pemberdayaan yang berusaha menghidupkan dan menginternalisasi kehidupan kenabian dalam aktivitas sosial-ekonomi, meskipun hingga saat ini kesalehan jamaah masih diutamakan. Gerakan keagamaan semacam ini merupakan fakta dan realitas dunia saat ini telah jauh dari model masyarakat yang dicitacitakan oleh Nabi Muhammad. Karena itu, mereka berupaya mengembalikan semangat kenabian tersebut dalam kehidupan social ekonomi. Menurut jamaah An-Nadzir, hanya dengan membangkitkan kembali semangat kenabian, persoalan besar yang dihadapi oleh manusia akan dapat teratasi. Membangkitkan semangat kenabian tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga diterjemahkan dalam bentuk nyata terutama tampilan fisik dan praktik sosial-ekonomi.

Jamaah an-Nadzir berupaya menghidupkan semangat kenabian dalam jamaah mereka, tetapi mereka tidak mengagendakan dakwah keluar. Dengan kata lain, sifat mereka cenderung eksklusif tetapi tetap terbuka. Mereka

eksklusif dalam hal ajaran agama. Tidak ada dialog untuk persoalan keagamaan, tetapi terbuka dalam hubungan ekonomi dan sosial. Oleh karena tidak bersifat ekspansif, maka benturan antara kelompok an-Nadzir dengan masyarakat atau dengan organisasi lain dapat terhindarkan. Jamaah an-Nadzir dapat menerima dan diterima baik oleh orang di lingkungan masyarakat sekitar Mawang, karena mereka membuka diri kepada masyarakat sekitar terutama di sektor ekonomi dengan jalur pemberdayaan. Anggota jamaah an-Nadzir banyak menjadi tenaga kerja di kebun dan sawah milik masyarakat lokal. Mereka memiliki pelanggan bengkel, pembeli di pasar, pengisian ulang air galon, cuci motor dari masyarakat luar.

Gerakan pemberdayaan sosial-ekonomi jamaah an-Nadzir lebih berorientasi pada kesalehan sosial dan keselamatan individual dalam rangka tercapainya dan terciptanya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, menegakkan syariat dan hukum Allah harus dimulai dari masing-masing individu dan kelompok sebagai kunci kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut mereka tidak menganggap pendirian negara Islam sebagai sesuatu yang penting. Dalam hal ini, sikap anti pendirian negara Islam merupakan sikap positif dari gerakan keagamaan An-Nadzir. Mereka tidak menjadikan pendirian negara Islam sebagai agenda perjuangan, sebab itu mereka menolak penggunaan jalur politik, tetapi mereka lebih menitikberatkan nilai Islam pada kepentingan sosial-ekonomi. Perjuangan penegakan Syariat Islam adalah perjuangan individual karena keselamatan akhirat memang bersifat *nafsi-nafsi* atau individual. Selain itu, gerakan Jamaah ini bersifat pasif dan lebih berorientasi pada kesalehan Jamaah. Sifat pasif ini menyebabkan benturan dengan masyarakat tidak terjadi karena mereka

tidak mengkampanyekan ajaran dan pemahaman mereka kepada masyarakat umum.

Sebagai sebuah komunitas keagamaan, mereka telah melakukan sesuatu yang baik. Mereka mampu mengembangkan kemampuan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kreatif dan membantu masyarakat sekitar untuk melakukan pengelolaan tanah tanpa berupaya menjadikan masyarakat tersebut sebagai bagian dari jamaah mereka. Dalam hal ajaran agama, mereka bersifat pasif. Mereka terbuka dan menerima siapapun yang datang berkunjung, bertamu, dan bertanya tentang pemahaman keagamaan mereka, tetapi mereka tidak ingin melakukan dialog kebenaran, karena mereka telah meyakini bahwa kebenaran yang mereka pegangi adalah kebenaran yang sesungguhnya.

Saran dan Rekomendasi

Dari studi di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal: a) Pemerintah secara intensif bekerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial dengan jama'ah An-Nadzir; b) Masyarakat umum agar lebih bijaksana berpikir, menghargai perbedaan persepsi dan tidak mudah melabeli jamaah An-Nadzir dengan stigma yang negatif, dengan melihat mereka secara proporsional yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; c) Pemerintah membuat kebijakan keagamaan yang tidak berpihak pada kepentingan kelompok dan arus *mainstream* saja, tetapi melihat hingga akar rumput bagaimana kelompok-kelompok keagamaan *non-mainstream* dengan tujuan memperoleh strategi penanganan gerakan keagamaan menghindari konflik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, H. A. Mukti. 1975. *Agama dan Pembangunan di Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Biro Humas Departemen Agama RI.
- Al-Qur'an.
- Asy'arie, Musa. 1997. *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI.
- Banks, Sarah. 2001. *Ethics and Values in Social Work*. New York: Palgrave.
- Craig, G dan Mayo (ed.) 1995. *Community Empowerment: A Reader in participation and Development*. London: Zed Books.
- Coleman, James S. 1992. *Rational Choice Theory, Advocacy and Critique*. London: Sage Publications.
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hakim, Ramlah. 2007. "Faham Lathiful Akbar An-Nadzir" dalam Kadir Ahmad (ed.) *Varian Gerakan Keagamaan*. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan Agama Makassar.
- Hanna, M.G dan B. Robinson. 1994. *Strategies for Community Empowerment: Direct-Action and Transformative Approaches to Social Change Practice*. New York: The Edwin Mellen Press.
- Hikmat, Harry. 1999. "Pembangunan Sosial yang Berpusatkan pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis". *Makalah*. Bandung: Unpad.
- _____.2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power. 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025; Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Kotze, D.C. dan R. Klaus (ed.). 1984."Contradiction and Assumption in Community Development". dalam *Community Development Journal* Vol. 22. No. 1.
- Kuntowijoyo. 2004. *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Jakarta: Penerbit Teraju.
- MacArdle, J. 1989. "Community Development Tools of Trade". dalam *Community Quartely Journal* Vol. 16.
- Midgley, James. 1997. *Social Welfare in Global Context*. USA: Sage Publications, Inc. Pals,
- Daniel L. 2006. *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Paul, S. 1987. *Community Participation in Development Project*. New York: World Bank.
- Pranarka dan Vidhyandika M. 1996. "Pemberdayaan" dalam Onny S.P dan A.M.W. Pranarka (ed.). Jakarta: CSIS.
- Rahardjo, Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Rapparort, J. 1987. "Terms of Empowerment: Toward a Theory for Community Psychology". dalam *American Journal of Community Psychology*, Vol. 15. No 2.
- Reamer, Frederic G. 1999. *Social Work Values and Ethics*. Edisi kedua. New York: Columbia University Press.
- Ruslani. 2000. *Wacana Spiritualitas Timur dan Barat*. Yogyakarta: Qalam
- Rojek, Chris. 1986. "The Subject in Social Work". Dalam *British Journal of Social Work* 16 (1) 65-79.
- Santoso, Thomas. 2006. "Kata Pengantar" dalam M Zainuddin. *Kesalehan Normatif dan Sosial*. Malang: UIN Malang Press.
- Soetarso. 1968. *Praktik Pekerjaan Sosial*. Jilid I. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

- Sulistiati. 2004. "Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial", dalam Edi Suharto, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI.
- Turner, Brian S. 1991. *Religion and Social Theory*. London: Sage Publication.
- _____.1992. *Sosiologi Islam: Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weber, Max. 1956. *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribners Son.
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowito. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zainuddin, M. 2007. *Kesalehan Normatif dan Sosial*. Malang: UIN Malang Press.

Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Memahami Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus

Arifuddin Ismail

Peneliti Balai Litbang Agama Semarang

Abstract

This study is intended to explore program of activities which related to the forming of religious thinking of students at the University of Gadjah Mada in Yogyakarta. This research has applied mixed methods, qualitatively and quantitatively. This investigation shows the religious programs of students activities have been planned in line with formal directions of curriculum, with two credits hours of class. The implementation of the class seems varied, radically, moderately or even plurally. The variations were related with the way and touching of teaching when the students attending class assistances and followed by rutin campus of Alquran recitations. Some others get from extra campus organization activities. Those varians are actually shows the dynamic of religious life in the campus, and in fact those event can not detected by the campus administration.

Keyweord: thought, religious movement, radicalis, moderate and plurally.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mengetahui program kegiatan yang terkait dengan pembentukan pemikiran keagamaan mahasiswa di UGM. Penelitian ini menggunakan mixed methods, yaitu penggabungan metode kualitatif dengan kuantitatif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa program kegiatan keagamaan mahasiswa UGM sudah dirancang sesuai dengan aturan formal yaitu menuangkan ke dalam perkuliahan dengan 2 SKS, di samping itu diberi muatan penguatan melalui program asistensi sebagai suplemen. Implementasi pembelajaran keagamaan itu tampak bervariasi, ada yang radikal, moderat bahkan cenderung pluralis. Varian itu rupanya terkait dengan sentuhan ketika mengikuti program asistensi yang dilanjutkan dengan pengajian rutinitas kampus, dan ada juga yang diperoleh melalui aktivitas mengikuti organisasi ekstra universitas. Varian itu menunjukkan adanya dinamika keberagaman sekaligus menciptakan potensi konflik yang sebelumnya tidak terdeteksi bahkan tidak terprediksi oleh pihak penyelenggara universitas

Katakunci: pemikiran, gerakan, keagamaan, pluralitas, moderat dan radikal.

Latar Belakang

Perkembangan pemikiran keagamaan terus berjalan dan merambah ke dunia kampus, terutama kalangan

mahasiswa. Beberapa Perguruan Tinggi (Universitas dan Institut) di Indonesia, semakin marak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat dinamis dan berkembang. Kegiatan keagamaan

tersebut ada yang dikondisikan oleh kampus, tetapi masih lebih banyak yang dikondisikan dari luar kampus. Beberapa kelompok keagamaan dari luar kampus yang merambah masuk ke kampus, menyebarkan sayapnya seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir (HT), Jamaah Tabligh (JT), Tarbiyah, Salafiyah, Wahdah Islamiyah dan lain-lain. Kelompok keagamaan ini melakukan pembinaan di kalangan mahasiswa, sebagaimana temuan para peneliti Balitbang Departemen Agama. Bahkan jauh sebelum kelompok-kelompok keagamaan tersebut melebarkan sayapnya di kampus, organisasi ekstra universitas seperti HMI, PMII dan IMM sudah duluan berkibrah di kampus melakukan pembinaan dan pengembangan SDM mahasiswa.

Salah satu cara penyebaran pemikiran dan gerakan keagamaan yang dilakukan kelompok salafi di kalangan mahasiswa di berbagai kampus adalah dengan melakukan kegiatan keagamaan di masjid atau mushallah kampus dalam bentuk halaqah dan daurah. Mereka mengusung simbol-simbol tertentu dalam komunitas tersebut yang nampak sebagai (seolah-olah) identitas Islam, yaitu memelihara jenggot, bercelana cingkrang, berjilbab besar, bahkan menggunakan penutup muka (cadar). Usungan Identitas tersebut dianggap sebagai kebangkitan Islam. Mereka menjadikan ekspresi kebudayaan dalam bentuk simbol keagamaan untuk menegaskan identitas kelompoknya. Aktifitas keagamaan yang diikuti dengan memakai simbol-simbol tersebut dapat diamati di berbagai masjid atau mushallah di beberapa kampus di berbagai daerah. Kebanyakan dari aktivis tersebut sering memanfaatkan waktunya untuk membahas materi keagamaan. Namun dalam waktu tertentu mereka juga membahas tentang materi lainnya

yang terkait dengan perkuliahan mereka.

Berangkat dari latar belakang tersebut kiranya penting untuk dilakukan penelitian mengenai varian pemikiran keagamaan dan gerakan keagamaan mahasiswa di Universitas Gajah Mada sebagai Universitas negeri (PTU) yang tidak berafiliasi ke Kementerian Agama.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka diasumsikan bahwa dengan adanya varian pemikiran keagamaan, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap gerakan keagamaan mahasiswa. Dari sini dirumuskan masalah penelitian, yaitu: "Bagaimana pemikiran dan gerakan keagamaan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta?"

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran tentang peta pemikiran keagamaan mahasiswa dan signifikansi pengaruh pemikiran keagamaan terhadap gerakan keagamaan mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan menambah bahan kajian terhadap corak pemikiran dan gerakan keagamaan mahasiswa di era pasca Reformasi. Sedangkan secara praktis hasil penelitian ini memiliki nilai penting bagi pihak Universitas Gajah Mada, demikian pula pemerintah, terutama Kementerian Agama RI, cq. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait dengan pembinaan kehidupan beragama bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan selama 6 bulan mulai Januari sampai Juni 2012 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tahapan yang dilalui yakni persiapan, mencari data sekunder melalui pembacaan literatur, untuk pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan *mixed method*⁸ atau menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengembangkan wawancara mendalam, pengamatan langsung, dibantu dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengacu pada unsur-unsur atau variabel penelitian yang ada.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggali fakta-fakta dengan menggunakan angket yang berisi sejumlah pernyataan yang merefleksikan pengaruh pemikiran keagamaan, jaringan komunikasi dan motivasi keagamaan mahasiswa terhadap gerakan keagamaan. Penelitian ini menempatkan pemikiran keagamaan sebagai variabel bebas, gerakan keagamaan sebagai variabel tergantung, jaringan komunikasi dan motivasi mahasiswa sebagai variabel mediator (*intervening*). Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpul, data kualitatif diolah dan dianalisis secara deskriptif; sedang data yang sifatnya kuantitatif dilakukan sesuai prosedur statistik, ditabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif persentase, penghitungan mean dan uji korelasional.

Program Keagamaan di UGM

Universitas Gajah Mada telah mencanangkan program pendidikan dan pembelajaran agama, sebagaimana perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Secara formal pendidikan dan pengajaran

agama di Universitas Gajah Mada dimasukkan ke dalam program tersendiri. Program pembelajaran Matapelajaran Agama dibagi 2, yaitu: 1) agama 1 (satu), di diajarkan materi standar, sebagaimana yang diterbitkan Kementerian Agama (Islam Disiplin Ilmu); 2) materi Islam Kontekstual, awalnya dikordinir langsung oleh universitas, tetapi kemudian sekarang diberikan ke fakultas masing-masing untuk menyesuaikan dengan disiplin ilmu di fakultas. Jadi materinya dirumuskan di fakultas dengan melakukan penyesuaian- penyesuaian dengan mata kuliah inti di fakultas. Misalnya kalau terkait dengan persoalan pertanian tentu dicarikan penyesuaian dengan persoalan pertanian yang ada di dalam Islam.

Mata Pelajaran Agama secara formal hanya 2 SKS, tetapi pihak Universitas punya kepedulian terhadap mahasiswa. Oleh karena itu dibuatkan program Asistensi Agama Islam (AAI) sebagai program *Suplemen* untuk membantu mengenalkan Islam kepada mahasiswa walaupun baru dasar-dasarnya, termasuk pembimbingan membaca al-Quran. Apalagi latar belakang pendidikan yang masuk di UGM kebanyakan bukan dari sekolah agama atau pesantren, tetapi dari sekolah umum.

Selain program pembelajaran keagamaan yang secara formal diberlakukan di UGM, ada beberapa kegiatan lain yang bersifat ekstra, seperti kegiatan "ngaji" dan "zikir" bersama yang diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika di lingkungan universitas dibawah kordinasi "*Majelis Dzikir dan Do'a*". Kegiatan tersebut dimunculkan oleh para dosen yang bertanggungjawab untuk hal-hal yang terkait dengan program keagamaan di lingkungan UGM. Program tersebut dimaksudkan untuk menjadi penyejuk hati, dan mendinginkan pikiran bagi para civitas akademika. Program ini dianggap sangat

membantu, dari sisi manfaat dan syiarnya cukup bagus, artinya ini adalah wujud kepedulian terhadap agama apalagi yang diurus anak-anak muda dari kalangan terpelajar.

Program yang dikondisikan dari universitas baik yang secara formal atau secara resmi masuk dalam pembiayaan universitas maupun yang tidak (biaya sendiri atau inisiatif pengurus), tampak semuanya bisa berjalan. Hanya pihak universitas tidak bisa mengetahui persis pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, baik yang dilakukan secara rutin yang masuk dalam program asistensi (AAI) melalui pengajian-pengajian kecil apalagi muatan atau materi dari kegiatan tersebut.

Yayasan Shalahuddin: Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Universitas

Kehadiran Yayasan Shalahuddin di UGM merupakan anugerah tersendiri, karena mampu menggairahkan dinamika keberagaman di kampus melalui kegiatan-kegiatannya, khususnya dalam pemajuan kesadaran keber-Islam-an. Yayasan Shalahuddin otonom dalam melaksanakan program-programnya, tetapi juga ada rambu-rambu khusus yang sudah digariskan oleh Universitas agar bisa sinergis dengan program-program UGM sendiri. Program kegiatan kegiatan sudah dirancang perdua bulan, baik yang sifatnya ibadah maupun yang terkait dengan program-program pembinaan umat lainnya. Khusus untuk pengajian yang bertujuan pengayaan dan pendalaman materi keilmuan, ditangani secara khusus. Misalnya untuk pengajian Tafsir Al-Qur'an, dan Hadits Yayasan Shalahuddin selalu mengundang ustadz alumni dari Madinah berinisial MR. Tetapi tema-tema yang terkait dengan isu kontemporer dan tematik, ustadz nya sering berganti-ganti. Walaupun telah berjalan sebagaimana rencana,

namun sampai saat ini pengelola Yayasan Shalahuddin merasa belum begitu optimal, tetapi selalu mengupayakan untuk melakukan yang terbaik dalam memajukan program-program keagamaan di UGM.

Selain itu itu, juga ada kajian yang diorganisir oleh kelompok-kelompok salafi seperti HTI, Salafi, Wahdah, KAMMI, Tarbiyah dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini juga melakukan pengajian di masjid kampus, tetapi terkesan diam-diam dengan tidak memberitahukan ke pengurus yayasan Shalahuddin. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dimaksudkan sebagai media pendalaman ajaran Islam. Kelompok-kelompok kajian ini tidak memiliki jadwal tetap, namun secara temporer mereka lakukan berdasarkan waktu luang dan kesepakatan masing-masing peserta diskusi.

Organisasi kemahasiswaan Ekstra Universitas, seperti HMI, PMII, IMM dan semacamnya juga sering melakukan kegiatan pengajian dan diskusi di luar jama'ah Shalahuddin. Tempatnya berpindah-pindah dari fakultas ke fakultas. Misalnya diskusi yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di lingkungan UGM, tepatnya di masjid Ibnu Sina Fakultas Kedokteran, pada hari Minggu, 6 Mei 2012 yang lalu, adalah Khotmil Qur'an dan kajian kitab Bidayatul Hidayah, yang dibawakan oleh ustadz Mustafid (pimpinan pesantren Mlangi, Yogyakarta). Kegiatan ini dimulai sejak pukul 09.00-12.00 WIB. Peserta yang hadir, selain mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam PMII, juga ada mahasiswa-mahasiswa lain yang tertarik dengan kajian ini. Bahkan, karena PMII adalah organisasi yang lintas kampus, kajian ini juga dihadiri oleh beberapa orang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perkembangan kegiatan ini adalah sesuatu yang positif karena secara intens mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang agama Islam. Tidak seperti program AAI yang biasanya hanya dilakukan di semester satu dan dua, dan tidak berkelanjutan. Padahal kalau kita melihat manfaatnya mestinya pembelajaran agama Islam ini bisa lebih intensif lagi dan berkelanjutan, agar pemahaman Islam mahasiswa bisa lebih baik dan lebih mantap lagi.

Pemikiran Keagamaan Mahasiswa

Dalam beberapa hal terkait dengan ke-Islaman, mahasiswa memiliki pemikiran tersendiri, misalnya: kepemimpinan yang bukan khilafah, seperti negara kita saat ini yang menganut sistem negara barat yang kafir ini pasti tidak akan pernah diridhai oleh Allah SWT. Makanya negara kita sampai saat ini tidak maju-maju, baik peradaban maupun kesejahteraan.

Ketika membincang tentang tema Islam saat ini/kekinian di Indonesia, sebagian besar mahasiswa memberikan jawaban, bahwa Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh manusia Indonesia saat ini, hanya dimaknai sebagai *agama ritual* dan *keturunan*. Orang Indonesia ber-Islam itu karena mereka lahir dari orang tua dan masyarakat yang beragama Islam. Tetapi pada dasarnya mereka tidak memahami bagaimana hakikat ber-Islam yang sesungguhnya (baca: Islam Kaaffah). Islam juga hanya dimaknai sebagai sekumpulan kewajiban dalam bentuk ritual yang harus ditunaikan, tanpa mengerti lebih jauh kenapa kita harus melakukan ritual-ritual seperti shalat, puasa, zakat maupun haji tersebut. Dasar-dasar Islam yang kaaffah belum dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Ini tentu saja menjadi tugas bagi semua komponen aktivis dakwah kampus untuk menyadarkan umat Islam, agar tidak terjebak pada pemahaman-

pemahaman Islam yang dangkal seperti ini.

Mereka juga berpendapat, bahwa Islam yang dipraktekkan di Indonesia masih sangat kental unsur budaya dan tradisinya atau mereka sebut sebagai akulturasi dengan kebudayaan setempat. Hal ini harus diwaspadai, karena bisa menjerumuskan umat Islam kepada kemusyrikan, yang bisa diganjar sebagai dosa besar oleh Allah SWT. Islam harus ditafsir dan dipraktekkan sesuai dengan apa yang terjadi di Makkah dan Madinah dahulu di zaman Rasulullah SAW, agar pemahaman Islam kita tidak melenceng dari apa yang digariskan oleh-Nya.

Namun, bagi kelompok mahasiswa Islam yang lain seperti PMII dan Gusdurian, berpandangan bahwa malah menjadi tugas kita untuk menafsirkan Islam agar sesuai dengan tradisi dan kebudayaan kita di Indonesia. Karena kita memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan di mana Islam itu lahir. Sehingga, bagi kelompok mahasiswa yang tergabung di PMII dan Gusdurian ini misalnya, mereka sering mengkampanyekan jargon-jargon Islam Indonesia atau Islam Nusantara, yang dibedakan dan dikontraskan dengan Islam Arab atau Islam Wahabi. Dalam hal ini mereka sering mengutip gagasan Gus Dur tentang Pribumisasi Islam. Bahwa substansi Islam itu hanyalah tauhid, sedangkan yang lainnya adalah ekspresi dari pemahaman akan tauhid itu sendiri, yang bisa saja berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan di Indonesia, ekspresi ber-Islam komunitas-komunitas lokal kita sangat kaya dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Sehingga, kita kemudian mengenal istilah-istilah Islam yang disematkan dan bersanding dengan nama komunitas lokal tertentu; Islam Kajang, Islam Bugis, Islam Jawa, Islam Tengger, Islam Banjar, dan seterusnya.

Adapun pertanyaan yang terkait dengan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Sebagian besar menyatakan bahwa istilah fundamentalisme dan radikalisme Islam itu adalah konspirasi Barat dalam mendiskreditkan umat Islam. Bahwa Islam itu identik dengan kebodohan, tak bisa diskusi dan dialog, senang kekerasan, penyerangan tempat ibadah agama lain, bahkan radikalisme dan fundamentalisme itu juga sering diasosiasikan dengan bom bunuh diri yang menghancurkan orang lain. Padahal dalam pengertian dasarnya, radikalisme dan fundamentalisme itu adalah kembali ke akar atau dasar Islam. Sehingga, kalau diasosiasikan dalam pengertian yang positif, radikalisme dan fundamentalisme itu adalah kembali ke keotentikan (baca: purifikasi) Islam. Tetapi, karena sebagian besar media dikuasai oleh kelompok-kelompok liberal, sehingga "penampakan" wajah radikalisme dan fundamentalisme Islam selalu tampil garang dan tidak ramah. Dan hal ini menurut mahasiswa-mahasiswa UGM, disebabkan oleh konspirasi Barat dengan media yang dengan sengaja menyudutkan Islam, agar tidak bisa tampil dalam pentas peradaban dunia. Pemahaman seperti ini tentu saja diwakili oleh kelompok-kelompok Islam yang sering dilabeli eksklusif, yang dalam konteks di UGM diwakili oleh kelompok-kelompok ROHIS dan Jama'ah Shalahuddin (JS), dan juga KAMMI ataupun HTI.

Pandangan yang seperti ini tentu saja berbeda dengan pemahaman Islam yang moderat dan liberal. Dalam pandangan kelompok Islam yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah, atau PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) di kelompok mahasiswa, dan atau Islam liberal seperti JIL (Jaringan Islam Liberal), radikalisme dan fundamentalisme itu adalah tanda kejumudan berpikir dan berpandangan bahwa pintu ijtihad itu

sudah tertutup, dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang pengetahuan Islam, yang diperbolehkan berpikir dan menafsirkan ajaran-ajaran Islam. Bagi kelompok moderat dan liberal ini, orang-orang atau kelompok fundamentalis dan radikal itu selalu menafsirkan sumber-sumber hukum Islam semisal Al-Qur'an dan Al-Hadits secara literal, sehingga seringkali kesulitan untuk mendapatkan hikmah dan pengajaran di balik yang tersurat dari teks tersebut.

Belajar dari Kasus Irshad Manji

Kedatangan Irshad Manji ke Indonesia (Jakarta, Yogyakarta dan Solo) sebenarnya dimaksudkan untuk membedah buku terbarunya, *Allah, Liberty & Love*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sejatinya, diskusi buku tersebut dibahas dalam empat forum yang berbeda, yakni di gedung Salihara, Jakarta, CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) UGM, Yogyakarta, UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di LKiS Yogyakarta atas kerjasama LKiS dan Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY).

Dari keempat forum tersebut, dua di antaranya dibatalkan sebelum acara diskusi dilaksanakan, yakni di CRCS-UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan dua lainnya sempat dilaksanakan meski kemudian juga terpaksa bubar karena diserang oleh beberapa kelompok Muslim radikal.

Sehari sebelum perhelatan diskusi buku Irshad Manji di UGM tanggal 09 Mei 2012, telah dilangsungkan acara diskusi "penolakan". Diskusi tersebut dihadiri sekitar 200 orang di pelataran Gedung FISIPOL UGM. Kelompok yang menolak direpresentasikan oleh HTI, KAMMI dan Jama'ah Shalahuddin, karena mereka yang menyelenggarakan diskusi sehari sebelum rencana perhelatan

Diskusi Irshad Manji. Diskusi tersebut dihelat dengan bermaksud menggagalkan diskusi Irshad Manji keeseokan harinya. Hanya sedikit terganggu, karena tiga nara sumber yang dihadirkan tidak menyepakati niat untuk menggagalkan diskusi tgl 09 Mei 2012 tersebut. Walau demikian niat penyelenggara diskusi tetap saja berupaya menggagalkan diskusi bedah buku Irshad Manji tersebut. Alasan penolakan adalah menganggap Irshad Manji kafir dan sesat. Bagi peneliti "pengadilan," klaim sesat atau bahkan kafir terhadap pemikiran Manji ini agak menggelikan, karena ketiga orang narasumber tersebut dengan terbuka dan terus terang menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat apalagi membaca buku-buku Manji. Ketika terjadi kasus pelarangan diskusi Irshad Manji di UGM menjadi satu bukti otentik bahwa di kalangan aktivis kampus sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran fundamentalis dan radikal.

Dinamika Pemikiran Keagamaan Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan, responden memberikan data mengenai keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Responden yang mengikuti organisasi intra kampus ada sejumlah 135 orang (67,2%), dan yang tidak ikut organisasi intra kampus sebanyak 66 orang (32,8%). Alasan mereka yang aktif di organisasi intra kampus agar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Jumlah responden yang mengikuti organisasi ekstra kampus sebanyak 132 orang (65,7%) sedangkan yang tidak mengikuti adalah sebanyak 69 orang (34,3%). Mereka yang aktif di luar kampus adalah sebelumnya memang mengikuti organisasi, baik intra maupun ekstra ketika di sekolah lanjutan. Kegiatan serupa sudah dikenalkan sebelum masuk PT, siswa dibebaskan untuk mengikuti

kegiatan intra maupun ekstra. Bagi siswa yang aktif berorganisasi ketika di Sekolah Lanjutan Atas (SMA) atau sederajat, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga ke Perguruan Tinggi. Dari sini menunjukkan, setiap orang yang aktif berorganisasi secara tidak langsung membentuk pola pikirnya.

Pengaruh pemikiran keagamaan terhadap gerakan keagamaan Mahasiswa

Dari table 31 Hasil perhitungan Anova tersebut, terlihat bahwa nilai ada nilai sig, yang kurang dari 0,05 tidak ada pengaruh pemikiran keagamaan terhadap gerakan keagamaan mahasiswa UGM Yogyakarta, namun hasil tabel tersebut menunjukkan nilai sig 0,000 sehingga pemikiran keagamaan tidak mempengaruhi gerakana keagamaan. Tabel 30 menunjukkan skor konstan pengaruh pemikiran keagamaan terhadap gerakan keagamaan mahasiswa UGM Yogyakarta, yakni Sig 0,000 < 0,05. Secara skor gerakan keagamaan tidak terpengaruhi oleh pemikiran keagamaan. Namun pada tabel 32 dari hasil Analisis Korelasi menunjukkan Pengaruh variabel pemikiran keagamaan 59,2%. Sedangkan sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi gerakan keagamaan mahasiswa bisa memicu gerakan radikal karena masih memegang pemikiran tekstual, dan kurang membuka diri terhadap pemikiran dari luar.

Pengaruh pola komunikasi dan motivasi terhadap gerakan keagamaan

Tabel 21 Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Jaringan Komunikasi dan Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta dan tabel 22 Anova, di tolak karena nilai signifikan, yakni Sig 0,000. Namun hasil perhitungan analisis korelasional

besaran pengaruh variabel jaringan komunikasi dan motivasi terhadap pemikiran keagamaan adalah sebesar 44,7%. Sedangkan sisanya sebesar 55,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Di tarik benang merahnya bahwa mahasiswa yang mengikuti organisasi keagamaan sudah bersenyawa dengan kegiatannya, sehingga pemikiran keagamaan mahasiswa semakin radikal, doktrin yang diajarkan begitu kuat tidak tergoyahkan.

Pengaruh pemikiran keagamaan terhadap gerakan keagamaan melalui komunikasi, motivasi keagamaan

Tabel 33 Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Jaringan Komunikasi, Motivasi, dan Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta, memberikan informasi bahwa skor konstan adalah signifikan, yakni Sig 0,000 dan, koefisien regresi variabel jaringan komunikasi diperoleh skor Sig 0,154 > 0,05, oleh karena itu variabel jaringan komunikasi tidak berpengaruh terhadap gerakan keagamaan. Sedangkan, koefisien regresi variabel pemikiran keagamaan dan motivasi masing-masing diperoleh skor Sig 0,000 < 0,05, sehingga keduanya memiliki pengaruh terhadap gerakan keagamaan.

Hasil analisis Anova pengaruh variabel jaringan komunikasi, motivasi, dan pemikiran keagamaan dan gerakan keagamaan, Sig 0,000 yang berarti lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau Sig 0,000 < 0,05. Artinya jaringan komunikasi, motivasi, dan pemikiran keagamaan tidak berpengaruh terhadap gerakan keagamaan. Ini berarti besaran pengaruh variabel jaringan komunikasi, motivasi, dan pemikiran keagamaan terhadap gerakan keagamaan adalah sebesar 63,3%. Sedangkan sisanya sebesar 36,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Bila mahasiswa berpikir tekstual, maka akan menumbuhkan bibit-bibit gerakan radikal yang kuat, namun sebaliknya, jika berfikir kontekstual maka akan menciptakan pikiran yang moderat dan menghargai sesama. Masuknya gerakan radikalisme di perguruan tinggi umum diantaranya, *pertama*, ajaran yang diterima dalam organisasi di telan mentah-mentah, menerima ajaran agama tanpa kajian yang memadai. *Kedua*, mahasiswa yang pengetahuan keagamaan masih kurang atau jarang bersentuhan dengan agama, mahasiswa seperti ini akan dijadikan sasaran para aktivis radikalisme.

Penutup

Implementasi pembelajaran keagamaan di Universitas Gajah Mada tampak bervariasi, yaitu: ada pemikiran yang *radikal*, *moderat* bahkan ada juga yang cenderung pluralis bahkan *liberal*. Varian itu rupanya terkait dengan sentuhan ketika mengikuti program aistensi yang dilanjutkan dengan pengajian rutinitas kampus, ada juga yang diperoleh melalui aktivitas mengikuti organisasi ekstra universitas, dan aktivitas bersama kelompok salafi. Varian pemikiran itu juga sekaligus menunjukkan adanya pengaruh terhadap dinamika gerakan keagamaan. Realitas tersebut sekaligus menjadi benih terciptanya potensi konflik yang sebelumnya tidak terdeteksi bahkan tidak terprediksi oleh pihak penyelenggara universitas.

Berdasar pada kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan; a) Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, terutama pada beberapa aspek yang terkait dengan pemikiran dan gerakan keagamaan secara menyeluruh, sehingga secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan; b) Berangkat dari adanya temuan tentang

pemikiran keagamaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap gerakan keagamaannya adalah suatu realitas yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus, karena di samping sebagai benih kerawanan terjadinya konflik horizontal juga bisa mengancam eksistensi

universitas sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan rasionalitas. Realitas ini menjadi renungan untuk merancang formulasi pembelajaran keagamaan yang lebih kondusif guna membangun suasana keilmuan dan keilmiahan yang lebih demokratis.

Daftar Pustaka

- Lihat Nurhayati Djamas (Ed.), 2009. *Pola Aktifitas Keagamaan Mahasiswa Islam Perguruan Tinggi Umum Negeri Pasca Reformasi*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat.
- Irwan Abdullah, 2007. *Kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Zaki Mubarak, 2007. *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Leonard Binder, 1988. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (Chicago: The University of Chicago Press).
- John W. Creswell, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Adib Zain (Ketua Umum PMII Cabang Sleman), 7 Mei 2012.

Lampiran

Tabel 15:
Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Jaringan Komunikasi terhadap pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model		Coefficients ^a			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Std. Error			
		B					
1	(Constant)	24.296	2.150		11.298	.000	
	KOMUNIKASI	1.128	.110	.588	10.256	.000	

a. Dependent Variable: PEMIKIRAN

Tabel 16:
Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Jaringan Komunikasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model		ANOVA ^b				
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12738.883	1	12738.883	105.195	.000 ^a
	Residual	24098.490	199	121.098		
	Total	36837.373	200			

a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI
b. Dependent Variable: PEMIKIRAN

Tabel 17:
Hasil Analisis Korelasi Variabel Jaringan Komunikasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.588 ^a	.346	.343	11.004	1.698
a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI					
b. Dependent Variable: PEMIKIRAN					

Tabel 18:
Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.297	2.786		6.927	.000
	MOTIVASI	.499	.052	.562	9.576	.000
a. Dependent Variable: PEMIKIRAN						

Tabel 19:
Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11619.934	1	11619.934	91.697	.000 ^a
	Residual	25217.439	199	126.721		
	Total	36837.373	200			
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI						
b. Dependent Variable: PEMIKIRAN						

Tabel 20:
Hasil Analisis Korelasi Variabel Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.562 ^a	.315	.312	11.257	1.785
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI					
b. Dependent Variable: PEMIKIRAN					

Tabel 21:

Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Jaringan Komunikasi dan Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.470	2.630		5.121	.000
	KOMUNIKASI	.801	.114	.418	7.048	.000
	MOTIVASI	.327	.053	.369	6.219	.000

a. Dependent Variable: PEMIKIRAN

Tabel 22:

Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Jaringan Komunikasi dan Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16677.061	2	8338.530	81.895	.000 ^a
	Residual	20160.312	198	101.820		
	Total	36837.373	200			

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMUNIKASI
b. Dependent Variable: PEMIKIRAN

Tabel 23:

Hasil Analisis Korelasi Variabel Jaringan Komunikasi dan Motivasi terhadap Pemikiran Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.673 ^a	.453	.447	10.091	1.821	

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMUNIKASI
b. Dependent Variable: PEMIKIRAN

Tabel 24:

Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Jaringan Komunikasi terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.053	2.615		16.080	.000
	KOMUNIKASI	1.192	.134	.534	8.911	.000

a. Dependent Variable: GERAKAN

Tabel 25:
Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Jaringan Komunikasi terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14220.772	1	14220.772	79.401	.000 ^a
	Residual	35641.029	199	179.101		
	Total	49861.801	200			
a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI						
b. Dependent Variable: GERAKAN						

Tabel 26:
Hasil Analisis Korelasi Variabel Jaringan Komunikasi terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.534 ^a	.285	.282	13.383	1.637
a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI					
b. Dependent Variable: GERAKAN					

Tabel 27
Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Motivasi terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.831	3.124		10.189	.000
	MOTIVASI	.623	.058	.603	10.672	.000
a. Dependent Variable: GERAKAN						

Tabel 28:
Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Motivasi terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18149.836	1	18149.836	113.894	.000 ^a
	Residual	31711.965	199	159.357		
	Total	49861.801	200			
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI						
b. Dependent Variable: GERAKAN						

Tabel 29:
Hasil Analisis Korelasi Variabel Motivasi terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.603 ^a	.364	.361	12.624	1.774

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI
b. Dependent Variable: GERAKAN

Tabel 30:
Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Variabel Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.615	2.468		9.569	.000
	PEMIKIRAN	.895	.053	.770	17.002	.000

a. Dependent Variable: GERAKAN

Tabel 31:
Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29532.319	1	29532.319	289.084	.000 ^a
	Residual	20329.482	199	102.158		
	Total	49861.801	200			

a. Predictors: (Constant), PEMIKIRAN
b. Dependent Variable: GERAKAN

Tabel 32:
Hasil Analisis Korelasi Variabel Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.770 ^a	.592	.590	10.107	1.973

a. Predictors: (Constant), PEMIKIRAN
b. Dependent Variable: GERAKAN

TABEL 33
Hasil Uji Koefisien Regresi Pengaruh Jaringan Komunikasi, Motivasi, dan Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model		Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			
		B	Std. Error	Beta					Zero-order	Partial
1	(Constant)	17.283	2.652		6.516	.000				
	KOMUNIKASI	.172	.121	.077	1.430	.154	.534	.101	.061	
	MOTIVASI	.243	.055	.235	4.453	.000	.603	.302	.191	
	PEMIKIRAN	.689	.067	.592	10.231	.000	.770	.589	.438	

a. Dependent Variable: GERAKAN

Tabel 34:

Hasil Analisis Regresi tentang Pengaruh Jaringan Komunikasi, Motivasi, dan Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan Mahasiswa UGM Yogyakarta

Model		ANOVA ^b				
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31851.415	3	10617.138	116.132	.000 ^a
	Residual	18010.386	197	91.423		
	Total	49861.801	200			

a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI, MOTIVASI, PEMIKIRAN
 b. Dependent Variable: GERAKAN

Tabel 35:

Hasil Analisis Korelasi Variabel Jaringan Komunikasi, Motivasi, dan Pemikiran Keagamaan terhadap Gerakan Keagamaan

Model		Model Summary ^b				
		R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1		.799 ^a	.639	.633	9.562	1.909

a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI, MOTIVASI, PEMIKIRAN
 b. Dependent Variable: GERAKAN

Ajaran-ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Berpotensi Menimbulkan Konflik

Amir Mu'allim

Peneliti Pusat Studi Hukum Islam, Pascasarjana FIAI, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Abstract

Partial understanding of anything will be easier to raise conflict. One of the factors is textual understanding. Conflict between the Council of Alquran Interpretation with other Moslem organizations is on the the differences of the perception furu'iyah problems. Problems of furu'iyah, such as number of units (rakaat) taraweh prayer, carry out of burying corpse, forbidden to raise some animal (dog) have been become polemic among member of society. This research is an investigation on the root of conflict, then trying to gain the solution that might be useful for regions aswell as government figures to overcome the phenomenon.

Keywords: Alquran interpretation, internal conflict, Islamis purification, textual interpretation, revitalization

Abstrak

Pemahaman yang parsial di ranah apa pun rawan memunculkan konflik. Salah satunya disebabkan oleh pemahaman secara tekstual menjadi pemicu. Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dengan ormas Islam lain berada pada tataran perbedaan pandangan pada masalah furu'iyah. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi konflik antara MTA dengan ormas lain. Persoalan furu'iyah seperti bilangan sholat tarawih, memelihara jenazah dan keharaman binatang (anjing) memunculkan polemik di kalangan masyarakat yang kerap muncul. Studi ini hendak mengkaji persoalan tersebut dengan mencari akar konflik, kemudian menawarkan solusi yang dapat ditempuh oleh tokoh agama maupun pemerintah. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif pada kasus konflik MTA dengan ormas-ormas lainnya.

Keywords: Majelis Tafsir Al-Qur'an, konflik internal, Islam puritan, tafsir tekstual, revitalisasi.

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia. (Mark Woodward. 1998: 91). Salah satu pluralitas Indonesia adalah agama dan kepercayaan. Disisi lain, kemajemukan menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah yang besar, perbedaan apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana dapat memicu pertikaian yang luas. (Wahyu Paramudya. 2005: 277). Satu diantara pluralitas Indonesia adalah agama dan keyakinan dan ini merupakan konflik

yang paling banyak terjadi. Menurut data Setara Institute mencatat lebih dari 300 kekerasan atas nama agama pada tahun ini. (Afrianto Budi. 2012., dalam <http://politik.kompasiana.com>). Konflik tidak selalu antar agama tetapi juga konflik dalam internal agama itu sendiri, termasuk Islam.

Konflik abadi dalam internal umat Islam di Indonesia bukanlah antara kelompok Sunni dan Syiah sebagaimana negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah pada umumnya, tetapi antara

Islam puritan dan tradisional. Deliar Noer memposisikan kondisi tersebut dalam dua paradigma yaitu Islam tradisional dan Islam modern yang dilihat dari 3 aspek, diantaranya; semangat pemurnian ajaran, sikap terhadap tradisi bermazhab, dan sikap terhadap perubahan dan rasionalitas. (Deliar Noer. 1980).

Persoalan yang kini muncul sesuai dengan tesisnya Deliar Noer diatas adalah konflik antara MTA dengan ormas Islam yang lain, sebagai representasi antara Islam Puritan dan Tradisional. Aktifitas MTA di beberapa daerah telah menimbulkan konflik, sebut misalnya dikutip dari situs *Metro TV*, puluhan aktivis dari GP Anshor, Fatayat, IPNU-IPPNU, PMII Kudus, dan Banser Kudus Sabtu (28/1) mendatangi Gedung Ngasirah di Jalan Jendral Sudirman Kudus, tempat pengajian MTA digelar. Mereka meminta penyelenggara segera membubarkan diri. Alasannya, ajaran MTA radikal dan menafsirkan Alquran seenaknya sendiri. Demikian juga dengan pemberitaan Rakyat Merdeka Online pada hari Minggu 29 Januari 2012, acara pelantikan pengurus Majelis Tafsir Alquran yang disertai pengajian di Kudus dibubarkan aktivis Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. (<http://www.rmol.com>)

Dalam penelusuran peneliti, juga ditemukan pengajian di Jawa Timur yang mempersoalkan ajaran-ajaran MTA. (Pengajian KH.Marzuki di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang). Demikian juga dijumpai adanya pernyataan sikap para ulama di Kabupaten Purworejo, para kiai merasa keberatan dengan materi dan metode pendekatan yang dilakukan MTA dalam melakukan dakwah. (Suara Merdeka 26 Juni 2011).

Menanggapi semua tuduhan-tuduhan tersebut, MTA memberikan pernyataannya sebagai sikap resminya menepis semua tuduhan yang

menganggap sesat ajarannya. (<http://mta-online.com>). Bagaikan gayung bersambut, ormas Islam lainnya memberikan pernyataan, misalnya dari Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, sebagaimana dikutip dari situs harian *Republika* tanggal 29 Januari 2012. Menurutnya aksi tersebut betul-betul tidak sejalan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Tindakan pembubaran paksa bertentangan dengan semangat kerukunan antar umat beragama. (<http://www.republika.co.id> tanggal 29 Januari 2012).

Jika persoalan ini sudah dibagi dengan umat Islam, maka sangat mungkin akan terjadi konflik-konflik horisontal internal umat Islam, terlepas apakah salah atau benar dari kubu kedua belah pihak. Tetapi kondisi ini sangat tidak kondusif dan tidak produktif dalam iklim demokrasi di Indonesia, sangat mungkin akan menjadi komoditi politik untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, oleh sebab itu perlu adanya jalan keluar sebagai reaksi atas timbulnya beberapa konflik horisontal di daerah-daerah sebagaimana contoh diatas.

Penelitian ini ingin menggali ajaran-ajaran purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA) yang berpotensi menimbulkan konflik. Ajaran-ajaran purifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ajaran yang dikemas dalam media publik, sekaligus mencari model jalan keluar sebagai resolusi konflik antar ormas Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti ingin fokus membedah pada tiga persoalan utama, yaitu; a) bagaimanakah ajaran pemurnian Islam menurut MTA yang dipublikasikan dalam media publik?, b) apasajakah ajaran-ajaran purifikasi Islam MTA yang berpotensi menimbulkan konflik dengan ormas

Islam lainnya?, dan (3) apa model solusi konflik yang tepat untuk menangani konflik antara MTA dengan ormas Islam lainnya?

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk mengetahui ajaran-ajaran pemurnian Islam menurut MTA yang dipublikasikan dalam media-media publik; buku, majalah, buletin, brosur dan karya-karya sejenis dalam bentuk teks. Temuan ini sangat penting sebagai data riil ajaran pemurnian Islam MTA yang telah disosialisasikan dan bentuk karya tulis baik yang dijual atau dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. *Kedua*, untuk mengetahui ajaran purifikasi Islam menurut MTA yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat muslim lainnya. Temuan ini sangat penting karena sumber dari persoalan terjadinya konflik ada pada temuan ini. Dan *ketiga*, untuk menemukan model solusi konflik yang tepat untuk menanggapi konflik antara MTA dengan ormas Islam lainnya. Temuan ini merupakan solusi dari persoalan, sehingga temuan ini dapat memberikan rekomendasi teknis bagaimana memecahkan masalah antara MTA dengan ormas-ormas Islam lainnya.

Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang secara khusus mengambil obyek MTA sebagai fokus kajiannya, diantaranya adalah: *Pertama*, penelitian Ariyanto (2010) tentang *Strategi Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Melalui Radio MTA 107,9 FM Surakarta*. *Kedua*, penelitian Rohman (2010), tentang *Hubungan antara pengetahuan tentang dakwah MTA dengan sikap terhadap tradisi dan tradisi yang dianut..* *Ketiga*, Penelitian tentang *Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat di Kota*

Surakarta (Solo) Jawa Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kompetitif yang didanai Puslitbang kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Kemenag RI 2011.

Kemudian, penelitian yang berkaitan dengan resolusi konflik yang bernuansa agama dapat di temukan pada penelitian; *pertama*: Tualeka, 2010, tentang *Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama*. *Kedua*, Ma'arif Jamuin (2004) tentang *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama*. *Jamuin menjelaskan bahwa asal mula konflik agama pada umumnya bersumber pada adanya klaim kebenaran*.

Dari penelitian-penelitian tersebut diatas, sepanjang penelusuran peneliti, belum menemukan secara khusus penelitian yang membahas ajaran purifikasi Islam MTA yang dipublikasikan khususnya buku-buku dan sejenisnya, dan model penyelesaian konflik antara MTA dengan ormas lainnya. Sudah ada beberapa penelitian sebagaimana penelitian Ariyanto (2010) diatas tetapi belum ada pemilihan dimana dakwah MTA yang berpotensi konflik. Demikian juga disertasinya Muthoharun Jinan, tentang *Penyebaran Gerakan Purifikasi Islam di Pedesaan Studi Kasus Majelis Tafsir Alquran*. Penelitian Jinan ini juga tidak ada pemilahan ajaran-ajaran pemurnian Islam ala MTA yang berpotensi konflik dari sumber publikasi ilmiah khususnya buku-buku dan karya lain yang sejenis.

Penelitian yang justru dekat dengan penelitian ini adalah penelitian tentang *Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat di Kota Surakarta (Solo) Jawa Tengah*. Penelitian ini adalah penelitian kompetitif yang didanai Puslitbang kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Kemenag RI 2011 dengan fokus sebagaimana disebutkan diatas. Perbedaan mendasar dari penelitian yang sedang peneliti lakukan ini adalah; peneliti mendalami ajaran MTA dari sisi publikasinya dan mencari solusi atas konflik yang terjadi akibat dari

ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh MTA. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin menggali ajaran pada dataran yang lebih spesifik tidak sekedar meresahkan, tetapi ajaran-ajaran yang lebih spesifik yang mengarah pada potensi konflik. Yang tidak diungkap dari penelitian 2011 adalah belum ada solusi atas persoalan, sehingga penelitian tahun 2012 ini justru ingin menemukan solusi atas konflik yang terjadi.

Teori Konflik

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf. (Mizraza Mariani: 2010 dalam <http://benyahya.student.umm.ac.id>).

Dari beberapa teori konflik yang ada, menurut Piere Van den Berghe (Ritzer, 1980: 63), teori fungsional struktural maupun teori konflik, cenderung sama-sama memusatkan perhatian terhadap variabel-variabel mereka sendiri dan mengabaikan variabel yang menjadi perhatian teori lain. Sebagai upaya untuk mempertemukan kedua teori tersebut, Berghe beranggapan bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula melahirkan konflik.

Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif, sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kejahatan maupun kerusakan yang terjadi antara individu dengan individu,

suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan penganut agama yang satu dengan golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat.

Diantara sumber persoalan yang muncul akibat konflik adalah wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan, oleh sebab itu, peneliti menggunakan analisis wacana sebagai alat analisisnya. Analisis wacana merupakan teori atau metode analisis yang banyak menggunakan teknik interpretasi. (Widyastuti Purbani. 2009).

Mediasi: Model Penanganan Konflik

Mediasi merupakan kosa kata atau istilah yang berasal *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa dengan cara menengahi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah sebagai penasehat. (*Kamus Bahasa Indonesia*: 569).

Istilah ini lebih menekankan peran pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa. Penjelasan ini menjadi penting sebagai pembeda dari model-model penyelesaian sengketa seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. (Syahrial Abbas: 3)

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya. (Khotibul Umam. 2010: 10). Dalam UU No.30

Tahun 1999 tidak ditemukan penjelasan tentang pengertian mediasi, namun hanya memberikan penjelasan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. (Muhammad Ssaifullah. 2009: 75).

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus (*kooperatif* / kerjasama). Pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa yang mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya sebagai berikut: (a) perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa, (b) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, dan (c) memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain dan para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dan sengketa yang dipersengketakan. (Harijah Damis. 25).

Prosedur Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. (Mestika Zed, 2008: 1-2)

Namun demikian penelitian tetap harus mendapat dukungan data dari lapangan, sehingga penelitian lapangan tetap diperlukan yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif dan terperinci terhadap suatu obyek yang

diinginkan dengan mempelajari berbagai data penguat atau pendukung suatu kasus. (Hadari Nawawi. 1995: 72). Peneliti terlibat langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, sehingga data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh. (Masri Singarimbu,. 1995: 4).

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data, alat analisis yang dipakai adalah analisis wacana. Analisis Wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau di belakang pilihan metode penelitian tertentu untuk menafsirkan teks. (Marianne WJorgensen. 2007: 2).

Sedangkan data lapangan yang dikumpulkan peneliti berasal dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, hasil wawancara ini sebatas sebagai verifikasi hasil analisis teks. Sedangkan membatasi wilayah geografis penelitian ini adalah di Surakarta dan DIY. Surakarta merupakan letak kantor pusat Yayasan MTA dan media-media publikasi MTA, sedangkan DIY adalah letak beberapa cabang MTA dan sumber-sumber informasi dari ormas Islam lain yang diperlukan.

Ajaran MTA yang Berpotensi Menimbulkan Konflik

Dari media-media publikasi yang terasa langsung adanya ajaran-ajaran pemurnian Islam adalah: Buku Kumpulan Brosur Ahad Pagi (terdiri dari 8 jilid, Buku 2004 - buku 2011), Buku Tuntunan Ibadah Sholat, Buku Thaharah, Buku Paket Ramadhan, Sunah & Bid'ah, Kumpulan Doa-doa, Risalah Shalat Safar, dan Risalah Shalat Jum'at.

Kedelapan buku diatas sarat dengan ajaran-ajaran pemurnian Islam dengan indikasi bahwa buku-buku tersebut berisi tentang ayat-ayat Al-

Qur'an dan Hadits yang sesuai dengan tema buku, sangat minim penjelasan dan tidak ada pembahasan dan dukungan dari pendapat-pendapat ulama. MTA bermaksud hanya menggunakan Al-Qur'an dan Assunnah sebagai landasan ajaran-ajarannya dan menolak semua ajaran agama yang tidak ada landasan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sikap ini juga didukung dengan menolak kepercayaan nenek moyang seperti gugon tuhon, tahayul, khurafat, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang sebenarnya menyimpang dari akal sehat maupun dari tuntunan-tuntunan kebenaran. (Majalah MTA, *RESPON*, 2012: 4-6).

Seiring dengan perkembangan yang begitu cepat, ternyata juga meninggalkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan relasi sesama ormas Islam. Menurut penelusuran kami, ada beberapa persoalan utama yang mengemuka mengenai ajaran purifikasi MTA yang berpotensi menimbulkan konflik dengan ormas Islam lain, diantaranya adalah:

Penafsiran secara tekstual

Menurut AF.Djunaidi, persoalan utama terjadinya konflik horisontal antara MTA dengan ormas Islam lain adalah karena MTA memahami agama secara tekstual, padahal dalam memahami ajaran agama tidak cukup dipahami secara tekstual saja, masih banyak faktor lain selain teks yang tertulis tersebut. (Wawancara dengan AF.Djunaidi, pada 4 September 2012).

Masyarakat kita belum siap dengan cara penyampaian seperti ini, sehingga wajar bila kemudian masyarakat bereaksi agak berlebihan. Menurut Asjmuni Abd. Rachman, dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan teks saja, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang kontekstual. (Wawancara dengan Prof. Asjmuni Abd. Rachman pada 12 September 2012).

Pendapat ini seide dengan Muthoharun Jinan, yang menulis disertasi *Penyebaran Gerakan Purifikasi Islam di Pedesaan Studi Kasus Majelis Tafsir Alquran*, di UIN Sunan Kalijaga, menyatakan memang MTA dalam menafsirkan Alquran tidak merujuk pada pendapat ulama dalam kitab-kitab tafsir. Karena MTA menafsirkan berdasarkan teks Al-Qur'an-Hadits. (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=53368>).

Model pemahaman yang demikian tidak akan menjadi persoalan bila tidak disebarkan kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang cukup kental dengan tradisi madzab, dimana ulama juga menjadi rujukan dalam pemahaman keagamaan, tetapi bila model pemahaman ajaran agama MTA masuk kewilayah-wilayah ini maka sangat berpotensi terhadap konflik. (Wawancara dengan Jamik pada 7 September 2012).

Pemahaman agama secara tekstual tanpa ada rujukan kitab-kitab tertentu, maka akan melahirkan penafsiran yang "liar" tergantung kepada pemahaman seseorang. (Wawancara dengan H. Soelarno).

Disisi lain, sikap MTA dengan jargon kembali kepada Al-Qur'an dan tidak merujuk pada sumber utama ajaran Islam merupakan misi utamanya, agar setiap amalan ibadah harus ada dasarnya, terutama dari Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan semua amalan ibadah yang tidak ada dasarnya ditinggalkan.

Salahsatu pernyataan yang disampaikan oleh Ust.Marzuki, bahwa bagi MTA Imam Syafi'i telah merusak fiqh dan merusak syariat, tetapi sepanjang penelusuran dalam media publikasi MTA, peneliti belum menemukan pernyataan tersebut dalam media-media publikasi MTA, tetapi justru peneliti temukan pendapat Imam Syafi'i tetap dipakai oleh MTA, yaitu dalam salah satu buku Tafsir

yang diterbitkan MTA, bahwa menurut Imam Syafi'i *bismillahirrahmanirrahim* merupakan bagian dari surat al-Fatihah. (Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah: 7)

Pemahaman dengan metode tekstual terhadap ajaran-ajaran agama disatu pihak dan dilain pihak ada sebagai umat Islam yang justru kental dengan rujukan kitab dan ulama, kemudian berujung pada saling klaim kebenaran telah terbukti menjadi sumber konflik antar MTA dengan pihak lain.

Sikap terhadap Tradisi Masyarakat Islam

MTA tidak sepaham dengan tradisi-tradisi keagamaan yang dianggap MTA tidak ada dalil yang mendasarinya, kasus misalnya tentang tradisi tahlilan, menurut Muthoharun Jinan, MTA tidak mau menjalankan praktik tahlilan. Alasannya, tidak ada perintah baik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tapi, MTA tidak mengharamkannya. "Terminologinya hanya meninggalkan," (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=53368>). Tradisi tahlil menurut MTA, selama tidak ada dalilnya agar ditinggalkan. Pendapat MTA mengatakan mengutip Hadits *Wala takfu maa laisa laka bihi ilmun* (janganlah kamu mengamalkan suatu perbuatan yang tidak ada ilmunya. Ada Hadits juga yang menjadi dasar ajaran MTA adalah *man amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa roddun* (apabila kita mengamalkan amalan tanpa ilmu maka ditolak). (Majalah MTA "RESPON", 2011: 15).

Pendapat MTA yang berpotensi konflik peneliti temukan pada Majalah MTA "RESPON" Edisi edisi 252/XXV/20 Mei – 20 Juni 2011, hlm.14, jawab Ust. Sukina terhadap pertanyaan jamaah:

"Upacara 7 bulanan sebelum kelahiran bayi yang pada hari itu dibacakan QS.Yusuf

dan Maryam agar nanti jika laki-laki dapat seperti Nabi Yusuf dan jika perempuan dapat seperti Maryam. Apa hukumnya mendatangi upacara tersebut Ustadz?. Jawaban Ust. Sukina; "Sepanjang yang saya ketahui itu tidak ada tuntunannya, termasuk juga upacara-upacara kematian (3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya). Kamu boleh datang jika kamu membubarkan upacara tersebut. Ada Hadist: Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merobahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka (hendaklah merobahnya) degan lisannya. Dan jika ia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (HR.Muslim juz.1 hlm.69".

Jawaban Ust. Sukina dengan "Kamu boleh datang jika kamu membubarkan upacara tersebut". Pernyataan ini akan menjadi persoalan berat yang serius. Sebab amalan-amalan yang sudah mentradisi pada sebagian besar masyarakat muslim Indonesia bila didatangi oleh seseorang dan membubarkannya maka akan menjadi konflik yang serius, apalagi yang mendatangi adalah seseorang dengan identitas ormas Islam yang berbeda.

Tarawih dan Memelihara Jenazah

MTA berusaha untuk meluruskan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits terhadap amalan ibadah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya. Misalnya, ibadah shalat Tarawih yang pada umumnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau mushalla, tetapi dalam pengajaran MTA, shalat Tarawih lebih baik dilaksanakan di rumah, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah saw, sebab menurut MTA Rasulullah saw lebih banyak melaksanakan shalat Tarawih di rumah daripada di masjid, walaupun Rasulullah tidak melarang shalat Tarawih di masjid, Rasulullah khawatir kalau ibadah shalat Tarawih dianggap shalat wajib. (Paket Ramadhan. Surakarta. 2012).

Selain itu, yang kerap dijumpai pertentangan masyarakat pada soal memelihara mayit, menurut MTA, disegerakan untuk dimakamkan, mayit tidak perlu diazani, tidak perlu ada tanda-tanda yang menjerumus pada pengkultusan terhadap orang yang telah mati, semacam nama pada nisan, atau tanda-tanda yang berlebihan pada kuburan. (Wawancara dengan Jamik pada 7 September 2012).

Dari dua kasus tersebut atas, ajaran MTA kerap dianggap sesat oleh masyarakat karena berbeda dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Telah banyak kasus di Indonesia yang hanya karena ajaran do'a qunut dalam shalat Subuh telah memisahkan umat Islam menjadi dua tempat ibadah dalam satu lingkungan, jika MTA berusaha membongkar sebagian kebiasaan dalam beribadah masyarakat dengan tidak hati-hati justru menuai konflik, apalagi jika kebiasaan beribadah tersebut merupakan identitas salahsatu tradisi ormas Islam lainnya.

Persoalan halal dan haram binatang

Dalam berbagai konflik yang selama ini terjadi diberbagai daerah dimana pengajian-pengajian MTA dibubarkan oleh ormas tertentu, isu yang paling menonjol adalah MTA menghalalkan daging anjing. Sejauh penelusuran peneliti dalam media publikasi yang diterbitkan oleh MTA, peneliti belum menemukan, tetapi tema yang berkaitan dengan halal dan haram tentang binatang buruan yang diburu oleh anjing atas perintah majikannya kami temukan yang ditulis dalam majalah RESPON MTA 2011. (Majalah MTA "RESPON" 20 Mei – 20 Juni 2011: 14).

Majalah tersebut menguraikan jawaban Ust. Sukina menjawab pertanyaan jamaah dari Norwegia. Jamaah bertanya,

di sini (Norwegia) banyak sekali anjing, apakah disentuh anjing itu haram dan harus dibasuh tujuh kali? Ust. Sukina menjawab; tidak, karena pada zaman Nabi pernah ada shahabat melepaskan anjing untuk berburu dengan mengucap basmallah, kemudian anjing tersebut pulang kerumah dengan membawa binatang buruan, maka binatang tersebut halal dimakan. Tapi kalau anjing tadi sebagian dimakan dan sebagian diserahkan kepadamu, binatang tersebut haram. Sebab dia berburu untuk dirinya sendiri dan kamu diberi sisanya. Kemudian jika binatang buruan tersebut berkelahi dengan binatang buruan dibantu oleh anjing yang lain, maka binatang buruan yang digondol (*dibawared*) anjing itu haram. Mungkin binatang buruan tersebut dibunuh oleh anjing lain, kecuali masih hidup dan sempat kamu sembelih hewan yang diburu anjing tadi. Yang harus dibasuh tujuh kali itu apabila anjing menjilat-jilat bejana tempat yang biasa kamu minum. Bejana tersebut harus dibasuh tujuh kali dan yang terakhir memakai debu.

Bahasan tentang binatang-binatang yang halal dan yang haram dibahas tuntas oleh Ust. Sukina pada pengajian Ahad Pagi pada tanggal 25 November 2007 dengan tema Sunnah dan Bid'ah. Pada pengajian tersebut Ust. Sukina tidak menghalalkan anjing dan menjelaskan jenis-jenis binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah swt dan oleh Rasulullah saw.

Kegiatan Dakwah yang masif

Banyak kalangan yang menilai dakwah MTAsangat bagus, menggunakan banyak potensi untuk menyebarkan misi dakwahnya. Sepanjang penelusuran peneliti, usaha MTA dalam menyebarkan misi dakwahnya menggunakan media publikasi seperti buku, majalah, brosur,

buletin, kalender, CD MP3 rekaman pengajian Ahad Pagi, CD Video rekaman pengajian Ahad Pagi, CD Video rekaman presmian MTA di daerah-daerah, Radio FM, website dan yang paling inten adalah pengajian-pengajian yang dilaksanakan secara reguler. Yang paling expansif adalah pengajian Ahad pagi di kantor Yayasan MTA Surakarta. Pengajian ini dipandu dengan brosur dan brosur-brosur tersebut kemudian dibukukan per tahun, mulai 2004-2011, adapula terbitan terpisah secara tematik, kemudian pengajian itu pula disiarkan langsung melalui radio FM MTA, dan diupload di website MTA online. (www.mta.online.com).

Akan tetapi teknis metode dakwah MTA dinilai beberapa kalangan “terlalu vulgar” seperti melarang amalan-amalan ibadah yang telah menjadi tradisi sebagian masyarakat Islam khususnya kalangan Nahdhiyin. (Wawancara dengan Soelarno pada 10 September 2012). Di beberapa tempat metode ini banyak mendapat tentangan dari lingkungan khususnya dari lingkungan masyarakat Islam tradisional.

Kebijakan MTA untuk tidak membuat masjid sendiri tidak lepas dari persoalan, disisi lain kebijakan MTA ini diambil agar MTA dapat berbaur dengan masyarakat, tidak eksklusif, menjadi ormas yang terbuka dengan ajaran yang terbuka pula dan jauh dari kesan sembunyi-sembunyi, sehingga MTA bisa diikuti oleh siapa saja. (Wawancara dengan Jamik).

Tetapi kebijakan ini bisa saja diartikan sebaliknya oleh masyarakat, MTA ingin menguasai masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat Islam. (Wawancara dengan Soelarno). Posisi yang saling berhadap-hadapan inilah sangat sangat berpotensi menimbulkan konflik.

Penanganan Konflik Antara MTA dengan Ormas Islam Lain

Konflik abadi dalam internal umat Islam di Indonesia bukanlah antara kelompok Sunni dan Syiah sebagaimana negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah pada umumnya, tetapi antara Islam puritan dan tradisional. Deliar Noer memposisikan kondisi tersebut dalam dua paradigma yaitu Islam tradisional dan Islam modern yang dilihat dari 3 aspek, diantaranya; semangat pemurnian ajaran, sikap terhadap tradisi bermazhab, dan sikap terhadap perubahan dan rasionalitas. (Daliar Noer. 1980. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : PT Djaya Pirusa). Salah satu kasus menurut peneliti sesuai dengan tesisnya Deliar Noer ini adalah konflik MTA yang memilik semangat pemurnian Islam dengan jargon kembali ke Al-Qur'an dan disisi lain dengan Ormas Islam yang berciri tradisional, diantaranya NU.

Sebagaimana hasil temuan peneliti yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya tentang ajaran MTA yang berpotensi konflik, peneliti menyimpulkan bahwa persoalan utama dari konflik ini adalah persoalan ajaran, dimana satu pihak merasa paling benar dengan metode pemahaman keagamaannya dan yang lain pada posisi dipersoalkan validitas ajaran agamanya, sehingga saling klaim kebenaran inilah yang menjadi titik persoalannya dan ini sebenarnya “lagu lama” konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia pada umumnya. (**Ma'arif Jamuin, 2004.**)

Sepakat dengan pendapat Mudjahirin Thohir (2008) bahwa ketika agama sebagai identitas, maka muncul kecenderungan melakukan dua hal sekaligus yaitu; (1) kepentingan diskralisasi dengan mengatasnamakan Tuhan, dan (2) menghakimi pihak lain yang berbeda pandangan sebagai pandangan yang menyesatkan, sehingga dengan mudah meyelesaikan persoalan

perbedaan pandangan tadi dengan tindak kekerasan atas nama menjaga kebesaran Tuhan. (Muadjahirin Thohir. 2008).

Dari temuan penelitian ini, peneliti memberikan tawaran atas konflik yang terjadi atau potensi konflik yang mungkin akan terjadi, yaitu: *Pertama*; Revitalisasi Peran Pemerintah dengan melakukan mediasi. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memelihara kerukunan umat beragama, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini singkatnya disebut dengan PBM. Kebijakan ini memberikan pedoman kepada para kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Adapun yang diatur dalam PBM ini bukan aspek doktrin agama, tetapi lalu lintas para warga negara Indonesia pemeluk suatu agama ketika berinteraksi dengan warganegara Indonesia lainnya yg memeluk agama berbeda. PBM ini tidak membatasi kebebasan beragama seseorang dan juga tidak membatasi seseorang untuk mendirikan rumah ibadat. (Balai Litbang Agama Semarang, 2008, hlm. 15).

Berkaitan dengan konflik antara MTA dengan ormas Islam lainnya, dimana fokus persoalannya adalah masalah perbedaan pendapat masalah cabang keagamaan (*furu'iyah khilafiyah*), maka pemerintah dapat melakukan fungsi mediasi, yaitu proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak

untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya. (Khotibul Umam. 2010: 10)

Pemerintah melalui Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Kagri No. A/VII/9221 tanggal 12 Juni 1952, memperingatkan jajaran Departemen Agama tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk tidak mencampuri masalah-masalah *furu'iyah khilafiyah*. Jika terdapat perselisihan mengenai soal keagamaan, pejabat terkait harus mendamaikannya dengan kebijaksanaan sebaik-baiknya dengan menjunjung keadilan dan tidak memihak pada salahsatu pihak. Jika ditemukan keberpihakan pegawai pada salah satu pihak berselisih, maka pejabat dimaksud harus bertindak tegas terhadap pegawai tersebut. (Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2009: 55).

Surat Edaran Menteri Agama tersebut memiliki posisi penting sebagai mediator mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Solusi konflik dengan mempertemukan dua pihak yang dimediasi oleh pemerintah ini sejalan dengan pendapat H. Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa kasus MTA dengan ormas Islam khususnya Nahdiiyin harus dipertemukan, yang saya lihat justru MUI yang banyak menengahi kedua pihak. (Wawancara dengan Yunahar Ilyas pada 12 September 2012).

Kedua belah pihak mesti memberikan argumen masing-masing, baik yang paham keagamaan secara tekstual maupun yang kontekstual, pertemuan kedua belah pihak jangan sampai merusak hubungan dan keyakinan. (Wawancara dengan Prof. Asjmuni Abd Rachman).

Kedua, Sosialisasi Peraturan Perundangan. Harus dipahamkan kepada kedua belah pihak yang bertikai atau juga kepada ormas-ormas lain di Indonesia,

bahwa ormas yang hidup di Indonesia ini memiliki fungsi, hak, dan kewajiban. Salahsatu kewajiban ormas adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 7).

Dengan demikian semua ormas di Indonesia memiliki fungsi, hak dan kewajiban yang kesemuanya dijamin oleh peraturan perundangan, dan yang paling penting dari kasus konflik MTA ini adalah telah mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, baik MTA maupun ormas lainnya yang dalam pertikaian, sebab telah melibatkan massa yang begitu besar. Sanksi hukum bila suatu ormas ternyata terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan yang justru mengganggu keamanan dan ketertiban adalah pembekuan dan pembubaran ormas tersebut. (UU No. 8 Tahun 1985 Pasal 13).

Benar ada kebebasan dalam melaksanakan kegiatan organisasi, tetapi dalam usaha/kegiatan mengajak orang lain sebagai bagian dari penyiaran agama sesuai dengan faham yang dianut tidak dapat bebas sekehendaknya, tetapi telah diatur tersendiri oleh pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Berkaitan dengan konflik MTA yang salahsatu persoalan yang mengemuka – sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya - adalah persoalan dimana MTA dalam melakukan penyiaran faham ajaran keagamaanya dinilai terlalu agresif, dengan indikator banyaknya publikasi yang diterbitkan oleh MTA. Maka harus diingatkan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri diatas khususnya Bab III Pasal 4 bagian b, yang menyebutkan tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut

agama lain dengan cara menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain. (Tim Penyusun. *Kompilasi*. 2009).

Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Kejaksaan Agung, Gubernur dan sebagainya jumlahnya puluhan, yang dikeluarkan untuk mengatur lalu lintas kehidupan keagamaan di Indonesia ini. Tapi sampai sekarang hubungan hidup antarumat beragama tetap saja dalam kondisi panas-panas dingin. (Burhanuddin Daya, Edisi 1: 2004). Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI telah melakukan kompilasi terhadap peraturan-peraturan yang khusus tentang kurukunan umat beragama, tetapi sepanjang penelusuran peneliti, peraturan-peraturan tersebut belum menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan kerukunan umat beragama. (Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan, 2009)

Oleh sebab itu, peraturan-peraturan mengenai kerukunan umat beragama harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, khususnya pada ormas-ormas Islam yang selama ini menjadi obyek dari sebagian besar dari peraturan tersebut. Tetapi peraturan-peraturan tersebut juga harus dibarengi oleh penegakannya, agar konflik-konflik yang terjadi tidak selalu diselesaikan dengan caranya sendiri-sendiri, tetapi dengan menggunakan alat-alat hukum agar memiliki kekuatan yang mengikat.

Alat-alat negara yang secara langsung terlibat dalam kerukunan umat beragama ini adalah Kemeterian Agama bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, BAKIN dan aparat pemerintah daerah serta Majelis

Ulama Indonesia/Majelis Ulama Daerah dan lembaga-lembaga keagamaan Islam. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran-aliran sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (Instruksi Menteri Agama No. 8 Tahun 1979).

Kurangnya ketelibatan alat-alat negara ini perlu ada program revitalisasi peran alat-alat negara sehingga tidak terkesan "ompong", padahal pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono, melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 ditetapkan bahwa peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama merupakan salahsatu dari arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama. (Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan. 2009).

Ketiga, Menghidupkan kembali dialog umat beragama. Untuk mengurai egoisme beragama maupun menyembuhkan luka kasus kekerasan beragama, gagasan dialog antaragama di Indonesia perlu dikampanyekan secara luas. Dialog dibangun atas dasar kemauan bersama, bukan atas desakan sosial atau politik. (Loekisno Ch.W.)

Pemerintah melalui Departemen Agama (sekarang Kementrian Agama) menginisiasi dialog antarumat beragama lewat gagasan trilogi kerukunan (zaman Alamsyah Prawiranegara), Lembaga Pengkajian untuk Kerukunan Umat Beragama (LPKUB, 1993), dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB, 2001). Sedangkan Departemen Luar Negeri menjalankan Diplomasi Total sebagai cara untuk memandang isu secara komprehensif dengan memaksimalkan komunikasi antar komponen bangsa, salah satunya lewat program *Foreign Policy Breakfast*. (JB. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, etc. 2011).

Salah satu produk pemerintah untuk mengurai persoalan konflik umat beragama pada tahun 2006 telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, Selian melakukan dialog-dialog, salah satu tugas FKUB adalah menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. (PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006). Maka perlu ada revitalisasi pran FKUB ini sebagai upaya menyelesaikan konflik-konflik ormas keagamaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ariyanto, Nur. 2010. *Strategi Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Melalui Radio MTA 107,9 FM Surakarta*. Semarang: Fak.Dakwah IAIN Walisongo.
- Budi, Afrianto. 2012. *Kementerian Agama, Skak Mat!*, dalam <http://politik.kompasiana.com>.
- Bambang Sugeng. tt. *Penanganan Konflik Sosial*, paper Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS Bandung.
- Craib. 1992. *Teori-Teori Sosial Modern*, Rajawali, Jakarta.
- D. Hendropuspito OC. 1989. *Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta.

- Jamuin, Ma'arif, 2004. *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama*, Surakarta: CISCORE Indonesia.
- JB. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, etc. 2011. *Dialog Antarumat Beragama; Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: CRCS UGM Jogjakarta & Mizan Bandung
- Jorgensen, Marianne W. 2007. *Analisis Wacana : Teori dan Metode*, (Bandung, Pustaka Pelajar).
- Judistira K. Garna. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Judistira K. Garna. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial; Dasar-Konsep-Posisi*, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung.
- Mariam, Mizrazaan. 2010, *Teori Konflik*, <http://benyahya.student.umm.ac.id>
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : PT Djaya Pirusa
- Paramudya, Wahyu. 2005. *Pluralitas Agama: Tantangan "Baru: Bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia*, dalam VERITAS 6/2 Oktober 2005.
- Rohman, Arif Nur. 2010. *Hubungan antara pengetahuan tentang dakwah MTA dengan sikap terhadap tradisi dan tradisi yang dianut (studi korelasi tentang hubungan antara pengetahuan tentang dakwah MTA dengan sikap terhadap tradisi dan tradisi yang dianut di kampung notoningratan)*, Surakarta: UNS.
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Singarimbun, Masri,. 1995. *Metode dan Proses Penelitian*, dalam Singarimbun dan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Slembrouck , Stef ; "What is Meant by Discourse Analysis"; (Belgium: Ghent University, 2006).
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sugiyarto, Wakhid. 2011. *Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat di Kota Surakarta (Solo) Jawa Tengah*. Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Kemenag RI.
- Tafsir MTA. 2004. Surat Al-Baqarah 142-176, Cet pertama. Surakarta: Yayasan MTA.
- Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan. 2009. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Depertemen Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan dan Keagamaan.
- Tim. 2008. *Interaksi Sosial Kelompok Aliran Islam Minoritas Dalam Masyarakat Di Berbagai Daerah Di Jawa Tengah*, (Laporan Penelitian) Badan Litbang dan Diklat Agama Semarang.
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*.

- Tualeka, Hamzah. 2010. *Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama (Studi tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat)*. Surabaya: Dissertation thesis, IAIN Sunan Ampel.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustakan Yustisia.
- Van Dijk, Teun ; "Discourse Ideology and Context"; (London;) 2000;
- Woodward, Mark. 1998. *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (terj. Ihsan Ali Fauzi). Bandung: Mizan.
- Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Media Massa, Situs internet dan lain-lain

<http://mta-online.com>

<http://www.republika.co.id> tanggal 29 Januari 2012.

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=53368>

Lihat dalam Sumber : <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=53368>

www.mta.online.com. Saluran Radio MTA: mt@fm 107,9.

<http://www.setara-institute.org>.

<http://www.rmol.co>

<http://metrotvnews.com>

<http://antarajateng.com> 28 Januari 2012.

Harian Suara Merdeka 26 Juni 2011.

VCD Pengajian KH.Marzuki di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang.

VCD rekaman pernyataan Ust. Sukina dalam pengajian Ahad Pagi pada tanggal 1 dan 8 April 2007.

Makalah dan Majalah

Harijah Damis, "Hakim Mediasi" *Mimbar Hukum*, No. 63.

Majalah MTA, *RESPON*, Edisi 265 XXVI 20 Juni-20 Juli 2012

Majalah MTA "RESPON", *Pertanyaan dan Jawaban Pilihan Pengajian Ahad Pagi*, edisi 252/XXV/20 Mei – 20 Juni 2011.

Kendall, Gavin; "What is Critical Discourse Analysis"; (FQS Volume 8, Mei 2007) .

Stephens, John. *Language and Ideology in Children's Fiction*, 1992.

Thohir, Mudjahirin. 2008. *Kekerasan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, Suatu Pendekatan Sosial Budaya*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Antropologi Budaya pada Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro, Semarang. 12 Januari 2008.

Widyastuti Purbani. 2009. *Analisis Wacana Kritis Dan Analisis Wacana Feminis (Critical Discourse Analysis And Feminist Discourse Analysis)*, Seminar Metode Penelitian Berbasis Gender di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 30 Mei 2009.

Regulasi Perundang-Undangan:

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006
Tentang pembentukan FKUB.

UU No. 8 Tahun 1985

Instruksi Menteri Agama No. 8 Tahun 1979

Dinamika Agama Adam Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Sosial

Sulaiman

Peneliti Balai Litbang Agama Semarang

Abstract

Focus of this study is on the dynamic of Adam religion among the Samin society in the terms of conservation local tradition during the social changes. This research was done qualitatively, collecting data by interviewing, observing and documents searching. This study will give much information and theoretical examinations for publics on the Adam religion which adherent to the society of Samin, in Bombong, Sukolilo, Pati. This study found that understanding of the religion by those society quite different with other formal religions which are approved by the government. Religion by this society is not understood as a believe system for after life world, but it is as builder of wong sikep. In the face of global development, they use adaptation strategy such as cooperation with many activists in social culture, environment and academicians. Those society strongly oppose building of cement factory in their area since it will pollute the environment of their settlement such as nature, soil as well as their history and socio cultural life.

Keywords: Adam religion, doctrine and rites, social changes, adaptation strategy

Abstrak

Fokus kajian penelitian ini adalah dinamika agama Adam dalam pelestarian nilai-nilai lama di tengah perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan-bahan kajian teoritik bagi masyarakat umum, khususnya agama Adam yang dipeluk oleh masyarakat Samin di Bombong, Sukolilo, Pati. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman terhadap Agama Adam berbeda dengan pemahaman agama-agama yang diakui oleh pemerintah pada umumnya. Agama tidak diartikan sebagai sistim kepercayaan yang diyakini untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat, tetapi agama difahami sebagai alat untuk membangun kehidupan sebagai "wong sikep". Dalam menghadapi globalisasi pembangunan, strategi adaptasi yang dilakukan oleh sedulur sikep tidak hanya mengandalkan mitologi dan situs-situs sosial budaya, tetapi juga bekerjasama dengan aktivis sosial budaya, lingkungan hidup, dan akademisi. Karena itu, komunitas sedulur sikep menolak dengan tegas terhadap rencana pembangunan semen di daerah sekitarnya, karena hal ini dapat mengancam kelestarian alam dan sumber pangan, bahkan kelestarian sejarah dan sosial budaya.

Kata kunci : Agama Adam - doktrin dan ritual - perubahan sosial - strategi adaptasi

Pendahuluan

Agama, sebagaimana yang difahami oleh para antropolog dan atau sosiolog, adalah sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa

yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Dalam perspektif ini, agama dapat didefinisikan sebagai suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh para penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dapat didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas

pada umumnya (Hendropuspito, 1984: 12). Dalam pengertian seperti ini, agama memiliki peran yang fungsional dalam kehidupan masyarakat, yakni terbentuknya komunitas yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama (Syamsul, 2009: 43).

Dalam kehidupan sehari-hari, agama-agama seringkali difahami hanya sekedar simbol yang tidak mampu bertindak sebagai basis orientasi hidup manusia, sumber etika dan moral, serta spirit dalam mengkonstruksi budaya, karena pemahaman agama tanpa disertai dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang memadai dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, fungsi agama tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh pemeluk agama, akan tetapi justru yang terjadi adalah *dikhotomi* antar agama-agama akibat kebijakan pemerintah, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1969.

Bagi penganut agama lokal, kebijakan ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi agama-agama yang hampir terjadi selama pemerintahan Orde Baru dan akibat-akibatnya masih dirasakan sampai sekarang. Situasi inilah yang menjadi pemicu ketegangan dalam kehidupan keagamaan sehingga terjadi perebutan posisi agama dalam negara yang secara politis dan sosial memaksa kelompok agama lokal terpaksa harus mengakui dengan cara memasukkan keyakinan pada agama yang diakui kepemelukannya oleh pemerintah, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Kondisi semacam ini membawa akibat bahwa agama yang hidup sebagai kepercayaan lokal (tradisional) masih saja terdiskriminasi.

Lebih ironis, kelompok kepercayaan lokal yang mencoba menentang arus kekuasaan agama besar akan disingkirkan dengan tuduhan sebagai kelompok sempalan (aliran) yang membawa ajaran sesat. Jika diteliti lebih jauh, kelompok-kelompok keagamaan yang berbasis

pada kekuatan spiritualitas lokal yang berkembang di masyarakat cukup banyak, antara lain kepercayaan lokal "Agama Adam".

Agama Adam yang dimaksud adalah agama yang dipeluk oleh kelompok minoritas masyarakat Samin yang terdapat di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.

Kelompok masyarakat ini menyimpan ajaran agama yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan berperilaku harmonis dengan alam sekitarnya (*hamemayu hayuning bawana*). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosyid (2008: 210) bahwa Samin sebagai sebuah ajaran yang mengedepankan nilai-nilai etika dan tidak ingin merugikan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat Samin lebih menyukai disebut sebagai "*sedulur sikep*" atau *Wong Sikep*", yakni orang yang baik dan jujur.

Dengan berjalannya waktu, komunitas *sedulur sikep* menghadapi tantangan global yang membawa perubahan pada pola hidup yang lebih dinamis dan kompetitif. Perubahan itu hingga mampu menyentuh pola perilaku dan pola pikir dimana mereka hidup. Atho Mudzhar (2006: 21) melihat bahwa penetrasi globalisasi sebagai bentuk perkembangan baru dari kapitalisme memberikan imbas pada perubahan tata nilai di masyarakat. Akibat lebih dalam, masyarakat tidak lagi percaya pada nilai-nilai budaya lokal, akan tetapi budaya Barat justru menjadi trend gaya hidup.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian tentang dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia yang nampaknya sedang mencari bentuk sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis. Karena itu, fokus penelitian ini adalah "Dinamika Agama Adam Dalam Pelestarian Nilai-Nilai lama di

Tengah Perubahan Sosial: Studi Kasus di Bombong, Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Dengan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, maka masalah penelitian dapat dirumuskan: a) Bagaimanakah pokok-pokok ajaran agama Adam yang dianut dan di-kembangkan oleh masyarakat; b) Bagaimanakah perubahan yang terjadi atas nilai-nilai yang dikembangkan bagi penganutnya di tengah-tengah era perubahan sosial; c) Bagaimanakah strategi adaptasi yang dilakukan oleh penganut agama Adam dalam menanggapi berbagai perubahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yakni suatu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini menghasilkan data *deskriptif*, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diamati, khususnya komunitas Agama Adam.

Sasaran penelitian ini adalah komunitas Agama Adam di Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat seorang tokoh *Sedulur sikep*, yakni mbah Tarno (alm). Selain itu, komunitas Agama Adam di daerah ini masih sangat kukuh dalam mempertahankan tradisi atau nilai-nilai yang diyakini oleh penganutnya, meski terjadi perubahan sosial di masyarakat.

Dalam penelitian ini, sumber

data utama adalah tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan komunitas agama Adam. Dalam hal ini, komunitas Agama Adam yang terdapat di Dukuh Bombong, dan beberapa komunitas lain yang terdekat, seperti: *Sedulur sikep* di Bowong (Ngawen) Sukolilo dan *Sedulur sikep* di Galiran, Baleadi. Sementara sumber data sekunder adalah dokumen tertulis atau naskah-naskah yang dimiliki oleh masyarakat, seperti: sejarah lokal dan adat istiadat masyarakat, monografi kecamatan, dan buku-buku hasil penelitian tentang agama lokal.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, observasi dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan atau informan yang dipilih secara purposif (*Purposive or Judgmental Sampling*) berdasarkan kriteria tertentu (Endraswara Suwardi, 2006:115). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai sejarah lokal masyarakat, sejarah agama Adam, nilai-nilai ajaran agama Adam, perubahan-perubahan yang terjadi atas nilai-nilai yang dianutnya, dan strategi adaptasi bagi komunitas agama Adam dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara observasi dilakukan guna melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat agama Adam, khususnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Kajian dokumen dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi, seperti laporan kegiatan, surat-surat keputusan, tata perundang-undangan, naskah-naskah klasik, dan sebagainya. Untuk menguji keabsahan data-data yang telah terkumpul, penelitian ini juga melakukan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data antar sumber dan membandingkannya dengan

antar metode, sehingga kredibilitas data bisa teruji keandalannya.

Dari hasil pengumpulan data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 200: 190). Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Penyajian data dimaksudkan adalah sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung (Mill and Hubberman, 1992: 15).

Sekilas Wilayah Penelitian

Penelitian ini berada di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Letak Desa Baturejo ini berada di sebelah selatan kota Pati, yang berjarak sekitar 32 km atau 117 km dari kota Semarang. Untuk menuju ke lokasi daerah ini ada dua alternatif, yakni melalui jalur utara (Semarang – Purwodadi – Sukolilo) atau melalui jalur timur (Semarang – Kudus- Pati – Sukolilo). Setelah di Kantor Kecamatan Sukolilo maka terus berjalan melalui jalan aspal menuju Bombong, Desa Baturejo.

Luas wilayah desa ini adalah 963.546 ha, yang terdiri atas tanah sawah sebanyak 839.265 ha; tanah kering seluas 106.279 ha; dan lainnya seluas 17.996 ha. Wilayah daerah ini terdiri atas 4 dukuh, yakni dukuh Ronggo, Dukuh Bombong, Dukuh Bacem, dan Dukuh Mulyoharjo. Diantara dukuh tersebut, dukuh Bombong ditempati oleh komunitas Agama Adam, yang lebih dikenal dengan masyarakat Samin atau *Sedulur sikep*. Daerah inilah sebagai tempat penyebaran Agama Adam pertama di daerah ini.

Penduduk desa Baturejo secara keseluruhan berjumlah 5.946 orang. Jumlah penduduk sebanyak 5.257 orang beragama Islam, 3 orang beragama Kristen, dan 681 orang beragama Adam/Sikep. Dari jumlah tersebut, penduduk yang belum tamat SD sebanyak 1.283 orang dan penduduk yang buta huruf sebanyak 1.248 orang. Berdasarkan data penduduk yang masih buta huruf ini dimungkinkan berasal dari komunitas adat *Sedulur sikep* yang memiliki keyakinan tidak diperbolehkan sekolah di lembaga pendidikan formal. Bagi sedulur sikep, sekolah berada di rumah keluarga masing-masing dan orang tua sebagai gurunya.

Agama Adam

Agama sebagai sistem budaya yang bersifat kognitif, meliputi unsur-unsur pokok yang di dalamnya terdapat pengetahuan (*knowledge*), kepercayaan (*belief*), nilai (*values*), norma, pengawasan (*control*), terhadap sistem nilai yang bersifat kondusif. Melalui ajarannya, agama memberi sumbangan pengetahuan yang berharga bagi manusia yang tidak ditemukan oleh akal (Ali, 2007: 34). Pengertian agama seperti ini berbeda dengan Agama Adam yang dianut oleh masyarakat Samin atau *Sedulur sikep* di Bombong, Sukolilo, Pati.

Istilah Agama Adam terdiri atas dua kata, yakni agama berarti *ageman* (senjata, pakaian), dan Adam berarti pengucap. Dalam pengertian lain, agama berarti *gaman lanang* (senjata, alat kelamin laki-laki), sedangkan Adam berarti pengucap, ada tanya ada jawab (Takashi, 1981: 114). Agama diturunkan bagi orang laki-laki (*lanang*) sebab di dalam dirinya terdapat benih manusia. Agama Adam adalah "*nglakoni tatane sikep rabi*" (menjalankan tatanan sikep rabi), yakni berhubungan seks (*sanggama*) dengan isterinya. Sebelum menjalankan *sikep rabi* ini dilakukan proses "tanya jawab" oleh

calon pengantin laki-laki dengan orang tua gadis atau calon mertua.

Dalam tatanan *sikep rabi*, seorang laki-laki *ngicir* (menanam benih) pada rahim wanita, dan wanita *nganakake* (melahirkan) anaknya. Suripan Sadi Hutomo mengatakan: “*ing sajrone agama ana roso sejati, sejatine roso mau awujud banyu. Amarga manungsa kuwi saka banyu, mula kabeh manungsa sedulur, kang awujud sedulur lanang lan wadok. Ing donya isine loro, lanang lan wadok*” (di dalam agama ada rasa sejati, dan sejatinya rasa tadi berujud air, karena manusia berasal dari air, maka semua manusia saudara, yang berujud laki-laki dan perempuan, dan di dalam dunia isinya juga laki-laki dan perempuan). Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas laki-laki dan perempuan adalah melaknakan perkawinan sebagai asal usul terjadinya manusia.

Karena itu, yang disebut *Sedulur sikep* adalah “*ngakoni opo sing dilakoni, wong lanang ngakoni tatanan sikep rabi, wong wadok ngakoni tatanan sikep laki*” (orang yang mau mengakui apa yang dilakukan, orang laki-laki melakukan tatanan *sikep rabi*, dan orang perempuan melakukan *sikep laki*). Kedua macam tatanan tersebut digambarkan dalam ajaran *sedulur sikep* sebagai “*ngelmu nabi Adam dan wali Adam*”. Istilah “nabi” digunakan untuk “wanita”, dan istilah “wali” digunakan untuk laki-laki, sehingga penulis Belanda menyebut wanita sebagai “Adam Nabi”, dan laki-laki disebut “Adam Wali”.

Dengan demikian, dasar terpenting dalam agama Adam adalah menjalankan kewajiban *sikep rabi*, yakni berhubungan seksual dengan isterinya untuk membangun hidup sebagai “*Wong Sikep*”. *Sikep rabi* ini merupakan kekuatan *magic* yang menjunjung tinggi arti seks dalam kehidupan suami isteri (*sikep rabi* dan *sikep laki*), dengan mengedepankan perilaku jujur. Dalam ajaran Samin (Munfangati, 2004: 26) dikenal dengan istilah “*Wong Sikep kukuh wali Adam, Wong Sikep kukoh*

nabi Adam” (orang sikep sangat kuat pertalian laki-laki dengan perempuan).

Pokok Ajaran

Sebagaimana agama-agama pada umumnya, agama Adam juga memiliki ajaran yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. Diantara pokok-pokok ajaran agama Adam adalah sebagai berikut:

Tuhan, Surga, dan Neraka

Dalam agama Adam, konsep Tuhan tidak dijelaskan secara tegas oleh pemeluknya. Konsep Tuhan seringkali dijelaskan secara *kiratabasa*, seperti: kata Tuhan berasal dari kata “*tuaning akondo*” (tuanya ucapan) atau “*tuahane ing panggunem*” (ucapan yang bertuah). Ucapan yang dianggap suci bagi sedulur sikep adalah perkataan “*nek ya hya, nek ora ya ora*”, maksudnya jika bilang “ya” maka benar-benar “ya”, jika bilang “tidak” maka benar-benar “tidak”. Selain itu, kata *Gusti* berasal dari kata “*bagusing ati*” (kebaikan hati). Kata-kata seperti ini mencerminkan tentang pentingnya kejujuran dan keadilan.

Segala sesuatu harus ada wujudnya, sehingga jika akan dikatakan “kendi”, misalnya, maka harus ada bukti / wujud “kendi” itu. Demikian juga kata Tuhan Allah itu ada wujudnya apa tidak? Jika tidak ada wujudnya maka sulit untuk dipercaya. Gunretno (2002) mempertanyakan apa agama itu. Kalau ada agama bentuknya seperti apa? Dan dimana tempatnya? Kalaupun ada, perbuatannya bagaimana, kalau dibuat bahannya dari apa?.

Pemikiran semacam ini sejalan dengan Benda & Castels (1969: 226), bahwa Samin tidak percaya tentang Allah atau ketuhanan lainnya, karena ia tidak melihatnya. Dalam analisisnya menyimpulkan bahwa “keyakinan

masyarakat Samin tidak ubahnya sama dengan faham yang dianut oleh Partai Komunis, sehingga samin diidentikkan dengan penganut "atheis". Hal ini nampaknya banyak dimanfaatkan pemerintah (terutama Orde Baru) dalam mengambil kebijakan pembangunan terhadap masyarakat Samin, sehingga sentimen negatif terhadap masyarakat Samin menjadi semakin kuat.

Jika *sedulur sikep* tidak percaya adanya Tuhan, maka mereka juga tidak percaya adanya surga dan neraka. Kepercayaan terhadap surga dan neraka dijelaskan oleh Suripan Sadi Hutomo, yakni "*miturut wong samin, sorga lan neraka iku panggonane ana ing pangucap. Yen pangucape apik bakal mlebu ing sorga dene yen pangucape elek bakal mlebu neraka*" , *dene wujud sorga lan neraka wong Samin percaya anane apa kang diarani "penitisan". Wujud sorga lan neraka iku manungsa lan dudu manungsa (kewan)*". Artinya: menurut kepercayaan wong Samin, surga dan neraka itu tempatnya di ucapan. Jika ucapannya baik, maka akan masuk surga, jika ucapannya jelek maka akan masuk neraka. Adapun wujud surga dan neraka adalah "*penitisan*", yakni manusia dan hewan.

Meski ajaran samin tidak mengenal konsep Tuhan, surga dan neraka, tetapi samin percaya bahwa "*Tuhan ada dalam dirinya*". Dalam agama Adam, konsep ketuhanan yang terpenting adalah "*Manunggaling kawula dan Gusti*", yakni bersatunya hamba dengan Tuhan (Gusti). Dalam pandangan Bandung (2011), hal ini berarti menyatu (*nyawiji*) antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, yakni "kejujuran".

Dalam agama Jawa, pemikiran semacam ini dinamakan "*sangkan paraning dumadi*", yakni dari mana manusia berasal, apa dan siapa dia pada masa kini, dan kemana arah tujuan hidup yang ditujunya (Geertz, 1985:xii). Untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka

sedulur sikep memiliki ajaran "*wong urip kudu ngerti ing uripe*" (manusia harus mengetahui hakikat kehidupannya). Hal ini berarti bahwa keyakinan terhadap Tuhan adalah kembali kepada dirinya sendiri (*awake dewe*), sebab Tuhan bagi orang sikep bukan sosok, bukan nama, tetapi *spiritualitas* yang sangat abstrak, sehingga sulit dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.

Keyakinan semacam ini sebagaimana terlihat dalam mistik Jawa, terutama Ki Kebo Kenongo, yang dikenal dengan Kiai Ageng Pengging. Karena itu, ada kemungkinan bahwa ajaran tentang ketuhanan dalam agama Samin merupakan sinkritisme antara Hindu dan Islam, karena pengaruh ajaran Syeh Siti Jenar. Kepercayaan seperti ini mengingatkan pengajaran mistik Jawa pada abad ke 16, sebagaimana yang dikemukakan oleh Geertz (1985: 416-120), bahwa dibalik perasaan manusiawi yang kasar ada suatu perasaan makna dasar yang murni, yakni "*rasa*" yang sekaligus merupakan diri sendiri seorang individu (aku) dan suatu manifestasi Tuhan (Gusti, Allah) dalam individu itu. Dan di dalam emosi itu seseorang bisa berhadapan dengan realitas tertinggi, yakni refleksi Tuhan dalam diri.

Hidup dan Mati

Dalam agama Adam, hidup (*urip*) merupakan ajaran dasar yang menjadi essensi segala sesuatu (wujud) yang ada. Di dunia ini, manusia hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup adalah sama dengan "roh" dan hanya satu yang dibawa selamanya (*siji kanggo selawase*). Setelah meninggal dunia, "roh" manusia tidak mati tetapi hanya menanggalkan pakaiannya (*salin sandangan*). Hal ini bisa dijelaskan bahwa jika manusia mati, maka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mati, tetapi ibarat orang sedang mandi dan berganti pakaian. Orang yang mati tersebut bisa

menjelma kembali menjadi manusia.

Jika *sedulur sikep* percaya bahwa “*sapa nandur bakal ngunduh wohe penggawe*”, maka pernyataan ini mengandung makna bahwa siapa menanam akan menuai hasilnya, barang siapa berbuat jahat akan menuai kejahatan, berbuat baik akan menuai kebaikan juga. Dalam kaitannya ini, Munfangati (2004: 31) menjelaskan, sebagai berikut:

“*Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi nangis nger niku sukma ketemu raga. Dadi mulane wong niku boten mati. Nek ninggal sandhangan niku nggih. ...Dadi ora mati nanging kumpul sing urip. Apik wong selawase sepisan, dadi wong selawase dadi wong*”

(Manusia muda mati rohnya dititipkan pada yang hidup. Bayi menangis itu pertanda ketemunya sukma dan raga. Jadi, makanya manusia itu tidak mati tapi kumpul yang hidup. Sekali manusia berbuat baik, selamanya akan menjadi orang baik. Sekali menjadi manusia, maka selamanya tetap jadi manusia).

Pada saat orang akan berganti pakaian “*salin sandangan*”, maka pakaian yang lama diganti dengan pakaian yang baru. Maksudnya, hidup seseorang itu bagaikan pakaian, dimana suatu saat akan mengalami kerusakan dan harus diganti dengan pakaian yang baru. Tidak selamanya satu pakaian yang sama dipakai seumur hidup. Itulah yang disebut “*urip*” bagi *sedulur sikep* yang diidentikkan dengan pakaian. Pemahaman *sedulur sikep* tersebut menurut Samiyono (2010: 135) identik dengan pemahaman *reinkarnasi*. Bedanya, dalam konsep *reinkarnasi*, kehidupan manusia yang akan datang ditentukan oleh perbuatannya pada saat di dunia sebelumnya.

Oleh karena itu, manusia hidup harus selalu berbuat baik, karena roh itu akan kembali kepada anak cucunya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan

oleh mbah Darmo: “*menungso niku uripe siji kanggo selawase, dadi rogone mawon sing pisah soko nyowo, saktekene nyowo niku bali maneh neng turune, mulo wong urip iku kudu becik lakune, supoyo biso urip neng kelanggengan*” (manusia hidup hanya sekali, tubuh berpisah dengan nyawanya. Sesungguhnya, nyawa itu akan kembali kepada anak cucunya, maka manusia hidup itu harus baik kelakuannya, supaya bisa hidup di alam kelanggengan).

Perubahan Ajaran

Dalam hal ini, perubahan yang dimaksudkan adalah adanya pergeseran dari ajaran leluhurnya. Perubahan yang terjadi di kalangan *sedulur sikep* merupakan perubahan sistem tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku, penolakan dan atau penerimaan tingkah laku baru. Di kalangan *sedulur sikep* Bombong, ada beberapa pergeseran tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran leluhurnya, antara lain: pergeseran dalam berbahasa, pergeseran dalam pendidikan, pergeseran dalam pekerjaan, dan pergeseran dalam tata cara perkawinan.

Dalam berbahasa, mereka menggunakan bahasa *Jawa Ngoko*, sebagaimana terlihat pada sejarah munculnya gerakan *saminisme*. Tetapi, jika bertemu dengan orang lain maka mereka menggunakan bahasa *krama andhap*, yakni tata krama bahasa yang tidak begitu halus. Hal ini terlihat ketika peneliti wawancara dengan beberapa tokoh *sedulur sikep*, mereka selalu menggunakan jawaban dengan bahasa “*Jawa Ngoko*”, meskipun pertanyaannya dengan menggunakan bahasa *Jawa Krama*.¹

¹Percakapan antara peneliti dengan tokoh *sedulur sikep*, antara lain terlihat dalam beberapa pertanyaan, seperti : *umure mpun pinten?* (umurnya berapa), jawab : *nek umur iku yo siji kanggo selawase* (jika tanya umur itu ya satu untuk selamanya). *Putrane mpun pinten?* (anaknya berapa?) Jawab : *loro, “lanang karo wedok”* (dua, laki-laki dan perempuan).

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa yang dipergunakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni bahasa umum dan bahasa khusus (*sangkalak*). Bahasa umum yang dimaksud adalah pemakaian bahasa yang menggunakan dialek “*lèh*”, seperti: kata putih (umum) berubah menjadi *putèh*, kata mulih (umum) berubah menjadi *mulèh*, kata *omahmu* berubah menjadi *omahem*, kata *butuh* berubah menjadi *butoh*. Bahasa khusus yang dimaksud adalah bahasa *sangkalak* atau bahasa sangkal, yang mengandung makna politis, seperti: kata “*mati*” diistilahkan dengan “*salin sandangan*”, jika bertanya: “*Umure piro*” (umurnya berapa), maka dijawab: “*Siji kanggo selawase*” (Satu untuk selamanya). Jika bertanya: “*Anake piro?*” (Anaknya berapa), maka dijawab: “*Loro, lanang karo wedok*” (Dua, laki-laki dan perempuan).

Namun, sekarang *Wong Sikep* sudah mengenal bahasa *Jawa Krama* yang umumnya termasuk *Kramadesa* untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal. Hal ini terlihat bahwa ketika peneliti bertemu dengan keluarga *sedulur sikep*, mereka juga berbicara dengan bahasa *Jawa Krama*. Bahkan ketika peneliti bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka pun juga menggunakan bahasa Indonesia. Anehnya, dari manakah mereka belajar bahasa *Jawa Krama* atau bahasa Indonesia? Hal tersebut menunjukkan bahwa *sedulur sikep* sangat komunikatif dengan dunia sekitarnya, baik dalam cara berpakaian ataupun berbahasa. Hal ini terjadi karena hubungan sosial kemasyarakatan yang sangat terbuka.

Dalam masalah pendidikan, pergeseran yang terjadi adalah ada beberapa warga *sedulur sikep* menjalankan pendidikan di sekolah formal. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa keluarga yang sudah mulai terjadi perubahan atas ajaran yang selama ini

diyakini sebagai orang *sikep*. Di bidang pekerjaan, warga *sedulur sikep* konsisten dengan ajarannya, yakni sebagai petani sejati (*tulen*). Sebagai petani, mereka memiliki lahan atau garapan yang menjadi miliknya sendiri (*toto nggauto sing dumunung the-e dewe*), sehingga bisa dipergunakan untuk “*tetanen*” (pekerjaan pertanian) atau “*nenandur*” (pekerjaan tanam menanam). Pekerjaan inilah yang dirasa sangat cocok bagi orang *sikep*, karena pekerjaan bertani hanya mengerjakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Selain itu, sebagian *sedulur sikep* beranggapan bahwa pekerjaan tani mencerminkan kejujuran, dan dengan kejujuran akan melahirkan keadilan.

Pada masa kini, pekerjaan warga *sedulur sikep* sebagian mengalami pergeseran ke arah perdagangan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Mulyono, yang tentunya merupakan larangan bagi kmunitas *sedulur sikep*. Ia melakukan hal ini karena tidak memiliki lahan/garapan sehingga bekerja sesuai dengan kemampuannya, yakni berdagang sambil *mocok* traktor atau lainnya. Baginya, hidup ini yang penting adalah perilakunya yang tidak menyimpang dari *pitutur* para sesepuh terdahulu, yakni jujur atau *ora tipon omongan* (tidak membohongi orang).

Dalam masalah perkawinan, juga ada beberapa *sedulur sikep* yang melaksanakannya dengan tata cara lain, yakni pencatatan nikah melalui KUA. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2010 tercatat 6 orang yang melaksanakan perkawinan di KUA, yakni: keluarga Suwardi, keluarga Kersyad, keluarga Darmo, keluarga Kusmanto, keluarga Sutrisno, dan keluarga Jasman. Mereka melakukan perkawinan semacam ini karena pola pergaulan dengan masyarakat umum, terutama orang-orang di luar *sikep*. Hal ini dimungkinkan karena pola

pemukiman *sedulur sikep* yang berada di tengah-tengah pemukiman umum. Selain itu, hal ini disebabkan oleh pengaruh teknologi modern, seperti: TV, Hp dan sebagainya.

Meskipun hal ini sudah diantisipasi oleh para sesepuh dengan memberikan nasehat agar kawin dengan *wong jero* (orang dalam), tetapi kenyataannya ada beberapa orang sikep yang kawin dengan *wong jobo* (orang luar). Jika terjadi demikian, maka orang tua hanya bersifat mengingatkan (*ngelengke*) kepada anak-anak agar ikut *tatane wong tuo* (tata caranya orang tua). Jika tidak mau diingatkan oleh orang tuanya, maka ditanggung sendiri oleh anaknya, seperti ada *unen-unen* (tuturan) sedulur sikep, yakni: "*tanggung anak, ora tanggung karep*" (anak tetap jadi tanggungan orang tua, tapi keinginan anak jadi tanggungannya sendiri).

Strategi Adaptasi Dalam Perubahan Sosial

Dalam Anthropologi, adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan-perubahan di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa bertahan sehingga mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan atau menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. Jika mereka tidak mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berubah, maka dapat dipastikan eksistensinya akan punah (Winich, 1977, 5). Dalam hal ini, perilaku adaptif yang dilakukan oleh masyarakat *sedulur sikep* terhadap perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi modern dan pembangunan.

Strategi Adaptasi Dalam Menghadapi Teknologi Modern

Dalam teknologi modern, ada dua macam teknologi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan *sedulur sikep*, yakni teknologi pertanian dan teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi pertanian yang dimanfaatkan oleh masyarakat *sedulur sikep* adalah "mesin traktor", yakni alat pengolah tanah/sawah; "mesin selep", yakni alat pengolah hasil pertanian (seperti padi dan jagung). Dengan menggunakan teknologi tersebut, pengolahan lahan dan hasil pertanian menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Karena itu, masyarakat *sedulur sikep* bersikap positif terhadap kehadiran teknologi pertanian itu, sehingga banyak petani *sedulur sikep* yang memiliki alat mesin traktor dan mesin selep.

Sementara itu, teknologi komunikasi dan informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat sedulur sikep adalah televisi (TV) dan handphone (HP). Kedua macam teknologi tersebut memiliki dampak negatif terhadap komunitas sedulur sikep, terutama bagi generasi muda dan anak-anak. Karena itu, para sesepuh mulai mengkhawatirkan dampak negatifnya, sehingga mendirikan sebuah tempat pembelajaran, yang dikenal dengan "*pasinaun*", seperti: *setonan* dan *selasanan*. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengantisipasi dan atau mengurangi dampak negatifnya yang bisa mengakibatkan lupa terhadap *pitutur wong sepuh*. Pembelajaran ini juga dimaksudkan sebagai upaya pelestarian terhadap ajaran *sedulur sikep* yang telah diwariskan oleh sesepuh-sesepuh terdahulu.

Strategi Adaptasi Dalam Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain. Namun, secara umum istilah pembangunan diartikan

sebagai proses untuk melakukan perubahan. Siagian, sebagaimana yang dikutip oleh Fenny (dalam <http://www.com>) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginjar Kartasmita, sebagaimana yang dikutip oleh Fenny (dalam <http://www.com>) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Di daerah ini terdapat rencana pembangunan pabrik "Semen Gresik" yang melibatkan *sedulur sikep*. Dalam pembangunan ini, diperkirakan akan menggunakan lahan seluas 1.432 hektar, yang tersebar di Pati Selatan, yantara lain: desa Kedumulyo, desa Gadudero, Desa Sukolilo, Desa Sumber Suko, Desa Kasiyan, dan Desa Baturejo. Rencana pembangunan ini diperkirakan membutuhkan dana investasi sebesar Rp 5 triliun, dan berkapasitas produksi 3 juta ton/tahun. Jika rencana pembangunan tersebut terealisasi, maka PT. Semen Gresik akan memprioritaskan sumber daya manusia dan alam dari daerah setempat, seperti: bahan baku (*trass* dan tanah *liat*), peralatan transportasi, dan tenaga kerja.

Rencana pembangunan pabrik semen yang demikian menjanjikan ini mendapat tantangan keras dari warga masyarakat, terutama masyarakat *sedulur sikep* di Bombong, Sukolilo, Pati. Komunitas *sedulur sikep* terlibat dalam pertentangan dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Persoalan utama dalam pembangunan pabrik ini adalah rusaknya eko-sistem/lingkungan alam, sehingga mematikan sumber-sumber

mata air. Sementara itu, air bagi *sedulur sikep* merupakan sumber kehidupan dan penghasilan sebagai petani sejati (*mligi*).

Oleh karena itu, pembangunan pabrik semen tersebut tidak hanya mengancam kelestarian alam dan sumber pangan, tetapi juga mengancam kelestarian sejarah dan budaya. Hal ini disebabkan bahwa di beberapa daerah sekitar pegunungan Kendeng ini terdapat situs-situs yang bersejarah, bahkan satwa-satwa yang dilindungi, seperti: burung merak, kijang/rusa, ayam hutan, udang gua, kelelawar dan berbagai burung yang sudah langka. Karena itu, Gubernur Jawa Tengah, Ali Mufiz, mengingatkan kepada masyarakat agar melakukan penyelamatan terhadap kelestarian pegunungan Kendeng. (<http://Gelarseni budaya di Pegunungan Kendeng, diunduh tanggal 31 Oktober 2011>).

Itulah sebabnya, *Wong Sikep* sangat aktif dalam menyuarakan gerakan "*tolak semen*" karena mata air dipandang sebagai sumber kehidupan masyarakat petani. Rencana pembangunan ini ditolak secara tegas akan mengancam keberadaan *sedulur sikep* yang selama ini mengandalkan hasil pertanian maupun air dari pegunungan Kendeng. Hal ini terkait juga dengan keinginan warga *sedulur sikep* agar apa yang selama ini tidak berubah, termasuk pola hidup sederhana yang sudah turun temurun. Selain itu, penolakan *sedulur sikep* ini nampaknya juga dilatar-belakangi oleh sebuah pandangan hidup yang dikenal dengan ajaran Samin (*saminisme*). Perlu diketahui bahwa munculnya *saminisme* sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang dengan cara berpura-pura bodoh, tidak boleh sekolah formal, bahkan tidak boleh berbusana seperti penjajah (Samiyono, 2010: 70).

Dalam kehidupan sekarang, sistem perlawanan yang dilakukan oleh *sedulur sikep* juga bersifat *non konfrontatif*, yakni

perlawanan yang menekankan pada ke-lugu-an dalam *tuturan* (ucapan) *laku lampah* (perilaku). Meskipun komunitas *sedulur sikep* menghadapi tekanan-tekanan yang dahsyat dari pihak penguasa ataupun pemilik modal, mereka tetap menghadapi dan mengkritisnya dengan tenang dan santun. Mereka dipandang oleh *sedulur sikep* telah berlaku tidak adil dan bertindak sewenang-wenang karena mengganggu kelestarian alam, sejarah, dan budaya, sehingga hal semacam ini layak mendapatkan perlawanan. Karena itu, perlawanan yang dilakukan oleh *sedulur sikep* pada hakikatnya adalah perlawanan terhadap “ketidak-adilan” dan “kesewenang-wenangan”.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa agama Adam berbeda dengan agama-agama yang diakui oleh pemerintah pada umumnya. Dalam agama Adam, agama tidak diartikan sebagai sistem kepercayaan yang diyakini untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat, tetapi agama difahami sebagai alat untuk membangun kehidupan sebagai “*wong sikep*”. Bagi penganutnya, tuhan tidak bisa didiskripsikan secara jelas, karena tuhan bukan sosok, bukan nama, tapi *spiritualitas* yang sangat abstrak dan diyakini ada dalam dirinya sendiri.

Di era modernisasi, ajaran *sedulur sikep* mengalami pergeseran meskipun tidak signifikan. Pergeseran ini terlihat pada beberapa warga *sedulur sikep* yang mengikuti sekolah formal (SD), menjalankan perkawinan di KUA, dan bekerja di sektor perdagangan. Karena itu, strategi adaptasi yang dilakukan oleh komunitas *sedulur sikep* adalah senantiasa mengingatkan kepada para pengikutnya agar berpegang teguh (*ngugemi*) pada ajaran leluhur dengan memposisikan keluarga sebagai basis pendidikan moral dan pembentukan sikap hidup.

Dalam menghadapi teknologi pertanian, strategi adaptasi yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi tersebut sebaik-baiknya tanpa mengalahkan tradisi *saminisme* sebagai “*dasar laku*” dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi teknologi informasi dan komunikasi, *sedulur sikep* dihadapkan pada kekhawatiran akan lunturnya tatanan *sikep*. Karena itu, strategi adaptasi yang dilakukan adalah menggalakkan kembali “*pasinaun*” (tempat pembelajaran) bagi generasi *sedulur sikep*, terutama bagi generasi muda dan anak-anak.

Dalam menghadapi globalisasi pembangunan, strategi adaptasi *sedulur sikep* tidak hanya mengangkat isu-isu mitologi dan situs-situs sosial budaya, tetapi juga bekerjasama dengan aktivis sosial budaya, lingkungan hidup, dan akademisi. Karena itu, strategi adaptasi yang dilakukan adalah membangun *resistensi* (perlawanan) terhadap penguasa dengan *non konfrontatif*, yakni perlawanan yang bukan cara kekerasan tetapi dilakukan dengan tenang dan santun yang menekankan pada ke-lugu-an dalam *tuturan* (ucapan) *laku lampah* (perilaku). Perlawanan yang dilakukan oleh *sedulur sikep* pada hakikatnya adalah perlawanan terhadap “ketidak-adilan” dan “kesewenang-wenangan”.

Bertitik tolak dari temuan-temuan tersebut di atas, maka disarankan kepada pemerintah cq Kementerian Agama: a) Hendaknya pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat dalam pembinaan kehidupan keagamaan bagi pemeluk agama lokal sehingga menjamin komunitas *sedulur sikep* dalam mengekspresikan dan melaksanakan agamanya; b) Hendaknya pemerintah mengambil aspek positif ajaran agama Adam untuk bisa dikembangkan sebagai model pembangunan karakter bangsa, seperti: kejujuran, keadilan, kesederhanaan, kebersamaan, toleran, dan tidak merugikan orang lain.

Daftar Pustaka

- Ali, Abdullah, 2007, *Agama dalam Ilmu Perbandingan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia
- Benda, H., and Castles, L., 1969, *The Samin Moverment*, In: *Bijdragen tot de Teal-Land-en Volkenkunde* 125 (1969), no: 2, Leiden, 207-240
- Desantara, 2002, *Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Samin*, edisi 06/ Tahun 11/2002
- Endraswara, 2006, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Idiologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widiatama.
- Geertz, Clifford, 1985, *Abangan, Santri, dan Priyayi, dalam Masyarakat Jawa*, terj. Jakarta: Pustaka Jaya, Cet. II
- Gunretno, 2002, *Keprihatinan Bumi Pertiwi*, makalah disampaikan dalam diskusi publik di Jakarta tanggal 27 November 2002
- Hendropuspito, 1984, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hutomo, Suripan Sadi, *Bahasa dan Sastra Lisan Orang Samin, Basis*, januari 1983
- , *Masyarakat Samin Ing Daerah Ngraho*, FKSS – IKIP Surabaya.
- King, Victor T, 1973, *Some Observations on The Samin Moverment of North Central Java*, In: *Bijdragen tot de Teal-Land-en Volkenkunde* 129 (1973), no: 4, Leiden, 457-481
- Miles and Hubberman, 1992, *Expanded Sources, Books, Qualitative Data Analysis*, Sage, Publications
- Mudzhar, M. Atho', 2006, *Evaluasi Kebijakan Teknis Kelitbangan dan Kediklatan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kkementerian Agama RI
- Munfangati, Titi, 2004, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Yogyakarta: Jarahmitra
- Rosyid, Moh, 2008, *Samn Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samiyono, David, 2010, *Sedulur Sikep: Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukalila*, Salatiga: Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW
- Shiraishi, Takashi, *Dangger's Testimony: Saminism Reconsidered*, The seminar "multilingualism in Indonesia" organized by Benedict Anderson in Agustus 1981
- Syamsul, Arifin, 2009, *Studi Agama, Perspektif Sosiologis dan Issu-issu Kontemporer*, Malang, UMM Press
- Wininch, Charles, 1977, *Dictionary of Anthropology*, New Jersey, Littlefield, Adam & Co.

Model Penanganan Konflik Keagamaan antara “Jama’ah” Qur’ani dan “Jama’ah Qur’an Sunnah” di Desa Cibumar, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

Asep Achmad Hidayat

Pengasuh Pesantren Tasauf Zawiyah Darusshufi, Garut

Abstract

The group of Jamaah Qurani has different theologic thought and religious teachings with other s, especially in faith and religius services (mahdhoh and mu`amalah). Other factor that could be made more to the conflict are competitive and fight on economic resources, unsolutiable individual problem and religious organization. The solution to handle the conflicts is in the form of a certain model done the society. The methods used of this study are interview and observation in the field.

Keywords: local wisdom, religious community, conflict

Abstrak

Kelompok Islam Jama’ah Qur’ani ditengarai memiliki pemikiran teologis dan ajaran syari’ah yang berbeda dengan doktrin teologis dan syari’ah kelompok Islam lainnya, meliputi bidang aqidah, ibadah mahdhoh dan mu’amalah. Akan tetapi, faktor-faktor yang lain turut mewarnai pemicu konflik berbasis sosial di Cibumar Tarogong Kidul Garut. Seperti persaingan dan perebutan sumber ekonomi, masalah individu yang belum terselesaikan dan masalah organisasi keagamaan. Solusi penanganan konflik di daerah ini menampilkan model tersendiri dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri pula. Metode penelitian ini yakni pendekatan deskriptif analitik pada studi kasus dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan.

Keywords: kearifan lokal, jemaah agama, konflik

Latar Belakang

Salah satu dari berbagai kelompok keagamaan dalam Islam yang muncul di Indonesia sekarang ini adalah kelompok “Jamaah Islam Qur’ani”. Kelompok ini memiliki paham yang berbeda dengan pemahaman Islam pada umumnya. Mereka yang terlibat dalam kelompok keagamaan ini berpandangan bahwa hanya al-Qur’an satu-satunya sumber hukum, atau, hanya al-Qur’an yang diakui dan diterima menjadi dasar hukum dalam Islam.

Gerakan Jamaah Islam Qur’ani ini muncul dan tampak dengan terang-terangan mengembangkan pahamnya di Indonesia sekitar 1978. Kelompok ini lebih dikenal dengan sebutan “Jamaah Inkarussunah”. Namun sebutan “inkarussunah” tersebut oleh kelompok ini ditolak, mereka lebih suka menyebut kelompoknya sebagai “Jamaah Qur’ani” atau “orang Qur’an”, karena hanya al-Qur’an-lah yang mereka jadikan sumber ajaran yang benar.

Pada tahun 1970-an “Jamaah Qur’an” ini hanya berkembang di Jakarta, namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya adalah Kabupaten Garut. Salah satu wilayah di daerah Garut yang mendapat sentuhan gerakan “Jamaah Qur’an” adalah Kampung Cibunar Girang, Kecamatan Tarogong Kidul.

Sebelum datang gerakan “Jamaah Qur’ani”, masyarakat Cibunar terpolarisasi ke dalam empat tradisi pemahaman keagamaan, yaitu ahlussunah wal jama’ah (NU), Muhamadiyah, Syarikat Islam (SI/PSII), dan Persatuan Islam (PERSIS). Selama itu mereka hidup rukun, saling menghargai satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Akan tetapi setelah datang kelompok “Jamaah Qur’an” masyarakat Cibunar mengalami perubahan yang sangat dinamis, yaitu berupa persaingan yang ketat antara kelompok “Jamaah Qur’an” dan kelompok di luar “Jamaah Qur’an”; yaitu NU, Muhamadiyah, Syarikat Islam Indonesia (PSII), Sunnah. Persaingan itu berujung pada konflik sosial antara dua kelompok keagamaan tersebut.

Peristiwa konflik antara dua kelompok keagamaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2002, di mana terjadi perkelahian antara pemuda dari kedua kelompok. Kemudian pada 7 November 2002 terjadi perdebatan yang sengit mengenai “aqidah Islam” dan “fiqh”. Perdebatan itu berujung pada perkelahian masal antara kelompok “Jamaah Qur’an” dan “Jamaah Qur’an Sunnah”. Dalam peristiwa tersebut “mesjid milik Jamaah Qur’an” dirusak oleh masa dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai “Jama’ah Qur’an Sunnah”.

Semenjak peristiwa konflik antara dua kelompok keagamaan tersebut (tahun 2002 M) sampai dengan tahun 2012

M, tidak ditemukan lagi konflik di antara mereka. Bahkan menurut pengamatan langsung penulis, kehidupan mereka menunjukkan keharmonisan. Hidup mereka saling toleran, berdampingan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Fenomena sosial semacam itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Dalam peristiwa tersebut selain mengandung sosial probleme masyarakat Islam, juga terdapat beberapa permasalahan lain yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian ilmiah. Beberapa permasalahan dalam peristiwa tersebut, diantaranya: dalam aspek apa terjadi perbedaan paham antara kedua kelompok keagamaan tersebut? Faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik antara kelompok “Jamaah Qur’an” dan kelompok “Jamaah Qur’an Sunnah? Dan bagaimana upaya penyelesaian konflik di antara keduanya?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara rasional empiris mengenai proses terjadinya konflik sosial tersebut dan untuk menemukan model penanganan konflik apa yang telah dilakukan oleh keduanya. Aspek ini akan sangat bermanfaat secara akademis maupun praktis di dalam upaya mencari model penyelesaian konflik sosial keagamaan yang akhir-akhir ini sering muncul di berbagai belahan wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori deskriptif atau lebih khusus lagi disebut deskriptif mendalam, yang tidak terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data tersebut. Deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai peristiwa konflik, ajaran, dan usaha yang dilakukan oleh kedua kelompok atau

lembaga lain dalam upaya mengatur konflik yang telah terjadi antara kedua kelompok yang bertentangan. Karena itu metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Gambaran Lokasi Penelitian

Secara administratif, Desa Cibunar, termasuk dalam kawasan atau wilayah Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa Cibunar terletak di sebelah ibu kota kecamatan Tarogong Kidul. Jarak tempuh Desa Cibunar dari Kecamatan Tarogong Kidul kurang lebih 2 Km, dari ibu kota pusat pemerintahan Kabupaten Garut sekitar 4 Km, dan dari Bandung kurang lebih 67 Km ke arah selatan.

Dilihat dari topografis, wilayah Cibunar berada di daerah dataran tinggi. Ketinggian dpl-nya adalah 1100 m di atas permukaan laut. Karena itu udara di wilayah ini terasa dingin hampir sebanding dengan udara di daerah dataran tinggi Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dan daerah tinggi Pangalengan Kabupaten Bandung

Sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat pendidikan masyarakat Cibunar yang rata-rata hanya menempuh pendidikan rendah (SD dan SLTP), maka mata pencaharian mayoritas penduduk desa Cibunar adalah bertani, terutama sebagai buruh tani. Kondisi seperti ini diperparah oleh kepemilikan tanah pertanian (sawah dan ladang) yang berada di wilayah desa Cibunar sebagian besar dikuasai oleh penduduk luar, terutama orang kota yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan penduduk Cibunar. Dari 4.895 jumlah penduduk Cibunar, terdiri dari 2.472 laki-laki dan 2.423 orang perempuan, hanya 176 orang yang bekerja sebagai PNS/TNI dan Porli.

Sementara itu, agama yang dianut mayoritas penduduk Cibunar adalah agama Islam. Sisanya adalah penganut Kristen Protestan sebanyak 64 orang, penganut Katolik sebanyak 8 orang, penganut agama Hindu sebanyak 5 orang. Dan seorang menganut agama kepercayaan, yang berpandangan bahwa ibadah itu cukup hanya dengan ingat (eling) kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak usah melakukan ritual apa pun, yang terpenting berkelakuan baik dan rukun dengan sesama.

Meskipun mayoritas penduduk Cibunar menganut agama Islam, namun masih banyak diantara mereka yang mempercayai adanya hantu gentayangan, kunti lanak, genderewo, dan dewi sri atau mayat yang tidak diterima oleh bumi karena menganut ilmu-ilmu tertentu. Masih ditemukan juga beberapa warga di kampung Cibunar Hilir dan kampung Cibunar Girang yang mempraktikkan “sesajen” dengan makanan dan minuman serta membakar kemenyan di atas bara api setiap malam Selasa dan malam Jum’at serta pada hari-hari tertentu seperti pada musim panen dan yang lainnya. Bahkan masih ditemukan juga orang-orang yang bertapa di “kuburan” dan tempat-tempat tertentu yang dianggap angker.

Akan tetapi secara prinsipil aliran atau faham keagamaan yang dianut sebagian besar masyarakat Cibunar tidak jauh berbeda dengan aliran atau faham keagamaan yang dianut kaum Muslim Indonesia pada umumnya. Dilihat dari aspek teologis atau sudut pandang ilmu kalam (*ilmu tauhid*) masyarakat muslim di Cibunar dapat dikategorikan sebagai penganut “Sunni” (ahlusunah wal-jamaah), yaitu suatu paham teologi yang dibangun oleh Imam al-“As’ari” dan diinterpretasi lebih lanjut oleh Imam al-Maturidhi dari Samarkand (Uzbekistan) kawasan Asia Tengah.

Kemudian, jika dilihat dari aspek “fiqh” (syari’ah dalam arti

sempit) terutama dari segi *metodologi* pengambilan hukum Islam, masyarakat muslim di Cibunar pada umumnya termasuk penganut faham "*fiqh*" yang dikembangkan oleh para imam mazhab dari kalangan Sunni. Meskipun secara tidak langsung menyatakan dirinya (kecuali NU), di Indonesia aliran atau faham "*fiqh*" yang dikembangkan imam mazhab tersebut diwakili oleh enam *agregat* atau kelompok aliran besar Islam di Indonesia, yaitu Syarikat Islam/Syarikat Islam Indonesia (PSII), NU, Muhamadiyah, Persis, Perti dan Matalul Anwar. Sebelum Indonesia merdeka, beberapa kelompok keagamaan tersebut telah menapakkan kakiknya di Cibunar yaitu SI/PSII, NU, Muhamadiyah, dan PERSIS. Keempat agregat kelompok keagamaan tersebut telah lama mempengaruhi corak pemikiran dan faham serta praktik keagamaan masyarakat muslim Cibunar secara keseleruhan.

Selain itu, di Cibunar juga berkembang pemahaman-pemahaman dan praktik keagamaan bercorak "*sufistik*". Hal ini dapat dilihat dari praktik ritual yang berkembang dan berulang di kalangan masyarakat Cibunar, khususnya kelompok keagamaan yang berorientasi pada mazhab "*syafi'iyah*" (NU dan SI/PSII). Diantara ritual yang menunjukkan pada fenomena tersebut adalah kegiatan "*istigosah*" setiap malam Jum'at, *sholawatan*, *dzikir bersama* pada hari-hari tertentu, dan "*nadhoman atau pupujian*" yang sering dilantunkan oleh kaum muslim (baik orang tua maupun muda).

Jama'ah Qur'ani Cibunar

Sejarah dan Perkembangan

Orang pertama yang memperkenalkan dan mendakwakan ajaran (paham) kelompok "*Jama'ah Qur'ani*" adalah seorang pemuda asal luar wilayah Cibunar, tepatnya berasal

dari Kampung Pasar Kemis, desa Jati, Tarogong Kaler; yaitu bernama Ustad Diyan. Aktifitas kesehariannya Diyan adalah sebagai seorang mubalig "*Jama'ah Qur'ani*" yang berceramah keliling Indonesia.

Pola dakwah yang dikembangkan Diyan untuk menarik orang masuk ke dalam kelompoknya adalah melalui jalur pernikahan dan pola dakwah ekonomi. Pada tahun 1997 Diyan menikahi gadis asal kampung Cibunar Girang, anak gadis Koko, seorang terpendang di Kampung Cibunar Girang. Melalui pernikahan ini Diyan selanjutnya mengajak Koko dan istrinya untuk menjadi anggota "*Jama'ah Qur'ani*".

Setelah mendapat pengaruh dari Diyan, Koko merubah pandangannya mengenai dasar tasyri dan sumber hukum Islam yang selama ini ia yakini, yaitu Qur'an dan Sunnah Nabi, menjadi aliran Qur'ani yang tidak mengakui hadist Nabi atau al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Kemudian setelah itu, ia bersama menantunya itu membuka kelompok pengajian al-Qur'an di kampung Cibunar Girang. Kegiatan pengajian itu dinamakan oleh Koko dan Diyan dengan nama "*Jama'ah Qur'ani*". Melalui kegiatan pengajian al-Qur'an tersebut, selanjutnya Koko dan Diyan mengajak anggota kerabat dan tetangga terdekanya untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat anggota pengajian "*Jama'ah Qur'ani*" terus meningkat jumlahnya hingga mencapai puluhan orang.

Pokok Ajaran "*Jama'ah Qur'ani*"

Ajaran utama yang dikembangkan kelompok "*Jama'ah Qur'ani*" Cibunar adalah penolakan mereka terhadap hadist Nabi Saw sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Mereka beralasan bahwa "*cukuplah bagi kami Kitabullah*

(al-Qur'an saja) karena didalamnya telah disebutkan semua urusan agama beserta penjelasan dan perinciannya, sehingga kaum Muslim tidak perlu lagi hadist Nabi sebagai sumber syari'at dan tidak perlu lagi mengambil hukum darinya". (Wawancara dengan H.Fu'ad, mantan Kepala Desa Cibunar, pada tanggal 9 Nopember 2003).

Mereka juga menyatakan, bahwa "hadist bukanlah wahyu Allah, namun merupakan perkataan manusia yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan cara penipuan dan pemalsuan, dimana wahyu tidak memiliki campur tangan dalam hal kemunculan hadist Nabi Saw dan tidak ada satu pun wahyu yang turun kepada Nabi Saw kecuali al-Qur'an". Karena itu menurut mereka, mengikuti hadist Nabi Saw dan melaksanakannya adalah suatu perbuatan syirk terhadap hukum Allah, karena Dia Allah telah menerangkannya di dalam al-Qur'an.

Pernyataan ini senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh *Abdullah bin Abdullah al-Jakrawali*, tokoh Ingkar Sunnah asal Punjab, Pakistan. Ia mengatakan bahwa "sesungguhnya kita tidak diperintahkan kecuali untuk mengikuti wahyu Allah". "Seandainya kita, lanjut al-Jakrawali, seandainya kita anggap benar penisbatan beberapa hadist kepada Nabi Saw dengan periwayatan yang pasti, maka betapa pun shahihnya penisbatan itu maka tetap tidak diwajibkan untuk diikuti karena ia bukan wahyu Allah". (Asep Achmad Hidayat, 2008: 12)

Selanjutnya, secara garis besar terdapat tiga kelompok ajaran "Jama'ah Qur'ani" yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan kelompok Islam lainnya, yaitu *aqidah*, *ibadah mahdoh* (fiqh dalam kategori umum), dan *ibadah mu'amalah*. Dalam bidang *aqidah*, mereka hanya menekankan kewajiban taat kepada Allah Swt, tidak kepada Rasul Saw. Alasannya, karena Rasulullah Saw

telah wafat. Apabila kita mengambil ajaran selain dari apa yang disampaikan dalam al-Qur'an berarti kita telah taat kepada dua ajaran. Ini adalah perbuatan syirk. Nabi Saw hanya menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Swt, karena itu tidak boleh ada ajaran yang diluar al-Qur'an itu, seperti apa yang disebut hadist atau sunnah itu. Semua itu palsu, ini terbukti banyaknya hadist-hadist yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang satu dhaip yang satu tidak, dan bahkan banyak hadist-hadist yang bertentangan dengan al-Qur'an.

Bidang *ibadah mahdoh* yang disentuh oleh "Jama'ah Qur'ani" adalah mengenai sholat. Sholat dalam pandangan mereka adalah melakukan permohonan kepada Allah SWT, oleh karena itu tidak boleh ada perbuatan atau kata-kata di luar dari permohonan terhadap Allah Swt. Seperti cerita, salam kepada orang lain, menengok ke kiri dan ke kanan. Sholat pada hakikatnya adalah hubungan dengan Allah Swt, kapan saja dan di mana saja. Sholat Nabi Saw adalah memberikan atau menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah melalui malaikat Jibril kepada ummatnya, atau dengan kata lain Nabi mengajarkan al-Qur'an kepada ummatnya itulah sholat bagi Nabi Saw. Hal ini karena Nabi Saw diperintahkan sholat supaya "sholli" atas mereka (al-Taubah/103), di mana *shollinya* itu akan memberikan ketenangan. Dengan demikian, kata mereka, bisa diambil suatu gambaran masalah yang berkaitan dengan sholatnya Nabi Saw adalah terdapat dalam Qur'an surat al-Taubah ayat 103 itu adalah dengan menyampaikan "ayatul bayyinah", yang diwahyukan kepada Nabi sebagai "yusholli Allah dan malaikat-Nya, agar manusia keluar dari kegelapan.

Selain mengajarkan konsep "sholat" yang berbeda dengan konsep "sholat" kelompok Islam lainnya, "Jama'ah Qur'ani" juga mengajarkan beberapa

ajaran tentang *ibadah mahdoh* lainnya yang sangat kontras perbedaannya dengan cara dan tata cara (*kaifiyat*) kaum muslim pada umumnya. Menurut Jama'ah Qur'ani, waktu buka shaum (*ta'zil*) di waktu Ramadhan adalah bukan setelah azan magrib, melainkan malam sekitar pukul 21.00. Alasannya, kumandang azan bukan untuk menyuruh buka puasa, tapi untuk memberi tahu kepada kaum muslim bahwa *waktu sholat* telah tiba.

Kemudian Sholat yang diperintahkan Allah hanyalah shalat malam (*tahajud*), sholat Jum'at, dan sholat shubuh. Pelaksanaan sholat tidak usah pakai rukuk atau sujud, cukup ingat saja kepada Allah Swt. Dalam shalat itu tidak ada ucapan salam, atau menengok ke kiri dan ke kanan. Sebab salam itu ditujukan kepada manusia, bukan kepada Allah Swt. Dan salam itu harus dijawab oleh orang yang mendengarnya. Tapi anehnya, orang yang disebelahnya pun melakukan hal yang sama.

Shalat Jum'at diperintahkan kepada semua kaum muslim, laki-laki maupun kaum wanita. Prakteknya tidak seperti apa yang telah dilaksanakan kaum muslim pada umumnya, tetapi hanya mendengar ceramah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an. Bayi dan anak-anak kecil pun boleh dibawa ke dalam ruangan mesjid ketika shalat "Jum'at" dilaksanakan.

Ucapan dua kalimah shahadat pada waktu berlangsungnya akad nikah seperti yang dilakukan kaum muslim sekarang ini tidak ada tuntunan. Karena itu tidak boleh dilaksanakan. Bacaan shahadat hanya dilakukan ketika seseorang hendak masuk agama Islam, di luar itu tidak ada perintah dalam al-Qur'an. Syighatnya adalah "Isyhadu bianna Muslimun".

Apabila mendengar surat *al-Fatihah* dibaca, dan ketika akhir surat dibacakan sampai lafadz "*waladhollin*" tidak boleh membaca kata "amiin" bagi yang membacaknya maupun yang

mendengarkannya. Jika ia membaca lafadz "amiin" artinya mengiyakan dan menyetujui jalan kesesatan (*al-dhdhalliin*). Ini sesuatu hal yang tidak logis dan tidak ada perintah Allah dalam al-Qur'an. (Wawancara dengan H.Fuad pada tanggal 9 Nopember 2003)

Terakhir, bidang "*mua'amalah*". Bidang "*muamalah*" yang disentuh oleh kelompok "Jama'ah Qur'ani" adalah mengenai perintah "zakat kepada kaum muslim. Menurut mereka "zakat" itu hanyalah terdiri dari infaq dan shadaqah. Infak gunanya untuk mensucikan jasmani, dan shadaqah gunanya adalah untuk mensucikan peralatan hidup. Seorang muslim yang tidak melaksanakan "*infaq*", maka gugur imannya, menjadi orang kafir.

Penyebab Terjadinya Konflik.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat tiga faktor utama penyebab terjadinya konflik antara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah, yaitu karena perbedaan ajaran, perebutan sumber ekonomi dan solidaritas kelompok.

Diantara ajaran atau paham yang menimbulkan konflik di antara kedua kelompok keagamaan tersebut adalah mengenai perbedaan paham dalam menentukan sumber hukum Islam. Bagi kelompok "Jama'ah Qur'ani" sumber hukum dan dasar tasyri' (*syari'at Islam*) cukuplah al-Qur'an saja, menolak hadist Nabi atau al-Sunnah. Sedangkan bagi kelompok keagamaan lainnya seperti NU, SI Indonesia/PSII, PERSIS, dan Muhammadiyah tidak hanya al-Qur'an yang dijadikan sumber hukum dan dasar tasyri', tapi juga al-Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Perbedaan tentang penentuan sumber hukum dan dasar tasyri' tersebut kemudian dipertajam oleh paham

furu'iyah yang diajarkan oleh kelompok "Jama'ah Qur'ani" seperti penolakannya terhadap adanya kehidupan di alam barzah, penolakan zakat fitrah, dan kaifiyat sholat yang hanya cukup dengan ingat saja atau dengan cara mengajarkan al-Qur'an dan ceramah.

Sebagai reaksi dari pandangan yang bertentangan dengan pandangan atau ajaran yang sudah mapan selama ini, maka kaum muslim yang tergabung dalam ormas Islam NU, SI Indonesia/PSII, PERSIS dan Muhammadiyah membentuk "jama'ah" tandingan dengan menyebut dirinya sebagai "Jama'ah Qur'an Sunnah". Implikasi dari terbentuknya "Jama'ah Qur'an Sunnah" secara spontan dan kultural itu, maka konflik antara kelompok sosial dalam masyarakat Cibunar menjadi terbuka dan diwakili oleh dua kelompok sosial, yaitu "Jama'ah Qur'ani" dan "Jama'ah Qur'an Sunnah".

Manipulasi konflik dari dua kelompok sosial keagamaan tersebut pada awalnya hanya debat-debat biasa antar individu di mesjid Jamik Cibunar Girang. Persoalan yang diperdebatkan pada waktu itu mengenai ajaran Islam dan praktik ritual yang biasa mereka kerjakan sehari-hari seperti sholat, shaum dan cara mempelajari al-Qur'an. Lama kelamaan, sesuai dengan proses waktu, perdebatan antar individu anggota masyarakat Cibunar Girang tersebut berkembang pada ajaran-ajaran Islam yang prinsipil, terutama mengenai sumber hukum dan dasar tasyri'. Karena seringnya terjadi perdebatan diantara mereka, akhirnya perdebatan tersebut melibatkan beberapa tokoh dari kedua belah pihak. Pada tanggal 23 Desember 2001 terjadi perdebatan yang sangat sengit dan memanas antara tokoh "Jama'ah Qur'ani" dengan tokoh agama setempat, yaitu antara Koko (orang Cibunar menyebutnya "Mang Koko") dari kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan Iding (Muhamadiyah), Dadeng (Muhamadiyah) serta Encuk

(NU) di Mesjid Jamik Cibunar Girang. Perdebatan tersebut disaksikan oleh masa dari dua kelompok.

Sejak peristiwa itu, keluarga Koko dan anggota jama'ahnya memisahkan diri dari tata pergaulan masyarakat Cibunar. Sebelumnya mereka sangat aktif dalam acara pengajian rutin satu minggu sekali setiap malam rabu. Koko dan anggota jama'ahnya sejak itu cenderung eksklusif. Mereka tidak mau saling tegur sapa (*teu patanya: tidak saling menanya*) satu dengan yang lainnya. Masing-masing kelompok merasa tidak senang jika berhadapan keduanya. Persaingan dan konflik laten (Sunda: *ngageremet*) di dalam mendapatkan pengaruh dari anggota masyarakat di antara kedua tokoh itu pun tidak dapat dihindarkan, bahkan berujung pada saling memojokkan dan menyalahkan. Masing-masing kelompok merasa benar sendiri akan ajaran yang dianutnya.

Persaingan dan konflik laten di antara dua kelompok (jama'ah), terutama antara tokoh kedua belah pihak, diperuncing oleh persaingan mereka dalam memperebutkan sumber ekonomi. Mereka bersaing dalam penguasaan pasar pengrajin "telapak" (talapak) kuda dan perkakas rumah tangga. Mereka juga bersaing di dalam mendapatkan pasokan bahan produksi seperti tembaga, perak, besi, baja dan yang lainnya. Dalam persaingan ini kelompok "Jama'ah Qur'ani" lebih unggul dari kelompok pengrajin lainnya karena mereka mendapat aliran dana dari anggota "Jama'ah Qur'ani" yang bekerja di Australia. Hampir setiap bulan mereka mendapatkan sumbangan dana hibah untuk pengembangan "Jama'ah Qur'ani" di Kabupaten Garut. Melalui dana hibah inilah mereka melakukan pengembangan dakwah "Jama'ah Qur'ani" di daerah Cibunar dan sekitarnya.

Sebagai akibat dari persaingan tersebut, kelompok "Jama'ah Qur'ani"

menjadi terasingkan dari tata pergaulan masyarakat Cibunar. Akhirnya mereka mengadakan kegiatan keagamaan tersendiri, terpisah dari aktifitas keagamaan masyarakat Cibunar. Mereka melakukan pengajian sendiri, sholat dan menyembelih qurban sendiri dan lain-lain. Kultorisasi di antara anggota kelompok "Jama'ah Qur'ani" berjalan mulus secara alamiah. Akibatnya, ketegangan dan saling curiga diantara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan "Jama'ah Qur'an Sunnah" tidak dapat dihindarkan. Konflik terbuka pun kembali terjadi.

Pada 21 Maret 2002 terjadi perkelahian antara dua pemuda dari masing-masing kelompok, yaitu antara Rohman (anggota Jama'ah Qur'ani) dan Dadan (Ketua Tarka Cibunar Girang). Perkalihan ini dipicu oleh sikap arogansi Rohman yang menyatakan bahwa do'a di luar kelompok "Jama'ah Qur'ani" tidak akan diterima oleh Allah Swt karena tidak berdasar pada al-Qur'an. Pada waktu itu sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Tarang Karuna (Tarka) sedang melakukan pekerjaan gotong royong membangun rumah salah seorang warga Cibunar Girang. Dalam tradisi masyarakat setempat, jika akan membangun sebuah rumah biasanya didahului oleh doa'a bersama. Tiba-tiba Rohman datang dari arah selatan sambil mengejek dan mengolok-olok para pemuda yang sedang khusus berdo'a. Ia mengatakan: "Do'a kalian percuma, tidak akan dikabul, karena kamu banyak dosa".(Wawancara dengan Dadan, Ketua Tarka pada tanggal 12 Juni 2012, dan diperkuat oleh Ujang Oleh (Saksi peristiwa) pada tanggal 5 Agustus 2012).

Perkataan Rohman tersebut mendapat respon dari Dadan. Dadan melakukan bantahan atas pernyataan Rohman tersebut. Perdebatan pun tidak bisa dihindarkan, dan akhirnya berujung pada adu jotos antara Dadan dan Rohman. Menjelang waktu magrib,

sekelompok pemuda bukan anggota kelompok "Jama'ah Qur'ani" berkumpul di depan Gardu Ronda di Jl. Desa. Mereka berkumpul untuk menyerang kelompok "Jama'ah Qur'ani". Motivasinya adalah solidaritas kelompok dan "jihad" menentang ajaran "Jama'ah Qur'ani". Di bawah komando Dadan, sekelompok pemuda itu langsung menyerang anggota "Jama'ah Qur'ani". Rumah dan mesjid milik kelompok "Jama'ah Qur'ani" dilempari batu dan dirusak. Kemudian dibalas pula oleh para pemuda dari kelompok "Jama'ah Qur'ani", maka perkelahian pun pecah di antara mereka. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, kecuali rumah dan mesjid rusak gentengnya.

Selain karena faktor solidaritas dan perbedaan paham, penyerangan sekelompok pemuda terhadap rumah dan mesjid milik "Jama'ah Qur'ani" tersebut, juga didorong oleh semangat penentangan terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap sesat. Kebetulan, dua hari sebelum terjadi penyerangan (19 Maret Malam 2001), di Kampung Cijambe (Desa Kersamanah) yang berbatasan langsung dengan Desa Cibunar, telah terjadi penyerangan terhadap rumah dan mesjid milik LDII. Dalam peristiwa itu dua rumah dan satu mesjid di bakar massa. Peristiwa penyerangan ini secara psikologis telah memberi dorongan pada sekelompok pemuda yang anti kelompok "Jama'ah Qur'ani" untuk melakukan hal yang sama.

Semenjak peristiwa penyerangan dan perkelahian antar pemuda 21 Maret 2001 itu, ketegangan antara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah" terus berkembang. Pada 7 November 2002 konflik terbuka berupa perkelahian massa antara pemuda dari kedua kelompok kembali terjadi. Peristiwa ini sebagai akibat dari perdebatan sengit antar tokoh dari kedua kelompok keagamaan tersebut yang tidak menghasilkan kesepakatan.

Penanganan Konflik

Usaha seseorang atau kelompok sosial meredakan suatu konflik untuk mencapai suatu harmoni atau kestabilan dinamakan "akomodasi". Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri pada keadaan tersebut dengan cara bekerja sama. Diantara bentuk akomodasi adalah berupa paksaan (*coercion*), kompromi (*compromise*), arbitrase (*arbitration*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), dan toleransi (*tolerance*).

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah" dapat digolongkan pada tiga model penanganan konflik, yaitu *mediasi daq'n ajukasi kepolisian*, tekanan *jagerisme*, dan *toleransi*.

Mediasi dan Ajukasi Kepolisian

Mediasi ialah penghentian pertikaian oleh pihak ketiga dengan tidak memberikan keputusan yang tidak mengikat. Dalam kasus konflik antara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah" upaya mediasi untuk mencari jalan kompromi antara dua belah pihak yang bertikai dilakukan oleh aparat Desa Cibunar. Mediasi ini dilakukan beberapa kali, namun kesepakatan untuk menghentikan pertikaian di antara dua kelompok tersebut tidak dapat dicapai. Masing-masing kelompok mempertahankan alasannya. Kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah" justru menghendaki pembubaran paksa terhadap aktifitas pengajian dan praktik ibadah kelompok "Jama'ah Qur'ani".

Karena konflik antara kedua kelompok keagamaan tersebut semakin memanas dan meruncing, maka Kepala Desa Cibunar, Haji Fu'ad (yang merupakan

aktifis Muhamadiyah) berinisiatif mencari tahu mengenai ajaran yang dikembangkan oleh kelompok "Jama'ah Qur'ani". Selama tiga hari ia melakukan "anjang sono" dan wawancara kepada tokoh "Jama'ah Qur'ani", Koko, dan beberapa anggota jama'ah kelompok ini. Dari hasil anjang sono tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan mengenai ajaran "Jama'ah Qur'ani" yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya.

Temuan Haji Fua'd dari anjang sono tersebut kemudian disampaikan dalam pertemuan (musyawarah) yang dihadiri oleh para tokoh agama, ketua RT dan RW, para pemuda, aparat desa dan anggota BPD di Mesjid Jamik Cibunar Hilir pada tanggal 12 November 2002. Musyawarah yang dipimpin anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) itu menghasilkan kesimpulan tentang penyimpangan ajaran "Jama'ah Qur'ani" dari ajaran Islam yang sebenarnya dan selanjutnya merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Garut untuk segera melakukan penyegelan tempat kegiatan kelompok "Jama'ah Qur'ani".

Lembaga pemerintah yang merespons surat rekomendasi tersebut hanyalah Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Garut. Dalam hal ini Kepala Kapolres Garut mengintruksikan kepada Kasad Reserse, Sukriawan, memanggil Diyan untuk diminta keterangan seputar ajaran yang telah disampaikannya pada anggota "Jama'ah Qur'ani" Cibunar. Hasil pemeriksaan kepolisian tersebut menyebutkan bahwa Diyan tidak mengakui seluruh ajaran yang disampaikannya itu menyimpang dari ajaran Islam. Entah bagaimana kabar beritanya, pihak kepolisian Garut pun tidak jadi menyegel tempat yang dijadikan kegiatan pengajian dan ibadah kelompok "Jama'ah Qur'ani" tersebut. Padahal keinginan mayoritas masyarakat Cibunar mengharapkan penyegelan sementara agar emosi para pemuda terkendali..

Sikap dari kepolisian dan MUI serta pemerintah Kabupaten Garut yang tidak merespons baik atas usulan masyarakat Cibunar tersebut telah mengakibatkan kekecewaan mendalam sehingga konflik pun terus berlangsung sampai tahun 2004. Beberapa insiden kecil berupa pertikaian mulut diantara anggota kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan anggota masyarakat Cibunar Girang lainnya sering terjadi. Begitu pula perkelahian kecil di antara pemuda dari kedua kelompok tersebut, meskipun tidak dalam bentuk masal, sering terjadi dalam event-event tertentu seperti perkelahian akibat kalah dalam pertandingan sepak bola dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan yang lainnya.

Tekanan "Jagerisme".

Untuk mencegah pertikaian lebih lanjut antara dua kelompok keagamaan tersebut, Kepala Desa Cibunar (H.Fu'ad) menunjuk Supriatna, seorang pemuda asal Kampung Cibunar Girang untuk menanganinya. Penunjukan itu didasarkan atas kewibawaan Supriatna sebagai seorang pemuda yang sangat ditakuti oleh warga setempat. Orang setempat menyebutnya sebagai "jager", yaitu sebutan lokal untuk istilah "preman" atau orang yang memiliki *charisma* dan ditakuti oleh semua pihak karena memiliki kemampuan dalam ilmu bela diri, baik ilmu "kanuragan" maupun ilmu-ilmu magis tertentu.

Model penanganan konflik yang dilakukan Supriatna untuk menghentikan konflik diantara kedua kelompok tersebut adalah model "jagerisme", yaitu berupa tekanan, paksaan dan ancaman. Mereka yang bertikai dipaksa untuk berdamai, saling menghormati satu sama lainnya, dan jika diantara mereka yang berkelahi karena persoalan pemahaman agama yang dianut salah satu kelompok maka mereka akan disiksa (*ditenggeulan,*

digebugin) sampai babak belur tanpa kecuali.

Model penanganan seperti itu ternyata sangat efektif. Setelah mendapat tekanan "model jagerisme" itu kelompok yang bertikai berhenti dan berusaha melakukan pendekatan masing-masing untuk mencari kompromi. Ketika laporan ini ditulis, suasana masyarakat Cibunar Girang dalam keadaan harmonis, terkendali dan aman. Aktifitas sosial ekonomi dan kehidupan beragama pun berjalan sebagaimana biasanya. Masing-masing kelompok yang bertikai mampu mengendalikan emosinya.

Kekuatan tekanan dan paksaan "model jagerisme" itu semakin ampuh setelah Supriatna menjadi "Kepala Dusun (Kadus)" Cibunar Girang. Dengan gaya kepemimpinan "jagerisme"-nya ia mampu mengendalikan kelompok-kelompok yang bertikai, khususnya pertikaian antara kelompok keagamaan "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah".

Toleransi: Merujuk pada Kearifan Lokal

Terciptanya harmoni kembali antara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah" tersebut, juga disebabkan oleh perubahan sikap dan prilaku para tokoh dari masing-masing kelompok. Mereka menyadari bahwa konflik terus menerus diantara mereka akan merugikan kedua belah pihak dan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Cibunar. Para tokoh dari kedua kelompok itu mengakui realitas yang sebenarnya, bahwa memang betul ada perbedaan pemahaman diantara keduanya. Untuk itu, toleransi yang harus dimunculkan, bukan konflik, karena walau bagaimana pun masing ada kesamaan satu dengan yang lainnya. Masing-masing kelompok menyatakan: "*urusan aqidah mah aya nu ngurusna, nyaeta pangeran, serahkeun we ka*

pangeran, Gusti Allah" (urusan aqidah itu ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa). *"Nu penting keur urang ayeuna hablum minan nas"* (Yang terpenting sekarang kita mempertahankan hablum minan nas).

Selain itu, para tokoh dari kedua belah pihak yang bertikai itu, juga menyadari bahwa pertikaian itu bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang dianut masyarakat Sunda pada umumnya, khususnya norma *"silih asih silih asuh, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak (saling menyayangi, saling menitipkan diri, ke air jadi satu kali, ke darat jadi satu lobang)"*, artinya harus saling menyayangi satu sama lainnya.

Hubungan antara Koko (Mang Koko, tokoh "Jama'ah Qur'ani") dan Encuk, Dadeng (tokoh agama setempat) kembali harmoni (Sunda: *akur*). Jika pada tahun 2001-2004, Koko dan kelompok jama'ahnya eksklusif (tidak mau bergaul) dengan tetangga yang bukan anggota "Jama'ah Qur'ani", sekarang ia terbuka dengan tetangga yang lainnya. "Mang Koko ayeuna larsup deui ka imah simkuring (sekarang Mang Koko sudah biasa masuk keluar rumah saya lagi". Demikian penuturan Encuk dan Dadeng. (Wawancara dengan Encuk dan Dadeng pada 26 Juli dan 28 Juli 2012).

Faktor lainnya, yang tidak kalah pentingnya, mengapa tercipta saling toleran diantara mereka sekarang ini? Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas penduduk Kampung Cibunar Girang memiliki kekerabatan satu dengan yang lainnya. Hubungan kekerabatan di antara mereka masih terbilang dekat. *"Kagoklah nantangna ge, kahalangan ku kaduluran"* (*canggunglah untuk menentang Koko, terhalang oleh kekerabatan*). Tegas Encuk.

Faktor-faktor tersebut juga didukung oleh faktor lainnya, yang

bersifat kebetulan, atau juga boleh jadi direncanakan secara matang oleh pihak kelompok "Jama'ah Qur'ani", yaitu ketika Pemilu 2004 aspirasi politik kelompok "Jama'ah Qur'ani" disalurkan pada Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan pada Pemilu Presiden RI, kelompok "Jama'ah Qur'ani" mendukung calon presiden Amin Rais dari Muhammadiyah. Sikap politis dari kelompok "Jama'ah Qur'ani" ini sudah tentu mendapat sambutan yang sangat baik dari tokoh Muhammadiyah Cibunar, Dadeng, yang secara terang-terangan pendukung panatik PAN dan Amin Rais. Begitu juga dalam pemilihan PILKADES, kelompok "Jama'ah Qur'ani" mendukung penuh calon kepala desa, Supriatna, asal Cibunar Girang.

Dengan cara seperti maka ganjalan psikologis diantara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan masyarakat Cibunar Girang mencair. Saluran komunikasi antara mereka yang tadinya tertutup dan tersumbat, menjadi terbuka. Anak mudanya pun kembali harmoni, mereka melakukan kerjabakti bersama, dan bermain sepak bola bersama.

Kebiasaan bergotong royong pun kembali tercipta, mereka bersama-sama memperbaiki saluran air (irigasi) untuk kepentingan pengairan pertanian dan empang (kolam), menghadiri acara-acara syukuran, dan yang lainnya. Bahkan ada di antara anggota "Jama'ah Qur'ani" sekarang ini yang menjabat sebagai ketua RT, yaitu RT-1 di wilayah RW-4, Cibunar Girang.

Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah disajikan, maka ditemukan kesimpulan bahwa terjadi perbedaan signifikan antara pemikiran, paham (ajaran) dan kepentingan yang dikembangkan kelompok Islam "Jama'ah Qur'ani" dengan pemikiran teologis dan ajaran syari'ah yang dikembangkan

kelompok Islam lainnya. Perbedaan tersebut meliputi bidang aqidah, ibadah mahdhoh dan mu'amalah.

Konflik sosial yang terjadi antara kelompok "Jama'ah Qur'ani" dan kelompok "Jama'ah Qur'an Sunnah" di wilayah administrasi Cibunar adalah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu a) karena adanya kemajemukan atau sifat aneka ragam organisasi keagamaan di dalam masyarakat, b) disebabkan oleh persaingan dan perebutan sumber ekonomi dan terbatasnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, c) disebabkan adanya perbedaan ajaran dan keyakinan

(teologis) antara dua kelompok keagamaan, d) disebabkan konflik personal yang selanjutnya mendorong munculnya konflik antara dua kelompok, e) disebabkan rangsangan dari peristiwa sebelumnya, yaitu berupa pertikaian antara masyarakat Cicurug dengan kelompok Islam LDII.

Model penanganan konflik yang telah dilakukan oleh anggota masyarakat setempat adalah model penanganan *mediasi* dan *adjudikasi* kepolisian, penekanan "*jagerisme*", dan model akomodasi *toleransi*.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Conseuelo G. Sevila, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Pres, Jakarta, 1993
- Doyle Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I dan II, terjemahan Robert Mz. Lawang, Gramedia, Jakarta, 1986
- Imam Tholkhah dkk (editor), *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1989
- IAIN Craib, *Teori-teori Sosial Modern*, Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Imam Tholhah dkk (editor), *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1989
- James A. Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Refrika Aditama, Jakarta, 1999.
- Nasution, *Kesatuan Gerakan Islam Jamaah (LDII)*, Dewan Dakwah Indonesia, Jakarta, 1995
- Ramlan Surbekti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1999

B. Majalah

1. Prisma, 1986-1996
2. Al-Muslimun, 1983-1985
3. Panji Masyarakat, 1986
4. Suara Masjid, 1986-1988
5. Media dakwah, 1984-1991

Harmoni dalam Keragaman (Konstruksi Perdamaian dalam Relasi Islam- Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya)

Fitri Annisa

Peneliti IAI Latifa Mubarakiyah (IAILM) PP Suryalaya

Abstract

Harmony in diversity is an expectation of multy religion society. The objectives of this study are to quest and analyze peace construction among people who have three different religions in Kalimanggungir and Nagaherang, the district of Tasikmalaya. This research paradigm is phenomenology and look at the followers perspectives. Technique of collecting data are depth interview, observation and documents. Results of the study is that the three components using by those people, i.e. efectively channel of communication, civic association in creating integrative climate and critical mass of peace enhancing leadership. Religious identities not on the theology or ritual, but more on social and humanity functions, that they are individual as civil society.

Keywords: *harmony, diversity, peace construction*

Abstrak

Abstrak : Harmoni dalam keragaman merupakan harapan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal multi keyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis proses konstruksi perdamaian masyarakat dalam relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi dimana bersandar pada perspektif pelaku dan berusaha memahami yang diobservasi dari perspektif subjektif, sedangkan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumentasi . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar komunitas di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang terbilang cukup erat dalam bersosialisasi, meskipun ada ruang-ruang yang bisa mensegresikan mereka, namun masih dalam batas kewajaran. Ada tiga komponen paling menonjol yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri dalam menciptakan kondisi perdamaian di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang diantaranya; Pertama, adanya effective channel of communication (saluran komunikasi yang efektif). Kedua, adanya civic asociation sebagai wadah kebersamaan dalam aktifitas sosial dan religius yang berperan menciptakan integrative climate (bridging social capital) (iklim masyarakat yang kondusif dan integratif). Ketiga, adanya critical mass of peace enhancing leadership (tokoh perdamaian). Identitas agama/keyakinan bagi mereka bukan ditekankan pada hal yang bersifat teologis/ ritual tetapi lebih kepada menjalankan fungsi sosial/kemanusiaan dimana anggota masyarakat mempunyai kesamaan posisi individu sebagai warga suatu negara (pluralisme kewargaan).

Kata Kunci : *Harmoni, Keragaman, Konstruksi Perdamaian*

Pendahuluan

Keberagaman agama dan aliran kepercayaan dalam satu komunitas merupakan hal yang harus dikelola dengan mengakomodasi segala perbedaan dan mempertahankan prinsip kesetaraan warga negara. Dengan keragaman yang dipersatukan maka akan tercipta keharmonisan dalam keragaman (*harmony in diversity*). Namun realitasnya keharmonisan antar umat manusia di tengah perbedaankeyakinan masih terdapat ketegangan-ketegangan dalam masyarakat sekarang. Ada beberapa laporan yang mempresentasikan fakta tersebut, yaitu berdasarkan Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Tahun 2010 dan 2011 yang dikeluarkan oleh CRCs. Kurangnya keharmonisan antar umat beragama dan penganut aliran kepercayaan sarat menimbulkan konflik dan berimplikasi luas bagi kehidupan masyarakat. Dalam menciptakan keharmonisan umat beragama, secara teoritis dapat dilihat dari perspektif teori konstruksi perdamaian yang melibatkan beberapa komponen diantaranya; *effective of channel communication, effective system of arbitration, integrative climate (bridging social capital), critical mass of peace enhancing leadership* dan *just structure*. perspektif harmoni kerukunan umat beragama senantiasa terkait dengan dialog antar umat beragama dan pluralitas kewargaan.

Bertolak dari pemikiran latarbelakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses kontruksi perdamaian masyarakat dalam relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya?. Dengan mengacu pada

rumusan masalah penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses konstruksi perdamaian masyarakat dalam relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya.

Hendropuspito mengemukakan bahwa secara sosiologis keberadaan agama mengemban dua fungsi sekaligus, yaitu di satu sisi agama merupakan pemupuk persaudaraan dan memicu perpecahan disisi lain. (Hendropuspito, 1984: 54).

Dalam hal memupuk persaudaraan, agama dalam realitas sosial dapat dilihat sebagai wadah dalam pemersatu aspirasi manusia dan sumber perdamaian, namun agama juga dapat memicu perpecahan tatkala Isu keragamana agama adalah isu agama diruang publik, bukan sekedar fakta adanya beragam (komunitas) agama secara bersama-sama di suatu tempat. Identitas keagamaan baru menjadi masalah ketika ia berperan efektif di ruang publik, ketika ia dimobilisasi dan dijadikan dasar /klaim untuk politik identitas, lebih-lebih utnuk menafikan identitas lain-baik identitas kelompok lain, atau identitas dalam diri seseorang. (Zaenal Abidin Bagir. 2011: 22).

Selain fungsi agama sebagai pemupuk persaudaraan dalam kehidupan sosial, ada komponen-komponen lain yang berpengaruh terhadap terciptanya integrasi sosial, hal itu dapat dilihat dari perspektif teori konstruksi perdamaian. Secara lebih rinci dan operasional gambaran mengenai konstruksi perdamaiannya menurut M. Iqbal Ahnaf dapat digambarkan seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.

Operasional Konstruksi Perdamaian

Pilar	Channels of Communication	Arbitration System/ Institution	Integrative climate (social capital)	Peace Leadership	Just Structure
Aktor, Lembaga	Forum pertemuan warga; asosiasi, media dialog; sistem informasi	Formal: pengadilan, peraturan organisasi; perangkat dan penegakan hukum Informal: lembaga adat, institusi/otoritas keagamaan, dst.	Organisasi sosial/asosiasi lintas (bridging) identitas/kelompok (contoh: kelompok hobi, sport, asosiasi bisnis, ronda, dll.)	Tokoh agama/adat, LSM, pelaku akar rumput, pemerintah, pengusaha, politisi.	Sistem politik, hukum, birokrasi (good government) dll.
Peran	Diskusi, klarifikasi, rumor control, penyelesaian konflik dengan jalan non-kekerasan		Membangun trust, membendung politik identitas	Promosi jalan non-kekerasan, de-mobilisasi ekstrimisme	Menciptakan keadilan sebagai fondasi perdamaian.

Komponen-komponen dari konstruksi perdamaian yang ikut berpengaruh terhadap terciptanya kedamaian /keharmonisan masyarakat diantaranya dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut;

Pertama, *Effective Channels of Communication* (saluran komunikasi yang efektif). Komponen ini fokus pada sistem komunikasi, konsultasi, dan negosiasi antar anggota masyarakat. Melalui saluran komunikasi yang efektif, persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dapat didiskusikan untuk mencari solusi dan semua hal tersebut tentunya dilakukan secara intens.

Kedua, adalah *Effective System of Arbitration* (sistem arbitrase yang efektif). Dalam komponen ini baik lembaga formal maupun informal ikut berperan andil dalam terciptanya kedamaian/keharmonisan. Hak-hak individu anggota masyarakat dalam mendapatkan perlindungan kepastian hukum terjamin.

Ketiga, *Integrative Climate (Bridging Social Capital)* (Iklim masyarakat yang kondusif dan integratif). Komponen ini diperlukan untuk membangun sebuah proses perdamaian yang berkelanjutan. (Reychler dan Langer, 5).

Artinya memang iklim masyarakat yang kondusif dan integratif tercipta karena adanya komponen saluran komunikasi dan sistem arbitrase yang efektif. Karakteristik dari iklim kondusif dan integratif meliputi: harapan masa depan yang menarik sebagai konsekuensi dari adanya kerja sama, pengembangan rasa kepedulian terhadap sesama, loyalitas tinggi dan rekonsiliasi. Kalau sudah seperti itu maka terciptalah lingkungan sosial-psikologis yang menguntungkan yang mengarah pada kehidupan damai/harmoni. (Luc Reychler, 2006: 5-6)

Bentuk nyata dari adanya *Integrative Climate* dalam masyarakat adalah munculnya lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok sosial yang mengutamakan pada kepentingan sosial (*civic association/ social capital*). Pengertian *civic association/ social capital* menurut Varshney adalah relasi antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang beragam. (Ashutosh Varsney dalam <http://muse.jhu.edu> (20/07/2012).

Jadi dapat dikatakan bahwa *civic association/social capital* merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan keanggotaannya bersifat sukarela

dan heterogin baik dari aspek ekonomi, budaya, pendidikan, agama, dan lain-lain sesuai dengan kondisi dari lingkungannya. Dalam masyarakat pedesaan contohnya muncul perkumpulan-perkumpulan seperti Arisan, PKK, dan lain-lain. Lebih lanjut Varsney menyatakan bahwa *civic association/social capital* merupakan cara terbaik untuk mencegah konflik sosial.

Keempat, *Critical Mass of Peace Enhancing Leadership* (tokoh perdamaian). Dalam komponen ini tokoh-tokoh pemimpin yang mempunyai pengaruh kuat dalam domain yang berbeda (politik, diplomasi, pertahanan, ekonomi, pendidikan, media, agama, kesehatan, dan sebagainya) baik pada masyarakat elit, tengah, dan bawah keberadaannya dibutuhkan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Tokoh masyarakat ada dua kategori yakni tokoh masyarakat formal (ketua RT/RW, kepala Desa/lurah, Camat, dll) dan tokoh masyarakat informal (tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dll).

Kelima, *Just Structure* (sistem keadilan). Komponen ini memberikan kontribusi di dalam menciptakan sistem keadilan dalam masyarakat baik dalam sistem politik, ekonomi, birokrasi, hukum, pendidikan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai. Semua hal tersebut terwujud dalam bentuk sistem undang-undang yang berlaku.

Komponen-komponen dari konstruksi perdamaian tersebut merupakan cara pandang masyarakat dalam bersikap dan berperilaku sehingga tercipta keharmonisan. Tapi dalam ruang lingkup masyarakat kampung apalagi ruang lingkup yang kecil tentunya komponen-komponen tersebut tidak semuanya muncul dalam masyarakat, bisa jadi hanya beberapa saja bahkan satu komponen karena sulit diterapkan. (Nur Kholik Afandi 2012: 9-10).

Dialog antar umat beragama dan pluralitas kewargaan menjadi komponen yang sangat penting terhadap konstruksi perdamaian, sehingga muncul sikap pluralitas kewargaan, dimana setiap individu yang memiliki identitas beragam (agama, ras, bahasa) hidup bersama atau menyatu dalam ikatan konteks identitas sebagai warga negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi. Paradigma yang dimaksud adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. (Heddi Shri Ahimsa-Putra, Makalah Short Course 2012: 2). *Phenomenology is the study of lived, human phenomena within the everyday social context in which the phenomena occur from the perspective of those who experience them.* (Angie Titchen dan Dawn Hobson, 2005: 125)

Jadi, Fenomenologi adalah studi yang menggambarkan fenomena kehidupan manusia dalam konteks sosial sehari-hari di mana fenomena terjadi dari perspektif mereka yang mengalaminya atau bersandar pada perspektif pelaku dan berusaha untuk memahami yang diobservasi dari perspektif subjektif. Sifat data yang diperlukan adalah kualitatif yakni mendeskripsikan dan menganalisis fenomena mengenai harmoni keberagaman relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang dilihat dari teori perdamaian. Diharapkan dengan penelitian kualitatif ini dapat menggali data lebih dalam.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yakni melakukan wawancara mendalam, observasi dan Telaah Dokumentasi.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu selama dilapangan yakni mempersempit fokus, menetapkan jenis studi, mengembangkan dan menyusun pertanyaan analitik, dan telaah kepustakaan yang relevan, sedangkan analisis setelah lapangan yakni membuat kategorisasi penemuan dari lapangan sesuai dengan penataan sekuensi dan peneluhannya.

Lokasi yang dijadikan tempat untuk penelitian ini adalah Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya. Dua lokasi penelitian ini selain dipilih berdasarkan pada keberagaman keyakinan (Islam-katolik-Sunda Wiwitan), juga didasarkan pada masih adanya hubungan kekerabatan antara penduduk dua kampung tersebut. Hal itu dikarenakan adanya ikatan perkawinan.

Etnografi Hubungan Antarkomunitas

Hubungan antar komunitas masyarakat di Kali Minggir dan Nagaraherang berdasarkan hasil observasi tampak erat meskipun berbeda keyakinan. Identitas agama atau kepercayaan bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bersosialisasi. meskipun perlu peningkatan partisipasi aktif. Karakter mereka tampak terbuka sehingga tidak sulit untuk menjalin komunikasi.

Ada fenomena-fenomena menarik yang peneliti temukan ketika observasi di Kali Minggir yakni ketika dalam kegiatan kerja bakti membersihkan *Astana gede*, salah seorang warga penganut Islam dan Katolik yang sudah lama tidak bertemu bersalaman dan dengan riangnya mengucapkan "salam damai." Selain itu peneliti juga melihat beberapa orang ibu-ibu penganut Katolik dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan kadang memakai kerudung kalau bepergian keluar dan kerja bakti. Hal

yang sama juga ditemukan ketika peneliti menghadiri acara arisan di Nagaraherang, beberapa orang ibu-ibu penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan memakai kerudung. Berdasarkan hasil wawancara, alasan mereka memakai kerudung adalah menghormati orang Islam, merasa nyaman dipakai agar tidak kepanasan dan kerudung bagi mereka bukan merupakan simbol yang sakral yang menegaskan identitas keagamaan, tapi hanyalah sebagai simbol dalam sebuah fashion (gaya berpakaian).

Baik di Kali Minggir maupun di Nagaraherang, tampaknya bagi laki-laki topik pekerjaan, hal-hal tertentu menyangkut kampung dan warga merupakan topik utamayang mereka bicarakan pada waktu mereka bertemu baik ketika ada kumpulan maupun dalam interaksi biasa sehari-hari, sedangkan bagi perempuan topik yang dibicarakan adalah masalah pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan bagaimana mengurus anak.

Ada ruang-ruang yang bisa mempertemukan warga terutama bagi warga yang jarang bertemu baik itu di Kali Minggir maupun di Nagaraherang diantaranya adalah adanya kerjabakti, rapat RT, arisan/paguyuban, gotong royong memperbaiki jalan dan membantu membangun rumah warga/tempat ibadah, karang taruna, ronda, PKK dan acara kesenian sunda berupa Gondang, Kecapi-Suling, Tari Buyung, pengurusan jenazah dan pergi bertani dan berladang bersama-sama.

Meskipun relasi Islam-Katolik-Aliran kepercayaan Sunda Wiwitan (Penghayat) di Kali Minggir dan Nagaraherang terbilang cukup erat dan bersosialisasi baik, namun ternyata ada ruang-ruang yang mensegregasikan mereka seperti contohnya kalau ada salah satu warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam program kerja yang diadakan di kampung tersebut, semisal jarang ikut

ronda atau kerjabakti dengan alasan yang tidak jelas. Sudah pasti untuk rencana kedepannya tidak akan ikut dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Contoh lainnya hal yang bisa mensegresikan mereka adalah ketika ada tetangganya yang menampakan identitas keyakinannya secara berlebih dan itu membuat risih dan kurang simpati penganut keyakinan lain.

Dengan keberagaman keyakinan yang ada di Kali Minggir dan Nagaraherang, dalam kehidupan keluarga tidak jarang ditemukan beberapa keluarga dimana dalam satu atap keluarga terdapat tiga keyakinan yakni Islam-Katolik-Sunda Wiwitan, namun tetap hidup berdampingan. Bagi mereka berbeda keyakinan dalam keluarga bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Jika diamati bahwa agama tidak muncul sebagai sebuah misi yang harus disebarkan atau disosialisasikan. Kepentingan bersama lebih diutamakan bahkan menjadi perekat hubungan kekerabatan. Sebagaimana Diah dalam wawancara pada 5 Juli 2012.

“Neng. . saya dan suami penghayat, anak saya dua. . yang satu Islam dan yang satunya lagi Katolik. Tidak ada apa-apa koq. . . malahan kalau hari raya masing-masing. . . suka saling membantu.”

Hal senada diungkapkan Jaja dalam wawancara pada 1 Juli 2012.

“Kita harus bersatu, saya mempunyai anak yang muslim. . tetap selalu memberi nasihat ciri-cirinya. . . yang penting jangan sampai menyimpang. . . ah masing-masing saja kalau masalah keyakinan.”

Relasi sosial dari adanya beberapa keluarga sehingga dalam satu atap bisa berbeda keyakinan adalah karena adanya ikatan perkawinan. Perkawinan termasuk dari sistem persaudaraan. Mereka bisa pindah keyakinan sesuai dengan

jodoh yang didapatkan dan cenderung mengikuti laki-laki. Tapi sebelumnya bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk pindah keyakinan harus membuat laporan terlebih dahulu kepada para tokoh agama setempat. Misalkan jika ada seorang Penghayat ingin pindah keyakinan ke agama Islam, harus melapor ke *Ais Pangampih* (sebutan untuk tokoh aliran kepercayaan Sunda Wiwitan (Penghayat) dan kepada tokoh agama Islam. Untuk penganut Aliran Kepercayaan Sunda wiwitan generasi penerusnya banyak yang memeluk Katolik dan Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya keinginan dari para orang tua yang menganut aliran kepercayaan Sunda wiwitan yang ingin anaknya mendapatkan kejelasan status baik dalam KTP maupun akta nikah.

Tradisi Sosial Keagamaan

Ditinjau dari perspektif konstruksi perdamaian, fenomena tradisi sosial keagamaan di Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang merupakan saluran komunikasi yang efektif. Hal ini ditandai adanya intensitas komunikasi antar anggota masyarakat dengan mengusung nilai-nilai kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai perasaan tanpa memandang perbedaan agama dan keyakinan. Kehangatan adanya *silaturrahim* di tengah keberagaman dan perbedaan keyakinan, menarik untuk disimak, karena merupakan modal awal bagi terciptanya keharmonisan antar umat beragama dan aliran kepercayaan.

Silaturrahim

Hari raya Idul Fitri dan silaturrahim merupakan tradisi bangsa Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama dan berlangsung tiap tahun. Pada hari raya Idul Fitri masyarakat Kali Minggir dan Nagaraherang merayakan dengan menyediakan berbagai menu makanan

seperti ketupat, opor dan berbagai jenis kue untuk para tamu yang hendak berkunjung, baik itu keluarga dekat/ jauh maupun tetangga.

Makna *silaturrahim* pada hari raya Idul Fitri eratkan kerukunan antar umat beragama dan keyakinan. Hal yang menarik untuk diamati dalam perayaan hari raya Idul Fitri di Kampung Kali Minggir dan Nagaherang tersebut adalah adanya keterlibatan atau dukungan dari para penganut Katolik dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka mengunjungi para rumah tetangga maupun saudara mereka yang beragama Islam. Sebagaimana Bapak Entang menyatakan dalam wawancara pada 30 Juli 2012.

“ Kalau tiap hari raya Idul Fitri. . . mereka yang dari Katolik maupun Penghayat suka datang untuk mengucapkan selamat. . . datang ke tiap rumah. ”

Demikian juga Bapak Omo dalam wawancara Wawancara dengan Bapak Omo pada 1 Juli 2012.

“Alhamdulillah disini itu kita bersatu, kalau hari raya Idul Fitri baik dari Katolik Maupun Penghayat selalu datang untuk silaturahmi, bahkan kalau Idul Fitri mereka suka membantu untuk memberesihkan makam. . . setiap perayaan hari besar keagamaan atau Penghayat selalu dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan lokasi masyarakat sekitar untuk mencegah ketegangan dengan penganut agama lain. ”

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh data hasil observasi yang dilakukan ketika peneliti mengunjungi rumah Bapak Omo di Kali Minggir dan Ibu Ana di Nagaraherang pada waktu hari pertama Idul Fitri, banyak warga penganut Katolik maupun Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan (Penghayat) yang datang *bersilaturrahim* untuk mengucapkan

selamat hari raya Idul Fitri dan saling memaafkan.

Perayaan Natal

Natal merupakan hari raya kelahiran Yesus Kristus. Natal merupakan moment yang tepat bagi para penganut Katolik untuk memperdalam keimanannya, yang mana kedamaian antara dirinya sendiri dan orang lain merupakan kunci di dalam menciptakan kehidupan damai. Sama seperti halnya umat Islam yang merayakan hari raya Idul Fitri. Para pemeluk Katolik pun menyediakan berbagai jenis makanan dan kue untuk disuguhi kepada tamu yang hendak berkunjung sebagai bentuk penghormatan, karena tamu yang datang tidak hanya dari pemeluk Katolik saja tapi juga dari umat Islam dan penganut aliran kepercayaan. Keterlibatan atau dukungan dalam bentuk lain juga dalam merayakan hari raya umat Katolik di Kampung Kali Minggir adalah membantu dalam pembuatan gua natal dan pohon cemara. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Hendra, dalam wawancara pada 29 Juli 2012.

“Disini kita saling bergandengan tangan. . . tidak terhalang oleh perbedaan agama. . . tidak ada kendala. ”

Tradisi 1 Muharram

Tanggal 1 Muharram merupakan hari raya bagi penganut Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan (Penghayat). Acara ini dilaksanakan selama satu tahun sekali yang berpusat di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dan fenomena yang menarik juga yang terjadi di Kali Minggir dan Nagaraherang adalah adanya dukungan dari beberapa warga pemeluk Islam dan Katolik yang ikut untuk mengikuti acara 1 Muharram. Dan disana mereka hanya menghadiri saja

sekaligus mengikuti dialog keagamaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Jaja dan di benarkan oleh Bapak Ganda dalam wawancara dengan peneliti Jaja di Kali Minggir pada 29 Juli 2012:

“ Suka ada yang ikut warga penganut Katolik atau Islam kalau ada acara 1 Muharram di Cigugur. . . berangkat dengan rental mobil. . . Di sana suka diadakan dialog tiap agama, mengeluarkan pendapat masing-masing. . . . dari tiap suku bangsa semuanya ada. . contohnya badui. . . tidak hanya dari Indonesia, dari luar negeri juga suka banyak yang datang. . . . tidak usah ada percekocokan yang penting sekarang adalah hidup tentram dan aman. ”

Tradisi Sosial Budaya Masyarakat

Arisan

Arisan merupakan kegiatan yang menjadi ciri khas dari Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang. Arisan merupakan bagian dari *effective channel of communication* atau saluran komunikasi yang efektif dimana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan warga masyarakat dari berbagai kalangan dan keyakinan, sehingga tercipta hubungan yang harmoni. Fungsi strategisnya adalah menjaga hubungan masyarakat, memberikan tata tertib bagaimana seharusnya anggota masyarakat berperilaku dan sebagai pengendalian sosial.

Dalam kegiatan ini keterbukaan dalam berdialog dimana ide, saran dan kritik dapat disalurkan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama pula, disamping itu dengan adanya kegiatan ini persoalan yang dihadapi oleh anggota masyarakat mendapat solusi.

Kegiatan arisan di Kali Minggir dan Nagaraherang dilaksanakan secara

bergilir di rumah warga sekitar 1 bulan sekali. Dan sudah dilaksanakan sejak tahun 1991. Anggota arisan di Kali Minggir dan Nagaraherang adalah seluruh warga baik laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan dari keyakinan mana berasal. Dengan jumlah anggota berkisar 35-40 orang. Kegiatan arisan ini berbentuk uang dengan jumlah Rp. 3000 dan beras sejumlah 1 kg. Sama halnya dengan kegiatan arisan yang diadakan di Nagaraherang dilaksanakan 1 bulan sekali. Bentuknya uang sebesar Rp. 2000 dan beras sejumlah 1 kg. Biasanya setelah rangkaian acara berakhir, mereka makan bersama.

Kerjabakti

Kerjabakti merupakan kearifan lokal pribumi yang bisa menciptakan sebuah perdamaian dan harmoninya hubungan masyarakat. Dalam kerjabakti tersimpan pesan yang sarat saling melengkapi dan berbagi. Pekerjaan yang awalnya dinilai tidak mungkin teratasi namun dengan kerjabakti dapat terealisasi. Selain itu kegiatan ini sebagai sarana bagi warga untuk silaturahmi sesama warga. Sebagaimana yang diungkapkan Hendra dalam wawancara pada 2 Juli 2012

“Tujuan kerja bakti disini selain menjaga lingkungan tetap bersih. . ya untuk kebersamaan kita juga sebenarnya.”

Kerja bakti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kali Minggir dan Nagaraherang. Warga kampung masih setia dengan agenda rutin ini. Ada tiga jenis Kerja bakti di kampung kali Minggir, diantaranya : Pertama, Opsih (operasi bersih), kegiatan opsih ini diadakan dua hari sekali dalam seminggu tiap hari Kamis dan Minggu. Kegiatan Opsih ini dilakukan di jalan kampung dan tanah pekarangan. Misalnya mengurus selokan, memperbaiki jalan dan lain-lain. Kedua, kerja bakti yang dikhususkan hanya untuk

membersihkan *astana gede*, kegiatan ini dilakukan di pemakaman umum Kali Minggir dimana baik jenazah penganut Islam, Katolik maupun aliran kepercayaan Sunda Wiwitan dikebumikan di satu tempat yang dinamakan *astana gede*. Pelaksanaan kegiatannya sekitar satu bulan sekali.

Ketika peneliti mengobservasi langsung kegiatan ini, warga yang ikut kerja bakti tidak lantas langsung pulang, mereka berkumpul terlebih dahulu hanya sekedar istirahat sambil berbincang-bincang. Biasanya setelah kegiatan tersebut, mereka bersama-sama membuat nasi liwet. Kalau bulan Ramadhan berlangsung mereka tidak membuat jamuan, hal ini dikarenakan demi menghormati orang Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hal yang sering dilakukan oleh ketua RT ketika akan memulai kegiatan kerja bakti di Kali Minggir adalah memberitahu warga dengan menggunakan kentongan. Ketiga, kerja bakti *gempungan* yang dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangkauan lebih luas yakni area batas Kali Minggir dengan kampung lain.

Untuk kerja bakti di Kampung Nagaraherang agendanya tidak rutin seperti halnya di kampung Kali Minggir. Kegiatannya dilaksanakan hanya seminggu sekali. Memperbaiki jalan, memperbaiki selokan air, saling membantu dalam pembangunan rumah ibadah serta membersihkan *astana gede* menjelang lebaran merupakan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan.

Tradisi dalam Pertanian dan Perkebunan

Kegiatan warga masyarakat Kali Minggir dan Nagaraherang dalam kegiatan bertani dan berladang bersama-sama merupakan saluran komunikasi yang efektif, karena tercipta suatu hubungan dialogis antara relasi Islam-

Katolik-Penghayat. Melalui kegiatan ini komunikasi antara mereka terjalin secara intens tanpa memandang perbedaan keyakinan yang paling penting adalah tolong menolong dalam kebersamaan melakukan pekerjaan. Dan ini merupakan kekuatan untuk menyatukan mereka sehingga tercipta keharmonisan.

Kegiatan bertani dan memanen di kampung Kali Minggir dilakukan di tanah rahab (tanah desa) dan tanah orang milik lain karena memang mayoritas pekerjaan warga masyarakat di kampung tersebut adalah buruh tani. Untuk kegiatan bertani di tanah rahab berlangsung 3,5 bulan sekali dengan jumlah pekerja tiap satu petak sawah 5 orang. Sedangkan di Nagaraherang, warga kampung lebih banyak menggarap tanah milik orang lain dan tidak ada tanah rahab.

Selanjutnya untuk kegiatan berladang, di Kali Minggir dan Nagaraherang sama-sama dilakukan di kebun milik bersama dengan menanam kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung dan kayu albiso. Dan ketika panen hasilnya dijual kepada warga setempat kemudian hasil penjualannya dimasukkan kas desa.

Relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan

Integrative climate (bridging social capital) (iklim masyarakat yang kondusif dan integratif) merupakan prasarat terciptanya hubungan yang harmonis. Iklim yang kondusif dan integratif di Kali Minggir dan Nagaraherang terbentuk karena ada saluran komunikasi yang efektif. Dan bentuk nyata dari adanya iklim yang kondusif dan integratif ini adanya *social capital* yang menjelma dalam bentuk *civic association*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, di Kampung Kali Minggir dan Bale Manggu ada beberapa bentuk *civic association*, diantaranya sebagai berikut;

Program PKK

Dilihat dari perspektif konstruksi perdamaian bahwa adanya kelompok PKK di Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang merupakan saluran komunikasi yang efektif yang mempunyai peran dalam menciptakan iklim yang kondusif dan integratif (*integratif climate*) dalam kehidupan masyarakat. Adanya kegiatan dialog-dialog melalui kegiatan PKK yang melibatkan tiga keyakinan merupakan bentuk dari dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan karena memang tidak ada keyakinan yang mampu menyelesaikan permasalahan secara individu, karena suatu masalah secara idealnya perlu untuk dicarikan jalan keluar secara bersama-sama. Dari adanya dialog tersebut maka masalah identitas agama/keyakinan bukan menjadi kekuatan pembeda tetapi menyatu dalam posisi identitas individu sebagai warga suatu negara, yang setara satu sama lain (*pluralisme kewargaan/civic pluralism*).

Program yang dimotori oleh ibu-ibu ini merupakan bagian dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya kehidupan keluarga untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan melalui sikap gotong royong yang merupakan kearifan lokal di tengah masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan dari adanya PKK di Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang diantaranya; posyandu, paguyuban/arisan, pembuatan bordir serta memasak. Tetapi untuk PKK di Kali Minggir menginduknya ke kampung tetangga yakni Cihanjaro.

Karang Taruna

Ditinjau dari perspektif teoritis konstruksi perdamaian, maka Karang taruna merupakan bagian dari *civic association*. Karang taruna merupakan wadah bagi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan generasi muda di wilayah desa/kelurahan. Karang

tarunabisa mempengaruhi lingkungan sosial-psikologis yang mengarah pada kehidupan damai/harmoni karena menghidupkan kegiatan dan aktifitas warga dan secara tidak langsung juga akan mampu membantu pemerintah memajukan lingkungan dan mental warga ke arah yang lebih baik. Disamping itu juga kegiatan ini melatih para pemuda dan pemudi untuk lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan melatih bersosialisasi dengan tidak bersikap individualis.

Kegiatan karang taruna di Kali Minggir dan Nagaraherang masih digalakkan. Kegiatan yang paling sering dilaksanakan adalah dalam bidang olahraga. Lomba bola voli dan sepak bola antar kampung dan kecamatan yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dan sehabis hari-hari besar keagamaan. Bahkan hal yang menarik dari adanya kegiatan lomba olah raga tersebut adalah para pemuda Kali Minggir yang sedang bekerja merantau keluar kota ketika ada waktu libur/luang mereka menyempatkan untuk pulang ke kampung halamannya Kali Minggir hanya untuk ikut lomba bola voli dan sepak bola untuk melawan tim dari kampung lain. Untuk tim yang menang hadiahnya berupa traktiran makan dari tim yang kalah. Sedangkan untuk di Nagaraherang sama halnya di Kali Minggir sudah menjadi agenda rutin 2 minggu sekali ada perlombaan bola voli baik antar kampung maupun kecamatan. Disamping bola voli ada juga perlombaan gerak jalan yang di motori oleh warga sekitar.

Arisan

Kegiatan arisan yang merupakan tradisi sosial budaya masyarakat Kali Minggir dan Nagaraherang, selain bagian dari *effective channel of communication* atau saluran komunikasi yang efektif, juga berperan dalam menciptakan iklim yang

kondusif dan integratif (*integratif climate*) karena kegiatan ini merupakan salah satu bentuk *civic association*, yang berperan sebagai wadah untuk menyalurkan ide-ide atau pendapat yang berkaitan dengan tujuan daripada organisasi/assosiasi itu sendiri. Kegiatan arisan yang ada di Kali Minggir dan Nagaraherang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dan keanggotaannya bersifat sukarela tidak membedakan dari keyakinan mana berasal.

Ronda Malam

Bentuk nyata dari *integrative climate* (*bridging social capital*) (iklim masyarakat yang kondusif dan integratif) di Kali Minggir dan Nagaraherang adalah adanya kegiatan ronda malam. Kegiatan ini merupakan kekuatan untuk menciptakan sebuah perdamaian/keharmonisan karena disamping meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa bertanggungjawab dalam meningkatkan keamanan juga merupakan wadah yang efektif untuk *bersilaturahmi* antar warga. Biasanya peserta ronda ketika melaksanakan tugasnya akan saling berdialog menyalurkan ide-ide dan gagasan dan membicarakan isu-isu hangat yang berkembang sambil bercanda ria. Semua warga semuanya berbaur menjadi satu, tidak ada sekat perbedaan baik itu dari status sosial, keyakinan, atau perbedaan usia.

Kegiatan ronda di Kali Minggir dilaksanakan tiap malam, dengan jumlah anggota 5 orang tiap malam. Setiap 1 jam keliling dilakukan. Para peserta berkumpul disebuah pos ronda berukuran 4x4 meter. Di dinding pos ronda tersebut tertera daftar nama anggota ronda beserta jadwalnya serta foto-foto dokumentasi berisi kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan warga Kali Minggir. Jika ada salah satu anggota yang berhalangan hadir, maka dia wajib untuk menggantinya di malam berikutnya.

Untuk di Nagaraherang hal yang unik dari adanya kegiatan ronda malam adalah adanya kegiatan perelek (beras) dimana tujuannya adalah untuk menggiatkan ronda dan meningkatkan kesejahteraan warga. Tiap-tiap rumah menyediakan ruas untuk perelek (beras). Ruasnya disimpan dan digantungkan di depan pintu. Warga biasanya menyimpan perelek (beras) 1 atau 2 sendok. Dan beras yang ada di ruas tersebut dibawa oleh anggota ronda. Kalau pada malam tersebut tidak ada yang membawa perelek berarti tidak ada ronda. Meskipun dalam pengisian ruas hanya 1 -2 sendok , tapi kalau dikumpulkan dari seratus rumah hasilnya bisa mencapai 2-3 kilo. Hasil tersebut diserahkan ke ketua RT untuk disimpan sebagai kas. Jikalau ada warga yang kurang mampu, bisa dibantu melalui musyawarah terlebih dahulu.

Pandangan Para Tokoh

Peran sejumlah tokoh dalam relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan ternyata bisa mengkonstruksi perdamaian pada masyarakat Kali Minggir dan Nagaraherang. Keberadaan sejumlah tokoh baik itu formal (kepala desa, ketua RT, Punduh, dll) maupun informal (Tokoh agama, ketua adat, dll) menentukan sistem kepemimpinan yang damai. Adanya tokoh lintas agama juga mampu untuk menyuarakan misi perdamaian, anti kekerasan dan penindasan antar satu golongan dengan golongan yang lain.

Diakui bagi sebagian para tokoh yang ada di Kali Minggir dan Nagaraherang, menjaga kerukunan umat beragama merupakan suatu tantangan tersendiri, tidak mudah mengelola keharmonisan dalam keragaman sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Deddy dalam pada 29 Juli 2012.

“Sebagai kepala desa yang mengemban amanah dalam memimpin kampung yang punya

tiga keyakinan. . . tentunya saya harus merangkul semuanya. . . hal ini tidak mudah. . . pasti ada kendala. . . namun selama inisaya kira semuanya dapat diatasi. . . yang pentingkan komunikasi”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad dalam wawancara pada tanggal 2 Juli 2012. Ia adalah seorang Punduh di Kampung Nagaraherang. Ia menyatakan bahwa memang kendala selalu ada dalam membangun keharmonisan antar tiga keyakinan di kampung Nagaraherang contohnya ketika ada beberapa pendatang dari daerah lain yang mencibir kampung Nagaraherang mengenai adanya tiga keyakinan.

“bapak sudah 17 tahun mengelola Nagaraherang. . . pengen seperti ini tuh gampang-gampang susah. . . bapak sering menasehati atau menegur orang yang mencibir daerah Nagaraherang. . . sedangkan orang sininya meskipun berbeda akidah/keyakinan tapi tetap selalu saling menghormati”.

Bagi bapak Ahmad sendiri, seorang tokoh sebaiknya menjauhi sikap dan tutur kata yang provokatif dan mengobarkan permusuhan merupakan usaha untuk tetap menciptakan keharmonisan, karena semua sikap dan tutur kata akan diikuti oleh pengikutnya. Sebagai contohnya usaha bapak Ahmad ketika menghadapi kasus perkelahian antar pemuda di kampung Nagaraherang selalu berusaha untuk bersikap hati-hati dengan membimbing dan memberi nasihat dengan tidak membedakan dari keyakinan mana berasal.

Beberapa hal yang dilakukan oleh para tokoh baik itu formal maupun non formal di Kali Minggir dan Nagaraherang dalam menciptakan kontruksi perdamaian adalah adanya rapat RT *Sabilulungan*(persatuan) yang diselenggarakan sebulan sekali di Kali Minggir dan rapat RT di Nagaraherang

yang diadakan lima bulan sekali atau disering disebut juga *Riungan Pama Pami*. Dalam rapat tersebut para tokoh seperti ketua RT maupun tokoh dari masing-masing keyakinan berkumpul untuk mengadakan dialog mengenai masalah peningkatan penciptaan kerukunan umat beragama. Selain yang didiskusikan mengenai masalah kerukunan, rapat tersebut juga membahas mengenai upaya kemajuan kampung tersebut. Baik dari seksi kepemudaan, seksi keamanan RT & Desa, seksi kebersihan, seksi peralatan, dan seksi humas mendiskusikan mengenai program-program yang telah dilaksanakan sebagai refleksi dan juga program yang akan dilaksanakan sebagai rencana kedepan. Adapun untuk tempat pelaksanaan rapat, di kampung Kali Minggir sudah tersedia bangunan khusus berupa balai pertemuan sedangkan di Nagaraherang bertempat di rumah penduduk secara bergiliran. Hal yang menarik ketika peneliti mengobservasi langsung rapat RT tersebut adalah tampak adanya diskusi yang berjalan alot dan interaktif bahkan penuh canda, seolah –olah identitas keyakinan bagi mereka bukanlah menjadi pemisah.

Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya tentang kontruksi perdamaian relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan dapat disimpulkan bahwa hubungan antar komunitas di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang terbilang cukup erat dalam bersosialisasi, meskipun ada ruang-ruang yang bisa mensegresikan mereka namun masih dalam batas kewajaran. Proses konstruksi perdamaian relasi Islam-Katolik-Sunda wiwitan di Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang dibangun oleh komponen *Effective channel of communication* (saluran komunikasi yang efektif), *integrative climate (bridging social capital)* (iklim masyarakat yang kondusif

dan integratif), *critical mass of peace enhancing leadership* (tokoh perdamaian).

Effective channels of communication (saluran komunikasi yang efektif) merupakan komponen yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis/damai, karena dengan adanya komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan yang terus dibina pada dasarnya akan saling mengerti latar belakang dengan segala permasalahannya sehingga tidak ada rasa saling curiga yang menimbulkan perpecahan. Ada beberapa tradisi kemasyarakatan yang merupakan saluran komunikasi yang efektif di Kali Minggir dan Nagaraherang diantaranya; *Silaturahmi* perayaan Idul Fitri, Natal, tradisi 1 Muharram, arisan, kerjabakti, bertani serta berkebun.

Civic association yang merupakan bentuk nyata dari *integrative climate (bridging social capital)* (iklim masyarakat yang kondusif dan integratif) dan berperan sebagai wadah untuk menyalurkan ide atau gagasan yang mempunyai tujuan dari sebuah organisasi/assosiasi. Bentuk *civic association* yang ada di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang, diantaranya PKK, Karang taruna, Arisan, Ronda malam.

Komponen bagi terciptanya keharmonisan antar umat beragama dan aliran kepercayaan Sunda Wiwitan adalah *critical mass of peace enhancing leadership* (tokoh perdamaian). Peran tokoh formal maupun informal mempunyai peranan penting dalam perubahan sosial dan roda kehidupan sosial keagamaan. Keberadaan mereka mempunyai pengaruh untuk memberi pencerahan kepada masyarakat ketika berada pada kondisi tertentu, sikap dan tingkah laku mereka menjadi panutan yang secara langsung membangun karakter masyarakat dan membangun sistem dan tradisi yang ada dalam masyarakat.

Keharmonisan kehidupan sosial keagamaan di Kampung Kali Minggir dan Nagaraherang relevansinya dengan pluralisme kewargaan (*civic pluralism*) secara umum dapat disimpulkan bahwa agama/keyakinan bagi mereka bukan ditekankan pada hal-hal yang bersifat teologis atau ritual tetapi lebih kepada menjalankan fungsi sosial/kemanusiaan. Identitas sebagai anggota masyarakat yang mempunyai kesamaan posisi individu sebagai warga suatu negara (pluralisme kewargaan) lebih dominan, sehingga meskipun beragam keyakinan namun tidak lantas dapat melunturkan sikap saling menjaga kerukunan/keharmonisan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan diskusi yang terangkum dalam makalah ini, peneliti mengajukan beberapa pokok rekomendasi/saran sebagai berikut:

Secara khusus, bagi kemenag sendiri adalah memperkenalkan program-program sebagai berikut:

Pertama, dari perspektif pendidikan diadakannya program pelatihan untuk orang dewasa seperti diadakannya *short course*/pelatihan singkat berbasis pemahaman pluralisme kewargaan (*civic pluralism*) untuk multi keyakinan. keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan agama Islam, Katolik dan Sunda Wiwitan yang disatukan dalam sebuah media untuk berbagi informasi tentang perspektif agama masing-masing dalam tataran sosial masyarakat yang sudah mentradisi di masyarakat itu sendiri. Hal ini ditujukan untuk melestarikan tradisi yang baik sebagai suatu upaya untuk mencegah sekelompok individu yang bertujuan mengangkat isu keyakinan sebagai dasar kekacauan. Kemudian untuk program jangka panjang (*long term*), Kemenag menyelenggarakan pusat pendidikan dasar (formal) yang

berbasis multikultural, contohnya SD/MI berbasis multi kultural. Langkah ini diambil agar siswa memiliki pemahaman memadai untuk hidup berdampingan dan mengelola keberagaman keyakinan menjadi suatu kekuatan untuk bersatu membangun bangsa.

Kedua, dari perspektif sosial budaya yakni perlu dibangun sebuah situs (simbol) atau sebuah bangunan seperti balai keyakinan. Situs (simbol) berfungsi sebagaibukti bahwa multi keyakinan yang ada telah dibangun secara damai dan situs ini dapat menangkal secara simbolis kepada pihak-pihak yang

berencana untuk meruntuhkan bangunan perdamaian yang sudah mentradisi. Sedangkan, balai keyakinan sebagai media *silaturahhim* multi keyakinan dan tempat sentral dalam menyelesaikan konflik keyakinan yang akan terjadi.

Ketiga, dari Perspektif ekonomi diadakannya program zakat untuk pengembangan ummat; dikhususkan untuk membantu masyarakat multi keyakinantujuannya adanya interaksi sosial dalam bentuk ekonomi keagamaan yang melihat dogma agama/keyakinan tidak semestinya hanya berlaku pada agama/keyakinan tertentu saja

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, Heddi Shri (2012), *Makalah Short Course Sosial Keagamaan, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*, Yogyakarta: CRCS.
- _____ (2000), *Antropologi dan Seni: Sebuah Pengantar*, Diktat Kuliah Pasca sarjana UGM, Yogyakarta.
- Ahnaf, Muhammad Iqbal (2011), *Konstruksi perdamaian, Makalah di sampaikan dalam Short-Course Metodologi penelitian Keagamaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam kemenag RI-CRCS Sekolah Pascasarjana UGM*.
- Al Aluf , wilda (2011), *Kerukunan Antarumat Beragama (Kajian Sosio-Historis Hubungan Isl m - Kristen di Dusun Ranurejo Kabupaten Situbondo Pasca Kerusuhan 1996)*. Tesis :Program Pascasarjana UIN Malang.
- Banawiratma, J. B. , Bagir, Zaenal Abidin, dkk (2010), *Dialog Antar umat Beragama. Gagasan dan Praktik di Indonesia*, Bandung:Mizan.
- Bagir, Zaenal Abidin, dkk (2011), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Zaenal Abidin, dkk (2012), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Bagir, Zaenal Abidin, dkk (2011), *Pluralisme Kewargaan. Arah BaruBudaya Politikkeragaman di Indonesia*, Bandung:Mizan.
- Hendropuspito, (1984), *sosiologi agama*, yogyakarta: kanisius
- Morgan, David, (2009), *The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice*, University of California Press.
- Nurjanah, (2011),*Pluralisme Agama Di Batu (Studi Tentang Makna dan Pola Kerukunan Antarumat Beragama Di Kota Batu)*. Tesis: Program Pascasarjana UIN Malang.

- Mubarrak, Khusni, (2008), *Toleransi Umat Beragama (Studi tentang Peran Tokoh Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Cirebon)*. Tesis : program Pascasarjana UIN Bandung.
- Varshney, Ashutosh (2002), *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, Yale University Press
- Rahmawan, Ahmad Jamhari, dkk (2008). *Faktor Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Lamongan sebagai gambaran kehidupan Ideal Bangsa Indonesia (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi kabupaten Lamongan)*. Penulisan Ilmiah IPB.
- Titchen, Angie & Hobson, Dawn, (2005), *Research Methods in the Social Sciences*, London: SAGE Publications Ltd.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah. (2008). *laporan penelitian Tentang Interaksi Sosial Kelompok Aliran Islam Minoritas dalam Masyarakat di Berbagai Daerah di Jawa tengah*.

Jurnal dan laporan

- Afandi, NurKholik (2012), *Harmonisasi Dalam Keragaman: Konstruksi Perdamaian dalam Relasi Muslim-Katolik di Kalibawang Kab. Kulon Progo. Laporan Latihan Penelitian dalam Short-Course Metodologi Penelitian Keagamaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam kemenag RI-CRCS Sekolah Pascasarjana UGM*.
- Reychler, Luc, (2006), *Challenges of Peace Research*, *International Journal of Peace Studies*, Volume 11, Nomor 1, Spring/Summer
- Ridwan, (2009), *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antarumat Beragama*. Dalam Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume VII, Nomor 30, April-Juni.

Internet

- Situs Kementrian Agama: Kumpulan Makalah Annual Conference on Islamic Studies (ACIS).
- Ashutosh Varsney, *Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond*, (<http://muse.jhu.edu>), diakses tanggal 20 Juli 2012.
- Agus Ulahaiyanan, pr., *Peran Tokoh Agama dalam Mengantisipasi dan Penanganan Konflik*, (<http://stpakambon.wordpress.com/peran-tokoh-agama-dalam-mengantisipasi-dan-penanganan-konflik-di-maluku/>), diakses tanggal 27 Juli 2012
- <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=78008>, di akses 20 februari 2012)
- <http://news.okezone.com/read/2011/05/30/340/462318/jenazah-penganut-aliran-kepercayaan-ditolak-di-tpu> di akses tanggal 20 Juli 2012

Potensi Konflik dan Integrasi Kehidupan Keagamaan di Provinsi Gorontalo

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

Population of Gorontalo are plural in terms of religion and ethnicity. Infact, those people live in harmony. There are many conflict occures in other provinces, but not in Gorontalo. The Gorontalo society hold the principle `torang samua basodara` (all are in one family) that until now is still perpetuating in their religious as well as social interaction. Local contents have abilities to unite them. This study will give a model of life harmony among plural society in Indonesia. This research is qualitatively in approach, using observation, interview and library study.

Keywords: local contents, plural society, intercultural relation

Abstrak

Penduduk Gorontalo yang majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama. Berkali-kali konflik sosial dan keagamaan sering terjadi di daerah lain, tidak demikian halnya di Gorontalo. Masyarakat Gorontalo berpegang pada prinsip "torang samua basodara" dan terbukti masih lestari dalam kebudayaan dan interaksi antar umat beragama. Kearifan lokal mampu menjadi perekat kerukunan, semua pemeluk agama merasakan kenyamanan yang tinggi. Fakta ini hendak menjadi pokok bahasa studi ini sebagai model kerukunan yang ada di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi pustaka.

Keywords: kearifan lokal, hubungan sosial, kemajemukan sosial.

Latar Belakang

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 12.215,44 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1,038.585 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km².

Sampai dengan September 2011, wilayah adminitrasi Provinsi Gorontalo mencakup 5 kabupaten (Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango,

Gorontalo Utara, dan Pohuwato), 1 kota (Kota Gorontalo), 75 kecamatan, 532 desa, dan 69 kelurahan. Data ini terus mengalami perubahan seiring dengan adanya proses pemekaran kabupaten/kota, kecamatan, desa, atau kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo hingga sekarang.

Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Parepare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran

agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Gorontalo termasuk multi etnis dan agama. Secara etnis di Gorontalo terdapat bangsa Cina, Arab, serta suku-suku lainnya seperti Makasar, Sanger, Minahasa, dan Jawa. Gorontalo juga memiliki keragaman dalam hal kehidupan keagamaan, hal ini ditandai dengan banyaknya simbol-simbol religi yang ditemui di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo seperti keberadaan masjid, gereja, vihara/klenteng dan pure dapat ditemui di beberapa tempat di Kota Gorontalo sebagai tempat beribadat bagi pemeluk-pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Namun demikian agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Dalam masyarakat multikultural seperti Gorontalo, sering tidak dapat dihindari berkembangnya faham-faham atau cara hidup yang didasarkan pada ethnosentrisme, primordialisme, politik aliran, dan sektarianisme. Namun secara umum kerukunan antar umat beragama di Kota Gorontalo terjalin sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan tenang dan damai yang telah terjalin selama ini. Dengan berpegang pada falsafah "*Adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah*" ciri religius sangat lekat pada masyarakat Gorontalo.

Namundemikian, terdapat beberapa hal yang patut diwaspadai yang jika tidak diantisipasi bisa menjadi masalah serius yaitu: *Pertama*, pada masyarakat yang majemuk biasanya potensi konflik yang bertendensi suku agama ras dan

antar golongan (SARA) tak terhindarkan. Hal ini terjadi jika para pemimpin dan tokoh agama gagal menanamkan tradisi pluralisme dan semangat hidup harmoni dalam perbedaan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. *Kedua*, faktor ekonomi dan sosial, sebagai daerah yang baru mengalami pemekaran dan menjadi provinsi sendiri (dulunya masuk Provinsi Sulawesi Utara), Gorontalo relative dalam proses awal menata kehidupan social ekonomi masyarakat. Beberapa kabupaten juga baru mengalami pemekaran seperti Bualemo dan Pohuwato. Jika pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait gagal melakukan pemerataan hasil pembangunan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan program-program pro-rakyat maka kondisi demikian bisa menjadi potensi konflik. *Ketiga*, seiring dengan semangat otonomi daerah, konflik politik yang muncul sebagai residu dari kompetisi politik seiring dengan semangat otonomi daerah baik di tingkat nasional maupun lokal. Residu politik pemilukada misalnya, terbukti menjadi masalah yang serius di berbagai daerah selama ini, kadang dipicu oleh penyelenggaraan pemilukada yang kurang baik dan ketidakdewasaan elit dalam menyikapi proses dan hasil pemilukada.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penting dilakukan penelitian seputar kehidupan beragama masyarakat di Provinsi Gorontalo guna menggali, mengidentifikasi, dan menghimpun informasi mengenai bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat, serta faktor-faktor apa sajakah yang berpotensi menguatkan dan melemahkan integrasi antarumat beragama, khususnya yang terkait dengan isu-isu keagamaan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh peta awal kehidupan keagamaan masyarakat di Provinsi Gorontalo sehingga kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk memelihara, mengembangkan, dan menguatkan kerukunan umat beragama

di Gorontalo di masa yang akan datang.

Rumusan Masalah

Penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa point pertanyaan yaitu sebagai berikut: a). Bagaimana kondisi demografis dan sosial keagamaan masyarakat di Provinsi Gorontalo?; b) Apa saja kerawanan-kerawanan dan potensi konflik yang ada di Provinsi Gorontalo; c) Faktor-faktor apa sajakah yang berpotensi menguatkan dan melemahkan integrasi antarumat beragama di Provinsi Gorontalo?; d) Kearifan lokal apa sajakah yang masih berperan dalam memelihara kerukunan umat beragama; e) Bagaimana kebijakan publik Pemerintah Daerah dalam bidang keagamaan di Provinsi Gorontalo?; f) Bagaimanakah perkembangan dan peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut, diantaranya: a) sebagai masukan untuk meningkatkan Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Gorontalo yang akan diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan; b) sebagai acuan bagi pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Agama maupun majelis-majelis agama pusat dan daerah dan FKUB dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama; c) diharapkan dapat lebih memperkaya kajian-kajian teoritis serta menambah referensi tentang kehidupan keagamaan di Provinsi Gorontalo.

Faktor Penyebab Konflik

Diantara penyebab konflik yang terjadi diantaranya: Perbedaan individu dalam pendirian dan perasaan, latar belakang budaya. Juga perbedaan

kepentingan antara individu atau kelompok serta perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Beberapa kasus konflik di Indonesia berdasarkan identifikasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, disebabkan oleh beberapa faktor terdiri dari non-agama dan faktor keagamaan:

Faktor-Faktor Non- Agama meliputi kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan benturan sosial dan budaya. Sedangkan Faktor-Faktor Keagamaan adalah diantaranya disebabkan oleh; Penyiaran agama, bantuan keagamaan luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, adopsi anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, masalah jenazah, penodaan agama, kelompok sempalan, informasi keagamaan dan masalah pendirian rumah ibadah.

Beberapa hal yang hendak dikaji disini yakni masalah konflik. Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik dapat timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, misalnya, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti: diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap dan berbagai

struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Dengan demikian terdapat perbedaan antara konflik dan kekerasan, tidak semua konflik memiliki unsur yang ada dalam kekerasan, karena jika konflik dapat dikendalikan maka tidak akan bermakna negatif. Kekerasan memang biasanya terjadi dengan disebabkan adanya konflik yang tidak dapat dikendalikan. Untuk itu agar konflik tidak destruktif maka diperlukan suatu pengendala konflik atau manajemen konflik.

Konflik dikategorikan ke dalam bentuk latent, manifest, terbuka dan permukaan. Konflik latent sifatnya tersembunyi (potensi konflik). Konflik manifest sifatnya sudah mengemuka dipermukaan. Konflik terbuka berakar sifatnya sudah nyata dan memiliki akar sangat dalam, sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Sedangkan konflik dipermukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Jadi di samping ada perbedaan antara konflik dan kekerasan, juga ada jenis dan derajat konflik yang berbeda-beda (latent-manifest, berakar-terbuka vs dipermukaan-tidak berakar): demikian juga penyebabnya (*directly- indirectly: mikro-makro etc*). Pada dasarnya yang harus dicari adalah konflik terbuka yang disertai oleh kekerasan dan memiliki akar yang dalam. Bukan yang spontan dan hanya memiliki akar yang dangkal.

Konflik sifatnya tidak selalu permanent, menetap, vis a vis antara komunitas, tetapi seringkali spontan, tidak mengakar, hanya lewat saja. Kehadiran konflik tidak selalu dilakukan

dalam region yang tetap (seperti di Malino), dilakukan oleh komunitas yang permanent, melainkan tidak jarang didalangi oleh pihak luar (hasil rekayasa/didalangi tangan tak terlihat). Analisa konflik tidak selalu dapat dilakukan dalam unit komunitas yang menetap. (Anas S. Machfud, makalah- 2010).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi di kota Gorontalo dan Kabupaten Pahuwato. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan dan tokoh kunci (*key person*) yaitu Gubernur Gorontalo, Rektor IAIN Gorontalo, Pejabat Kemenag di Kanwil dan kantor Kabupaten di Provinsi Gorontalo, para tokoh agama dan pimpinan rumah ibadah lintas agama (Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu), serta beberapa warga masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumen seperti laporan pemerintah daerah dan kemenag provinsi, laporan ormas keagamaan, laporan hasil penelitian, dan tulisan dalam media massa serta situs-situs internet.

Teknik atau instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; a) Studi kepustakaan (buku, dokumen, naskah atau surat); b) Wawancara (langsung dan melalui telephon); c) Pengamatan/observasi.

Selanjutnya setelah diperoleh berbagai data dari lapangan, data tersebut dikelompokkan, dikategorikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data. Data setelah dianalisis, selanjutnya dilakukan interpretasi. Pengolahan data tersebut secara umum meliputi 3 proses yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Sekilas Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan daerah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Yang terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0,19' – 1,15' LU dan 121,23' – 123,43' BT. Letaknya sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan (Teluk Tomini di selatan dan Laut Sulawesi di utara) dan 2 KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu), yaitu: KAPET Bitui, Sulawesi Tengah dan KAPET Bitung, Sulawesi Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, batas wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Timur dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Bual, Provinsi Sulawesi Tengah.

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara, yang beriklim tropis agraris, dengan andalan utama perekonomian adalah dibidang pertanian, perkebunan, kelautan, kerajinan dan perdagangan. Luas wilayah provinsi ini 12.215,44 km².

Menurut sejarah, Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Parepare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran Islam, Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.

Sebagai implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, maka Gorontalo yang dulunya termasuk bagian dari Provinsi Sulawesi Utara kini Gorontalo menjadi daerah provinsi tersendiri yaitu Provinsi yang ke 32 sejak tanggal 22 Desember 2000.

Secara administratif Kota Gorontalo kini terbagi kedalam 5 kabupaten (Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Pohuwato), 1 kota (Kota Gorontalo), 75 kecamatan, 532 desa, dan 69 kelurahan. Data ini terus mengalami perubahan seiring dengan adanya proses pemekaran kabupaten/kota, kecamatan, desa, atau kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo hingga sekarang. (sumber: *Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, tahun 2010*).

Penduduk dan Pemeluk Agama

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan. Salah satu usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan pemerintah melalui program Keluarga Berencana yang dimulai awal tahun 1970-an.

Jumlah berdasarkan data dari Kementerian Agama RI Provinsi Gorontalo tahun 2010 berjumlah 1.038.585 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo menyebabkan perkembangan penduduk menjadi cukup tinggi.

Penganut agama yang berada di Provinsi Gorontalo disamping penduduk asli Gorontalo juga adanya para pendatang seperti dari Ternate, Manado, Tidore, Buton, Tondano, Makasar, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara serta dari wilayah Indonesia lainnya. Jumlah penduduk sebanyak 1.038.585, dengan perincian pemeluk agama Islam berjumlah 1.005.579 orang, Kristen, 20.412, Katolik 7.703, Hindu 4.051, dan Budha 840. (Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, th 2010).

Kehidupan Sosial Keagamaan

Provinsi Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo terdiri dari berbagai suku. Beberapa suku terbesar yang tinggal di adalah Gorontalo antara lain suku Minahasa, suku Bolaang Mangondo, suku Sangihe, dan suku Gorontalo. Sementara suku asli Gorontalo yang disebut dengan "*suku Bantik*" (seperti halnya suku Betawi di Jakarta) telah menjadi suku minoritas dan sebagian besar telah terusir dari tengah-tengah kota dan hidup di pinggir-pinggir kota dan di pinggir pantai, dengan pencaharian utama mereka adalah dari hasil bertani, nelayan, pedagang, pegawai pemerintah dll. Selain suku-suku tersebut di atas terdapat pula suku-suku lain yang jumlahnya tidak begitu besar, seperti suku Makasar, Jawa, Bugis, Banjar, Minang, Arab, Cina, dsb.

Suku-suku tersebut pada umumnya bekerja di bidang usaha rumah makan dan supir angkutan. Suku Sangihe pada umumnya bergerak di bidang usaha tukang kayu dan kuli. Suku Bolaang Mangondo pada umumnya menjadi pegawai dan perkebunan. Sementara suku Gorontalo bergerak di bidang usaha perdagangan dan pasar-pasar. Dalam hal keagamaan, di Gorontalo terdapat 5 agama yang dianut masyarakat yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu.

Masyarakat Gorontalo memiliki falsafah hidup yang selalu dipertahankan yaitu "*Torang Samua Bersaudara*" (kita orang semua bersaudara). Falsafah hidup tersebut tetap terpelihara sampai sekarang di kalangan masyarakat Gorontalo sehingga masyarakat tetap aman dan rukun. Selain itu terdapat pula falsafah yang membuat hubungan antar umat beragama dapat hidup damai dan saling berkunjung dan saling membantu satu sama lain yaitu "*Baku Pigi dan Baku Datang*" (saling mengunjungi dan mendatangi), dan "*Baku Baik dan Baku Sayang*" (saling berbuat baik dan saling menyayangi).

Beberapa falsafah hidup di atas menunjukkan betapa rasa persaudaraan dan kepedulian antarwarga masyarakat begitu tinggi, sehingga jalinan persaudaraan begitu kuat tanpa melihat suku, agama dan kehidupan sosial ekonominya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya di hari-hari besar keagamaan.

Untuk itu di Gorontalo dapat dijumpai rumah ibadah dari berbagai agama yang keberadaannya berdekatan misalnya di Desa Tenda Kecamatan Gorontalo Selatan Kota Gorontalo disamping banyak masjid juga dijumpai banyak bangunan gereja di sana serta vihara dan kelenteng. Di sepanjang jalan raya di Kabupaten Bualemo juga banyak dijumpai gereja baik milik umat Katolik maupun umat Protestan, bahkan di Desa Banurejo, Kecamatan Randangan Kabupaten Pahuwato antara mesjid, gereja, dan pura bisa dikatakan berdampingan. Meski secara umum lokasi rumah ibadat tersebut terletak di wilayah komunitas mayoritas muslim tapi hal tersebut tidak menimbulkan persoalan dalam kehidupan keagamaan.

Pada hari-hari besar keagamaan, baik di kalangan umat Islam maupun Nasrani, mereka saling menghormati dan saling mengunjungi satu sama lain.

Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, satu sama lain saling membantu dan tolong menolong. Antar pimpinan agama dan pemerintah daerah jika hari raya saling mengunjungi. Jika di desa masyarakat antar pemeluk agama juga saling mengunjungi. Remaja Kristen ikut membersihkan masjid usai shalat Idul Fitri. Remaja masjid ikut mengamankan gereja saat Natal. Ada bentuk bantuan materil antar umat dalam membangun rumah ibadah Islam dan Kristen. (Wawancara dengan Pdt. Petrus Tamong Ketua wilayah I GPIG).

Pada hari-hari besar keagamaan dan pesta-pesta yang mengundang orang banyak (khususnya di kalangan), ketika umat Nasrani mengundang umat Islam maka makanan yang dihidangkan terbebas dari hal-hal yang diharamkan bagi umat Islam, untuk itu orang yang memasak dan menyediakannya diminta bantuan dari kalangan umat Islam. Sementara pada hari-hari besar Islam atau pada acara-acara yang diadakan oleh umat Islam, maka juga tidak ada persoalan, karena bagi umat Nasrani tidak ada halangan untuk memakan apa yang dimasak oleh umat Islam. Bahkan ketika seorang umat Islam yang kebetulah masuk ke rumah makan orang Nasrani yang menyediakan makanan yang haram bagi umat Islam, mereka akan secara jujur mengatakan kepada warga muslim itu untuk tidak masuk ke rumah makan mereka, karena masakan yang mereka sediakan tidak halal bagi umat Islam.

Dalam perayaan Cap Go Meh 2012 baru saja dilaksanakan di Kota Gorontalo oleh masyarakat Tionghoa yang umumnya beragama Buddha, *Cap Go Meh* adalah perayaan hari ke 15 pada bulan pertama tahun Imlek, acara dirayakan dengan pawai dan upacara lainnya. Acara pawai di kota Gorontalo ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat Tionghoa saja tapi juga masyarakat etnis dan agama lain terutama muslim dan Kristen. Semua

kelompok etnis terlibat dalam kegiatan pawai dalam peringatan *Cap Go Meh* ini. Perayaan ini biasanya dilaksanakan selama tiga hari namun karena bertepatan dengan perayaan Hari Maulid umat Islam yang diperingati setiap tanggal 12 Robiul Awal 1434 H yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2012 maka umat Tionghoa Buddhapun rela memperingati *Cap Go Meh* hanya dua hari saja yaitu hanya tgl 5 dan 6 Februari saja. (Wawancara dengan Maryam Ketua Walubi, tanggal 10 Februari 2012).

Potensi Integrasi

Secara umum ada beberapa hal yang mempengaruhi integrasi di Gorontalo yaitu adanya ajaran agama Islam, kesamaan nasib dan sejarah, adat budaya, peran pemerintah dan para tokoh.

Ajaran Islam yang menjadi pemersatu seperti dominasi muslim dan cara-cara (sikap) beragama yang dipraktekkan muslim yaitu menghormati pemeluk agama lain. Sedangkan dari segi sejarah, orang Gorontalo berasal dari suku Gorontalo (Islam), Minahasa (Kristen), Sanger (Kristen) dan Jawa (mayoritas Islam namun ada juga agama lain). Etnis yang datang ke Gorontalo diantaranya Arab, Cina lalu kolonial Belanda dan transmigran. Sementara itu, Suku Cina sudah ratusan tahun tinggal di Gorontalo. Saat ini keberadaan Kelenteng Tridharma milik yayasan Tulus Harapan Kita tersebut sudah mencapai 273 tahun.

Adat/budaya yang masih kuat seperti; adat perkawinan, kematian dan maulidan. Di sisi lain, penyelenggaraan acara adat tidak terdapat perbedaan. Misalnya saat kematian hari pertama semua berpakaian putih, pada hari ke 7 semua berpakaian biru. Tata kehidupan masyarakat wilayah Provinsi Gorontalo berbasis adat, terdapat 3 serangkai adat yaitu Kepala pemerintahan, Kepala adat atau bate, dan Kepala agama atau

qadi. Tugas bate mengawasi perjalanan adat, ada empat bate di tiap kecamatan, dipimpin oleh *Bete Lo Olo Opoh* (kepala semua adat di kecamatan). Untuk tingkat kabupaten/Kota disebut *Bate Lo Hulon Dalo* (kepala bate tingkat walikota). Dan qodi bertugas memimpin acara perayaan agama, membuka acara, berdoa pada acara pelantikan pembesar Provinsi Gorontalo, jika non muslim maka qodi hanya mengalungkan bunga.

Di Gorontalo terdapat FKMPD atau Forum Kominda (Forum Komunikasi Masyarakat dan Pemerintah daerah) dan intelejen yang selalu mengantisipasi jika ada potensi konflik. Tidak dipungkiri lagi Tokoh Agama dan organisasi FKUB turut andil dalam mewarnai interaksi sosial dan keagamaan di wilayah ini.

Potensi Konflik

Salah satu persoalan yang biasanya dapat mengganggu hubungan antar umat beragama adalah adanya isu penyebaran agama oleh tokoh/penganut agama tertentu terhadap komunitas agama lain dan isu pendirian rumah ibadah. Dari berbagai informasi, tidak ditemukan adanya isu yang bersifat mengganggu kerukunan antarumat beragama seperti penyebaran agama oleh kelompok tertentu, tidak terdengar adanya isu islamisasi atau kristenisasi.

Kondisi Gorontalo yang aman dan jauh dari konflik ini dinyatakan oleh Abd. Rasyid Kamaru Ketua MUI dan FKUB provinsi Gorontalo, beliau mengatakan:

“Secara umum tidak ada konflik antarumat beragama di Gorontalo, potensi pun rasanya tidak ada”.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Pastor Aloysius Wilar, Pr. dari Katolik:

“Sudah dua tahun saya bertugas di Gorontalo saya tidak pernah

mengalami kesulitan hubungan dengan umat beragama, saat Idul Fitri bersama Dewan Pastoral kami silaturahmi ke tokoh-tokoh muslim, sebaliknya saat Natal kami juga dikunjungi oleh tokoh-tokoh dari umat muslim.”

Beberapa persoalan terkait pendirian rumah ibadah yang perlu mendapatkan perhatian dan langkah pemecahan yang bijaksana yaitu antara lain masalah IMB rumah ibadat Gereja Pantekosta di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo, yang sampai saat ini belum dapat berdiri karena belum mendapat IMB.

Masalah lain terjadi di Kabupaten Gorontalo dekat dengan Bandara Jalaluddin. Di lokasi tersebut telah berdiri sebuah gereja di tanah AU, masyarakat Kristen ingin membangun lagi gereja di tanah milik masyarakat, sepertinya masyarakat tidak mungkin memberikan izin.

Persoalan juga ada pada umat Katolik. Di Provinsi Gorontalo terdapat 1 Paroki dan 8 stasi, namun ada 2 stasi masih melaksanakan misa di rumah. Masih pada umat Katolik, di Randangan ada gereja Katolik belum memiliki IMB, padahal gereja tersebut sudah berdiri sebelum PBM tahun 2006 itu ditetapkan.

Sementara itu, umat Hindu di Kota dan Kabupaten Gorontalo sebelum tahun 2007 tidak memiliki pure sebagai rumah ibadah, karena masyarakat yang umumnya muslim menolak adanya tempat ibadah pura di sekitar mereka meskipun berulang kali disosialisasikan ke masyarakat. Namun saat ini umat Hindu sudah bisa mendirikan pure yaitu Pura Kahyangan Jagat menempati tanah di area milik Bataliyon Kompi B di Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Konflik yang mengganggu keamanan yang bersifat internumat

beragamapun relatif tidak ditemukan di Provinsi Gorontalo. Di lingkungan umat Islam, dulu ada pertentangan/konflik intern Islam yaitu antara Muhammadiyah dan NU tapi kini tidak lagi, karena kuatnya pengaruh adat dan seiring dengan interaksi sosial antar masyarakat maka lambat laun mereka bisa tersatukan oleh adat.

Di Gorontalo juga terdapat aliran-aliran agama yang berbeda dengan *mainstream* seperti Islam Jama'ah, tapi masih bersifat individual sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ada juga potensi konflik intern Islam dengan adanya aliran (tarik) Naksabandiyah yang dianggap memiliki *'amaliyah* berbeda dengan masyarakat muslim sekitar. Namun di masa yang akan datang potensi konflik bisa saja muncul jika ada paham/gerakan baru yang masuk ke Gorontalo misalnya Jamaah Tabligh atau lainnya, sebab dengan kuatnya adat di masyarakat maka bisa ada penolakan yang keras terhadap paham/gerakan baru tersebut. (Wawancara dengan Rektor IAIN Gorontalo, Prof. Muhammadiyah Amin, pada 7 Februari 2012).

Sementara ini pada non muslim ada juga beberapa kasus kecil yang bersifat konflik intern umat beragama yaitu ada konflik intern organisasi Protestan, ada keinginan umat Advent mendirikan gereja tapi belum dapat rekom dari FKUB dan Kemenag Kabupaten. Masyarakat muslim dan GPIG komplek atas pendirian rumah ibadat yang tidak prosedural tersebut, sehingga pembangunan gereja tersebut akhirnya dihentikan, bangunan tersebut saat ini dipasang *police line*. (Wawancara dengan Pdt. Jemy Paulus Bambang Wakil Ketua GPIG, pada 8 Februari 2012).

Terkait adanya isu bahwa terdapat beberapa peraturan daerah (perda) di wilayah Gorontalo yang bernuansa Syari'at mengganggu kaum minoritas hal tersebut tidak bisa dibuktikan.

Rektor IAIN Gorontalo, Prof. Muhammadiyah Amin menyatakan

"Di Gorontalo memang saat ini ada beberapa perda bernuansa syariat misalnya perda mengaji, baca tulis Al Quran, hiburan malam, berpakaian muslim, dan lainnya. Ada 3 reaksi masyarakat: menerima, menolak, dan ambivalen. Namun sejauh ini perda tersebut hanya diberlakukan bagi umat muslim saja sehingga tidak mengganggu umat agama lain".

Senada dengan pernyataan di atas Pdt. Jemy Paulus Bambang Wakil Ketua GPIG menyatakan:

"Sejak abad ke 15 masyarakat di Gorontalo berfalsafah semua yang ada di Gorontalo adalah orang Gorontalo, sikap pemerintahpun tidak membeda-bedakan. Kami merasa diperlakukan sama jadi walau ada perda tidak ada diskriminasi".

Pastor Aloysius Wilar, Pr. dari Katolik juga menyampaikan:

"Perda Syariah ada, tapi kami tidak merasa didiskriminasi. Ada perda bernuansa syariat tapi tidak mengganggu non muslim. Pemberanatasan makasiat, satpol PP (Pamong Praja) berperan aktif jadi tidak ada tindakan main hakim sendiri".

Peran FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis, banyak isu-isu keagamaan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dapat dinetralisir oleh dialog-dialog yang diselenggarakan FKUB baik melalui dialog yang bersifat formal maupun informal.

Di Gorontalo telah berdiri FKUB, baik di tingkat provinsi juga kabupaten, tiap bulan pengurus FKUB aktif melakukan pertemuan membahas program kerja dan berbagai hal terkait kehidupan keagamaan masyarakat. FKUB juga beberapa kali melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan kerukunan antarumat beragama, misalnya dua tahun lalu FKUB menyelenggarakan acara solidaritas bersama antarumat beragama/doa bersama di lakukan di Balai Kartini, dalam acara tersebut masing-masing para pemuka memimpin do'a bergiliran dan diikuti umatnya.

Sampai saat ini belum ada bantuan khusus dari pemda Prov. Gorontalo terkait fasilitas, sarana prasarana, maupun bantuan financial untuk program-program FKUB, Keberadaan FKUB di tingkat provinsi masih difasilitasi oleh Kementerian Agama, saat ini FKUB memiliki sekretariat di asrama haji yang relatif megah, ada bantuan financial dari pemda Prov. Gorontalo jika ada undangan dari luar dan pengurus FKUB berangkat mewakili ke daerah maka ada bantuan untuk transport dari Kesbangpol Linmas, secara umum program FKUB yang telah dijalankan belum banyak karena keterbatasan finansial.

Kondisi demikian berbeda dengan yang dialami oleh FKUB Kab. Pohuwato sampai saat ini setiap tahunnya mereka menerima alokasi anggaran dana sebesar Rp. 25 juta dari pemda setempat untuk dana operasional, para pengurus FKUB juga aktif dilibatkan dalam program-program kerukunan antarumat beragama di Kab. Pohuwato, Kantor Kemenag Kabupaten Pohuwato sering meminta para tokoh/pengurus FKUB kabupaten menjadi nara sumber untuk kegiatan di kecamatan-kecamatan. (Wawancara dengan Abdul Rasyid, Ka-Kankemenag Kab Pohuwato, tgl 9 Februari 2012).

Penutup

Provinsi Gorontalo relative majemuk, beragam suku bangsa dan agama telah hidup lama di sana, hampir semua etnis dan agama ada di Gorontalo dan masyarakat dapat hidup berdampingan, rukun dan damai. Meskipun di beberapa daerah di Indonesia terjadi beberapa konflik sosial, baik yang berdasarkan agama atau tidak, masyarakat Gorontalo sampai saat ini tidak terpengaruh, falsafah hidup seperti "*torang samua basudara*" masih benar-benar hidup dalam kebudayaan antar umat beragama.

Disamping nilai-nilai agama, keraifan lokal masyarakat Gorontalo mampu menjadi perekat kerukunan, semua pemeluk agama merasakan kenyamanan yang tinggi, walau bagian terbesar adalah komunitas muslim. Hal ini ditunjukkan oleh kesaksian beberapa peserta yang merasakan tidak terusik dalam menjalani ibadah keagamaan dan kehidupan sehari-hari.

Beberapa masalah memang pernah muncul di Gorontalo seperti pendirian rumah ibadah, isu SARA, nikah beda agama, atau lainnya akan tetapi semua masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah sebelum masalah itu meluas.

Unsur pemerintah di Gorontalo telah berperan mengayomi semua agama, perayaan keagamaan minoritas mendapat perhatian yang sama. Saat perayaan agama umat tertentu, maka pemerintah daerah berkunjung ke rumah ibadah agama tersebut dan turut memberi ucapan selamat. Pemda juga memberikan bantuan terhadap FKUB dan rumah-rumah ibadah, namun harus diakui bahwa belum semua rumah ibadah agama-agama menerima bantuan, karena dana yang terbatas sehingga bantuan diberikan secara bertahap.

Peran FKUB yang sudah relatif optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun masih terdapat beberapa hambatan khususnya dalam hal dukungan anggaran

Studi ini merekomendasikan yakni:
 a) perlu ada aktivitas tertentu antar umat beragama yang bukan bersifat ibadah untuk meningkatkan komunikasi dan memelihara kerukunan, hari besar agama dapat menjadi entry-point dalam membangun hubungan antarumat beragama; b) Menyikapi masalah pendirian rumah ibadah, bahwa pada dasarnya saat ini hampir semua agama juga relatif menghadapi masalah dalam pendirian rumah ibadah. Untuk itu diperlukan adanya revitalisasi budaya lokal yang menunjang kerukunan, karena sifatnya yang budayawi dan netral-keagamaan, maka budaya lokal tersebut bisa menampung kemajemukan agama sehingga strategis bagi pengembangan kerukunan beragama dan mendukung konsep persatuan secara nasional; c) Kondisi kerukunan antar umat beragama di Gorontalo selama ini berjalan baik, namun adanya mobilitas sosial dari luar Gorontalo dan kemajuan teknologi informasi dikhawatirkan akan muncul di masa depan hal-hal yang mengganggu kerukunan, untuk itu perlu langkah-

langkah antisipasi yang sistemik dan integratif. Oleh sebab itu, kerukunan di Gorontalo yang sudah baik perlu terus dikembangkan, karena rukun tidak sekedar rukun, tapi harus didayagunakan. Misalnya untuk program memelihara lingkungan, penghematan biaya keluarga dengan mendirikan koperasi, dll. Jadi rukun tidak bersifat statis namun juga dapat di dayagunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat; d) Pemerintah pusat dan daerah perlu terus memfasilitasi peningkatan kerukunan, namun demikian sesungguhnya kerukunan itu harus diawali dan dibangun dari komunitas sendiri, karena subyek kerukunan yang terpenting adalah dari komunitas itu sendiri. Untuk itu disamping adanya dukungan pemerintah maka masyarakat perlu menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk dapat menjalankan program-program kerukunan yang sudah direncanakan; e) Peran FKUB sangat strategis dalam memelihara kerukunan antarumat beragama, untuk itu dukungan semua pihak khususnya pemerintah daerah sangat diharapkan bagi penguatan eksistensi FKUB, bantuan anggaran bagi FKUB yang selama ini ada perlu ditingkatkan sehingga kerja FKUB dapat lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Emirzon, Joni. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emasaga, dkk. 2009. *Atlas Bernuansa Tematik Provinsi Gorontalo*. Jakarta: PT Musi Perkasa Utama.
- Fisher, Simon, (et. al). 2001. *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Harahap, Ahmad Rivai, 2004. “*Multikulturalisme dan Penerapannya dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama*”.

- Ishak, Otto Syamsuddin, (Ed.) . 2001. *Suara dari Gorontalo, Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Gorontalo. Seri II: Resolusi Konflik*. Jakarta: YAPPIKA.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramsbotham, Oliver, (et. al). 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Penerjemah: Tri Budhi Sastrio. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Terjemahan. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rusmin Tumanggor, Syafii Mufid, Imam Soeyoeti, at al. 2010. *Panduan Pengelolaan Konflik Etno Religius*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Anas S. Machfud, 2010, (makalah) "*Pengelolaan Konflik Etnoreligius dengan Pendekatan PAR*" 6-8 Maret 2010.

Model Penanganan Konflik Benuansa SARA di Kota Pontianak Kalimantan Barat

Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd.

Dosen STAIN Pontianak

Abstract

This research is an effort to find conflict based on primordial solution. The handling of the conflict could be analyzed by using some theories such as civil society, conflict management and social-cultural approaches. The case solution of conflict between youth and students of Dayak (PMD) and Front of Islam Protector (FPI) in Pontianak is a special and specific. This study finds four models of solution. First, the conflict is overcome not on military's and repressive way, but it based on the new frame of regulation. Second, model of conflict solution is somewhat similar with Madinah Chapters and there are actions to stop the conflict based on religion. Third, approaches, strategy and method of conflict solution tend of using new regulation based on State Regulation no 12, 2012 on how to handle social conflict. And, fourth, alternative model for handling and preventing conflict based on 'comprehensive eight religious integrative synergyc' The source of data of this research are depth interview and focus group discussion in the qualitative kind and model analysis of Miles and Huberman.

Keywords: conflict solution, civil society, conflict solution model

Abstrak

Penelitian ini berusaha menemukan model penanganan konflik sebagai salah satu upaya yang serius dan penting. Penanganan konflik dapat dianalisis berdasarkan teori masyarakat madani, teori manajemen konflik dan teori sosial-budaya. Kasus penanganan konflik yang terjadi di Kota Pontianak Kalimantan Barat antara Pemuda dan Mahasiswa Dayak (PMD) dengan Front Pembela Islam (FPI) merupakan kasus yang khas atau spesifik. Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Penanganan Konflik Benuansa SARA di Pontianak Kalimantan Barat tersebut ditemukan pertama, penanganan konflik tidak bersifat militeristik dan represif, tetapi berdasarkan kerangka regulasi baru. Kedua, upaya pencegahan dan penanganan konflik pada saat terjadi cenderung memiliki persamaan dengan pasal-pasal pada Piagam Madinah serta adanya tindakan pencegahan dan menghentikan konflik secara langsung berbasis religius. Ketiga, pendekatan, strategi, dan metode penanganan konflik cenderung menggunakan pendekatan kerangka regulasi baru berdasarkan pada UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan tiga strategi; pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pascakonflik. Keempat, model alternatif pencegahan dalam penanganan konflik yakni model "Religius Komprehensif Integratif Sinergis Angka Delapan". Sumber utama penelitian ini yakni; data hasil wawancara mendalam dan hasil FGD, hasil observasi dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik analisis data model Miles and Huberman.

Kata Kunci: Penanganan Konflik, Masyarakat Madani, dan Model Penanganan Konflik

Pendahuluan

Konflik dalam masyarakat majemuk tidak dapat dihindari. Pontianak ibu kota Propinsi Kalimantan Barat termasuk kota yang rawan konflik. Pemerintah telah berupaya untuk menangani konflik melalui kerangka regulasi. Ada tiga strategi dalam penanganan konflik oleh Pemerintah. Pertama kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik, kedua kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik dan ketiga kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik. Undang-undang yang terkait dengan penanganan konflik adalah UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik. Adapun bagi TNI-Polri telah menyiapkan seperangkat regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala Polisi (Perkap).

Untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang lagi, diperlukan sosialisasi tentang undang-undang, perkap dan peraturan bersama tersebut di internal pemerintah dan non pemerintah, termasuk di masyarakat. UU, Perkap, dan peraturan bersama tersebut dapat menjadi dasar dalam penanganan konflik, upaya pencegahan dalam penanganan konflik, upaya penanganan konflik pada saat terjadi konflik pendekatan, strategi, dan metode penanganan konflik. Berdasarkan keempat hal tersebut akan ditemukan model pencegahan dalam penanganan konflik yang komprehensif. Selain itu diperlukan kebijakan publik yang strategis. Dalam konteks konflik sosial aliran, faham, dan gerakan keagamaan bermanuansa SARA yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dipandang perlu menemukan model penanganan konflik perspektif *Islamic Studies*. Model dalam perspektif tersebut belum ditemukan.

Konflik horizontal, dalam hal ini konflik SARA, terjadi lantaran adanya proses marginalisasi terhadap standar moral yang selama ini diyakini dan

dipegang, seperti agama dan adat istiadat, serta belum jelasnya kerangka regulasi. Memasuki era industrial dan globalisasi budaya, barangkali yang paling terkena pengaruhnya secara langsung adalah kehidupan keagamaan. Perkembangan kehidupan sosial keagamaan akhir-akhir ini di Indonesia pada umumnya dan di Pontianak Kalimantan Barat pada khususnya menunjukkan gejala yang perlu mendapat perhatian yang serius dan perlu mendapat prioritas yang utama dalam upaya pembangunan di bidang agama dan bidang sosial budaya.

Pada tanggal 15 Maret 2012 telah terjadi konflik antara PMD FPI di Pontianak Kalimantan Barat. Faktor pemicu konflik bermula dari penolakan mahasiswa PMD terhadap FPI dengan memasang spanduk. Umat Islam Kalbar tidak terima dengan kelakuan sekelompok mahasiswa itu. Lantas mereka menurunkan spanduk-spanduk penolakan FPI, sehingga terjadilah konflik antara mahasiswa Dayak yang telah terprovokasi. Kemudian konflik berkembang menjadi massa umat Islam. Demikian pula PMD telah berkembang menjadi massa Etnik Dayak (ED). Mereka membawa senjata tajam dan sudah berhadap-hadapan untuk saling membunuh. Kemudian pemerintah, organisasi keagamaan, LSM, dan tokoh agama/masyarakat berupaya sekuat tenaga agar konflik tidak terjadi.

Data yang terkait dengan PMD sampai saat ini belum ditemukan secara pasti. Namun demikian, hasil wawancara mendalam dan pelacakan terhadap internet ditemukan beberapa informasi yaitu; 1) pemicu konflik bermula dari pemuda Moreng membawa spanduk yang menolak FPI, kebetulan di depan asrama dayak, 2) di Kalbar ada organisasi Forum Persatuan Pemuda Dayak (FP2D), FP2D berdiri tahun 2006, 3) di Kabupaten Melawi ditemukan organisasi Ikatan Pemuda Dayak Kabupaten Melawi

(IPDKM). Organisasi ini berdiri di Pontianak pada tanggal 11 Mei 2009. Kemudian ada juga organisasi Ikatan Mahasiswa Dayak Parindu (IMDP). Tahun berdiri belum diketahui secara pasti.

Secara umum dapat diuraikan bahwa etnis Dayak menganut kepercayaan nenek moyang yang terkait dengan tradisi mereka sendiri yang berlangsung dalam kehidupan dan penciptaan alam semesta. Menurut Munawar (2003:26) menguraikan bahwa mayoritas masyarakat Dayak adalah penganut agama Kristen: Katolik dan Protestan. Ada yang menganut kepercayaan nenek moyang (*animisme*) dan ada pula yang memeluk agama Islam, Budha dan Hindu. Lebih lanjut Munawar (2003:26) menguraikan bahwa animisme yang dianut oleh masyarakat Dayak, juga lazim diistilahkan dengan sebutan Kaharingan.

Secara nasional FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. FPI berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* di setiap aspek kehidupan. FPI berdiri di Kalimantan Barat pada tahun 2008 yang diketuai oleh Habib Iskandar, sedangkan Sekjenya adalah Hendri Al-Hafiz. Jumlah anggota FPI di Kalbar kurang lebih 25.000 orang yang masing-masing punya kedekatan emosional. Adapun program kerja rutin adalah pengajian rutin mingguan dan bulanan. Kekuatan FPI adalah organisasi yang mampu berbaur dengan berbagai etnis. Dialog itu isinya mensikapi isu SARA yang berkembang termasuk isu

penolakan FPI di Kal-Teng. Program lainnya adalah membangun komunikasi melalui kegiatan mengadvokasi masyarakat yang terpinggirkan.

Ada 6 Dewan Pimpinan Daerah yang tersebar antara lain; 1) Kabupaten Pontianak dengan jumlah anggota sekitar 16.700 orang dan memiliki 15 DPC, 2) Kota Pontianak, 3) Kota Singkawang, 4) Kabupaten Kubu Raya, 5) Kabupaten Ketapang, dan 6) Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di lapangan dan telaah literatur pada sumber skunder (hasil penelitian konflik sosial keagamaan benuansa SARA yang diterbitkan oleh Puslitbang Kemenag Pusat), ditemukan bahwa penanganan konflik sosial keagamaan yang pernah terjadi di Kalimantan Barat dihadapkan pada tiga masalah utama, yaitu *pertama*, masalah penanganan konflik secara umum yang selama ini berlangsung di Kalimantan Barat cenderung kurang bersifat militerisme dan belum memiliki instrumen yang lengkap. *Kedua*, masalah penanganan konflik yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun lembaga non- Pemerintah cenderung kurang adanya kepastian hukum. *Ketiga*, belum ditemukan model penanganan konflik yang strategis komprehensif.

Faktor penyebab masalah di atas, adalah *pertama*, sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih menekankan aspek kuratif dari pada aspek preventif. *Kedua*, penanganan konflik bersifat militeristik dan represif. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik masih bersifat parsial, dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. *Keempat*, penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi konflik-konflik cenderung

lemah, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan Konflik Sosial aliran, faham, dan gerakan keagamaan belum memiliki format kebijakan yang komprehensif, integratif, dan sinergis. Selain itu, belum adanya kebijakan, baik dalam bentuk Perda, SK Gubernur/Walikota/Bupati yang mengatur materi proses pencegahan (preventif) dan penyembuhan (kuratif) dengan pendekatan agama, dan ketentuan sanksi bagi aktor penyebab konflik. *Kelima*, sikap mental yang negatif, seperti intoleransi, prasangka, kesombongan religius, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan cenderung rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui penelitian ini akan ditemukan tingkat efektifitas penanganan konflik gerakan keagamaan bermanuansa SARA khususnya, dan penanganan konflik aliran, faham dan gerakan keagamaan pada umumnya.

Adapun rumusan masalah yang akan disajikan dalam penelitian kali ini, secara spesifik adalah sebagai berikut: 1) apa regulasi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam konflik yang melibatkan kelompok agama dan etnis?, 2) upaya apa yang dilakukan dalam pencegahan konflik bermanuansa SARA selama ini berlangsung pada umumnya dan antara Mahasiswa Dayak dan FPI pada khususnya di Pontianak Kalimantan Barat?, 3) bagaimana pendekatan, strategi, dan metode dalam pencegahan dan penanganan konflik di Pontianak Kalimantan Barat?, dan 4) bagaimana rumusan model alternatif bagi penanganan konflik bermanuansa SARA selama ini berlangsung pada umumnya dan antara Mahasiswa Dayak dan FPI pada khususnya secara berkelanjutan?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menemukan regulasi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan baik oleh Pemerintah maupun lembaga

non Pemerintah dalam konflik yang melibatkan kelompok agama dan etnis, 2) menemukan upaya yang dilakukan dalam pencegahan konflik bermanuansa SARA selama ini berlangsung pada umumnya dan antara mahasiswa dayak dengan FPI pada khususnya di Pontianak Kalimantan Barat, 3) menemukan pendekatan, strategi, dan metode dalam pencegahan dan penanganan konflik di Pontianak Kalimantan Barat, dan 4) menemukan rumusan model alternatif bagi penanganan konflik bermanuansa SARA pada umumnya dan antara mahasiswa dayak dengan FPI pada khususnya secara berkelanjutan.

Teori yang digunakan dalam penanganan konflik pada umumnya dan penanganan konflik gerakan keagamaan bermanuansa SARA adalah teori masyarakat madani, teori manajemen konflik, dan teori perubahan sosial budaya. Masyarakat madani yaitu masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, bersifat mandiri secara politik-ekonomi-budaya serta memiliki pemerintahan sipil, memiliki prinsip kesederajatan dan keadilan, serta prinsip keterbukaan (Hujair AH. Sanaky, 2003:41). Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Penanganan konflik tersebut dalam rangka mengembangkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Letak kekuatan masyarakat madani ada pada karakteristik dan pilar-pilarnya, sebagai prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Azyumardi Azra sebagaimana dikutip oleh Tim ICCE UIN Jakarta (2003:249) menyebutkan bahwa masyarakat madani mengacu

ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (*civility*). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

Masyarakat madani dalam piagam Madinah, tidak akan tegak, dan tidak akan berkembang, apabila fenomena sosial keagamaan di dalam masyarakat cenderung mengaktualisasikan sikap mental yang negatif. Demikian pula masyarakat madani tidak akan tumbuh apabila muncul berbagai aliran, faham, atau gerakan keagamaan yang radikal dan destruktif. (Hujair A.H. Sanaky, 2003:40) menguraikan bahwa posisi piagam madinah sebagai kontrak sosial antara Nabi Muhammad SAW dengan rakyat Madinah (orang Quraisy, kaum Yastrib, dan orang-orang yang mengakui berjuang bersama mereka). Kontrak sosial yang dilakukan oleh Nabi, dinilai identik dengan teori *social contract* Thomas Hobbes.

Terwujudnya masyarakat madani akan meminimalisir konflik, apalagi konflik bernuansa SARA. Karena institusi "Piagam Madinah" secara formal mengatur hubungan sosial antara komponen masyarakat, yaitu; antara sesama muslim, bahwa mereka adalah ummah walaupun mereka berbeda suku. Selain itu mengatur hubungan sosial antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Jadi, konflik bernuansa SARA dapat dicegah.

Penelitian ini diarahkan pada substansi aliran, faham, atau gerakan keagamaan spesifik tersebut dan kondisi sosial, ekonomi, politik yang mendorong perkembangannya, khususnya di

Kalimantan barat, sehingga masa konflik bernuansa SARA tidak lagi terjadi. Penelitian ini akan menemukan model penanganan konflik yang efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama lima bulan (Mei s/d September 2012) sesuai dengan tahapan penelitian kualitatif, yaitu: 1) tahap persiapan; melakukan kegiatan penelitian pendahuluan dan melakukan telaah literatur dan survey lapangan tentang masalah yang akan diteliti, 2) tahap kedua; penyusunan IPD (Instrumen Pengumpulan Data), 3) tahap ketiga; penelitian lapangan dan analisis, dengan kegiatan; wawancara mendalam, observasi dan FGD (*Focus Group Discussion*), 4) tahap keempat; analisis data, kegiatan penelitiannya adalah melakukan analisis data yang terkumpul dari kegiatan tahap ketiga, dan 5) tahap kelima; penulisan laporan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Studi kasus adalah cara yang peneliti gunakan untuk mendapatkan pembahasan tentang penelitian ini. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosial keagamaan perspektif *Islamic Studies*. Cara pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen : 1) telaah literatur (*literature review*), 2) *Focus Group Discussion* (FGD), 3) wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan 4) dokumentasi. FGD dan wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah informan kunci terdiri atas: para pejabat Pemerintah (Walikota dan Wakil Wali Kota), pimpinan TNI-Polri, pimpinan Perguruan Tinggi, non Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Data yang diperoleh kemudian

dianalisis dengan teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

Regulasi yang telah Diimplementasikan

Salah satu instrumen yang dijadikan dasar atau pedoman dalam penanganan konflik yang terjadi di Pontianak Kalimantan Barat berupa UU, peraturan, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Beberapa peraturan tersebut antara lain: 1) UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, 2) Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, 3) Perkap RI No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara RI, dan 4) Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Adapun poin-poin yang terkandung dalam peraturan-peraturan terkait yakni: *Pertama*, UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 10 bab dan 62 pasal. Bab 1 berisi beberapa pasal mengenai definisi konflik sosial, penanganan, penghentian dan pencegahan konflik, pemulihan pascakonflik, pengungsi, status keadaan konflik, Satuan penyelesaian konflik, pemerintah, DPR, pemda, DPRD, TNI, Polri, pranata adat, pranata sosial, APBN dan APBD. Bab 2 berisi beberapa pasal yang berisi tentang asas, tujuan dan ruang lingkup penanganan konflik,

bab 3 tentang pencegahan konflik, bab 4 tentang penghentian konflik, bab 5 pemulihan pascakonflik, bab 6 berisi hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik, bab 7 tentang peran serta masyarakat. Bab 8 berisi tentang pendanaan, bab 9 tentang ketentuan peralihan dan bab 10 ketentuan penutup.

Kedua, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam perkap ini terdapat 7 bab, dengan 17 pasal. Adapun bab 1 berisi definisi tentang Polri, tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, mempertahankan diri adan/atau masyarakat, tindakan pasif, tindakan aktif dan tindakan pasif. Bab 2 terkait dengan penggunaan kekuatan dalam hal tahapan dan pelaksanaan, bab 2 terkait dengan pelatihan untuk anggota Polri yang akan diturunkan ke lapangan. Bab 4 terkait dengan perlindungan dan bantuan hukum serta pertanggungjawaban Polri. Bab 5 terkait pengawasan dan pengendalian. Bab 6 terkait dikeluarkannya tembakan peringatan. Bab 7 memuat ketentuan penutup.

Ketiga, Perkap RI No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara RI. Peraturan ini terdiri dari 4 bab dan 21 pasal. Pada bab 1 terdiri dari definisi-definis tentang Polri, sistem operasional Polri, operasi kepolisian, kegiatan kepolisian, situasi aman, bencana, kecelakaan, dan gangguan keamanan, serta berisi asas, prinsip dan tujuan peraturan ini. Bab 2 berisi sistem Polri, bab 3 berisi tataran kewenangan dan tanggung jawab kepolisian

Keempat, Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan

Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan tersebut terdiri dari 10 bab dan 30 pasal. Bab 1 berisi tentang definisi-definisi tentang kerukunan umat beragama, pemeliharaan kerukunan umat beragama, rumah ibadat, ormas keagamaan, fkub, panitia pembngunan rumah ibadat, IMB rumah ibadat. Bab 2 berisi tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, bab 3 berisi tentang forum kerukunan umat beragama, bab 4 berisi tentang pendirian rumah ibadat, bab 5 berisi tentang izin sementara pemanfaatan bangunan gedung. Bab 6 berisi penyelesaian perselisihan, bab 7 berisi tentang pengawasan dan pelaporan, bab 8 tentang belanja, bab 9 tentang ketentuan peralihan dan bab 10 tentang ketentuan penutup.

Keempat regulasi tersebut diimplementasikan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penanganan konflik antara pemuda dan mahasiswa dayak dengan FPI di Pontianak Kalimantan Barat. Regulasi tersebut dijadikan dasar dalam penanganan konflik agar tidak menimbulkan anarkis serta dapat diambil langkah-langkah penanganan sesuai dengan aturan. Tujuannya melindungi masyarakat supaya hidupnya terjamin. Kerukunan umat beragama perlu dijaga baik diinternal umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.

Upaya Pencegahan Konflik

Penanganan konflik dilakukan melalui upaya pencegahan oleh semua pihak, yaitu pihak pemerintah (Pemkot, instansi terkait, dan TNI-Polri) dan lembaga non pemerintah (FKUB, CAIREU, FPI, MABM, YSDK, DAD, dan IKBM). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, yaitu: 1) penanganan secara prosedural, 2)

pendekatan keamanan, 3) melakukan komunikasi dengan toga, toma, dan toa, 4) melakukan dialog dengan tokoh muslim dan non muslim, 5) melakukan himbauan dan pernyataan sikap melalui sms, dan 6) meningkatkan kegiatan diskusi dengan menghadirkan toga, toma, tokoh adat, tokoh etnis.

Upaya utama yang dilakukan oleh pihak keamanan adalah menekankan fungsi Polri, dan TNI yakni; 1) sebagai mediator, 2) program 1 polisi 1 desa, polisi harus ada di setiap desa, 3) mengupayakan permasalahan-permasalahan tertentu agar tidak sampai ke ranah hukum melalui FKPM (Forum Komunikasi Polisi-Masyarakat), permasalahan diselesaikan dengan musyawarah untuk memperoleh *win-win solution*, 4) pemberdayaan bapulbaket, mendeteksi isu-isu yang ada di masyarakat, 5) pemberdayaan bapinkamtimnas yang berujung mengarah pada FKPM, dan 6) menjalin silaturahmi dengan toda, tomas, todat, dan toga.

Upaya lainnya yaitu; 1) memelihara kondisi damai dalam mayarakat, 2) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, 3) meredam potensi konflik, 4) membangun sistem peringatan dini, dan 5) mencari oknum pemasangan spanduk di mess mahasiswa Dayak, untuk diserahkan kembali hukumannya pada kelompoknya. Selain itu dilakukan upaya tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari; 1) kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, 2) perintah lisan, 3) kendali tangan kosong, 4) kendali tangan kosong keras, 5) kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas dan air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri, dan 6) kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan. Penanganan konflik yang terjadi tersebut hanya sampai pada tahap 4. Oleh karena penanganan konflik yang terjadi dianggap

sukses dan mendapat nilai poin 85 serta mendapat penghargaan dari Polri.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut.

Pertama, FKUB Kota Pontianak dan Propinsi Kalimantan Barat, yakni: 1) rapat dengan anggota FKUB lama dan calon anggota baru, 2) turun ke lokasi (lapangan) untuk memberikan penyadaran, pencerahan, dan pencegahan konflik, dan mencegah massa untuk tidak melakukan tindakan anarkis, dan minta mereka pulang, 3) pertemuan darurat dipimpin oleh Ketua FKUB, 4) mengikuti dialog dan musyawarah di Polda, 5) merumuskan kesepakatan bersama 6) kegiatan dialog tentang kerukunan umat beragama, yang dihadiri toga, toma, ketua RW/RT/Lurah/Camat dan pengurus rumah ibadah, 6) rapat rutin bulanan dengan kegiatan mengevaluasi kondisi dan situasi yang ada, 7) turun ke bawah dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan bersama No. 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, 8) dialog, 9) mengundang toga, toma, dan toa, 10) lokakarya, 11) dialog lintas agama atau lintas etnis, 12) gotong royong, 13) santunan-santunan sosial, dan 14) merayakan hari-hari besar Islam.

Kedua, CAIREU STAIN Pontianak, yaitu; 1) membangun komunikasi antara tokoh-tokoh masyarakat dan dewan adat, dan 2) bersama-sama dengan FKUB melakukan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama. *Ketiga*, FPI, yaitu: 1) meredam massa simpatisan muslim melalui telfon, 2) mengikuti pertemuan di polresta, 3) mengikuti pertemuan di polda yang turut dihadiri oleh todat, toga, toma, tokoh etnis, wakil walikota, ketua MABM, ketua Rabittah Alawiyah, FKPM dan FKUB, dan 4) membangun komunikasi

melalui kegiatan mengadvokasi masyarakat yang terpinggirkan. *Keempat*, MABM, yaitu: mengikuti pertemuan yang diadakan di polda. *Kelima*, Institute Dayakologi, yaitu: 1) pembinaan – pembinaan terhadap masyarakat Dayak (terutama golongan muda), 2) melakukan pengajaran dan sosialisasi perdamaian dan multikulturalisme di tujuh (7) sekolah yang menjadi binaan institute, 3) menghimbau untuk tidak panik kepada sekolah-sekolah binaan dan mengontak sesama aktivis perdamaian.

Keenam, YSDK, yaitu: 1) melakukan komunikasi, membangun dan mempererat jaringan, jaringan ke bawah lagi dan menghimbau untuk tidak mudah terprofokasi. Himbauan tersebut dilakukan dengan berkomunikasi langsung, lewat telepon juga ataupun turun langsung untuk berkumpul bersama. 2) bertemu dengan pak eka (CAERUE) dan beberapa pihak dan teman-teman LSM bertemu kapolda untuk mendorong upaya penanganan yang dilakukan.

Kedelapan, IKBM, yaitu: 1) Di wilayah pontura sudah dipesankan supaya jangan sampai orang-orang Madura terpancing. Adapun orang-orang yang sudah keluar harus disuruh kembali lagi. Konflik bukanlah masalah agama. Itu kan intern FPI dengan pemuda-pemuda Dayaknya. Orang-orang Madura dihimbau untuk tinggal di rumah saja, 2) mengikuti dialog di polda, 3) mengeluarkan statemen tentang sikap orang-orang Madura, yang dikeluarkan sejak tahun 2003 (berkas terlampir), 4) komunikasi dengan toga dari seluruh etnis.

Pendekatan, Strategi dan Metode Penanganan Konflik

Berdasarkan pada teori masyarakat madani bahwa pendekatan, strategi, dan metode penanganan konflik cenderung bertujuan untuk menciptakan keserasian

sosial dan mengembangkan toleransi religius-sosial dan budaya yang seluas-luasnya.

Mengacu pada teori manajemen konflik, berdasarkan data yang ada dalam upaya pencegahan konflik ditemukan bahwa data tersebut memiliki karakter tidak saja menggunakan metode dialog, pengumpulan informasi, mediasi, tetapi juga prihatin dengan keadaan yang ada dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh semua pihak (pemerintah dan non pemerintah). Berdasarkan karakter tersebut pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dan non pemerintah cenderung menggunakan pendekatan “controlling/pengendalian” dan pendekatan “problem solving/pemecahan masalah”. Pada pendekatan pengendalian, strategi yang digunakan yang utama adalah pengendalian dan strategi kekuatan oleh TNI-Polri. Pada pendekatan pemecahan masalah, strategi yang digunakan adalah pengumpulan informasi, dialog, dan mencari alternatif.

Berdasarkan pada teori sosial, pendekatan, strategi dan metode yang digunakan cenderung menggunakan teori konflik tentang watak asli masyarakat dengan paradigma pengelolaan keserasian sosial, dengan melibatkan orang ketiga (*third party*). Orang ketiga dimaksud adalah TNI-Polri, Pemerintah Kota, dan para pimpinan lembaga non-pemerintah.

Model Alternatif Penanganan Konflik

Hasil penelaahan terhadap literatur dalam buku *Working with Conflict, Skills and Strategies for Action* oleh Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith dan Sue Williams (2000:35), ditemukan ada 6 model penanganan konflik melalui alat-alatnya yaitu; 1) segitiga ABC, 2) lingkaran, 3) pohon konflik, 4) gaya

bidang, 5) pilar, dan 6) piramid. Model Segitiga ABC adalah analisis tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan konteks pada setiap bagian utama. Model lingkaran adalah cara menganalisis tentang bagian-bagian yang berbeda untuk penanganan konflik. Pohon konflik adalah Alat grafis menggunakan gambar pohon untuk memilah isu-isu konflik utama. Gaya bidang adalah alat untuk menganalisis kekuatan positif dan negatif dalam konflik. Pilar adalah alat untuk ilustrasi elemen grafis elemen atau kekuatan yang memegang situasi tidak stabil. Piramid adalah alat untuk menunjukkan tingkat stakeholder dalam konflik.

Berdasarkan tahap seleksi data tentang penanganan konflik yang berkaitan dengan strategi dan karakter dalam pendekatan pengendalian dan pemecahan masalah penanganan konflik ditemukan beberapa kiriteria, yaitu; Religius, Piagam Madinah, Komprehensif, Integratif, dan Sinergis. Penilaian terhadap penanganan konflik melalui pengukuran yang mendalam memperoleh nilai poin angka 85. Berdasarkan data ini berarti ditemukan adanya model alternatif dalam penanganan konflik.

Penanganan konflik melalui tiga strategi; pencegahan konflik, strategi penanganan konflik pada saat terjadi, dan penanganan pascakonflik. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam UUD 1945, maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan MPR (TAP MPR).

Pendekatan pengendalian dalam penanganan konflik yang dilakukan oleh TNI-Polri adalah strategi kekuatan dengan menekankan pada pendekatan keamanan. Berdasarkan teori masyarakat madani bahwa regulasi oleh Pemerintah, TNI-Polri yang terkait dengan Perkap, Non-Pemerintah, Toa, Toga dan Toma yang dijadikan dasar cenderung adanya

pernyataan atau kesepakatan masyarakat madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak semua warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama. Selain itu adanya prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara komunitas Muslim dan Non-Muslim (A. Ubaidillah, dkk, 2000: 215).

Solusi Konflik dalam Piagam Madinah

Deskripsi hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan bangunan keilmuan "Islamic Studies," yaitu teori masyarakat madani, teori manajemen konflik dan teori manajemen modern. Berdasarkan sudut pandang teori masyarakat madani yang berkaitan dengan piagam madinah, cenderung mengarah pada model "Piagam Madinah." Piagam Madinah dikenal dengan sebutan "Konstitusi Madinah" ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*. (http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah).

Analisis tersebut ditemukan adanya persamaan-persamaan antara upaya pencegahan dalam penanganan konflik di Kota Pontianak dengan piagam madinah. *Pertama*, upaya pencegahan tersebut terwujud karena bahu membahu antara TNI-Polri, Pemerintah, instansi terkait, pamong praja, media cetak dan masyarakat sendiri. Mereka mendorong

terwujudnya situasi damai, sehingga mereka bahu membahu menjadi satu ummah. Selain itu situasi konflik bukan keinginan masyarakat, Pontianak hanya dijadikan tempat. Dalam piagam madinah dijelaskan pada pasal 2-10, pasal 18, dan pasal 44 bahwa 9 suku (kaum Muhajirin dari Quraisy, banu Auf, banu Sa'idah, banu Al-Hars, banu Jusam, banu Annajjar, banu Amr bin 'Awf, banu Al-Nabit, dan banu Al-'Aws) bahu membahu untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah, dan setiap pasukan (kelompok) bahu membahu satu sama lain. Kedua, pihak keamanan (TNI-Polri), Pemerintah, dan FKUB memfasilitasi upaya pencegahan konflik melalui mediasi dan dialog. Dalam Piagam Madinah Nabi Muhammad SAW memfasilitasi suku-suku dan kaum Yahudi yang ikut bersama Nabi untuk menghentikan pertentangan tersebut dan menciptakan situasi yang damai, harmonis dan aman. Ketiga, dalam proses mediasi dan dialog mereka saling memberi saran, nasehat, dan memenuhi janji (pasal 37 PM). Keempat, penanganan konflik mencerminkan asas; 1) persatuan (pasal 1 dalam piagam madinah), 2) kemanusiaan (pasal 2 - 11, pasal 13-14 dalam piagam madinah), 3) tidak memihak dan tidak membeda-bedakan (pasal 13 dalam piagam madinah), 4) kekeluargaan (pasal 15 dan 16 dalam piagam madinah), 5) kepastian hukum (pasal 23, pasal 36, pasal 40, dan pasal 42 dalam piagam madinah), 6) hak asasi manusia (pasal 25, dan pasal 46 dalam piagam madinah), 7) keberlanjutan (pasal 42, dan pasal 45 dalam piagam madinah), 8) kearifal/budaya lokal (pasal 2-10 dalam piagam madinah), dan 9) persamaan dan keadilan (pasal 17 dan pasal 26-35 dalam piagam madinah).

Berdasarkan hasil analisis teori manajemen konflik ditemukan, *pertama*, adanya tindakan pencegahan konflik. (Lihat [https://docs.google.com/viewer?a=v&q= cache :7tkDCEsSXNEJ](https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache%3A%3A7tkDCEsSXNEJ). Diakses pada tanggal 30 Agustus 2012). *Kedua*,

adanya upaya yang komprehensif dalam penanganan konflik. Upaya tersebut ditangani melalui upaya pencegahan konflik. Pencegahan konflik adalah komponen inti dari Program Manajemen Konflik yang komprehensif (<file:///D:/conflictprevention.html>). Pendapat senada dikemukakan oleh David Carment dan Albrecht Schnabel (2004:5) bahwa pencegahan konflik memerlukan cara struktural atau interaktif.

Beberapa kategori dalam upaya pencegahan konflik dari perspektif teori sosial, Parsons (2005:58) menguraikan bahwa 'pola-pola yang berorientasi pada nilai amatlah penting dalam penataan sistem-sistem tindakan, sebab salah satu dari pola tersebut mendefinisikan pola-pola hak dan kewajiban timbal balik yang merupakan unsur pokok pembentuk ekspektasi peran dan sanksi.' Parsons percaya bahwa kesepakatan tentang nilai-nilai bersama merupakan jantung dari tatanan sosial.

Pendekatan, Strategi dan Metode Penanganan Konflik

Secara teoritis dalam konteks manajemen konflik, komprehensif artinya, pendekatan yang digunakan mengikuti sudut pandang humanistik, dan pragmatis. Bochner dan Kelly (1974) menegaskan bahwa sudut pandang humanistik menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung dan menciptakan interaksi yang bermutu, jujur dan memuaskan. Sudut pandang pragmatis menekankan pada manajemen dan interaksi yang positif serta pencapaian tujuan yang bermutu.

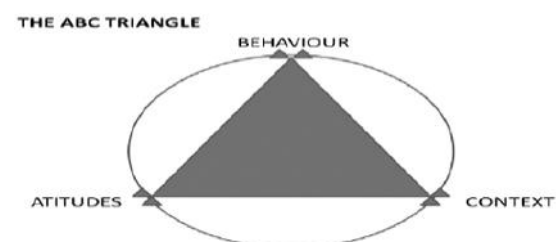
Para sosiolog perspektif teori konflik tentang watak asli masyarakat melihat masyarakat selalu dalam kondisi dinamis dan cenderung mengarah pada suatu konflik. Oleh karena itu muncul konsep untuk mengatasi masalah-masalah sosial sering menonjolkan aspek penanganan konflik antar kelompok, melalui

paradigma pengelolaan keserasian sosial. Imron Abdullah (2006: 194) menegaskan bahwa pengelolaan keserasian sosial adalah suatu usaha sistematis untuk mengatasi konflik. Dari definisi tersebut muncul suatu keyakinan bahwa usaha untuk mengatasi konflik antar kelompok hanya mungkin dilakukan oleh pihak ketiga (*third party*), sebab tidak mungkin orang-orang yang terlibat konflik mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Berbeda dengan teori fungsionalisme struktural menurut Imran Abdullah (2006: 195) cenderung pengelolaan keserasian sosial tidak lain usaha sistematis untuk mengarahkan proses interaksi sosial menuju terciptanya integrasi yang intensi, baik dalam bentuk kerjasama, adaptasi, akomodasi, akulturasi, maupun asimilasi budaya. Namun demikian, tidak jelas siapa yang melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut, apakah dari kalangan masyarakat itu sendiri atau harus dari pihak ketiga (*third party*).

Model Alternatif Penanganan Konflik Bernuansa SARA

Salah satu contoh model penanganan konflik dengan alatnya segitiga ABC (Attitude, Behaviour and Context) sebagaimana nampak dalam diagram berikut.



Tiga faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain ditunjukkan dengan panah yang mengarah dari satu ke yang lain. Konteks yang mengabaikan tuntutan satu kelompok cenderung mengarah pada sikap frustrasi, yang pada gilirannya

dapat mengakibatkan protes. Perilaku ini mengarah ke konteks penolakan lebih lanjut dari hak berkontribusi terhadap frustrasi yang lebih besar, bahkan mungkin marah, yang bisa meledak menjadi kekerasan.

Adapun temuan model dalam penelitian berdasarkan pada strategi dan karakter dalam pendekatan pengendalian dan pemecahan masalah konflik serta kerangka regulasi strategi penanganan konflik oleh Pemerintah dan Non Pemerintah.

Tujuan model penanganan konflik yakni; 1) untuk mengidentifikasi lima faktor-faktor untuk setiap bagian utamanya dalam penanganan konflik, yaitu; religiusitas, piagam madinah, komprehensif, integratif, dan sinergis, 2) untuk menganalisis pengaruh kelima faktor tersebut dalam penanganan konflik, 3) untuk menghubungkan dengan kebutuhan dan kekhawatiran dalam setiap bagian, dan 4) untuk mengidentifikasi awal permulaan untuk intervensi dalam sebuah situasi.

Penutup

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, regulasi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan baik oleh Pemerintah, TNI-Polri, Non-Pemerintah, dan Toa/Toga/Toma adalah berdasarkan kerangka regulasi baru. *Kedua*, upaya pencegahan dan penanganan konflik pada saat terjadi cenderung memiliki persamaan dengan pasal-pasal pada Piagam Madinah yang berbasis religius dengan teori masyarakat madani. Lebih lanjut bahwa penanganan tersebut cenderung adanya tindakan pencegahan dan menghentikan konflik secara langsung. Pencegahan konflik adalah komponen inti dari Program Manajemen Konflik yang komprehensif.

Ketiga, pendekatan, strategi, dan metode penanganan konflik cenderung menggunakan pendekatan kerangka regulasi baru dengan tiga strategi; pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pascakonflik. Selanjutnya bahwa Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan pengendalian konflik dan pemecahan masalah dalam konflik dengan strategi utama pengendalian dan strategi kekuatan oleh TNI-Polri. Berdasarkan pada teori sosial, pendekatan, strategi dan metode yang digunakan cenderung menggunakan teori konflik tentang watak asli masyarakat dengan paradigma pengelolaan keserasian sosial, dengan melibatkan orang ketiga (*third party*). Orang ketiga dimaksud adalah TNI-Polri, Pemerintah Kota, para pimpinan lembaga non-pemerintah, dan Toa/Toga/Toma.

Keempat, rumusan model alternatif bagi penanganan konflik bernuansa SARA selama ini berlangsung adalah penanganan yang bersifat militeristik dan repesif, karena struktur TNI-Polri masih dibawah ABRI. Sedangkan sekarang strukturnya sudah berubah dengan adanya reformasi birokrasi TNI-Polri dengan menerapkan manajemen perubahan. Adapun rumusan model alternatif dalam penanganan konflik bernuansa SARA cenderung ditemukan model "Religius Komprehensif Integratif Sinergis Angka Delapan" sebagai dapat dibaca pada sub masalah rumusan model alternatif.

Beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut: a) UU RI No. 7 Tahun 2012 perlu dijabarkan secara operasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dan oleh Kemenag RI. PP dan Perda tersebut perlu disertai dengan program dan penganggaran pada strategi pencegahan dini, termasuk program dan penganggaran FKUB, karena FKUB memiliki peran yang strategis; b)

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, TNI-Polri, Perguruan Tinggi, dan Toa/Toga/Toma perlu terus meningkatkan perannya dalam upaya pencegahan dini agar konflik tidak berkembang, sehingga tujuan penanganan konflik dapat tercapai; c) Perlu sosialisasi "Piagam Madinah" oleh semua pihak. Karena dalam piagam

madinah terdapat dua pokok bagi kehidupan bermasyarakat dan memiliki prinsip-prinsip dalam pengaturan tersebut; d) Perlu implementasi paradigma pengolahan keserasian sosial berdasarkan teori konflik fungsionalisme struktural dan teori konflik tentang watak asli masyarakat.

Daftar Pustaka

- David Carment dan Albrecht Schnabel, *Conflict Prevention from Rhetoric to Reality Into The Mainstreams: Applied Conflict Preventions*. USA 2004 Lexington Books.
- Fisher, Simon, et.al. *Working With Conflict Skills and Strategies For Action*. New York. 2007
- Hujair AH. Sanaky. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press. 2003
- Irwan Abdullah. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Imron Abdullah. *Studi Agama Kajian Empiris-Transendental*. Cirebon: STAIN Cirebon Press. 2006
- Michael Lund, *Preventing Violent Conflicts*, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996.
- Mudji sutrisno & Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. 2005
- Munawar, 2003. *Sejarah Konflik Suku di Kabupaten Sambas*. Pontianak. Penerbit; Kalimantan Persada Press.
- Seri II: Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama. 2003
- Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta press. 2000
- Tim. *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islami Studies (INIS) Universiteit Leiden. 2003

Artikel dari Internet:

Group Forum Persatuan Pemuda Dayak (FP2D) in facebook

Jurnal Manajemen, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah Manajemen

Modul Sosiologi, Mata Kuliah Kapita Selekta, Pokok Bahasan: System Social. Bidang Studi Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta

Syarif_untan.tripod.com. Makalah : *Mesianisme Dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat “ Keterkaitan Antara Unsur Budaya Khususnya Kepercayaan Nenek Moyang dan Realitas Kehidupan Social Ekonomi.* Syarif Ibrahim al Qadrie

Peraturan-peraturan terkait

Himbauan Kapolda Kalbar tanggal 21 maret 2012

Himbauan Kamtibmas Kapolda Kalbar tanggal 16 maret 2012

Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Negara RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Perkap RI No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara RI

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pernyataan sikap pengurus dan anggota FKUB kalbar terhadap konflik-ketegangan di kota Pontianak 14-16 Maret 2012

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Identifikasi Potensi Rawan Konflik dalam Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat Beragama di Kalimantan Tengah

Muhammad

Dosen Syari'ah STAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Abstract

The Acts of violence committed against by a particular religious group to other ones do not have normative legitimacy and justification of any religious teachings as well. Religion as a social identity binds its adherents with moral frame in order they do not commit acts of violence. This condemnation is not only due to religion wich directs the behavior of its followers on the right path, but also contrary to the conscience of humanity. Acts of violence in the name of religion, so far, has exceeded the limits of humanity that requires serious handling in reducing conflict and violence to realize a harmonious life. This article aims to expose some of the variables that are important to create an atmosphere constructed a harmonious life within multi-religious and multicultural society. In achieving the targeted objectives, the study used interview and documents as the data resouces. It was done in the three districts in Central Kalimantan, the district of Kapuas, East Kota Waringin and Lamandau. The study found some universal and the particular variable in reducing conflict in the name of religion, that were avoiding rigid exclusivism, avoiding the term wich arise miscommunication and misunderstanding, avoiding the issue of religion in politics, avoiding social prejudice, and particularly, developing a spirit of Betang culture.

Key words: Agama, social prejudice, dan spirit budaya Betang

Abstrak

Tindakan kekerasan yg dilakukan oleh kelompok agama tertentu terhadap kelompok lain tidak memiliki alasan dan aturan normatif yang sah pada ajaran agama manapun. Agama sebagai identitas masyarakat sejalan dengan kerangka moral agar mereka tidak melakukan tindakan kekerasan. Menyalahkan pihak lain tidak hanya berlawanan dengan agama tapi juga bertentangan dengan kesadaran kemanusiaan. Tindakan kekerasan atas nama agama, pada kenyataannya adalah melampaui batas-batas kemanusiaan yang membutuhkan penanganan serius dalam rangka mengurangi konflik dan kekerasan dalam rangka menciptakan kehidupan yg harmonis. Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan beberapa variabel yg penting dalam menciptakan suasana harmoni pada masyarakat yang multi agama dan multi etnis. Penelitian dilakukan secara kualitatif di tiga kabupaten (Kapuas, Kota Waringin Timur dan Lamandau) di propinsi Kalimantan Tengah. Temuan studi ini antara lain adalah adanya variabel khusus dan universal dalam rangka mengurangi konflik yang dilakukan atas nama agama, yakni menghindari eksklusifisme, salah komunikasi dan salah pengertian, serta tidak menggunakan issue agama dalam politik, syakwasangka dan mengembangkan budaya Betang.

Katakunci: agama, prejudice, intercultural communication, budaya Betang.

Latar Belakang

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila telah mencetuskan dasar-dasar keagamaan yang kokoh bagi pemeluk agama yang berbeda, yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa". Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah berdasarkan agama dan kepercayaan. Ideologi tersebut mengakui adanya pluralitas di Indonesia sebagai kenyataan historis yang tidak dapat dinafikan. Hidup damai dalam pluralitas, termasuk pluralitas keagamaan, membawa Indonesia menjadi bangsa berprestasi yang sangat mengagumkan (Hodgson, 1974).

Agama dan aliran kepercayaan yang plural sering kali memunculkan konflik dan tindak kekerasan yang tidak terelakkan. Toleransi antara agama yang menjadi identitas kolektif dan landasan pembangunan kehidupan beragama (Sabri, 1999) mengalami disorientasi dan absurditas makna. Kerukunan dan keharmonisan umat beragama yang mengagumkan menjadi terkoyak, persaudaraan antar umat beragama menjadi rapuh, hidup damai dalam bayang-bayang konflik dan kekerasan.

Munculnya tindak kekerasan yang merebak hampir merata di seluruh tanah air dilihat sebagai sumbangan besar dari agama. Konflik dan kekerasan atas nama agama bisa merusak tatanan harmoni di kalangan umat beragama (Abdullah, 1999). Agama menjadi sesuatu yang sangat sensitif, ditunggangi untuk dijadikan penyulut api konflik, bahkan legitimasi untuk membunuh orang lain seperti kasus Ahmadiyah (Muhammad, 2011).

Agama tidak saja mengajarkan doktrin cinta kasih kepada pemeluknya, tetapi juga membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan rukun. Agama tidak jarang menampilkan wajah konflik (Notingham, 1997) dan kekerasan yang tidak saja tidak dikehendaki dalam agama, tetapi juga menjadi tantangan dalam membangun kehidupan umat beragama yang harmonis dalam masyarakat majemuk (Abdullah, 1999).

Sisi paradoks kehidupan keagamaan ini menjadi menarik perhatian banyak kalangan selama dekade terakhir. John T. Sidel menulis bahwa *over the past decade, the study of religious violence has evolved into a varitable cottage industry*. Pelekatan kata industri dalam statement ini bisa dipahami sebagai lahan ekonomi bagi para peneliti studi agama. Konflik dan kekerasan dilakukan melalui modus riots (kerusuhan), programs (pembunuhan) terencana terhadap kelompok minoritas, dan jihad (Arifin, tt, 5).

Berbagai kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan terma agama seperti jihad oleh kelompok sempalan (*splinter group*) yang mengakibatkan ratusan jiwa orang lain melayang. Kekerasan dengan cara terror seperti disinyalir dilakukan kelompok radikal, al-Qaidah 11 September 2001 yang meluluhlantakan menara kembar di Amerika Serikat. Terror dilakukan atas dalih menyerang musuh Islam dan tergiur dengan surga sebagai tempat terhormat, yang menurut mereka disiapkan sebagai imbalan dari atas atas jihad melawan musuh Islam (Schwartz 2002:171). Kekerasan atas nama agama juga merupakan merefleksikan kekecewaan atas tindakan ketidakadilan global sehingga kelompok radikal mengkehendaki penerapan aturan atas agama mereka (Sageman 2004: 20, 23).

Setara Institute dan Wahid Institute, kedua lembaga ini merekam konflik dalam relasinya dengan agama.

Kekerasan berwajah agama, hingga tahun 2008, telah tercatat 367 tindak pelanggaran kebebasan beragama. Sebanyak 188 kasus kekerasan melibatkan negara sebagai aktornya (Arifin, tt, h. 9).

Berbagai pendekatan, interen, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah, Tri Kerukunan dikembangkan sebagai upaya menciptakan kehidupan umat beragama yang harmonis. Penerapan prinsip *agree in disagreement*, pengembangan wawasan multikultural dan pembentukan sejumlah forum antar dan intern kelompok beragam dalam skala lokal, nasional dan Internasional merupakan upaya menciptakan keharmonisan umat beragama.

Institusi keagamaan seperti FKUB, WALUBI, GPI, PARISDA Hindu dan sebagainya menawarkan berbagai alternatif dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. Dalam skala yang lebih luas terbentuk institusi keagamaan, seperti *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) yang bepusat di Genewa dan New York, *World Congress of Faiths* di London, *World Fellowship of Inter Religious Councils* di India, *Federation of the World Religions* di Amerika *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) di Jakarta ([www. the home of Lempu co.id](http://www.thehomeofLempu.co.id)).

Spirit pembentukan lembaga-lembaga keagamaan dimaksud tidak saja dari kalangan pemerintah, tetapi juga umat beragama dan masyarakat secara umum dengan maksud mewujudkan harmoni kehidupan masyarakat bangsa yang majemuk.

Kalimantan Tengah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki populasi penduduk yang plural baik dari sisi agama, suku maupun golongan, budaya dan enis. Keanekaragaman tersebut tidak saja dipandang sebagai sebuah karunia Tuhan, namun juga dapat mencabik-

cabik tatanan kehidupan yang telah mapan sebagaimana kasus yang pernah terjadi di Bumi Tambun Bungai, konflik Sampit-Madura. Prahara besar itu telah mencitrakan daerah Kalimantan sebagai daerah rawan konflik. Karena itu, pemerintah dengan berbagai kebijakan telah mengambil langkah kuratif melalui pembentukan lembaga keagamaan seperti FKUB dan sejenisnya.

Artikel ini merupakan hasil eksplorasi kerukunan hidup antar umat beragama di bumi Tambun Bungai. Fokus utama artikel ini untuk mengidentifikasi beberapa potensi rawan konflik yang menjadi ancaman bagi harmoni kehidupan umat beragama di Kalimantan Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Tengah, yaitu kabupaten Lamadau, kabupaten Gunung Mas dan kabupaten Kota Wringin Timur. Data-data penelitian dihimpun melalui instrument wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, FKUB dan tokoh pemuda. Dokumentasi dan studi kepustakaan menjadi sumber data penting terutama dalam mengungkap kondisi umat beragama, sarana dan prasarana ibadah yang dimiliki di tiga kabupaten. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, domain analysis proses mentransformasi data kasar yang ada dalam transkrip wawancara. Kedua, melakukan analisis domain yaitu membuat sub-sub tema berdasarkan temuan penelitian secara sistematis. Ketiga, verifikasi dan refleksi, yaitu proses interpretasi makna dan pengalaman pemeluk agama yang dinarasikan secara akademik dalam bentuk laporan. Sedangkan refleksi diterapkan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh tentang berbagai faktor yang

dapat merekatkan atau sebaliknya memunculkan konflik atas nama agama.

Kabupaten Gunung Mas

Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten di antara tiga belas kabupaten dan satu kota yang terdapat di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini memiliki motto: *Habangkalan Penyang Karuhei Tatau* (Sangiang) yang berarti Kumpulan, himpunan cita-cita yang menyatu atas dasar tekad dengan semangat yang tinggi dengan didasari agama dan keimanan dalam upaya bersama untuk membangun yang bertujuan mensejahterakan, membahagiakan dan kejayaan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten ini secara astronomi terletak pada $\pm 0^{\circ} 18' 00''$ Lintang Selatan s/d $01^{\circ} 40' 30''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur s/d $114^{\circ} 01' 00''$ Bujur Timur. Berpenduduk sebanyak 74.823 jiwa (sensus 2000). Luas wilayah kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² dan merupakan kabupaten terluas keenam dari 14 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah).

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas sekitar 96.990 jiwa dengan klasifikasi 51.385 laki-laki dan 45.453 perempuan serta jumlah Rumah Tangga sebanyak 22.933 KK (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Di tinjau dari sisi agama, masyarakat kabupaten Gunung Mas memiliki tingkat heterogenitas keyakinan (akidah) yang tinggi. Masyarakat Gunung Mas yang heterogen tersebut memeluk beberapa agama resmi, yaitu Islam sebanyak 12.438 jiwa, Protestan 64.822 jiwa, Katolik 882 jiwa, Hindu 18.848 jiwa. Total pemeluk agama yang plural sebanyak 96.990 jiwa (Dokumen, 2011).

Data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat gunung Mas memeluk agama Kristen dengan jumlah

sebanyak 64.822 orang. Posisi kedua didominasi pemeluk agama Hindu yaitu sebanyak 18.848 orang dan posisi ketiga adalah pemeluk agama Islam sebanyak 12.438 orang disusul oleh pemeluk agama Katolik sebanyak 882 orang. Secara keseluruhan pemeluk agama yang berbeda di kabupaten Gunung Mas dapat dilihat dalam tabel berikut. Jumlah Umat Beragama di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 adalah Islam 12.438, Protestan, 64.822, Katolik 882, Hindu 18.848 sehingga dengan jumlah keseluruhan yakni 96.990.

Perkembangan jumlah pemeluk agama di kabupaten Gunung Mas difasilitasi dengan sarana ibadah. Umat Islam memiliki masjid sebanyak 24 buah dan Mushollah sebanyak 11 buah sehingga keseluruhan sarana ibadah umat Islam sebanyak 35 buah. Pemeluk agama Protestan memiliki sarana ibadah meliputi Balai jemaat 239 buah, Gereja dan Pasrori 40 buah. Penganut agama protestan memiliki jumlah sarana ibadah yang lebih dari memadai ini sebanding lurus dengan kuantitas pemeluknya. Pemeluk agama katolik memiliki beberapa jenjang sarana ibadah, sarana Induk, pembantu dan karpel. Sarana Induk sebanyak 2 buah dan sarana pembantu 4 buah sehingga total sarana ibadah masyarakat Katolik sebanyak 6 buah. Sedangkan pemeluk agama Hindu terdiri dari pura, sanggar dan balai. Ketiga jenis sarana tersebut yang dapat ditemukan di kabupaten Gunung Mas hanya sarana Balai sebanyak 44 buah sedangkan Pura dan Sanggar belum dimiliki oleh umat Hindu.

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau, Central administrasi dan perpolitikan di kabupaten ini terletak di ibu kota Nanga Bulik. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, Lamandau memiliki luas wilayah 6.414 km² dan berpenduduk sebanyak 62.776 jiwa.

Secara geografis Kabupaten Lamandau yang meliputi tiga kecamatan terletak pada 1°9' - 3°36' **Lintang Selatan** dan 110°25' - 112°50' **Bujur Timur**. **Kabupaten Lamandau** memiliki luas wilayah sebesar 6.414 km² yang terbagi menjadi 3 wilayah Kecamatan, 3 Kelurahan dan 79 Desa. Penduduk Kabupaten Lamandau berjumlah 62.776 jiwa yang terdiri dari 17.554 Kepala Keluarga, dengan kepadatan penduduk 8 jiwa per km². Ditinjau dari aspek agama pemeluk agama Islam adalah sebanyak 36.671 orang, pemeluk Kristen sebanyak 17.547 orang, pemeluk Hindu sebanyak 10.040 dan Katolik sebanyak 6.832 orang.

Kabupaten Lamandau dihuni masyarakat multireligius yang difasilitasi sarana dan prasarana ibadah. Masyarakat Muslim memiliki masjid sebanyak 41 buah dan Mushollah sebanyak 64 buah. Total sarana ibadah umat Islam sebanyak 105 buah. Masyarakat Kristen memiliki Balai jemaat sebanyak 103 sedangkan Gereja dan Pasrori belum dimiliki. Pemeluk agama Katolik memiliki sarana ibadah yang relatif lengkap yang dikategorikan sarana Induk sebanyak 2 buah, sarana pembantu sebanyak 35 buah sehingga total sarana ibadah masyarakat Katolik sebanyak 37 buah. Masyarakat Hindu memiliki Balai sebanyak 11 buah.

Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di kota **Sampit**, ibu kota Kabupaten. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan penduduk sebanyak 373.842 jiwa. Kabupaten yang memiliki luas 16.496 km² memiliki batas-batas yang jelas, yaitu sebelah utara berbatasan dengan provinsi **Kalimantan Barat**, sebelah Selatan berbatasan dengan **Laut Jawa**, bagian Barat berbatasan dengan **Kabupaten Seruyan** serta bagian Timur berbatasan dengan **Kabupaten Katingan**.

Masyarakat kabupaten Kotim memeluk agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghutu. Muslim menempati posisi mayoritas yaitu sebanyak 322.375 orang. Jumlah terbesar kedua adalah pemeluk agama Hindu sebanyak 23.556 orang. Posisi ketiga adalah protestan dengan jumlah pemeluk sebanyak 22.041 orang. Pemeluk agama budha tercatat sebanyak 1.351 orang dan lain-lain sebanyak 169 orang. Total pemeluk agama di Kota Waringin Timur sebanyak 378.130 orang.

Sarana Ibadah

Pemeluk agama yang heterogen di atas dilengkapi dengan fasilitas ibadah sehingga mereka dapat menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sarana ibadah sebagai salah satu komponen penting yang harus ada dan mutlak ada sebagai wadah implementasi ajaran agama bagi pemeluknya. Masjid sebagai sarana ibadah kaum Muslimin sebanyak 242 buah, langgar 290 buah dan Mushollah sebanyak 80 buah. Total sarana ibadah umat Islam sebanyak 622 buah. Masyarakat Protestan memiliki sarana ibadah berupa Balai jemaat 1 buah, Gereja dan Pasrori sebanyak 84 buah. Masyarakat Katolik memiliki sarana ibadah berupa sarana Induk 2 buah, pembantu dan karpel sebanyak 27 buah. Masyarakat Hindu memiliki pura, sanggar dan balai. Sarana Balai sebanyak 27 buah, dan Pura 1 buah. Masyarakat Budha di kabupaten ini mendapat ruang untuk melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Mereka memiliki Vihara, Cetia dan Klenteng. Sarana ibadah berupa Vihara sebanyak 38 buah dan Cetia sebanyak 3 buah.

Merekatkan Harmoni Kehidupan

Mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama

akan berlangsung baik dan lancar apabila didasarkan pada pandangan, pengalaman masyarakat, fakta dan data dari lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor penting yang perlu dihindari agar tercipta kehidupan beragama yang harmonis, yaitu eksklusivisme pemahaman agama, isu agama dalam politik, prasangka sosial dan komunikasi.

Eksklusivisme dalam memahami agama

Secara teologis, setiap pemeluk agama meyakini kebenaran agama yang dianutnya. Bahkan, keyakinan itu melampaui batas teologis, yaitu kalim sebagai yang terbaik. Sikap eksklusivisme seperti ini telah menjadi sesuatu yang sublimatif dalam diri tiap penganut agama sehingga menghapusnya menjadi satu hal yang sangat sulit dihapus dari kepehaman keagamaan masyarakat. Namun demikian, dalam membangun kesadaran kebenaran lintas agama diperlukan sikap inklusif, siap mendengarkan, menghargai dan menerima kebenaran yang terkandung dalam agama lain walaupun tidak untuk diimami sebagaimana agama yang dipeluknya. Sikap semacam ini dapat mereduksi ketegangan sikap dan kepehaman keagamaan yang rigid, yang dapat melahirkan batu sandung terwujudnya keharmonisan hidup umat beragama.

Keyakinan terhadap agama yang dianut sebagai sesuatu yang terbaik pada prinsipnya tidak salah, sebab secara *common sense* jika agama yang dianutnya masih ada yang lebih baik dan lebih benar tentu tidak perlu dipertahankan sebagai sebuah keyakinan terbaik. Namun, keyakinan harus dibarengi dengan kesalingpahaman antara satu sama lain. Upaya meretas eksklusivisme ini menjadi perhatian sentral kalangan luas yang ditandai dengan maraknya kegiatan-

kegiatan yang bertemakan membangun kerukunan umat beragama seperti yang pernah diselenggarakan dalam bentuk seminar Internasional di Seoul pada 17-19 Juli 2011, yang dihadiri oleh para *stakeholders* dan sekitar 20 pemimpin agama dari Bangladesh, Cina, Filipina, India, Indonesia, Irak, Korea Selatan, Jepang, dan Pakistan.

Seminar yang bertema "*Conflicts and Dialogue: Peace-building in Discordant Areas and the Roles of Religious People*" itu merumuskan beberapa rekomendasi berupa sikap yang perlu dimiliki oleh setiap penganut agama. *Pertama*, sikap terhadap kebenaran agama yang dianut harus disertai dengan kesadaran bahwa itu hanya diakui oleh penganutnya saja, sementara penganut agama lain hanya meyakini kebenaran agama yang dianutnya pula. *Kedua*, sikap terhadap penganut agama lain harus disertai dengan kesadaran bahwa keyakinan yang mereka miliki bersifat asasi, atas pilihan pribadi, suatu kesadaran ketuhanan yang didasarkan pada pengalaman rohaniah masing-masing.

Kedua sikap tersebut dirasa sebagai suatu aksioma universal sehingga gaungnya menggema sampai ke level keberagamaan lokal seperti di Kalimantan Tengah. Dua rekomendasi fungsi melalui sikap beragama yang saling menghargai, yang diprakarsai oleh pemerintah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Terwujudnya kerukunan umat beragama dan menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama memainkan peran penting dalam membangun keharmonisan umat beragama di Kalimantan Tengah (Dokumen, 2011).

Isu Agama dalam Politik

Ketegangan dan kerenggangan hubungan antar umat beragama sangat

terasa ketika moment pesta demokrasi seperti pemilu kada. Dalam konteks ini, konflik latent karena perbedaan kepentingan aromanya terasa melalui media seluler seperti *short message send* yang sengaja disebar oleh pelaku yang tidak jelas identitasnya dengan tujuan melemahkan secara psikologis pihak lain dan yang lebih penting memperkeruh suasana umat beragama. Isu agama dalam politik menjadi salah satu aspek yang dianggap mengganggu keharmonisan kerukunan beragama di Kalimantan Tengah. Isu agama dalam politik seringkali menjadi instrument yang menegangkan kerukunan umat beragama. Intrik-intrik poliitik dengan menggunakan simbol agama tanpak terasa saat-saat menjelang pemilihan kepala Daerah. Persoalan keagamaan dijadikan "isu" politik, karena dukungan politik sangat diperlukan untuk membesarkan suatu kelompok/sekte agama tertentu. Agama dianggap sebagai kendaraan politik yang sangat penting bagi pemimpinnya. Ketua FKUB Propinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan:

Pada saat musim Pemilu, betapa pun juga urusan pemerintahan itu, biasanya gesekan urusan agama itu selalu ada. Sebagai contoh, calon A satu agamanya A, dan calon satunya agamanya B, pasti di antara para calon pendukung mereka ada yang menggunakan agama dalam meraih dukungan. Misalnya dengan memprovokasi "jangan kita pilih calon B karena agamanya B,". "Kadangkadangkang di antara satu kelompok yang selalu rukun dan harmonis sehari-harinya, pada saat menghadapi pemilihan yang berbeda agamanya, maka terjadi gesekan. Sehingga dari rukun berubah tidak rukun. Dan biasanya bukan di dalam calonnya, tapi dipendukungnya. Itu yang selalu kita antisipasi, (18/8/2011).

Kepentingan agama sulit dilepaskan dari faktor-faktor lain yang melingkupinya. Kehidupan yang semula

rukun menjadi tidak rukun karena kepentingan politis. Hal ini bisa dipahami karena sikap eksklusivisme beragama yang telah mengakar dalam dirinya. Sikap seperti ini terkadang membutuhkan nurani kelompok akar rumput untuk memilih secara objektif. Sejumlah tokoh agama menyatukan pandangan dan langkah strategis dalam mereduksi konflik politik yang menunggangi agama. FKUB memprakarsai pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh partai politik menjelang terjadinya pemilihan kepala Daerah di beberapa beberapa tempat di Kalimantan Tengah, terutama tiga kabupaten yang menjadi situs penelitian ini. Pertemuan dimaksud untuk menginjeksikan kesadaran pentingnya meredam kondisi-kondisi yang dapat memecah persatuan, dan mengeliminasi konflik atas nama agama. HM. Yamin Muhtar, ketua FKUB Kalteng menegaskan:

...biarlah agama ini menjadi suatu keyakinan kita masing-masing untuk kita amalkan. Sementara mereka yang dalam situasi politik menuju kepala daerah, tidak usah membawa isu agama dalam politiknya. Dengan seruan seperti itu, Ia percaya, bahwa tidak ada kepala daerah yang saat terpilih, hanya akan mengayomi dan mengurus agamanya masing-masing. Ia, pasti tetap akan adil kepada semua agama yang ada di daerahnya. Pasalnya, kepala daerah itu, bukan milik satu agama, tapi semua masyarakat yang ada di daerah tersebut (18/08/11).

Prasangka Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Tengah, slogan satu rumah tiga agama yang berbeda memperkuat rasa saling memahami dalam segala hal terutama beribadah dan aktivitas kebersamaan. Mereka

telah diikat oleh kesadaran inheren yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, yaitu budaya huma betang. Pengakuan tokoh Dayak berikut ini dapat kita jadikan sebagai justifikasi.

Kami adalah keluarga besar yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Orang tua, saudara dan saya sendiri berbeda. Ada Muslim, Kristean dan orang tua saya masih Kaharingan. Perbedaan itu tidak membuat kami pecah, kami hidup rukun dan damai. Dalam hal tata ibadah, kami juga memiliki sikap toleransi dan saling memahami yang sangat tinggi. Ketika melaksanakan ajaran agama, kami saling membiarkan dan menghargai cara ibadah kami yang berbeda satu sama lain pula. Dalam hal alat-alat yang digunakan untuk makan-minum kami sudah saling memahami, tidak ada kekhawatiran terjadinya percampuran antara yang terlarang dengan yang tidak terlarang. (w/19/10/11).

Miskomunikasi dan Pemahaman

Upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Kalimantan Tengah dilakukan melalui silaturahmi tokoh-tokoh agama. Kegiatan silaturahmi tak kalah peran dan fungsinya dalam membuka wacana dan dialog, serta menjunjung tinggi sikap sportif dalam beragama serta membangun komunikasi lintas arah sebagai prasyarat dalam membangun kehidupan yang harmonis. Keyakinan atas peran dan fungsi silaturahmi antar tokoh agama ini menjadi salah satu alasan bagi pemerintah Kota Waringin Timur untuk menyelenggarakannya. Kegiatan silaturahmi ini dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari tokoh lintas Agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Sejumlah elemen masyarakat dan pemerintah menyelenggarakan acara silaturahmi di Hotel Wella,

Sampit-Kotawaringin Timur (KOTIM). kegiatan silaturahmi yang dirangkai dengan workshop sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam penanganan trauma pasca konflik. Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kementerian Agama RI dan dibantu oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten KOTIM diselenggarakan hari senin sampai hari Jum'at, 25-29 Juli 2011.

Toleransi dan Spirit Budaya Betang

Di wilayah kota Palangka Raya dan di daerah pedalaman Kalimantan Tengah, hubungan antar umat beragama tampak rukun dan damai. Kerukunan dan saling menghormati tidak hanya tampak dalam hal kebebasan melaksanakan ajaran agama masing-masing, tetapi juga tampak dalam persoalan mumalah lain seperti jamuan makan dan minuman yang disesuaikan dengan selera dan tata aturan sesuai dengan keyakinan masing-masing agama.

Sikap saling menghargai (toleransi) ini tumbuh dan berkembang dari kesadaran nilai dan adat istiadat yang diwariskan nenek moyang. Spirit budaya Betang mewarnai komunikasi lintas akidah masyarakat sehingga terbangun hubungan keberagamaan yang saling menyapa. Spirit budaya betang memiliki kekuatan dalam membangun harmoni kehidupan antar umat beragama yang rukun dan toleran. Perwujudan toleransi dan kerukunan ini dapat terjadi melalui *handep/panganrau* dalam acara-acara besar seperti acara upacara ritual adat, ritual kehamilan, kelahiran, dan ritual kematian.

Handep/panganrau sebagai ciri khas kehidupan komunal mengikat masyarakat dengan nilai kebersamaan. Gotong royong, saling bantu membantu

(*handep panganrau*) dilakukan oleh masyarakat lokal tidak saja dimaksudkan untuk meringankan beban berat yang dipikul keluarga, tetapi juga untuk mengikat solidaritas sosial antar sesama terutama dalam menyelesaikan suatu perkara seperti turut membantu biaya tiwah, pesta kawin dan sebagainya. Keeratan hubungan ini menjadikan masyarakat sebagai satu keluarga besar yang melaksanakan sebuah acara besar, seperti upacara tiwah (penyucian roh/*tazkiyatun nufus*), kematian dan perkawinan keluarga besar. Dalam acara-acara besar tertentu seperti perkawinan, peran utama diemban lebih besar oleh keluarga dekat. Mereka bahu membagu dalam menyukseskan acara keagamaan dan acara sosial. Kebersamaan ini juga terlukis dari penggunaan “Kata-kata atas nama keluarga besar (kerabat dekat dan kerabat jauh) kami ucapkan selamat datang kepada para tamu.....”, sebagai ucapan populer dalam menyambut tamu yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekompakan, kesatuan, kekerabatan dan keharmonisan hubungan mereka.

Selain itu, harmoni kehidupan beragama juga dirajut melalui salaing mengunjungi pada saat perayaan hari Keagamaan atau pada momen lain. Mengunjungi sanak saudara dan sahabat pada hari-hari besar keagamaan memiliki makna ikatan emosional yang tinggi. Ikatan emosi dapat terjadi lantaran adanya rasa rukun dan damai terhadap sesama. Pada momen tertentu tokoh dan pemeluk agama yang berbeda dengan prinsip *hapakat basara* sepakat untuk melaksanakan perayaan dua momen berbeda pada waktu dan tempat yang bersamaan seperti perayaan natal bagi umat Kristiani yang dirangkaikan dengan acara halal bi halal bagi umat Islam. Rangkaian akhir dari acara diikuti dengan saling bermaaf-maafan antara satu sama lain dari pemeluk agama yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan suasana kehidupan umat beragama yang

rukun dan damai, saling menghargai dan membangun kehidupan yang saling menyapa. Dalam konteks ini agama memainkan peran sebagai perekat kehidupan sosial masyarakat multikultural, menjaga persatuan dan kesatuan antar umat manusia, mempersatukan kehidupan masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang keyakinan, latar belakang kultural dan latar belakang etnis, sosial dan ekonomi.

Penutup

Deskripsi hasil temuan penelitian ini dan mengacu pada fokus permasalahan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa harmoni kehidupan umat beragama di tiga kabupaten di Kalimantan Tengah berada pada stratum harmoni. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan umat beragama yang majemuk menjadi satu kekuatan yang saling mengikat satu sama lain dalam pembangunan daerah. Harmoni kehidupan umat beragama di tiga kabupaten ditandai dengan dengan hidup aman, damai dan rukun. Interaksi antar pemeluk agama berjalan sebagaimana lazim tanpa dibayang-bayangi oleh adanya kecemasan karena perbedaan agama. Bagi masyarakat di situs penelitian ini, perbedaan adalah bagian integral dalam kehidupan mereka. Hal ini terjadi lantaran dalam satu rumah terdapat tiga pemeluk agama yang berbeda.

Sungguhpun kehidupan umat beragama berada dalam koridor harmoni, namun riak-riak konflik dapat dirasakan oleh mereka dalam bentuknya yang latent (tertutup) terutama sekali ketika di bulan suci ramadhan di mana kalangan Muslim mengekspresikan kegembiraan dalam beribadah seperti tadarrus al-Qur’an mengguakan mikrofon dan melampaui batas-batas yang diserukan oleh pemerintah. Secara manifest hasil penelitian ini menemukan beberapa

potensi konflik yang dapat mengganggu harmoni kehidupan umat beragama di Kalimantan Tengah sekaligus upaya kuratif untuk mereduksi potensi konflik dimaksud, yaitu, pertama, eksklusivisme pemahaman agama secara rigid. Aspek ini memiliki kontribusi bagi munculnya konflik manifest. Langkah pencegahan dilakukan oleh FKUB dengan memberikan pengarahan yang dapat menggugah kesadaran agar pemeluk agama bersikap inklusif guna menjaga kedamaian dan kerukunan di antara sesama. Kedua, menghindari isu agama

dalam politik yang disering hembuskan oleh para pemburu kekuasaan. Mereka menampilkan simbol-simbol keagamaan yang dengan itu dapat memunculkan penguatan identitas keagamaan masyarakat. Ketiga, menghindari prasangka sosial (*social prejudice*) karena adanya perbedaan prinsip dan aturan tentang pola makan, dan simbol agama. Keempat, toleransi dan menjunjung tinggi spirit budaya betang. Keempat, menjunjung tinggi prinsip hidup dalam budaya betang yang mengajarkan hidup bersama dalam dama, rukun dan aman.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. Relevansi *Studi Agama di Era Pluralisme Agama*. Pengantar dalam Muhammad Sabri (1999) *Keberagamaan yang saling menyapa Perspektif Filsafat Perrenial*. Yogyakarta:ITTAQA Press.
- Abdullah, Irwan, dkk (eds). 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta;Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar.
- Arifin, Syamsul. *Silang Sengkarut Agama dalam Ranah Sosial. Tentang Konflik, Kekerasan dan Nalar Multikultural*. Malang:UMM Press.
- Hidayat, Komaruddin dan Nafis, Muhammad Wahyuni. 1995. *Agama masa Depan: Perspektif Filsafat Perrenial*. Jakarta:Paramadina.
- [Http/www. The home of Lempu co.id](http://www.ThehomeofLempu.co.id). *Tipologi Sikap Beragama*. Online, diakses Juni 2012.
- Jeynes, William H. 2007. *Religion, Intact Families, and the Achievement Gap*. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion* Volume 3, 1- 27
- Loveland, Matthew T. Stater, Keely Jones dan Park, Jerry Z. 2008. *Religion and the Logic of the Civic Sphere: Religious Tradition, Religious Practice, and Voluntary Association*. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion* Volume 4 2008 Article 7, 1-26
- Moaddel, Mansoor dan Latif, Hamid. 2006. Events and Value Change: The Impact of September 11, 2001, on the Worldviews of Egyptians and Moroccans. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*. Volume 2 2006 Article 5.
- Muhammad. (2011). Potret Buram kehidupan Umat Beragama di Tanah Air. *Opini SKH Kalteng Pos*, 2011, 18
- Notingham, Elizabeth. 1997. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta:Rajawali Press.
- O'dea, Thomas F. 1996. *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*. Jakarta:rajawali Press. Pennsylvania Press.

- Sabri, Muhammad. 1999. *Keberagamaan yang Saling Menyapa. Perspektif Perennial*. Yogyakarta:ITTAQA Press.
- Sageman, Marc. 2004. *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of
- Schwartz, Stephen. 2002. *The Two Faces of Islam: The Houses of Sa'ud from Tradition to Terror*. New York: Doubleday.
- Sumartana, dkk (eds). 2001. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta:Interfidei.
- Tigran Melkonyan and Mark Pingle. 2009. *Religion and Faith: A Decision Theory Perspective*. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*. Volume 5 2009 Article 3, h. 3-19.
- Tjilik Riwut dan Sanaman Mantikai. *Maneser Panatau Tatu Hiang. Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya:PusakaLima, Cet. 1 Tahun 2003, 141.
- Tjilik Riwut. *Kalimantan Membangun*. JakartaLJayakarta Agung Offset, 1979, 188.
- Usop, Onen M. 2001. *Sistem Religi Masyarakat Dayak*. *Himmah, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 2 No. 23.

Pemberdayaan Umat Beragama Melalui Pemberdayaan Wakaf di Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

This research focuses on the role of VIP rooms at RSI Unisma, Malang in developing of Religious Society, especially in using religious donation or wakaf. Some of needed to be investigated are mechanism of collecting, management, distribution, supervision of the funds. This research done by qualitative approach. It is found that society welcome services at the VIP room of the hospital, its management is professional and transparant, evaluation is done three monthly base and reported to the Ministry of Religious Affair.

Keywords: role, religious donation, empowerment

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada Peran Ruang VIP Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang dalam Pemberdayaan Umat Beragama, Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf. Hal yang ingin digali dalam kajian ini antara lain: bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaat-an), pengawas-an dana dan asset sosial kepada lembaga keagamaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi kasus. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa masyarakat menyambut baik terhadap pelayanan ruang VIP RSI Unisma Malang; pengelolaannya sudah profesional dan transparan, serta telah dilakukan evaluasi tiap 3 bulan sekali dan dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat; ruang VIP RSI Unisma Malang telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, walaupun baru bersifat karitatif.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan

Pendahuluan

Konsep teologis agama-agama memberikan tuntunan moralitas kepada manusia untuk merefleksikan ketaatan pada Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Agama-agama besar di Indonesia memiliki ajaran memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan (filantropi). Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya)

kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nazhir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

Dasar hukum wakaf diambil dari al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama: Firman Allah: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."* (QS. Ali Imran [3]: 92). Kemudian Sabda Rasul: *"apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh."* (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda rasul 'sedekah jariyah' sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat memanfaatkan harta. Bagi umat muslim derma yang diberikan umumnya dalam bentuk zakat harta yang biasa dikeluarkan setiap tahun, besarnya dana yang diberikan adalah 2,5%.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, wacana pengembangan wakaf secara produktif di negeri kita cukup intensif baik dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama maupun kalangan masyarakat. Hal ini dimaklumi karena prinsip dari ajaran wakaf itu sendiri berbasis pada upaya optimalisasi peran kelembagaan Islam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dialog antara Nabi Muhammad saw dan sahabat Umar RA tentang pola pengelolaan sebidang tanah di Khaibar dapat mendiskripsikan filosofi dari ajaran wakaf tersebut.

Untuk itu pemerintah memandang perlu memberikan dukungan dan fasilitasi agar pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan itu dapat berjalan optimal sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Sejumlah potensi yang ditengarai dapat mendukung dana dan asset sosial keagamaan, antara lain: tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya; tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi

pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan Kementerian Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendaftaran administrasi wakaf uang; berkembangnya lembaga-lembaga Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan. Melalui UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (*Nazhir*) secara nasional, sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif dan; tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan pemerintah dalam hal ini dapat berperan sebagai mitra strategis peningkatan mutu pengelolaan, melalui pengembangan berbagai program pembinaan dan asistensi pelayanan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan asset sosial keagamaan antara lain: a) masih terdapat persepsi keliru bahwa fungsi dana dan asset sosial keagamaan itu hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan; sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat lintas agama, b) masih berkembang sikap "curiga", terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan; jika pemerintah merancang kebijakan dan program untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan cenderung dianggap sebagai turut campur tangan soal ibadat; c) dana dan asset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional.

Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh semua pihak, terutama pemerintah. (Renstra Kemenag: hal. 20-21)

Mengacu pemikiran di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada persepsi komunitas muslim terhadap dana dan asset sosial keagamaan di ruang VIP RSI Unisma Malang. Juga mengenai mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan asset sosial kepada lembaga keagamaan tersebut; apakah pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan oleh lembaga sosial keagamaan tersebut dapat berperan dalam memberdayakan umat beragama; dan faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan oleh lembaga sosial keagamaan tersebut dalam memberdayakan umat.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi komunitas agama Islam terhadap dana dan asset sosial keagamaan di ruang VIP RSI Unisma Malang; untuk mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan asset sosial oleh lembaga keagamaan tersebut dan; untuk mengungkap peran lembaga sosial keagamaan dalam mengelola dana dan asset sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat beragama; dan ingin mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan.

Definisi Konsep dan Kerangka Teori

Kata peran menurut M. Ali diartikan sebagai suatu yang memegang pimpinan utama pada terjadinya suatu hal (M. Ali: Hal. 304). Pendapat lain mengatakan peranan sebagai bagian dari

tugas yang harus dilaksanakan. (Bambang Marhiyanto: Hal.460)

Menurut Wrightman seperti dikutip Subarman peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu. (Khaidarman Syah: Hal. 11). Peran dalam kajian ini dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan (peran serta-karakter yang diperankan) dalam suatu kegiatan dan berfungsi ikut menentukan arah dan pencapaian suatu tujuan yaitu terciptanya pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan secara baik dan mampu memberdayakan umat beragama.

Menurut R. M. Mat Iver menyatakan lembaga (institusi) adalah prosedur yang tetap (pasti) bentuknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan kelompok", sejalan dengan pengertian itu Bronislow Malinoski mengemukakan bahwa lembaga (institusi) adalah organisasi sistem kegiatan manusia dalam arti luas tetap, universal dan tidak terikat satu dengan yang lain sebagai komponen-komponen yang terdapat secara nyata di dalam suatu unit kebudayaan. (Khaidarman Syah: Ibid)

Dari berbagai definisi di atas, peran lembaga pengelola dana dan asset sosial keagamaan dalam penelitian ini adalah keikutsertaan institusi pengelola pada sistem kegiatan manusia dalam penggunaan dana dan asset sosial keagamaan secara tetap dan universal. Dikalangan umat Islam institusi dimaksud misalnya lembaga pengelola wakaf.

Kemudian Gery Dasley (1995) mengartikan pemberdayaan dipahami sebagai memberikan wewenang dan memungkinkan masyarakat atau individu untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan Astrid S. Susanto dalam sosiologi

pembangunan (1984) memberikan penekanan dalam tataran konseptual bahwa istilah pemberdayaan dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial ekonomi bahkan politik, sehingga pemberdayaan juga merupakan proses perubahan kekuasaan atau kemampuan diri.

Dengan demikian pengertian pemberdayaan umat beragama dalam penelitian ini adalah proses transformasi dalam rangka penguatan diri maupun kelompok masyarakat atau umat beragama dengan upaya penumbuhan kekuasaan atau kemampuan yang dilakukan melalui pemberian wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain upaya menumbuhkan umat beragama meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah masa depan, dilakukan atas pilihan sendiri sehingga meningkat kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan mereka. Kondisi semacam ini akan dapat mendorong mereka untuk mengoptimalkan pengamalan ajaran agamanya. Tujuan dari pemberdayaan adalah memanfaatkan segala sesuatu yang ada untuk mendapatkan hasil dari tujuan kegiatan atau proses dengan baik

Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terkait dana dan aset sosial keagamaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan dan pemerintah telah banyak dilakukan, salah satu diantaranya adalah kajian pengelolaan wakaf dan pemberdayaannya di Indonesia yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2005. Kajian ini dimasukkan dalam bidang penelitian hukum Islam dan pranata sosial. Penelitian ini berhasil mengungkap antara lain bahwa dompet duafa yang dikenal dengan lembaga nirlaba pengelola zakat, infak dan sodaqoh

sejak tahun 2001 mulai menghimpun dan mengelola wakaf uang, dan semua dana yang terkumpul dipergunakan untuk membiayai pembangunan gedung dan pelayanan kesehatan gratis kepada kaum dhuafa melalui program pelayanan kesehatan cuma-cuma (LKC), tanpa menyisakan nilai pokok dana (uang) wakaf.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal menggali persoalan sekitar wakaf baik latar belakang, penggalian dana, sistem pengelolaan, dan pemanfaatannya. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan kali ini di samping akan menggali aspek bagaimana penggalian dana (*fund rising*) dan pemanfaatannya, juga akan menggali secara mendalam aspek manajemen pengelolaan dana-dana tersebut, menggali persepsi komunitas agama Islam terhadap dana dan aset sosial keagamaan; pengawasan dana dan aset sosial kepada lembaga keagamaan tersebut dan; pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan tersebut dapat berperan dalam memberdayakan umat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berbentuk studi kasus atas sebuah ruang VIP RSI Unisma Malang di mana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Sebagai instrumen utama, peneliti mengumpulkan data melalui kajian awal di perpustakaan atau browsing di internet dan pengumpulan data lapangan di ruang VIP RSI Unisma Malang. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasil "eksplanasinya" tidak dapat digeneralisir. (Sanapiah Faisal: Hal. 22)

Dengan studi ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan gambaran dari masyarakat yang dianggap mengetahui perihal pelaksanaan pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan dan bagaimana pemberdayaannya kepada umat beragama dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama. Dengan pendekatan kualitatif maka penelitian ini akan lebih memungkinkan untuk dapat menggali informasi terkait bagaimana manajemen pengelolaan dana dilakukan oleh ruang VIP RSI Unisma Malang dan sejauh mana upaya-upaya yang dikembangkan oleh lembaga tersebut efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Penyajian penelitian ini dilakukan apa adanya.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*dept interview*) dan observasi lapangan. Para informan adalah Nazhir ruang VIP RSI Unisma Malang, karyawan, warga, dan aparat pemerintah tahun 2011. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan penelusuran kajian terdahulu mengenai pemberdayaan pengelolaan wakaf. Lokasi penelitian di ruang VIP RSI Unisma Malang Jl. MT Haryono, No. 139, Malang, Jawa Timur.

Sekilas Kota Malang

The city the People", kota adalah penduduk yang menghuninya, demikian sering dikatakan oleh para ahli perkotaan. Seperti halnya semua kota-kota kolonial di Jawa pada umumnya, Malang juga dihuni oleh sebuah masyarakat yang majemuk yang terdiri atas: penduduk pribumi setempat, penduduk Timur Asing yang terdiri atas orang Cina dan Arab, serta Timur asing lainnya. Demikian gambaran kasar bentuk kota Malang sampai tahun 1914, dengan alon-alon sebagai pusat dan penyebaran daerah permukiman yang ada di sekitarnya.

Kota Malang dengan kondisi udara pegunungan yang sejuk dikenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Pariwisata menjadi daerah tujuan para pelajar/mahasiswa dari seluruh penjuru negeri, investor asing maupun local serta dari mancanegara, memiliki karakteristik yang khas dan kompleks. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang secara geografis terletak pada posisi 112,06°-112,07° BT dan 7,06°-8,02° LS dengan luas wilayah 11.006 Ha atau 110,06 Km², mencakup 5 (lima) Kecamatan terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang; sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang; sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Kondisi demografis Kota Malang berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 (Kota Malang dalam Angka Tahun 2011), jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, di antara 5 (lima) kecamatan yang ada, Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 186.013 jiwa, kemudian diikuti Kecamatan Sukun sebanyak 181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 174.477 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 172.333 jiwa, dan terakhir Kecamatan Klojen

sebanyak 105.907 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Kedungkandang yaitu 2,72, sementara terendah di Kecamatan Klojen minus 1,96. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk mengarah ke Kecamatan Kedungkandang sedangkan perkembangan penduduk di Kecamatan Klojen semakin berkurang. Nampaknya fenomena ini sesuai dengan perkembangan Kota Malang yang mengarah ke wilayah Timur.

Sarana pendidikan yang ada di Kota Malang untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2010/2011 sebanyak 315 lembaga. Untuk jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) jumlah lembaga yang pada Tahun 2010/2011 sebanyak 115 lembaga. Pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2010/2011 sebanyak 56 lembaga dan jenjang pendidikan SMK sebanyak 45 lembaga.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7-12 tahun mencapai 98,78%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 13-15 sebesar 90,16%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 16-18 tahun 72,18%. APS adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok usia yang sama dalam persen.

Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan adalah tingkat kemampuan masyarakat untuk Malang tahun 2010 sebesar 97,15%. Kemampuan baca tulis penduduk Kota Malang tahun 2010 lebih baik dibandingkan pada tahun 2009 (96,37%). Kemampuan baca tulis laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan perempuan. Tahun 2010 AMH untuk laki-laki sebesar 98,98%, sedangkan perempuan sebesar 95,37%.

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Diantara beberapa ukuran kesehatan yang ada, indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan taraf kesehatan penduduk adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Jika melihat dari data statistik Kota Malang banyaknya rumah sakit umum milik pemerintah pada tahun 2008 sebanyak 2 buah begitu juga pada tahun 2009 ada 2 buah. Sedangkan rumah sakit milik swasta pada tahun 2008 sebanyak 7 buah dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan yaitu menjadi 13 buah.

Angka Kematian Bayi didefinisikan besarnya kemungkinan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun, dinyatakan dalam per seribu kelahiran hidup. AKB di Kota Malang jika dilihat polanya dari tahun 2008 sampai 2010 ada kecenderungan menurun. Tahun 2009 sebesar 29,3% sedangkan tahun 2010 menjadi 27,89%. Pola AKB berlawanan arah dengan pola Angka Harapan Hidup AHH, dimana AHH didefinisikan berapa tahun peluang usia untuk hidup seorang bayi yang dilahirkan. AHH penduduk Kota Malang menunjukkan pola yang semakin naik dengan akselerasi yang tidak tajam. Angka Harapan Hidup Tahun 2010 mencapai 27,89 tahun.

Angka Kematian bayi sangat terkait dengan proses persalinan. Dari hasil SUSENAS menunjukkan bahwa 26,09% kelahiran ditolong oleh dokter, 70,65% oleh bidan dan hanya 3,26% masih ditolong oleh dukun.

Sedangkan sistem kehidupan sosial masyarakat mayoritas diwarnai nuansa keagamaan khususnya Islam. Hal ini wajar saja karena di samping mayoritas penduduknya beragama Islam, juga karena banyaknya jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren,

madrasah, masjid, mushalla serta lembaga keagamaan yang tersebar di seluruh pelosok pedesaan maupun perkotaan.

Hubungan kekerabatan umumnya menganut kekerabatan Islam yaitu orang tua laki-laki dipandang sebagai pemimpin rumah tangga (patrilineal) sebagaimana yang diajarkan agama Islam dan budaya ini telah terpatri kuat dalam masyarakat sampai pada implementasi pembagian harta warisan dengan istilah "segendong sepikulan". Hal ini menunjukkan betapa laki-laki didudukkan pada posisi yang "lebih" dibanding perempuan.

Ruang VIP Rumah Sakit Islam (RSI) Unisma Malang

Landasan berdirinya Rumah Sakit Islam (RSI) Malang "Unisma" berasal dari pemikiran pengurus Yayasan Universitas Islam Malang antara lain: KH. Usman Mansyur, KH. Tholchah Hasan dan segenap para ulama, pengusaha di wilayah Malang Raya terhadap tuntutan jasa pelayanan kesehatan yang representatif bagi masyarakat Malang khususnya warga Nahdliyyin dan Islam pada umumnya.

RSI Malang "Unisma" awal berdirinya dimulai tanggal 28 Agustus 1994 di Malang dan diresmikan oleh Ketua PBNU (saat itu) KH. Abdurrahman Wachid di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang yang menempati lahan tanah milik Al Ma'arif dan bekas sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri/Madrasah Aliyah Negeri (PGAN/MAN) I Malang seluas 2 Ha, yang terletak di Jl. Mayjen Haryono No. 139, Malang atau 5 km dari pusat Kota Malang.

Kini RSI Malang dengan status type C, telah jauh berkembang dan didukung dengan telah dibukanya Fakultas Kedokteran yang erat hubungannya menjadikan status RSI Malang "Unisma"

mengarah ditingkatkan fungsi menjadi Rumah Sakit type B pendidikan. Di usia 12 tahun (2006) mulai berkembang dan dikenal di Malang Raya atas keberadaannya yang selalu berbenah diri terus menerus secara bertahap, efektif dan efisien menjadikan sebagai rumah sakit rujukan masyarakat. Jajaran pengurus, direksi dan staf telah berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana secara optimal.

Latar belakang yang melandasi pengembangan sarana dan prasarana adalah adanya peningkatan kunjungan dan hunian rawat inap pasien kelas menengah ke atas. Adapun kondisi riil, sarana kelas I yang sangat terbatas dengan kapasitas 7 ruang. Untuk itu, demi pengembangan sarana hunian inap itulah, jajaran manajemen Rumah Sakit Islam ini dengan dana mandiri operasional rumah sakit dan melakukan terobosan bantuan atau pinjaman dari pihak luar.

Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu, jajaran pengurus RSI mengajukan dana bantuan ke Depag RI melalui pemberdayaan dana wakaf produktif yang sampai saat penelitian ini dilaksanakan sedang digalakkan oleh Depag RI. Pada bulan Desember 2006, pengajuan tersebut diterima dengan baik dan disepakati untuk diberikan dana bantuan sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) untuk alokasi anggaran dana penambahan ruang rawat inap VIP sebanyak 11 ruang. Penetapan dana bantuan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/243/2006.

Luas tanah yang digunakan untuk membangun gedung ruang rawat inap kelas VIP tersebut adalah 600 M². dengan konsep arsitektur yang minimalis dan rancang bangun terbuat dari beton, yang terdiri dari 2 lantai dan 11 kamar. Peletakan batu pertama sebagai tanda

dimulainya pembangunan dilakukan pada 5 Februari 2007 dan membutuhkan waktu selama 210 hari. Dalam kurun waktu hampir 1 tahun, pembangunan ruang inap kelas VIP tersebut selesai dilaksanakan dan lahirnya diresmikan pada tanggal 8 September 2007 yang lalu.

Sarana penunjang RSI yang dibangun melalui pemberdayaan dana produktif untuk kebutuhan pelayanan publik adalah mushala (1 buah), halaman (1 buah), kamar mandi/WC (13 buah), dan alat pemadam kebakaran (2 buah).

Tujuan pengembangan ruang VIP adalah menanam, merawat, membesarkan dan memetik hasil yang merupakan proses awal dari sebuah aktivitas tumbuh dan berkembangnya RSI Malang "Unisma" demi komitmen memberikan kontribusi hasil dari pengembangan Ruang Rawat Inap VIP ke depan bermanfaat bagi masyarakat.

Secara umum tujuan, visi dan misi ruang VIP adalah menginduk kepada RSI Unisma Malang. Adapun Visi: menjadi rumah sakit pendidikan Islami yang terbaik, pada tahun 2025 dan mengutamakan etika disiplin, profesi nilai keislaman dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Kemudian misinya antara lain: memberikan pelayanan prima paripurna berdasarkan etika dan disiplin profesi yang dijiwai nilai-nilai ke-Islaman; mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian; meningkatkan pendapatan rumah sakit dan karyawannya dan; mengembangkan jaringan kerjasama dengan rumah sakit pendidikan regional dan internasional.

Selanjutnya tujuan didirikan RSI Unisma Malang antara lain: meningkatkan mutu pelayanan yang Islami; tersusunnya standar pelayanan rumah sakit; meningkatkan mutu dan

profesionalisme sumber daya manusia; meningkatkan pendapatan rumah sakit dengan pengelolaan yang efisien dan efektif; terbentuknya jaringan kerjasama dengan institusi terkait dan; terwujudnya rumah sakit pendidikan pada tahun 2025. Hal tersebut dikukuhkan dengan motto "pengabdianku pelayanan terbaikku".

Instalasi rawat inap RSI Unisma Malang sebanyak 81 kamar tidur yang diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan rawat inap dengan tetap mengutamakan pelayanan prima. Sampai saat ini rumah sakit sedang mengembangkan pelayanan di mana hal ini didasari oleh semakin tingginya angka kedatangan pasien sehingga rumah sakit berinisiatif menambah jumlah fasilitas baik medis maupun penunjang sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan seoptimal mungkin bagi masyarakat.

Secara teknis bangunan RSI Unisma Malang memiliki luas tanah 20.800 meter persegi, luas bangunan 9.857,25 meter persegi, dengan kapasitas parkir kendaraan roda 2 ± 70 unit dan kapasitas parkir kendaraan roda 4 sebanyak ± 40 unit. Khusus ruang rawat inap kelas VIP A, tarif kamar Rp. 325.000/hari, dengan fasilitas AC, TV 21", lemari es, sofa penunggu, kamar mandi dalam (air panas dan dingin), almari pakaian, sentral oksigen, nurse call dan, teras penunggu tamu. Kemudian ruang rawat inap kelas VIP B dengan tarif kamar Rp. 275.000/hari, dengan fasilitas tempat tidur elektrik, AC, TV 21", lemari es, sofa penunggu, kamar mandi dalam (air panas dan dingin), almari pakaian, sentral oksigen, nurse call dan, balkon.

Sementara itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Ruang VIP melakukan pengelolaan dan pendistribusian penggunaan dana wakaf dilaksanakan secara transparan, menggunakan masukan data dari banyak pihak. Operasionalisasinya

mengajak Lembaga dan Instansi yang berkepentingan ke dalam kemitraan, yaitu: RSI Unisma Malang, Kementerian Agama serta beberapa perusahaan dan asuransi baik nasional maupun internasional, di antaranya AJA, AJB, Astra, Admedika, Avrist, Aviva, Acahimas Chemi, BRI, Bringin Life, BTN, Bank Mandiri, CJ Indonesia, Darya Varia, Global, Garda Medika, Generali, PT. Guna Bangun, PT. Guiners, FIF, PT. Fajar Farmatama, PT. Pama Persada, Inhutani, IBT, Indosat, In Health, Jiwa Bakrie, Jamsostek, Kalbe, Nestle, Nayaka, Multilife, Pertamina, PLN Tarakan, Pupuk Kaltim, PLN, PJB, SOS, Sinar Mas, Takaful, Trakindo, Thies Kontraktor, Unilever, dan Winthenthur.

Pelaksanaan Pengelolaan Ruang VIP RSI Unisma Malang

Dalam pengelolaan wakaf saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada. Dalam sistem pengelolaan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syari'ah dengan satu syarat: nilai wakaf tanah atau bangunan yang diinvestasikan tidak boleh berkurang.

Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). (UU No. 41 tahun 2004, pasal 12) Sebagaimana diketahui tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengemankan Badan Wakaf Indonesia (BWI) agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Seorang nazhir lebih berfungsi sebagai pengawas atas harta wakaf produktif agar tidak diselewengkan. Seorang pengelola harta wakaf adalah seorang profesional yang bertugas membisniskan harta wakaf agar memberi keuntungan yang setinggi-tingginya. Memang kita bisa melatih dan mendidik nazhir agar dapat mengelola harta wakaf produktif tersebut dengan baik. Tetapi jika harta wakaf produktif itu banyak, maka tetap saja masalah akan timbul. Sebab biasanya kerja nazhir adalah kerja sambilan dan bukan kerja sepenuh masa

Menurut pengurus RSI Unisma Malang, pengembangan ruang rawat inap kelas VIP diharapkan bisa mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan RSI dan memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Dengan mendapatkan dana bantuan pemberdayaan wakaf produktif sebanyak 2 Milyar tersebut bisa mendapatkan hasil yang memadai, sehingga akan mencapai BEP dalam kurun waktu 7 tahun 2 bulan (86 bulan). Setelah mampu mencapai BEP dan mendapatkan keuntungan secara signifikan, diharapkan pula mampu memberikan tunjangan kesehatan secara lintas ruang. Artinya, hasil dari pengembangan tersebut sebisa mungkin juga diberikan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, dalam hal pemberian keringanan biaya rawat inap di kelas yang lain, maupun keringanan biaya perawatan serta obat-obatan.

Dengan demikian, pemanfaatan pemberdayaan dana wakaf produktif yang awalnya lebih ditujukan bagi pembuatan ruang rawat inap bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas juga bisa didistribusikan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Unit khusus VIP berada di bawah koordinasi RSI Unisma Malang dan masih

mempunyai hubungan organisasi yang bersifat vertikal dan koordinatif dengan Kementerian Agama. Pada tiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi dan laporan sekaligus sebagai sarana konsultatif kepada Kementerian Agama Pusat. Struktur Nazhir Yayasan Universitas Islam Malang yang diberi mandat untuk mengelola pengembangan dana wakaf produktif. Data tahun 2010 Nazhir tersebut yakni H.A. Zawawi Mochtar, SH (Ketua), Drs. H. Chozin Ismail (Sekretaris), dan Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH (Bendahara).

RSI Unisma Malang dalam Pemberdayaan Umat

Sesuai dengan tujuan program bantuan Wakaf Produktif untuk mensejahterakan umat, Nazhir RSI Unisma telah mendapatkan bantuan Wakaf Produktif DIPA tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan telah berkomitmen untuk mencapai *break even point* (BEP) dalam jangka waktu 7 tahun 2 bulan (86 bulan). Dalam mengelola ruang VIP Unisma Malang selama ini berjalan dengan lancar bahkan tiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan komitmen dalam mencapai BEP tersebut, maka unit usaha Ruang VIP harus menghasilkan laba sebesar Rp. 279.069.767 per tahun.

Setelah 3 tahun berjalan perolehan laba Ruang VIP RSI Unisma mengalami peningkatan yang cukup baik dengan menghasilkan laba sebesar Rp. 279.770.928 di tahun 2009 dan memiliki indikasi akan meningkatnya capaian laba di tahun berikutnya.

Pencapaian unit usaha pada tahun 2009 sebesar 183.175.030, Direktur Jenderal Pemberdayaan Wakaf Drs. H. Masyhudi, MM dengan nomor surat DJ.II.5/Ka.01.V/165/2011, memberikan izin untuk menyisihkan sebagian dari laba untuk bisyaroh/santunan kepada guru diniyah dengan catatan harus dapat

mempertahankan serta meningkatkan kinerja unit Ruang VIP secara berkesinambungan.

Menurut Lilis Umi K. salah seorang penerima bisyaroh yang sudah puluhan tahun mengajar di TPQ Nurul Hidayah, merasa sangat bersyukur atas kepedulian ruang VIP RSI Unisma Malang dan pemerintah (Kementerian Agama) yang telah memberikan bantuan dan ia berharap ada keberlanjutan pemberian bisyaroh tersebut, karena selama ini para ustad-ustadzah dalam mengajar anak didik di TPQ hanya berlandaskan ikhlas beramal. Walaupun begitu menurut Ibu Ummi mereka tentunya tetap memerlukan bisyaroh dalam pengabdian mereka mengajar di TPQ, agar dapat juga meringankan beban ekonomi keluarga. (Wawancara dengan Lilis Umi K)

Namun ketika Ibu Ummi menerima bisyaroh kemudian justru digunakan untuk keperluan TPQ, misalnya untuk membeli "buku iqro" dll. Tidak digunakan untuk keperluan sendiri. Jika diperhatikan lebih lanjut sudah sepantasnya ketika ruang VIP Unisma memperoleh keuntungan yang memadai dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pemberdayaan umat, seperti misalnya bisyaroh untuk ustad-ustadzah TPQ.

Pengelolaan Ruang VIP RSI Unisma Malang dalam Pemberdayaan Umat Beragama

Seperti penjelasan sebelumnya, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).

Kementerian Agama yang telah memberikan bantuan wakaf produktif kepada RSI Unisma Malang yang diwujudkan ruang VIP sesungguhnya dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf tersebut, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Pemberdayaan kesehatan dapat berupa bantuan biaya kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu yang tidak mampu, serta bantuan gizi bagi balita. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Selain itu pemberdayaan sosial dapat pula program penanganan dan rehabilitasi remaja bermasalah (narkoba, premanisme, PSK, dsb.). Aktifitas pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema *qardhl* hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta peningkatan mutu produk.

Berkenan dengan peran ruang VIP RSI Unisma Malang dalam pemberdayaan pengamalan ajaran agama, penghasilan yang diperoleh

dari pengelolaan ruang VIP telah dapat membantu operasionalisasi harian ruang VIP dan menanggung pemberian honor bagi nazhir wakaf serta karyawan tetap dan kontrak, walaupun masih dalam berbagai keterbatasan. Selain itu juga pada tahun 2011 baru dapat membantu para ustad-ustadzah guna memotivasi mereka dalam mendidik anak-anak TPQ. (Hasil wawancara dengan H.A. Zawawi Mochtar, Chusnul Faiza, Dewi Marwah).

Sebagai salah satu Nazhir ruang VIP H.A. Zawawi Mochtar cukup memperhatikan poin-poin penting dalam pengelolaan dan wakaf ini di antaranya: *transparancy*, beliau me-manage dana wakaf secara transparan dan secara rutin membuat laporan keuangannya yang bisa dilihat atau diakses oleh Kementerian Agama Pusat, dan menjelaskan kepada Kemenag bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan penyalurannya. Investasi terbesar bagi H.A. Zawawi Mochtar bukanlah uang atau aset berharga lain, tapi konsistensi pencapaian tujuan dan untuk sementara ini masih diprioritaskan untuk mencapai BEP. Kemenag menginvestasikan hartanya, sementara H.A. Zawawi Mochtar menginvestasikan waktu, pikiran, dan uang; *productivity*, H.A. Zawawi Mochtar dapat me-manage dana wakaf secara produktif sehingga orang-orang yang berhak menerima wakaf bisa memanfaatkan dana tersebut secara berkesinambungan; inovatif, dengan selalu membuat inovasi dalam program, namun sampai saat ini hanya baru sebatas rencana-rencana ketika BEP sudah tercapai maka akan melakukan pemberdayaan secara lebih maksimal. Dengan maksimalnya pemberdayaan harta wakaf diharapkan akan menjadi jalan pembuka bagi proses fundraising karena calon wakif baru akan tertarik dengan kekinian isu yang termaktub dalam program kerja; partner, menjalin hubungan dengan partner sesama nazhir, baik personal maupun institusional;

trustable (bisa dipercaya) integritas H.A. Zawawi Mochtar sangatlah penting hal ini dapat diperhatikan betapa RSI dan Kemanag percaya kepada beliau selama ini untuk menjadi nazhir ruang VIP tersebut, sebab sifat inilah yang akan menjauhkannya dari tindakan penyelewengan; membuat program yang terencana baik bagi pemberdayaan semua harta wakaf tersebut dan melaksanakan dengan baik; evaluatif, dalam proses evaluatif penilaian dari Kementerian Agama, penerima manfaat dan institusi nazhir lain juga memberi kontribusi terhadap keberlanjutan program, sehingga sampai saat ini ruang VIP Unisma Malang dapat berjalan dengan lancar.

Pandangan masyarakat terhadap pengelolaan dana dari ruang VIP RSI Unisma Malang cukup baik. Menurut pengakuan bapak Muddin tidak ada keluhan dari beliau dan keluhan yang diterima dari keluarganya selama ia menjadi pasien dan menempati ruang VIP, bahkan beliau merasa puas dengan pelayanan dokter/petugas dan kenyamanan di ruangan tersebut. (Hasil wawancara dengan Muddin)

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pengelolaan dana dan asset sosial ruang VIP Unisma Malang antara lain: adanya dukungan dana dari pemerintah pusat di mana Kementerian Agama memberikan dana awal untuk pembangunan ruang VIP Unisma Malang; adanya potensi yang menjanjikan mengenai keberadaan ruang VIP Unisma Malang yang berada di tengah-tengah kawasan masyarakat ekonomi menengah perkotaan; pengelolaan yang profesional dari karyawan ruang VIP Unisma Malang; adanya tanggapan yang positif dari masyarakat mengenai keberadaan dan pelayanan ruang VIP Unisma Malang.

Kemudian yang menjadi penghambat antara lain: adanya beberapa karyawan ruang VIP Unisma Malang (perawat kontrak) yang terkadang minta berhenti bekerja sehingga mengganggu pengelolaan ruang VIP; adanya "pasien" ruang VIP Unisma Malang yang kadang-kadang fluktuatif sehingga mengganggu pelayanan ruang VIP; ruang VIP terkadang juga "sepi" sehingga ada kekhawatiran BEP tidak tercapai tepat pada waktunya; kemudian adanya tuntutan tercapainya BEP, sehingga menghambat pemberdayaan kepada masyarakat yang lebih luas.

Penutup

Dari uraian di atas ada beberapa kesimpulan di antaranya; a) Masyarakat menyambut baik dan "puas" terhadap pelayanan ruang VIP RSI Unisma Malang; b) Pengelolaan ruang VIP RSI Unisma Malang dilakukan dengan profesional dan transparan, serta telah dilakukan evaluasi tiap 3 bulan sekali dan dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat; c) Ruang VIP RSI Unisma Malang telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, walaupun baru terbatas insentif bagi beberapa ustad-ustadzah; d) Beberapa faktor yang menjadi pendukung antara lain: adanya dukungan dana awal dari Kementerian Agama untuk pembangunan ruang VIP Unisma Malang; adanya potensi ekonomi, sosial keagamaan yang menjanjikan mengenai keberadaan ruang VIP RSI Unisma Malang untuk masyarakat sekitarnya; pengelolaan yang sudah profesional; serta adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Dan yang menjadi penghambat antara lain: adanya beberapa karyawan kontrak yang terkadang tiba-tiba minta berhenti bekerja; adanya "pasien" yang kadang-kadang fluktuatif sehingga ruang VIP tidak dapat menampung pasien; serta adanya tuntutan tercapainya BEP dari Kementerian Agama Pusat secara tepat waktu.

Rekomendasi dari studi ini yakni:
a) RSI Unisma Malang (ruang VIP) perlu memberikan honor yang lebih layak (sesuai UMR Kota Malang) bagi karyawan kontrak agar mereka tenang bekerja;
b) Agar Kementerian Agama Pusat tidak terlalu ketat dalam menetapkan BEP, sehingga pemberdayaan kepada masyarakat lebih dapat ditingkatkan; c)

Bagi masyarakat sekitar yang mampu secara ekonomi ketika berobat dan menginap, hendaknya dirawat di RSI ruang VIP Unisma hendaknya menginap di ruang VIP; d) Pemberdayaan umat perlu ditingkatkan ke arah yang lebih produktif tidak hanya bersifat karitatif, sehingga masyarakat semakin mandiri.

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Hadits Nabawy As Syarief

Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*, Tahun 2003

Astrid S. Susanto, *Sosiologi Pembangunan*, Binacipta, 1984

Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2011, *Kota Malang dalam Angka Tahun 2010*

Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya, Bintang Timur, tt.

http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606076#ixzz2685De5jD

Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Pembangunan Bidang Agama*, Setjen Kementerian Agama RI, Jakarta

Khaidarman Syah, *Fungsi dan Peranan Widyaiswara*, Studi Kasus pada Diklat X, 1995, Jakarta, Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.

M. Ali, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Amani, Jakarta, tt.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

SK. Direktur No. 10/Kep.A/RSI-U/VI/2008

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

UU No. 41 tahun 2004, pasal 12

Review Buku

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Profil

Judul buku	: DARI PUNCAK BAGDAD: <i>Sejarah Dunia Versi Islam</i>
Penulis	: Tamim Ansary
Penerjemah	: Yuliani Liputo
Ukuran Buku	: 15 x 23 cm
Tebal	: 600 halaman
Penerbit	: Zaman
Tahun	: 2012

Abstract:

Tamim Ansary is a historian who now live in San Fransisco, USA. He has Afganistan blood, moved do the United States and having different perception from his origin land. As a moslem, he is identified as secular. His principle of plurality is not a problem to see the God being. According to him, one or more Gods is not a problem, beside the most problem faced by the world are hunger, war, criminal, injustice, gaps, global warming, limited resources, deases which threatening. Those his thought and standing are West and he is labelled as westernized and thretening Islam.

Keywords: Islam civilization, Islam era, Islam thought, Bani Umayyah, Daulat Abbasyiah

Abstrak :

Tamim Ansary adalah seorang sejarawan yang kini tinggal di San Francisco Amerika Serikat. Ia berdarah Afghanistan, berhijrah ke Amerika dan memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat kampung halamannya. Ia sebagai Muslim tetapi dicap telah berpaham sekuler. Prinsip pluralitas yang ia miliki tidak menjadikan persoalan akan keberadaan Tuhan. Menurut Ansary, satu Tuhan, dua, tiga dan tidak ada Tuhan bukan menjadi persoalan, namun yang menjadi masalah penting yakni bagaimana menyelesaikan permasalahan yang melilit bangsa-bangsa di dunia seperti kelaparan, kemiskinan, perang, kejahatan, ketidakadilan, ketimpangan, pemanasan global, penipisan sumber daya dan terjangkitnya penyakit yang mengancam kehidupan manusia. Pemikiran demikian yang membuatnya diterima oleh barat yang tentu saja ia pun dicap sebagai kaki tangan barat yang selalu menjadi ancaman bagi Arab (Islam).

Kata kunci: Peradaban Islam, era Islam, Bani Umayyah, Daulat Abbasyiah.

Pendahuluan

Lembaran-lembaran bukti sejarah yang terbentang di seluruh dunia, banyak tersebar disampaikan dari sudut pandang Barat, termasuk perspektif terhadap dunia Islam dan Timur Tengah. Bentangan lembaran sejarah versi Barat itu seringkali menceritakan secara minor peradaban-peradaban yang muncul di negeri-negeri Islam, sehingga terkesan berita “barat” itu lebih menarik. Padahal, jika dikaji secara proporsional, sejarah dan peradaban timur menyimpan mutiara yang bersinar kemilau menyinari penjuru dunia.

Sejak lama, antara barat dan timur (Islam) terdapat jarak pemisah, masing-masing pihak memiliki kesibukan internal sendiri, menganggap dirinya masing-masing sebagai pusat sejarah manusia. Penilaian minor terhadap dunia timur, setidaknya menguatkan dugaan Barat akan adanya tabiat orang Arab yang keras, sampai akhirnya terjadi peristiwa 11 September 2001 yang populer disebut dengan *Black September*. Meski barat nampak mendominasi, namun tidak serta merta dunia timur tergilas hilang. Ia masih dapat dipetakan dan terbaca dalam memoar-memoar orang-orang yang menulis secara obyektif. Dalam kapasitas inilah, Tamim Ansary dengan kacamata sekulernya menyampaikan pada pembaca di seluruh dunia akan fakta yang terjadi di belahan timur dan Islam tersebut.

Biografi Singkat Author

Tamim Ansary adalah sejarawan dunia, berlatar keturunan Afghanistan yang fundamentalis. Dari situlah Ansary dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang memiliki strata sosial terhormat berdasarkan sepenuhnya pada reputasi kesalehan dan pembelajaran agama Islam.

Ansary pernah menulis memoar *West Of Kabul, East of New York* yang

terbit tidak lama setelah peristiwa 11 September 2001. Ia kini tinggal di San Francisco Amerika Serikat dan menjabat sebagai direktur San Francisco Writers Workshop. Tamim Ansary lahir pada 4 November 1948 di Kabul. Ansary dikenal sebagai penulis buku dan sering menjadi pembicara. Ia seorang Muslim tetapi sudah berpaham sekuler. Hal tersebut menjadi maklum, karena ia tinggal di AS yang menganut kapitalisme. Beragama dalam pandangan Ansary yakni sikap yang tidak mempersoalkan tentang Tuhan. Baginya satu Tuhan, dua, tiga dan tidak ada Tuhan sekalipun, tiap orang akan memiliki pandangan berbeda yang tidak layak dipertentangkan. Baginya, jawaban dari pertentangan itu tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan kelaparan, kemiskinan, perang, kejahatan, ketidakadilan, ketimpangan, pemanasan global, penipisan sumber daya dan terjangkitnya penyakit yang menimpa manusia.

Ansary menampilkan Islam secara proporsional, menampakkan hal terbaik sehingga meninggalkan kesan yang positif bagi orang di luar Islam. Menginjak usia remaja, ia menyelidiki filsafat Islam melalui pemikiran Fazlur Rahman dan Syed Hussein Nasr. Sementara bidang sejarah Islam, ia menyelaminya melalui Ernst Grunebaum dan Albert Hourani. Pemikirannya pun akhirnya tertambat pada sekulerisme setelah sebelumnya mengalami penyelaman panjang dari seorang fundamentalis.

Cita Rasa Bertutur

Dalam tulisannya itu, Ansary mengklaim menuturkan sejarah timur (Islam dan Arab) dalam versi yang muncul dan lahir dari dunia Islam. Sekian banyak sejarah dunia Islam telah mengalami distorsi oleh penulis-penulis yang menguntungkan barat.

Dalam bahasannya, Ansary membagi dunia menjadi tiga kawasan, yaitu Barat (Mediterania ke arah Barat), Timur (Cina dan sebelah Timur India), dan Tengah (antara Mediterania sampai India). Dari wilayah tengah ini ia hendak memfokuskan dengan cara versi Islam sendiri. Daerah ini membentang mulai dari Laut Tengah sampai dengan lembah sungai Indus di India. Ansary menolak wilayah ini disebut sebagai Timur Tengah.

Ribuan tahun sebelum era Islam, telah ada peradaban masyarakat Mesopotamia dan Mesir terbentuk dari masyarakat yang memiliki kesamaan tempat tinggal yang dilalui oleh jalur aliran sungai. Sungai Efrat dan Tigris membentuk peradaban Mesopotamia oleh orang-orang Sumeria, dan sungai Nil membentuk peradaban Mesir berupa kerajaan-kerajaan yang saling menaklukkan. Pengaruh peradaban Sumeria itu ditemukannya aksara, roda, gerobak dan sistem bilangan awal.

Di sekitar laut Tengah (Mediterania), geliat lalu lintas manusia melalui jalur perdagangan ditengarai sebagai penyebab pertemuan antar peradaban. Bangsa-bangsa seperti Mycenaean, Kreta, Fenisia, Lydia, Yunani dan Roma yang masing-masing memiliki akar budaya bertemu saling mempengaruhi dan memperbarui nasib mereka. Di tempat lain tak jauh dari Mediterania, terdapat magnet budaya yang menghubungkan pertemuan antar anak bangsa terbentang dari India, Mesopotamia sampai Mesir yang melahirkan peradaban dunia tengah. Pertemuan peradaban itu melalui jalur Turki terhubung oleh keberadaan selat Bosphorus dari jalur air. Hasilnya memunculkan cerita dan biografi tiada henti sepanjang sejarah bak skenario panjang bangsa-bangsa yang mewarnai cakrawala berfikir seantero dunia. Peradaban yang dibangun oleh pemerintahan kerajaan pernah berjaya

di kawasan Efrat dan Tigris hingga Mediterania, dibangun oleh dinasti Sassanid Persia dan Bizantium.

Memasuki era Islam, perjalanan umat Islam dicatat semenjak hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah menuju Madinah. Di tengah-tengah kedatangan Nabi ke Madinah, telah ada di sana berbagai macam suku Arab yang merupakan keturunan Smith bersambung sampai Nabi Ibrahim. Sebagian besar orang Arab di kawasan itu adalah penyembah berhala (musyrik), di samping penganut Yahudi dan Nasrani. Secara budaya, tidak ada yang membedakan mereka, karena komunikasi dan struktur suku mereka sama.

Geografi Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad diuntungkan karena tidak jauh dari tepian laut Merah. Apalagi di kota tersebut terdapat pusat ziarah agama-agama Ibrahim, yakni Ka'bah (Baitullah). Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, kota Makkah memiliki kuil-kuil yang dipenuhi oleh dewa-dewa seperti Hubal, Manat, Latta dan Uzza. Tidak terkecuali, kompleks Ka'bah juga dipenuhi oleh representasi dewa-dewa berbentuk patung. Suku yang memperkokoh kondisi dan tradisi itu adalah Suku Quraisy. Makkah juga memiliki orbit lain yang menarik minat orang untuk mengunjunginya, yakni sebagai kota perniagaan.

Kedatangan doktrin monoistik Muhammad saw di bawah tuntunan Al-Qur'an mendapat tentangan dari suku-suku dan agama yang telah ada sebelumnya. Pengikut agama tauhid risalah Muhammad makin hari bertambah dan hidup mereka dalam ancaman dari penganut berhala. Untuk mengamankan pengikutnya, Muhammad saw mencari suaka politik ke penguasa-penguasa yang secara geografis dekat dengan Kota Makkah, seperti kepada raja Najasyi dan penguasa negeri Kopti di Mesir. Sedangkan suku lain di dekat Makkah

yang siap melindungi Muhammad saw dan pengikutnya adalah penduduk Yatsrib (Madinah). Di dalamnya terdapat kaum Anshar yang siap membela hak-hak saudaranya (Muhajirin) yang hijrah ke lokasi yang baru.

Dalam waktu yang relatif singkat, peradaban Islam mempengaruhi dan merubah peradaban sebelumnya yang telah berjalan selama ribuan tahun. Ekspansi Islam setelah wafatnya Nabi di bawah kendali empat khalifah yang dikenal dengan Khulafa Rasyidun, yakni Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ekspansi itu sangat signifikan. Penyampaian risalah Islam oleh para khalifah berlangsung hingga ke penjuru semenanjung Arabia dan melintas ke benua lain. Tantangan pun makin keras, bukan hanya dari orang-orang Arab, tetapi dari kekuatan dinasti-dinasti yang telah eksis sebelumnya. Kerajaan Persia dan Romawi yang memiliki pasukan tempur terlatih menjadi musuh baru. Namun, dengan semangat juang dan prinsip yang fundamental (tauhid), kemenangan-kemenangan dalam medan pertempuran berhasil diperoleh oleh pasukan Muslim.

Penguatan khalifah sebagai pemimpin pengganti Nabi Muhammad saw yang ditempuh dengan musyawarah hanya sampai Ali bin Abi Thalib. Sesudah Ali, kekuasaan dikendalikan oleh dinasti. Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus yang dirintis oleh Mu'awiyah menjadi tonggak awal kekuasaan dari garis keluarga ini. Dinasti ini memerintah dari tahun 661-737 M. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah sepi dari peperangan.

Bentuk pemerintahan dinasti monarkhis seperti kekaisaran ini menambah cerita kekuasaan "*wangsa*" yang selalu muncul dan tenggelam silih berganti. Kekuasaan yang dibangun di atas magnet politik, tidak jauh dari adagium: politik adalah kepentingan.

Yang tidak kalah riuhnya, berangkat dari politik akhirnya menjalar ke persoalan teologi. Faksi-faksi kecil teologi juga tumbuh bersamaan dengan perseteruan dan konspirasi politik yang "jahat".

Kekuasaan dinasti Umayyah di Syiria makin meredup, muncul dan berkuasa kemudian dinasti Abbasiyah yang dirintis oleh Abu al-Abbas As-Safah sejak tahun 737-961 M. Kemunculan dinasti dari keluarga Abbas bin Abdul Mutholib dari garis bani Hasyim, kerabat Umayyah. Ia menjadi kekuatan tandingan mengalahkan dinasti Umayyah. Meski keislaman Abbas (paman Nabi) disanksikan dan cukup tidak menyenangkan sehingga tidak dikandidatkan memegang suksesi sepeninggal Rasulullah. Tentunya, lebih mengutamakan keturunan Ali bin Abi Thalib yang secara terang-terangan secara total berada di belakang Rasulullah sejak awal kenabian. Tetapi, kedekatan ikatan keluarga antara Abbas dengan Ali itu dimanfaatkan oleh Abu Muslim Al-Khurasani (pemimpin revolusi Abu al-Abbas), merayu orang Syi'ah memuluskan penggulingan kekuasaan Bani Umayyah.

Pasca Abu al-Abbas, kendali Daulat Abbasiyah dipegang oleh Al-Mansur. Abu Muslim yang berjasa pada suksesi Abu al-Abbas dianggap berbahaya oleh Al-Mansur, menemui ajal dalam sebuah muslihat yang telah direncanakan oleh Al-Mansur.

Zaman Abbasiyah perekonomian tumbuh pesat dibandingkan Daulat Umayyah yang berjalan lambat penuh kesederhanaan. Untuk menguatkan kekuasaan, Abbasiyah menggunakan intelijen, polisi dan tentara yang profesional. Zaman keemasan era Umayyah dilanjutkan oleh Abbasiyah ke titik puncak dalam masa dua abad hingga menjadi era yang paling dikenang oleh sejarah barat dikenal dengan zaman keemasan Islam. Bagdad menjadi pusat pemerintahan pada tahun 765 M, sebuah

kota ideal atas rintisan Al-Mansur. Kota ini terletak di antara Efrat dan Tigris, sehingga wilayah kota ini membentang di antara dua sungai tersebut. Dalam waktu dua puluh tahun, Bagdad menjadi terbesar di dunia dan kota terbesar yang pernah ada. Kisah 1001 malam pun lahir dari peradaban Daulat Abbasiyah pada masa Harun Al-Rasyid yang tersohor.

Pada era keemasan daulat ini bermunculan para ulama madzhab tersohor dan filsuf kenamaan yang harum menghiasi sejarah intelektual dunia, baik di barat maupun di timur. Empat madzhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) tidak diragukan lagi kredibilitasnya menghiasi lembaran sejarah Islam hingga saat ini. Para imam meletakkan dasar-dasar agama dalam doktrin yang sudah mapan meski dengan interpretasi berbeda terhadap nash (Al-Qur'an dan Hadits). (Jalaluddin Rakhmat, 2003: 181).

Selain kemunculan ulama, juga terdapat para sufi dan filsuf yang secara intensif memiliki cara berfikir filosofis dan menggabungkannya dengan wahyu, kemudian mengintegrasikannya ke dalam satu sistem koheren yang rasional mengenai alam, kosmos dan tempat manusia di dalam semua itu. Para sufi, mereka sebelumnya adalah muslim.

Tiga kelompok besar tersebut (ulama, filsuf dan sufi) memiliki "lahan" sendiri-sendiri. Para ulama menguraikan doktrin dan hukum Islam secara penuh, sementara filsuf bertugas mengungkapkan pola dan prinsip alam semesta. Dan para sufi mengembangkan teknik mencapai kesatuan pribadi dengan Allah. Secara keseluruhan, ketiga kelompok ini mengorbit pada persaingan dan ketidaksepakatan intelektual. Terkadang terseret pada kepentingan pribadi atau kelompok. Benturan antara kaum filsuf dan ulama pada masa Abbasiyah rupanya terus berkelanjutan hingga era sekarang, antara para filsuf dan kelompok muslim konservatif.

Pada era Abbasiyah, muncul intelektual terkemuka sepanjang sejarah umat Islam dan dunia, yakni kemunculan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali pun mengguncang dunia. Al-Ghazali yang telah melahirkan karya-karya besar intelektual, pernah menjadi pimpinan universitas Nidzamiyah yang prestisius di Bagdad kala itu. (Ansary, hal. 191).

Era Abbasiyah pun runtuh oleh serangan mematikan dari bangsa Mongol. Pasukan Tartar itu dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu Jengis Khan penguasa sadis bangsa Mongol Tartar. Hulagu mengirimkan surat ancaman kepada penguasa Bagdad yang terakhir. Serangan Mongol dimulai pada 3 Februari 1258. Tepatnya pada tanggal 20 Februari, tentara Tartar membunuh seluruh kerabat kerajaan, membunuh hampir seluruh penduduk Bagdad mati. Bagdad dibumihanguskan. Perpustakaan, sekolah, rumah sakit, arsip, catatan kota, artefak peradaban yang diabadikan dan kesaksian keemasan Islam semua binasa. Kaum muslim akhirnya dapat mengambil kembali wilayah dan mengajak orang Mongol masuk Islam. Hal tersebut juga didorong oleh fatwa Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa para tentara Mongol adalah para pemberontak yang harus diperangi atau masuk Islam. (Aziz, 2011:129).

Pelarian orang-orang Abbasiyah menyebar ke berbagai tempat, diantaranya ke Turki hingga pada abad 15 M mengkristal pendirian dinasti Utsmani. Rezim ini bahkan dapat bertahan hingga ratusan tahun sampai Perang Dunia I.

Suasana keruntuhan Bagdad memuluskan jalan lahirnya gerakan Salafi oleh Ibnu Taimiyyah. Gerakan Salafi berpandangan bahwa runtuhnya Islam (Abbasiyah) disebabkan oleh kaum Muslim telah melenceng dari ajaran murni Islam sehingga perlu dikembalikan kepada ajaran orang-orang Islam yang

awal (*as-sabiqunal awwalun*). (Aziz, 2011:129).

Kebesaran daulat Islamiyah tidak berjalan sendirian, membentang dari Cordoba, Afganistan, Maroko hingga Burma dengan penguasa silih berganti yakni Abbasiyah, Umayyah di Cordova dan Fathimiyah di Mesir.

Pasukan tentara Islam dalam konfrontasi dengan Barat, yang populer dengan perang Salib. Pasukan Salib dari Eropa bahu membahu, diantaranya pasukan dari kerajaan Inggris, Perancis dan Jerman dibantu oleh raja-raja kecil dari seluruh semenanjung benua itu. Perang ini berlangsung sebanyak delapan kali pertempuran, berlangsung kurang lebih selama dua ratus tahun dengan medan yang berbeda-beda. Tujuannya yakni memperebutkan Yerusalem yang diklaim sebagai tempat suci umat Islam dan Kristen.

Era perang Salib ini, menurut Ansary dari kacamata Islamis radikal tidak begitu bermakna. Perang itu bukan dianggap sebagai persoalan yang menarik untuk dibicarakan. Bagi umat Islam, perang itu tidak lebih sebagai bencana yang menimpa peradaban. Umat Islam memandang pasukan Salib tidak lebih binatang buas yang suaranya menggetarkan, namun tanpa taring. Kenyataannya, pasukan Salib hanya sekali sampai tanah suci Yerusalem, tetapi berhasil dipukul mundur. Pasukan Salib tidak pernah menjejakkan kakinya hingga Makkah dan Madinah. Juga tidak pernah menyentuh Bagdad yang pernah menjadi pusat peradaban Islam. Perang Salib tidak meninggalkan virus budaya Eropa apa pun ke dalam dunia Islam, namun beralih ke arah wilayah lain. Wilayah itu yakni pusat-pusat komoditi yang menarik mereka, seperti pusat pala, cengkeh, lada hitam dan rempah-rempah. Juga komoditi sutra, satin dan kain-kain yang terbuat dari kapas.

Catatan tentang Buku

Tulisan Ansary ini dihimpun dalam 17 judul pembahasan, masing-masing judul disampaikan dengan bahasa yang mengalir, mengajak pembaca mengikuti pikirannya, menyimak apa-apa yang hendak dia paparkan. Dari rangkaian judul-judul itu, Ansary melukiskan berbagai fakta Islam dan masyarakatnya yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang dan masa-masa yang akan datang yang disampaikan dengan gemilang, informatif dan komprehensif.

Dalam menguraikan bahasanya, Ansary mendeskripsikan dalam tahapan: a) pra Islam b) Nabi Muhammad, c) Sukses khilafah dengan syuro, d) Kekuasaan dinasti, e) Konfrontasi ideologi dan peradaban, barat vs timur, f) Ekspansi barat terhadap timur; g) Gerakan pembaruan Islami.

Buku ini termasuk kategori buku *Best Seller*. Meski demikian, buku tersebut tidak lepas dari kritik-kritik. Ia dinilai sebagai sekuler, mendeskripsikan sejarah Islam tidak beda halnya dengan cara berfikir para orientalis meskipun dia seorang muslim. Karya tulisnya ditengarai menguntungkan Amerika Serikat dan negara-negara serupa.

Secara proporsional, layak diberikan apresiasi atas karya Ansary tersebut. Ia menyertakan peta/sketsa lokasi terjadinya peristiwa sehingga memudahkan para pembaca. Ia juga menceritakan dengan penyampaian bahasa yang mudah dimengerti didukung oleh referensi (*end note*) yang cukup banyak. Akan tetapi, sangat disayangkan dalam tiap-tiap keterangan numerik yang berkaitan dengan *end note* tidak disebutkan secara langsung sehingga menyulitkan pembaca untuk mencari referensi yang dimaksud.

Namun, nampaknya Ansary menempatkan ajaran tasawuf yang tidak proporsional. Ia menilai tasawuf memiliki

ide dan dorongan yang serupa dengan mistisisme Hindu dan Buddha. Para sufi adalah individu-individu yang berpaling ke dalam diri dan mencari metode untuk mencapai persatuan mistik dengan Allah. (Muhammad Usman Najati. 2005: 228)

Hal tersebut dilakukan lantaran tidak puas dengan birokratisasi agama. Dan ide-ide ke arah mana tujuannya, para sufi itu dimana-mana sama. Antara tasawuf dan mistisisme Hindu atau

Buddha tentu dapat dibedakan secara signifikan, terutama metode dan tujuan akhir dari tasawuf tersebut.

Uraian mengenai akidah yang selama ini diyakini oleh umat Islam juga dibahas. Akan tetapi, uraiannya telah terwarnai oleh pemikiran dan jiwanya yang telah lama hidup di negara sekuler, sehingga banyak tersandarkan pada ulasan-ulasan yang berdasarkan pada logika.

Daftar Pustaka

- Ansary, Tamim. *Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam*. (Jakarta, Zaman). 2012.
- Littlejohn, Stephen W at.al. *Teori Komunikasi- terj.* (Jakarta: Salemba Humanika). 2009.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. (Jakarta: Alvabet). 2011.
- Najati, Muhammad Usman. *Al-Qur'an dan Psikologi*. (Jakarta: Aras Pustaka, 2005).
- Rakhmat, Jalaluddin. *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*. (Bandung: Muthahhari Press).

PEDOMAN PENULISAN JURNAL HARMONI PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEAGAMAAN KEMENTERIAN AGAMA RI

1. Artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris disertakan abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
2. Konten artikel mengenai: a) Pemikiran, Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan; b) Pelayanan dan Pengamalan Keagamaan; c) Hubungan Antar Agama dan Kerukunan Umat Beragama.
3. Penulisan dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali tabel. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm. maksimal 15 halaman isi di luar lampiran.
4. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut sistematika berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama
 - c. Alamat lembaga dan email penulis
 - d. Abstrak.
 - e. Kata kunci.
 - f. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis- *opsional*, tujuan)
 - g. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - h. Hasil dan pembahasan.
 - i. Penutup (kesimpulan dan saran)
 - j. Daftar pustaka.
5. Judul diketik dengan huruf kapital tebal (**bold**) pada halaman pertama. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
6. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asteriks *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata "dan".
7. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
8. Kata kunci terdiri dari 5 kata, ditulis *italic*.
9. Pengutipan dalam artikel berbentuk body note.
 - a. Setelah kutipan, dicantumkan penulisnya, tahun penulisan dan halaman buku dimaksud. Contoh:(*kutipan*)...(Nurcholis Madjid, 1997: 98).
 - b. Buku yang dikutip ditulis secara lengkap pada bibliografi.

10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pustaka yang dikutip:

- a. Buku dengan penulis satu orang. *Contoh:*
Hockett, Charles F. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Macmillan Company, 1963.
- b. Buku dengan dua atau tiga pengarang. *Contoh:*
Oliver, Robert T., and Rupert L. Cortright. *New Training for Effective Speech*. New York: Henry Holt and Company, Inc., 1958.
- c. Buku dengan banyak pengarang, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan dengan susunan terbalik. *Contoh:*
Morris, Alton C., et.al. *College English, the First Year*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1964.
- d. Buku yang terdiri dari dua jilid atau lebih. *Contoh:*
Intensive Course in English, 5 Vols. Washington: English Language Service, Inc., 1964.
- e. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. *Contoh:*
Ali, Lukman, ed. *Bahasa dan Kasusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung, 1967.
- f. Sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi. *Contoh:*
Jassin, H.B. ed. *Gema Tanah Air, Prosa dan Puisi*. 2 jld. Jakarta: Balai Pustaka, 1969.
- g. Sebuah buku terjemahan. *Contoh:*
Multatuli. *Max Havelaar, atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*, terj. H.B. Jassin, Jakarta: Djambatan, 1972.
- h. Artikel dalam sebuah himpunan. Judul artikel selalu ditulis dalam tanda kutip. *Contoh:*
Riesman, David. "Character and Society," *Toward Liberal Education*, eds. Louis G. Locke, William M. Gibson, and George Arms. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962.
- i. Artikel dalam ensiklopedi. *Contoh:*
Wright, J.T. "Language Varieties: language and Dialect," *Encyclopaedia of Linguistics, Information and Control* (Oxford: Pergamon Press Ltd., 1969), hal. 243-251.
"Rhetoric," *Encyclopaedia Britannica*, 1970, XIX, 257-260.
- j. Artikel majalah. *Contoh:*
Kridalaksana, Harimurti. "Perhitungan Leksikostatistik atas Delapan Bahasa Nusantara Barat serta Penentuan Pusat Penyebaran Bahasa-bahasa itu berdasarkan Teori Migrasi," *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Oktober 1964, hal. 319-352.

- Samsuri, M.A. *"Sistem Fonem Indonesia dan suatu Penyusunan Edjaan Baru,"* Medan Ilmu Pengetahuan, 1:323-341 (Oktober, 1960).
- k. Artikel atau bahan dari harian. *Contoh:*
- Arman, S.A. *"Sekali Lagi Teroris,"* Kompas, 19 Januari 1973, hal. 5. *Kompas*, 19 Januari 1973.
- l. Tesis dan Disertasi yang belum diterbitkan. *Contoh:*
- Parera, Jos. Dan. *"Fonologi Bahasa Gorontalo."* Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
- m. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding. *Contoh:*
- Mudzhar, M Atho. *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- n. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa. *Contoh:*
- Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8.
- o. Bila pustaka yang dirujuk berupa website. *Contoh:*
- Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. www.swaramuslim.org., diakses tanggal
- p. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga. *Contoh:*
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, 2009. Jakarta.
- q. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, simposium atau seminar yang belum diterbitkan. *Contoh:*
- Sugiyarto, Wakhid. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April. 2007.
- r. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten. *Contoh:*
- Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
- s. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian. *Contoh:*
- Hakim, Bashori A. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta. 2009.
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg. Untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai format HARMONI.

ISSN 1412-663X

INDEKS ABSTRAK JURNAL VOL. 11 NO 2 TAHUN 2012

- 2 **Strategi Budaya Taqiyah:
Dilema Penyembunyian Identitas
dalam Perkembangan Syiah** **Cultural Strategy, Taqiyah: Dilemma of
identity Hiding in the Development of
Syiah**

M. Alie Humaedi

Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Menguatnya konstelasi politik di Indonesia seolah berjalan lurus dengan makin tersebarnya gerakan Islam trans nasional. Sebuah gerakan “tanpa ruang batas kewilayahan nation state” yang mempromosikan agenda khilafah Islamiyah dan romantisme kejayaan Islam, termasuk semangat pembumian dan penegakan syariat Islam. Tidak demikian dengan paham keagamaan Syiah, ia ada seiring adanya sejarah Islam di Indonesia, serta tumbuh an berkembang kembang secara perlahan dengan cara taqiyah. Ketakutan menampilkan identitas merupakan bagian dari ajaran syiah dan strategi budaya dalam politik identitas pada proses perkembangan Syiah di Indonesia. Dilema seperti ini tercermin pada perkembangan dan tragedi yang dialami masyarakat Syiah di Pekalongan, Batang, Jepara dan Sampang Madura. Tulisan ini hendak menjelaskan perkembangan Syiah jejaring Jawa, beserta penerapan taqiyah sebagai strategi budaya politik identitas ditengah tuduhan-tuduhan miring kelompok Islam mayoritas.

Kata kunci: Syiah, taqiyah, stretagi budaya, politik identitas, perkembangan keagamaan

Constelation strangthening of Indonesia politics has been paralleled with dissemination of transnationalism of Islam movements. The movement is borderless in terms of nation states, that promoting agenda of khilafah Islamiyah and romaticism of Islamic victory. The Syiah stream is quite different, its development in Indonesia in line with the history of Islam in this country, slowly moved with taqiyah. Its fear in showing of its identity has been part of the Syiah lesson and its strategy for spreading its teaching in this country. This dilemma could be visible in development and tragic experiences of communities in Pekalongan, Batang, Jepara, and Sampang, Madura.

Keywords: syiah, taqiyah, cultural strategy, political identity, religious development

3 **Pemikiran dan Gerakan
Keagamaan Mahasiswa*
Memahami Merebaknya
Radikalisme Islam di Kampus**

**Thought and Religious Movement of
Students: Tracing the Spreading of
Islamic Redicalism in Campus**

Arifuddin Ismail

Peneliti Balai Litbang Agama Semarang

Penelitian ini bermaksud mengetahui program kegiatan yang terkait dengan pembentukan pemikiran keagamaan mahasiswa di UGM. Penelitian ini menggunakan mixed methods, yaitu penggabungan metode kualitatif dengan kuantitatif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa program kegiatan keagamaan mahasiswa UGM sudah dirancang sesuai dengan aturan formal yaitu menuangkan ke dalam perkuliahan dengan 2 SKS, di samping itu diberi muatan penguatan melalui program asistensi sebagai suplemen. Implementasi pembelajaran keagamaan itu tampak bervariasi, ada yang radikal, moderat bahkan cenderung pluralis. Variasi itu rupanya terkait dengan sentuhan ketika mengikuti program asistensi yang dilanjutkan dengan pengajaran rutinitas kampus, dan ada juga yang diperoleh melalui aktivitas mengikuti organisasi ekstra universitas. Variasi itu menunjukkan adanya dinamika keberagaman sekaligus menciptakan potensi konflik yang sebelumnya tidak terdeteksi bahkan tidak terprediksi oleh pihak penyelenggara universitas

Kata kunci: pemikiran, gerakan, keagamaan, pluralitas, moderat dan radikal.

This study is intended to explore program of activities which related to the forming of religious thinking of students at the University of Gadjah Mada in Yogyakarta. This research has applied mixed methods, qualitatively and quantitatively. This investigation shows the religious programs of students activities have been planned in line with formal directions of curriculum, with two credits hours of class. The implementation of the class seems varied, radically, moderately or even plurally. The variations were related with the way and touching of teaching when the students attending class assistances and followed by rutin campus of Alquran recitations. Some others get from extra campus organization activities. Those variations are actually shows the dynamic of religious life in the campus, and in fact those event can not detected by the campus administration.

Keyweord: thought, religious movement, radicalis, moderate and plurally.

4 Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Strategi Penanganan Gerakan Keagamaan pada Jamaah An-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Social economic Empowerment as a Strategy of Handling of Religious Movement of An-Nadzir Followers in the District of Gowa, South Sulawesi)

Mustaqim Pabbajah

Dosen Peneliti Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali, Makassar

Pada era modern seperti saat ini di mana persaingan ekonomi semakin kuat, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan, terutama pemberdayaan pada bidang ekonomi guna terciptanya masyarakat yang kuat, kreatif, dan lebih mandiri. Pemberdayaan sosial-ekonomi merupakan salah bentuk untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan etika agama (Islam) dalam proses dan praktik pemberdayaan sosial-ekonomi dengan mengambil jamaah An-Nadzir sebagai basis analisisnya. Dalam hal ini An-Nadzir berkembang sebagai komunitas gerakan keagamaan yang mandiri dari aspek ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif analisis.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial-Ekonomi, Gerakan keagamaan, Mandiri, dan An-Nadzi

At this modern era, where the economic competition has become very stronger, societal empowerment should be encouraged, especially in the economic life in order to build a strong, creative and autonomous society. This research is intended to explain relations religious (Islam) ethics, in the process and practices of societal empowerment of jamaah/followers An-Nadzir. This community, is actually has been autonomus in terms of economic aspect of their life. The methods of this resarch was qualitatively in technique and descriptive in its analysis of data..

- 5 **Ajaran-ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang Berpotensi Menimbulkan Konflik**

Doctrines in Islamic Purification of the Council of Alquran Interpreters Which Have Potential to Raise Conflicts

Amir Mu'allim

Peneliti Pusat Studi Hukum Islam, Pascasarjana FIAI, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Abstrak

Pemahaman yang parsial di ranah apa pun rawan memunculkan konflik. Salah satunya disebabkan oleh pemahaman secara tekstual menjadi pemicu. Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dengan ormas Islam lain berada pada tataran perbedaan pandangan pada masalah furu'iyah. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi konflik antara MTA dengan ormas lain. Persoalan furu'iyah seperti bilangan sholat tarawih, memelihara jenazah dan keharaman binatang (anjing) memunculkan polemik di kalangan masyarakat yang kerap muncul. Studi ini hendak mengkaji persoalan tersebut dengan mencari akar konflik, kemudian menawarkan solusi yang dapat ditempuh oleh tokoh agama maupun pemerintah. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif pada kasus konflik MTA dengan ormas-ormas lainnya.

Keywords: Majelis Tafsir Al-Qur'an, konflik internal, Islam puritan, tafsir tekstual, revitalisasi.

Abstract

Partial understanding of anything will be easier to raise conflict. One of the factors is textual understanding. Conflict between the Council of Alquran Interpretation with other Moslem organizations is on the the differences of the perception furu'iyah problems. Problems of furu'iyah, such as number of units (rakaat) taraweh prayer, carry out of burying corpse, forbidden to raise some animal (dog) have been become polemic among member of society. This research is an investigation on the root of conflict, then trying to gain the solution that might be useful for religious aswell as government figures to overcome the phenomenon.

Keywords: Alquran interpretation, internal conflict, Islamis purification, textual interpretation, revitalization

6 **Dinamika Agama Adam
Strategi Adaptasi di Tengah
Perubahan Sosial**

**The Dynamic of Adam's Religion in
Adaptation Strategies in the Social
Changes**

Sulaiman

Peneliti Balai Litbang Agama Semarang

Focus of this study is on the dynamic of Adam religion among the Samin society in the terms of conservation local tradition during the social changes. This research was done qualitatively, collecting data by interviewing, observing and documents searching. This study will give much information and theoritical examinations for publics on the Adam religion which adherent to the society of Samin, in Bombong, Sukolilo, Pati. This study found that understanding of the religion by those society quite different with other formal religions which are approved by the government. Religion by this society is not understood as a believe system for after life world, but it is as builder of wong sikep. In the face of global development, they use adaptation strategy such as cooperation with many activists in social culture, environment and academicians. Those society strongly oppose building of cement factory in their area since it will pollute the environment of their settlement such as nature, soil as well as their history and socio cultural life.

Keywords: Adam religion, doctrine and rites, social changes, adaptation strategy

Focus of this study is on the dynamic of Adam religion among the Samin society in the terms of conservation local tradition during the social changes. This research was done qualitatively, collecting data by interviewing, observing and documents searching. This study will give much information and theoritical examinations for publics on the Adam religion which adherent to the society of Samin, in Bombong, Sukolilo, Pati. This study found that understanding of the religion by those society quite different with other formal religions which are approved by the government. Religion by this society is not understood as a believe system for after life world, but it is as builder of wong sikep. In the face of global development, they use adaptation strategy such as cooperation with many activists in social culture, environment and academicians. Those society strongly oppose building of cement factory in their area since it will pollute the environment of their settlement such as nature, soil as well as their history and socio cultural life.

Keywords: Adam religion, doctrine and rites, social changes, adaptation strategy

- 7 Model Penanganan Konflik Keagamaan antara "Jama'ah" Qur'ani dan "Jama'ah Qur'an Sunnah" di Desa Cibumar, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

- Model for Handling Religious Conflict Between 'Jamaah Qurani' and 'Jamaah Quran Sunnah' di the Villagte of Cibumar, Tarogong Kidul, the District of Garut

Asep Achmad Hidayat

Pengasuh Pesantren Tasauf Zawiyah Darushufi, Garut

Kelompok Islam Jama'ah Qur'ani ditengarai memiliki pemikiran teologis dan ajaran syari'ah yang berbeda dengan doktrin teologis dan syari'ah kelompok Islam lainnya, meliputi bidang aqidah, ibadah mahdhoh dan mu'amalah. Akan tetapi, faktor-faktor yang lain turut mewarnai pemicu konflik berbasis sosial di Cibumar Tarogong Kidul Garut. Seperti persaingan dan perebutan sumber ekonomi, masalah individu yang belum terselesaikan dan masalah organisasi keagamaan. Solusi penanganan konflik di daerah ini menampilkan model tersendiri dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri pula. Metode penelitian ini yakni pendekatan deskriptif analitik pada studi kasus dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan.

Keywords: kearifan lokal, jemaah agama, konflik

The group of Jamaah Qurani has different theologic thought and religious teachings with other s, especially in faith and religius services (mahdhoh and mu'amalah). Other factor that could be made more to the conflict are competitive and fight on economic resources, unsolutable individual problem and religious organization. The solution to handle the conflicts is in the form of a certain model done the society. The methods used of this study are interview and observation in the field.

Keywords: local wisdom, religious community, conflict

8 **Harmoni dalam Keragaman
(Konstruksi Perdamaian dalam Relasi
Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di
Kali Minggir dan Nagaraherang
Kabupaten Tasikmalaya)**

**Harmony in Diversity: Construction of
Peace in Relations of Islam, Catholic
and Sunda Wiwitan in Kali Minggir
and Nagaherang, the district of
Tasikmalaya**

Fitri Annisa

Peneliti IAI Latifa Mubarokiyah (IAILM) PP Suryalaya

Abstrak : Harmoni dalam keragaman merupakan harapan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal multi keyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses konstruksi perdamaian masyarakat dalam relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaraherang Kabupaten Tasikmalaya. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi dimana bersandar pada perspektif pelaku dan berusaha memahami yang diobservasi dari perspektif subjektif, sedangkan teknik pengumpulan data diantaranya wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar komunitas di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang terbilang cukup erat dalam bersosialisasi, meskipun ada ruang-ruang yang bisa mensegresikan mereka, namun masih dalam batas kewajaran. Ada tiga komponen paling menonjol yang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri dalam menciptakan kondisi perdamaian di kampung Kali Minggir dan Nagaraherang diantaranya; Pertama, adanya effective channel of communication (saluran komunikasi yang efektif). Kedua, adanya civic association sebagai wadah kebersamaan dalam aktifitas sosial dan religius yang berperan menciptakan integrative climate (bridging social capital) (iklim masyarakat yang kondusif dan integratif). Ketiga, adanya critical mass of peace enhancing leadership (tokoh perdamaian). Identitas agama/keyakinan bagi mereka bukan ditekankan pada hal yang bersifat teologis/ ritual tetapi lebih kepada menjalankan fungsi sosial/kemanusiaan dimana anggota masyarakat mempunyai kesamaan posisi individu sebagai warga suatu negara (pluralisme kewargaan).

Kata Kunci : Harmoni, Keragaman, Konstruksi Perdamaian

Harmony in diversity is an expectation of multy religion society. The objectives of this study are to quest and analyze peace construction among people who have three different religions in Kaliminggir and Nagaherang, the district of Tasikmalaya. This research paradigm is phenomenology and look at the followers perspectives. Technique of collecting data are depth interview, observation and documents. Results of the study is that the three components using by those people, i.e. efectively channel of communication, civic association in creating integrative climate and critical mass of peace enhancing leadership. Religious identities not on the theology or ritual, but more on social and humanity functions, that they are individual as civil society.

Keywords: harmony, diversity, peace construction

9 **Potensi Konflik dan Integrasi
Kehidupan Keagamaan
di Provinsi Gorontalo**

**Potentions of Conflict and Integration:
Religious Life in the province of
Gorontalo**

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Penelitian ini berusaha menemukan model penanganan konflik sebagai salah satu upaya yang serius dan penting. Penanganan konflik dapat dianalisis berdasarkan teori masyarakat madani, teori manajemen konflik dan teori sosial-budaya. Kasus penanganan konflik yang terjadi di Kota Pontianak Kalimantan Barat antara Pemuda dan Mahasiswa Dayak (PMD) dengan Front Pembela Islam (FPI) merupakan kasus yang khas atau spesifik. Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Penanganan Konflik Bernuansa SARA di Pontianak Kalimantan Barat tersebut ditemukan pertama, penanganan konflik tidak bersifat militeristik dan represif, tetapi berdasarkan kerangka regulasi baru. Kedua, upaya pencegahan dan penanganan konflik pada saat terjadi cenderung memiliki persamaan dengan pasal-pasal pada Piagam Madinah serta adanya tindakan pencegahan dan menghentikan konflik secara langsung berbasis religius. Ketiga, pendekatan, strategi, dan metode penanganan konflik cenderung menggunakan pendekatan kerangka regulasi baru berdasarkan pada UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan tiga strategi; pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pascakonflik. Keempat, model alternatif pencegahan dalam penanganan konflik yakni model "Religius Komprehensif Integratif Sinergis Angka Delapan". Sumber utama penelitian ini yakni; data hasil wawancara mendalam dan hasil FGD, hasil observasi dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik analisis data model Miles and Huberman.

Kata Kunci: Penanganan Konflik, Masyarakat Madani, dan Model Penanganan Konflik

This research is an effort to find conflict based on primordial solution. The handling of the conflict could be analyzed by using some theories such as civil society, conflict management and social-cultural approaches. The case solution of conflict between youth and students of Dayak (PMD) and Front of Islam Protector (FPI) in Pontianak is a special and specific. This study finds four models of solution. First, the conflict is overcome not on military's and repressive way, but it based on the new frame of regulation. Second, model of conflict solution is somewhat similar with Madinah Chapters and there are actions to stop the conflict based on religion. Third, approaches, strategy and method of conflict solution tend of using new regulation based on State Regulation no 12, 2012 on how to handle social conflict. And, fourth, alternative model for handling and preventing conflict based on `comprehensive eight religious integrative synergyc` The source of data of this research are depth interview and focus group discussion in the qualitative kind and model analysis of Miles and Huberman.

Keywords: conflict solution, civil society, conflict solution model

10 **Model Penanganan Konflik
Benuansa SARA
di Kota Pontianak
Kalimantan Barat**

**Model for Primordial Conflicts
Solution in Pontianak, West
Kalimantan**

Dr. Lailial Muhtifah
Dosen STAIN Pontianak

Penelitian ini berusaha menemukan model penanganan konflik sebagai salah satu upaya yang serius dan penting. Penanganan konflik dapat dianalisis berdasarkan teori masyarakat madani, teori manajemen konflik dan teori sosial-budaya. Kasus penanganan konflik yang terjadi di Kota Pontianak Kalimantan Barat antara Pemuda dan Mahasiswa Dayak (PMD) dengan Front Pembela Islam (FPI) merupakan kasus yang khas atau spesifik. Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Penanganan Konflik Bernuansa SARA di Pontianak Kalimantan Barat tersebut ditemukan pertama, penanganan konflik tidak bersifat militeristik dan represif, tetapi berdasarkan kerangka regulasi baru. Kedua, upaya pencegahan dan penanganan konflik pada saat terjadi cenderung memiliki persamaan dengan pasal-pasal pada Piagam Madinah serta adanya tindakan pencegahan dan menghentikan konflik secara langsung berbasis religius. Ketiga, pendekatan, strategi, dan metode penanganan konflik cenderung menggunakan pendekatan kerangka regulasi baru berdasarkan pada UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan tiga strategi; pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pascakonflik. Keempat, model alternatif pencegahan dalam penanganan konflik yakni model “Religus Komprehensif Integratif Sinergis Angka Delapan”. Sumber utama penelitian ini yakni; data hasil wawancara mendalam dan hasil FGD, hasil observasi dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik analisis data model Miles and Huberman.

Kata Kunci: Penanganan Konflik, Masyarakat Madani, dan Model Penanganan Konflik

This research is an effort to find conflict based on primordial solution. The handling of the conflict could be analyzed by using some theories such as civil society, conflict management and social-cultural approaches. The case solution of conflict between youth and students of Dayak (PMD) and Front of Islam Protector (FPI) in Pontianak is a special and specific. This study finds four models of solution. First, the conflict is overcome not on military's and repressive way, but it based on the new frame of regulation. Second, model of conflict solution is somewhat similar with Madinah Chapters and there are actions to stop the conflict based on religion. Third, approaches, strategy and method of conflict solution tend of using new regulation based on State Regulation no 12, 2012 on how to handle social conflict. And, fourth, alternative model for handling and preventing conflict based on `comprehensive eight religious integrative synergyc` The source of data of this research are depth interview and focus group discussion in the qualitative kind and model analysis of Miles and Huberman.

Keywords: conflict solution, civil society, conflict solution model

11 **Identifikasi Potensi Rawan
Konflik dalam Mewujudkan
Harmonis Kehidupan Umat
Beragama
di Kalimantan Tengah**

**Identification of Conflict Sensitives in
the Forming of Religious Life Harmony
in the Central Kalimantan**

Muhammad

Dosen Syari'ah STAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Tindakan kekerasan yg dilakukan oleh kelompok agama tertentu terhadap kelompok lain tidak memiliki alasan dan aturan normatif yang sah pada ajaran agama manapun. Agama sebagai identitas masyarakat sejalan dengan kerangka moral agar mereka tidak melakukan tindakan kekerasan. Menyalahkan pihak lain tidak hanya berlawanan dengan agama tapi juga bertentangan dengan kesadaran kemanusiaan. Tindakan kekerasan atas nama agama, pada kenyataannya adalah melampaui batas-batas kemanusiaan yang membutuhkan penanganan serius dalam rangka mengurangi konflik dan kekerasan dalam rangka menciptakan kehidupan yg harmonis. Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan beberapa variabel yg penting dalam menciptakan suasana harmoni pada masyarakat yang multi agama dan multi etnis. Penelitian dilakukan secara kualitatif di tiga kabupaten (Kapuas, Kota Waringin Timur dan Lamandau) di propinsi Kalimantan Tengah. Temuan studi ini antara lain adalah adanya variabel khusus dan universal dalam rangka mengurangi konflik yang dilakukan atas nama agama, yakni menghindari eksklusifisme, salah komunikasi dan salah pengertian, serta tidak menggunakan issue agama dalam politik, syakwasangka dan mengembangkan budaya Betang.

Katakunci: agama, prejudice, intercultural communication, budaya Betang.

The Acts of violence committed against by a particular religious group to other ones do not have normative legitimacy and justification of any religious teachings as well. Religion as a social identity binds its adherents with moral frame in order they do not commit acts of violence. This condemnation is not only due to religion wich directs the behavior of its followers on the right path, but also contrary to the conscience of humanity. Acts of violence in the name of religion, so far, has exceeded the limits of humanity that requires serious handling in reducing conflict and violence to realize a harmonious life. This article aims to expose some of the variables that are important to create an atmosphere constructed a harmonious life within multi-religious and multicultural society. In achieving the targeted objectives, the study used interview and documents as the data resouces. It was done in the three districts in Central Kalimantan, the district of Kapuas, East Kota Waringin and Lamandau. The study found some universal and the particular variable in reducing conflict in the name of religion, that were avoiding rigid exclusivism, avoiding the term wich arise miscommunication and misunderstanding, avoiding the issue of religion in politics, avoiding social prejudice, and particularly, developing a spirit of Betang culture.

Key words: Agama, social prejudice, dan spirit budaya Betang

12 Pemberdayaan Umat Beragama
melalui Pemberdayaan Wakaf di
Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA
Malang

Empowering Religious People by
Empowerment of Religious Donation
or Wakaf Islamic Hospital, UNISMA
Malang

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Penelitian ini memfokuskan pada Peran Ruang VIP Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang dalam Pemberdayaan Umat Beragama, Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf. Hal yang ingin digali dalam kajian ini antara lain: bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan asset sosial kepada lembaga keagamaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi kasus. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa masyarakat menyambut baik terhadap pelayanan ruang VIP RSI Unisma Malang; pengelolaannya sudah profesional dan transparan, serta telah dilakukan evaluasi tiap 3 bulan sekali dan dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat; ruang VIP RSI Unisma Malang telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, walaupun baru bersifat karitatif.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan

This reasearch focuses on the role of VIP rooms at RSI Unisma, Malang in developing of Religious Society, especially in using religius donation or wakaf. Some of needed to be investigated are mechanism of collecting, management, distribution, supervision of the funds. This research done by qualitative approach. It is found that society welcome services at the VIP room of the hospital, its management is professional and transparant, evaluation is done three monthly base and reported to the Ministry of Religious Affair.

Keywords: role, religious donation, empowerment

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Tamim Ansary adalah seorang sejarawan yang kini tinggal di San Francisco Amerika Serikat. Ia berdarah Afghanistan, berhijrah ke Amerika dan memiliki pandangan yang berbeda dengan masyarakat kampung halamannya. Ia sebagai Muslim tetapi dicap telah berpaham sekuler. Prinsip pluralitas yang ia miliki tidak menjadikan persoalan akan keberadaan Tuhan. Menurut Ansary, satu Tuhan, dua, tiga dan tidak ada Tuhan bukan menjadi persoalan, namun yang menjadi masalah penting yakni bagaimana menyelesaikan permasalahan yang melilit bangsa-bangsa di dunia seperti kelaparan, kemiskinan, perang, kejahatan, ketidakadilan, ketimpangan, pemanasan global, penipisan sumber daya dan terjangkitnya penyakit yang mengancam kehidupan manusia. Pemikiran demikian yang membuatnya diterima oleh barat yang tentu saja ia pun dicap sebagai kaki tangan barat yang selalu menjadi ancaman bagi Arab (Islam).

Kata kunci: Peradaban Islam, era Islam, Bani Umayyah, Daulat Abbasiyah.

Tamim Ansary is a historian who now live in San Fransisco, USA. He has Afganistan blood, moved do the United States and having different perception from his origin land. As a moslem, he is identified as secular. His principle of plurality is not a problem to see the God being. According to him, one or more Gods is not a problem, beside the most problem faced by the world are hunger, war, criminal, injustice, gaps, global warming, limited resources, deases which threatening. Those his thought and standing are West and he is labelled as westernized and thretening Islam.

Keywords: Islam civilization, Islam era, Islam thought, Bani Umayyah, Daulat Abbasiyah

A

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Review Buku: Dari Puncak Bagdad: Sejarah Dunia Versi Islam

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta

Abdul Jamil ____

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Potensi Konflik dan Integrasi Kehidupan Keagamaan di Provinsi Gorontalo

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu Dalam Pengelolaan Dana dan Aset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan Umat Beragama

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peran Ruang VIP Rumah Sakit Islam (RSI) UNISMA Malang dalam Pemberdayaan Umat Beragama: Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Ahmad Syafi'i Mufid

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

ISSN 1412-663X

Aji Sofanudin

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang
Studi Tahapan Penyelesaian Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Profil Gerakan Dakwah di Kota Palu
Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Amir Mu'allim

Dosen dan Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Ajaran-Ajaran Purifikasi Islam menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) yang Berpotensi Menimbulkan Konflik
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Arifuddin Ismail

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang
Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Menelusuri Merebaknya Radikalisme Islam di Kampus
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Asep Ahmad Hidayat

Peneliti
Model Penanganan Konflik Keagamaan Antara Jama'ah Qur'ani dan Jama'ah Sunnah: Studi Kasus Konflik Aliran Keagamaan di Desa Cibunar Tarogong Kidul Kabupaten Garut
Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Asep Saefullah

Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Resensi ~ Membangun Peradaban Du'ania yang Damai: Pentingnya Pembaruan dan "Kearifan" Barat.
Tinjauan Buku "Masa Depan Islam", karya John. L Esposito
Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 di Jakarta Utara

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Alexander an-Atheis" di Provinsi Sumatera Barat

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

B

Bashori A Hakim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

F

Fadlil Sumadi

Hakim Mahkamah Konstitusi

Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konsitusi

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Fauziah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Perilaku Komunitas Muslim dalam Mengkonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Fitri Anisa

Peneliti IAI Latifa Mubarakkiyyah PP. Suryalaya Tasikmalaya

Harmonisasi dalam Keragaman: Konstruksi Perdamaian dalam Relasi Islam-Katolik-Sunda Wiwitan di Kali Minggir dan Nagaherang Tasikmalaya

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

I

Ibnu Hasan Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Studi Kasus Rencana Pembangunan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Kota Palu Sulawesi Tengah

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

K

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Fenomena Khutbah Jum'at di Kota Manado

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

L

Lailial Muhtifah

Dosen STAIN Pontianak Kalimantan Barat

Model Penanganan Konflik Bernuansa SARA di Kota Pontianak Kalimantan Barat

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Lukmanul Hakim

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP) Jakarta

Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

M

M. Alie Humaedi

Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah

Identifikasi Potensi Konflik dalam Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat Beragama di Kalimantan Tengah

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

M. Yusuf Asry

Peneliti Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Strategi Budaya Taqiyah: Dilema Penyembunyian Identitas dalam Perkembangan Syi'ah

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

M. Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Review Buku: Sejarah Tuhan, Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Muchtar

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal: Studi Kasus di Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Muhammad

Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah

Identifikasi Potensi Konflik dalam Mewujudkan Harmonis Kehidupan Umat Beragama di Kalimantan Tengah

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Mustaqim Pabbajah

Dosen dan Peneliti

Pemberdayaan Sosial-Ekonomi sebagai Strategi Penanganan Gerakan Keagamaan di Indonesia: *Studi Kasus Jama'ah An-Nadzir di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

N

Noor Rachmat

Dosen dan Peneliti Universitas Negeri Jakarta

Socio-Teologis: Memahami Dualitas Perspektif Pluralisme Agama Indonesia

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Nuhrison M Nuh

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

S

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Suhanah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal

Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang

Volume 11, Nomor 2, April - Juni 2012

Sulaiman

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang

Dinamika Agama Adam: Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Sosial

Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012

Suprpto

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama

Survei Keberagamaan Pelajar SLTA: Paham Ke-Islam-an Pelajar SMA dan MA dalam Kehidupan Sosial

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

T

Taufik Hidayatullah

Penyuluh Agama Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor

Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

W

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI

Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Pusat di Kota Surakarta Jawa Tengah

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Z

Zaenal Abidin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama

Membangun Harmoni melalui Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Padang

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

Redaksi Jurnal Harmoni mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas Jurnal Harmoni. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif. Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
2. Endang Turmudi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
5. Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)
6. Rikza Chamami (IAIN Semarang)

